



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2011

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjabarkan visi, misi dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2010-2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Muchtar Bukittinggi;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. HB. Sa'anin Padang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber

daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah provinsi.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 -2025, selanjutnya disebut RPJPD Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Tahun 2010-2015 merupakan :

- a. Penjabaran Visi, Misi, dan Program Gubernur ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD Sumatera Barat;
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2010-2015 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota), swasta dan masyarakat .

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2010-2015 sebagai pedoman

dalam:

- a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah Sumatera Barat;
- b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan RKPD; dan
- c. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2010-2015 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Gubernur disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- (2) RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Gubernur pada akhir masa jabatan

BAB IV

DOKUMEN RPJMD TAHUN 2010-2015

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
 - d. BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

- h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
 - i. BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - j. BAB X : Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Tahun 2010 – 2015, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RPJMD Tahun 2010-2015 wajib dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 8

RPJMD Tahun 2010-2015 dapat disesuaikan kembali dengan RTRWP, apabila Peraturan Daerah tentang RTRWP yang menjadi acuan penyusunan RPJMD telah ditetapkan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015 dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 6 Juni 2011

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



DRS. H. ALI ASMAR, MPd
Pembina Utama Madya
NIP. 19580705 197903 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 16

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2011

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015

I. Penjelasan Umum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk dapat memayungi dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi, serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten/Kota, agar kegiatan pembangunan daerah Tahun 2010-2015 dapat bersinergi dan berkelanjutan, dan dapat menjawab kebutuhan daerah serta dapat meminimalkan permasalahan yang ada, terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah yaitu :

- 1) Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat,
- 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan,
- 3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan,
- 4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat,
- 5) Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan,
- 6) Pengembangan

Industri Olahan, UMKMK, Perdagangan dan Iklim Investasi, 7) Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, 8) Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal, 9) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat, 10) Penanggulangan Bencana Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 berisi arah kebijakan umum, program prioritas pembangunan daerah yang disertai kerangka kebutuhan pendanaan dan penetapan indikator daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terpadu yang akan dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan periode 5 tahun dan perencanaan tahunan daerah bagi seluruh pelaksana pembangunan.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015 dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) terhadap indikator kinerja pembangunan dan indikator kinerja program pada setiap tahunnya dan lima tahunan atau akhir periode RPJMD.

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 56

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	1
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN	6
BAB II	
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	9
2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	9
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	9
2.1.2 Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah..	19
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	22
2.1.4 Demografi	27
2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.....	30
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	30
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	42
2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM.....	44
2.3.1 Fokus Layanan Dasar Urusan Wajib.....	44
2.3.2 Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan.....	73
2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	93
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah.....	94
2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	98
2.4.3 Investasi Daerah.....	122
BAB III	
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	127
3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU	127
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	127
3.1.2. Neraca Daerah.....	129

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU	132
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	132
3.2.2. Analisis Pembiayaan	136
3.3. KERANGKA PENDANAAN	138
3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.....	138
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	139
 BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	143
4.1. PERMASALAHAN POKOK PEMBANGUNAN DAERAH	143
4.2. ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	148
 BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	153
5.1. VISI	153
5.2. MISI	155
5.3. TUJUAN DAN SASARAN	158
5.3.1. Tujuan Pembangunan.....	158
5.3.2. Sasaran Pembangunan	159
 BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	163
6.1. MISI 1 MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH ABS-SBK	163
6.1.1. Strategi untuk Misi 1	163
6.1.2. Arah Kebijakan untuk Misi 1	164
6.2. MISI 2 MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESIONAL	165
6.2.1. Strategi untuk Misi 2	165
6.2.2. Arah Kebijakan untuk Misi 2	166

6.3. MISI 3 MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN DAN BERKUALITAS TINGGI	168
6.3.1. Strategi untuk Misi 3	168
6.3.2. Arah kebijakan untuk Misi 3	168
6.4. MISI 4 MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TANGGUH, PRODUKTIF, BERBASIS KERAKYATAN, BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL	170
6.4.1. Strategi untuk Misi 4	171
6.4.2. Arah Kebijakan untuk Misi 4	172
6.5. MISI 5 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	176
6.5.1. Strategi untuk Misi 5	177
6.5.2. Arah Kebijakan untuk Misi 5	177

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	179
7.1. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	179
7.1.1 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 1	179
7.1.2 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 2	184
7.1.3 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 3	191
7.1.4 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 4	201
7.1.5 Kebijakan Umum dan Program Untuk Misi 5	228
7.2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN	232
7.3. ARAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	254

7.4. AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	256
7.4.1. Agenda Pembangunan Daerah	256
7.4.2 Prioritas Pembangunan Daerah	258
7.4.3 Program Per Prioritas Pembangunan	262
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN	269
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	305
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN	309
10.1 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016	309
10.2 Kaidah Pelaksanaan	309
10.3 Pengendalian dan Evaluasi	311

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perkembangan Nilai Indeks Koefisien Lokasi Menurut Sektor Dan Sub Sektor di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2009	21
Tabel 2.2 Kerentanan Umum di Provinsi Sumatera Barat	25
Tabel 2.3 Kerentanan Khusus di Provinsi Sumatera Barat	25
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Hasil Sensus Penduduk 2010	28
Tabel 2.5 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2006 – 2010	28
Tabel 2.6 Nilai dan Kontribusi Sektor Ekonomi dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat Periode 2005-2010 atas Dasar Harga Konstan	30
Tabel 2.7 Nilai dan Kontribusi Sektor Ekonomi dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat Periode 2005-2010 Atas Dasar Harga Berlaku	31
Tabel 2.8 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2005-2010 Atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan di Provinsi Sumatera Barat	33
Tabel 2.9 Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB pada Harga Belaku dan Harga Konstan Tahun 2005-2010 di Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 2.10 Perkembangan PDRB Tahun 2005-2010 Menurut Kabupaten/Kota Berdasarkan pada Harga Berlaku dan Konstan	36
Tabel 2.11 Perkembangan PDRB Per Kapita Tahun 2005-2010 Menurut Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Barat	37
Tabel 2.12 Nilai Inflasi PDRB Rata-rata Tahun 2005-2009 Provinsi Sumatera Barat	41
Tabel 2.13 Perkembangan Kinerja Makro Bidang Pendidikan Tahun 2006– 2010	46
Tabel 2.14 Perkembangan Kinerja Makro Bidang Kesehatan Tahun 2006– 2010	48

Tabel 2.15	Indeks Pembangunan Gender Tahun 2007	50
Tabel 2.16	Perbandingan Output UMKMK Terhadap PDB/PDRB Indonesia dan Sumatera Barat Tahun 2004-2008	56
Tabel 2.17	Perkembangan Koperasi di Sumatera Barat Tahun 2006 -2009	56
Tabel 2.18	Perkembangan UKM di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2009	57
Tabel 2.19	Data Perencanaan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah	68
Tabel 2.20	Perkembangan Jumlah Judul Penelitian di Sumatera Barat Tahun 2006-2010	68
Tabel 2.21	Persandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran & Kemiskinan Antara Nasional dengan Sumatera Barat	71
Tabel 2.22	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan Nasional dan Sumbar Tahun 2010-2015...	72
Tabel 2.23	Peranan Pertanian dalam Pembangunan di Sumatera Barat 2006-2010	73
Tabel 2.24	Produksi Beberapa Komoditi Utama Pertanian di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010	73
Tabel 2.25	Produktivitas Beberapa Komoditi Tanaman Pangan Tahun 2006-2010	74
Tabel 2.26	Perkembangan Luas dan Produksi Komoditi Utama Perkebunan Tahun 2008-2010	75
Tabel 2.27	Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2006-2010	79
Tabel 2.28	Perkembangan Armada Perikanan di Sumatera Barat Tahun 2006-2010	80
Tabel 2.29	Perkembangan Nilai Produksi dan Ekspor Hasil Perikanan Tahun 2006-2010	80
Tabel 2.30	Jumlah Tenaga Kerja Masyarakat Perikanan Tahun 2006-2009	81
Tabel 2.31	Komposisi Ketersediaan Energi dan Protein di Sumatera Barat Tahun 2005-2009	83
Tabel 2.32	Kondisi Jumlah Output dan Ekspor Industri Pengolahan Sumatera Barat Tahun 2008	86

Tabel 2.33	Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan Tahun 2006-2009	88
Tabel 2.34	Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Kelompok Komoditi 2006-2009	89
Tabel 2.35	Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang 2006-2009	90
Tabel 2.36	Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2009	91
Tabel 2.37	Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2009	92
Tabel 2.38	Peringkat Daya Saing Daerah Sumatera Barat di Indonesia	94
Tabel 2.39	Perkembangan Konsumsi Rumahtangga Per Kapita Tahun 2005-2010 Provinsi Sumatera Barat	95
Tabel 2.40	Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2005-2010 Provinsi Sumatera Barat	96
Tabel 2.41	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	97
Tabel 2.42	Peningkatan Perbaikan dan Pemeliharaan Irigasi Tahun 2006-2010	102
Tabel 2.43	Pembangunan Pengendalian Banjir, Pengamanan Abrasi Pantai dan Pengamanan Daya Rusak Air Tahun 2006-2010	103
Tabel 2.44	Lokasi Terminal di Provinsi Sumatera Barat	106
Tabel 2.45	Angkutan Khusus Batu bara dan Semen Melalui Pelabuhan Teluk Bayur Tahun 2005-2009	109
Tabel 2.46	Pemakaian Batubara di Sumatera Barat Tahun 2005-2009	112
Tabel 2.47	Produksi Pembangkit Listrik Tahun 2005 – 2009.....	113
Tabel 2.48	Pemakaian Energi Listrik Tahun 2005 – 2009.....	113
Tabel 2.49	Indikator Kinerja Makro Bidang Energi Listrik Tahun 2005-2009	114
Tabel 2.50	Jumlah Unit dan Kapasitas Terpasang PLTMH	115
Tabel 2.51	Potensi Energi Biomassa	115

Tabel 2.52	Jenis Pembangkit Listrik Yang Belum Tergarap Di Sumatera Barat	116
Tabel 2.53	Tingkat Kekritisan Lahan Tiap Wilayah Administrasi Pemerintah	120
Tabel 2.54	Investasi (Pembantuan Modal Tetap Bruto) Tahun 2006-2010	122
Tabel 2.55	Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Investasi PMA/PMDN di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2009	124
Tabel 2.59	Pertumbuhan PMA dan PMDN di Indonesia dan Sumatera Barat Tahun 2004-2008	125
Tabel 3.1	Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010.....	129
Tabel 3.2	Jumlah dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2006 – 2010	131
Tabel 3.3	Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2006 – 2010	132
Tabel 3.4	Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2007 – 2010.....	134
Tabel 3.5	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2010.....	135
Tabel 3.6	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2007 - 2010.....	136
Tabel 3.7	Surplus (Defisit) Riil Anggaran Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2007 – 2010.....	137
Tabel 3.8	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Sumatera Barat, tahun 2007 – 2010	139
Tabel 3.9	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tahun 2011 – 2015	142
Tabel 3.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, tahun 2011 – 2015.....	142
Tabel 5.1	Hubungan Hirarkhis Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	161

Tabel 6.1	Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 1	164
Tabel 6.2	Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 2	166
Tabel 6.3	Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3	169
Tabel 6.4	Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 4	174
Tabel 6.5	Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 5	177
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 1	181
Tabel 7.2	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 2	185
Tabel 7.3	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 3	193
Tabel 7.4	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 4	205
Tabel 7.5	Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 5	229
Tabel 7.6	Jumlah Nagari Tertinggal per Kabupaten.....	233
Tabel 7.7	Kriteria Fungsi Kota	235
Tabel 7.8	Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009	238
Tabel 7.9	Kondisi Jaringan Jalan dan Aksesibilitas Geografis PKN dan PKW Sumatera Barat selama RPJM I 2005-2010	236
Tabel 7.10	Rencana Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat Hingga Tahun 2028 per Kabupaten/Kota	237
Tabel 7.11	Rencana Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat Dirinci Menurut Kabupaten/Kota	239
Tabel 7.12	Arahan Kawasan Pusat Pengembangan Pertanian (Agropolitan)	245

Tabel 7.13	Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing dan Domba	244
Tabel 7.14	Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga Peternakan	2457
Tabel 7.15	Arahan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Horitukultura	2468
Tabel 7.16	Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	247
Tabel 7.17	Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perkebunan	248
Tabel 7.18	Arahan Pengembangan Kawasan Sentra Komoditi Unggulan Perkebunan	248
Tabel 7.19	Arahan Pengembangan Sentra Industri di Provinsi Sumatera Barat	250
Tabel 7.20	Sepuluh (20) Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat	250
Tabel 7.21	Wilayah Pengembangan Pariwisata	251
Tabel 7.22	Sepuluh (10) Destinasi Unggulan Pariwisata.....	252
Tabel 7.23	Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan Yang Berbatasan dengan Provinsi Tetangga.....	253
Tabel 7.24	Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas Pembangunan	258
Tabel 7.25	Sinkronisasi Prioritas Nasional Dengan Prioritas Sumatera Barat	262
Tabel 7.26	Hubungan Misi, Agenda, Prioritas dan Program.....	262
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Barat.....	271
Tabel 9.1	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	305

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Penduduk Sumatera Barat Hasil Sensus Penduduk 1971-2010	27
Gambar 2.2 Ketimpangan Wilayah Menurut Indeks Williamson di Sumatera Barat	39
Gambar 2.3 Grafik Indeks Aksesibilitas Potensial Kota-Kota Utama di Sumatera Barat, Tahun 2009.....	40
Gambar 2.4 Indeks Pembangunan Gender Indonesia Tahun 2005-2008.....	50
Gambar 2.5 Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia Tahun 2005-2008	51
Gambar 2.6 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2002-2010.....	71
Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Tahun 2002-2010.....	72
Gambar 2.8 Perbandingan Kondisi Mantap Jalan Nasional dengan Propinsi di Sumatera Barat 2004-2006	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, memperhatikan rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Barat disamping itu juga memuat arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam periode masa bakti Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda, prioritas pembangunan dan program Kepala Daerah yang merupakan pelaksanaan pembangunan daerah lima tahunan kedua dari RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan paling lambat 3 (tiga) atau 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, Pemerintah Daerah sudah harus menetapkan RPJMD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, disusun dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, sekaligus dalam kerangka penyusunan dan penguatan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat dan segenap pemangku kepentingan pelaku pembangunan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Hukum penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Muchtar Bukittinggi;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. HB. Sa'anin Padang.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dimana RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat.
RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 merupakan RPJMD kedua dari tahapan pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. RPJMD memuat Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014.
2. RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Barat.
Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
3. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran teknis operasional dari RPJMD ke dalam

arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan, bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan, Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Memuat Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah dan Isu-Isu Strategis Daerah

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Arah RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2010-2015.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta program pembangunan yang dikelompokkan ke dalam agenda dan prioritas pembangunan daerah.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD serta pencapaian target indikator kinerja per urusan disertai kebutuhan pendanaan.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat indikator kinerja makro pemerintah daerah dalam pencapaian outcome tahunan selama periode 2011-2015.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN Kaidah PELAKSANAAN

Memuat ketentuan peralihan untuk penyusunan RKPD transisi tahun 2016, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dari rencana yang telah disusun.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha dan Masyarakat) dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi, supaya terwujud proses pembangunan yang bersinergi. Disamping itu RPJMD dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu dilingkup Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, lintas sektor, wilayah, dan lintas Kabupaten/Kota. Selain itu juga dijadikan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan pada periode lima tahun kedepan.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 antara lain bertujuan untuk menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergis sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah Sumatera Barat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak dan Luas Wilayah Administrasi

Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0° 54' Lintang Utara (LU), sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan (LS), dan antara 98° 36' sampai 101° 53' Bujur Timur (BT), mempunyai luas daerah daratan ± 42.297,30 km² dan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km² dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai kepulauan mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 km. Perairan laut ini memiliki 185 pulau-pulau besar dan kecil. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Dengan letak tersebut menjadikan provinsi ini sebagai gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana baik transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau (BIM), maupun pelabuhan laut Internasional Teluk Bayur. Provinsi ini juga termasuk dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

2. Kondisi Geografis

A. Topografi

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m dpl hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian >3000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

Dataran rendah (< 500 m dpl) tercatat hanya 45%, dataran menengah (500 – 1.000 m) 32% dan 23% daerah Sumatera Barat berada pada dataran tinggi. Dengan kondisi tersebut sumberdaya alam yang potensial pada suatu daerah, diharapkan dapat dimanfaatkan dan dikelola secara seksama. Pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya alam perlu dicermati agar tidak terjadi kerusakan yang permanen di suatu kawasan yang berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang.

Dataran tinggi berupa jejeran bukit dan gunung adalah rantai dari pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha. Wilayah yang lebih datar dijumpai di bahagian Timur Sumatera Barat.

B. Geologi

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan (antiklinorium) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut – tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan micro plate. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok elatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki kerawanan bencana gempa bumi yang tinggi.

Secara umum kondisi stratigrafi dari struktur geologi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

- **Kelompok Pra Tersier** : kelompok ini mencakup masa Paleozoikum – Mesozoikum, dipisahkan menjadi kelompok batuan ultrabasa; kelompok batuan mélange, kelompok batuan malihan; kelompok batuan gunungapi dan kelompok batuan terobosan.
- **Kelompok Tersier** dipisahkan menjadi kelompok batuan ultrabasa; kelompok batuan mélange; kelompok batuan sedimen; kelompok batuan gunungapi dan kelompok batuan terobosan.
- **Kelompok Transisi Tersier – Kwartar** (Pilo-Plistosen) dapat dipisahkan menjadi kelompok batuan sedimen; kelompok batuan gunungapi dan kelompok batuan terobosan.
- **Kelompok Kwartar** dipisahkan menjadi kelompok batuan sedimen; batuan gunungapi dan aluhium

C. Hidrologi

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 buah yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di provinsi berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km², sedangkan Danau Diatas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

D. Klimatologi

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah dibagian barat ini berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan hortikultura.

Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim tropika basah. Adapun klasifikasi iklim berdasarkan sistem Schmidt-Fergusson daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 18^o – 34^o C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,5^oC. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5^o – 7^o C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan

Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 4° – 6° C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra hortikultura dan dapat dikembangkan sebagai daerah agrowisata potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79% – 87% dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.

E. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan manifestasi dari kegiatan sosial-budaya dan sosial-ekonomi dalam upaya pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada. Penggunaan lahan di Provinsi Sumatera Barat secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menjadi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, dan kawasan perlindungan setempat, sedang kawasan budidaya diantaranya berupa kawasan permukiman, kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan perikanan dan kelautan, dan kawasan hutan.

▪ Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan menjadi kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Sebaran permukiman perkotaan relatif terkonsentrasi di wilayah bagian tengah, terutama jalur antara Kota Padang dan Bukittinggi, sedang permukiman perdesaan menyebar di seluruh wilayah provinsi.

Sebaran kawasan permukiman perkotaan mencakup beberapa wilayah, yaitu seperti Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam. Dari sebaran kawasan permukiman perkotaan tersebut paling luas adalah Kota Padang dan yang terkecil Kota Sawahlunto. Perkembangan kawasan permukiman Kota Padang berjalan cukup pesat baik dari segi jumlah penduduk maupun luas kawasan, bahkan cenderung membentuk kawasan perkotaan cukup luas yang mencakup beberapa bagian wilayah kabupaten di sekitarnya, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Perkembangan ini ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai, dan prasarana

permukiman lainnya.

▪ **Kawasan Pertanian Tanaman Pangan**

Kawasan Tanaman Pangan yang meliputi Kabupaten-kabupaten Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Solok dan Pasaman. Daerah ini merupakan daerah subur yang sejak lama berfungsi sebagai “lumbung pangan” Sumatera Barat dengan produksi utama adalah padi, palawija dan tanaman pangan lainnya. Untuk meningkatkan produktivitas lahan, daerah ini sudah sejak lama dilengkapi dengan fasilitas irigasi yang cukup memadai. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, kedepan daerah ini akan terus dikembangkan sebagai penghasil utama komoditi pangan untuk daerah Sumatera Barat maupun provinsi tetangga, terutama Riau.

Budidaya pertanian tanaman pangan di Provinsi Sumatera Barat meliputi pertanian tanaman pangan lahan basah, dan pertanian tanaman pangan lahan kering. Sampai tahun 2010 luas pertanian lahan basah yang meliputi sawah dengan irigasi, tadah hujan, pasang surut, dan polder lainnya mencapai 237.327 Ha. Dari luas sawah yang diusahakan, sebagian besar diusahakan untuk tanaman padi yang mencapai 230.756 Ha (97,23%) dan sisanya bukan tanaman padi. Selanjutnya dari luas tanaman padi sekitar 73,84% dapat dilakukan penanaman dua kali setahun, dan sisanya sekali dalam setahun.

Untuk pertanian tanaman pangan lahan kering sampai tahun 2007 luasnya sekitar 692.604 Ha yang diusahakan dalam bentuk lahan pekarangan, tegalan/kebun, dan ladang dengan total luas 510.945 Ha (73,77%) dan sisanya sementara tidak diusahakan seluas 181.659 Ha.

▪ **Kawasan Perkebunan**

Kawasan Perkebunan yang meliputi kabupaten-kabupaten Sijunjung, Dharmas Raya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Produk utama daerah ini adalah karet, kelapa sawit dan teh yang merupakan komoditi ekspor utama Sumatera Barat. Untuk meningkatkan nilai tambah telah dibangun pula industri karet remah (Crumb-rubber) terutama di Kota Padang dan pabrik minyak sawit (Crude Palm Oil, CPO) terutama di daerah Pasaman Barat dan Dharmas Raya. Kedepan kawasan ini akan terus dikembangkan sebagai daerah perkebunan besar dalam rangka mendukung peningkatan ekspor daerah Sumatera Barat.

Lahan di Provinsi Sumatera Barat sangat sesuai untuk pengembangan budidaya perkebunan, untuk tanaman karet, kelapa sawit, kopi, dan kakao sebagai komoditas utama, dan komoditi lain yang meliputi gambir, kasiavera, pala, cengkeh, tembakau, tebu, pinang, nilam, kelapa, kemiri dan sebagainya termasuk dalam komoditi unggulan lokal.

Pemasaran komoditi utama telah menembus pasar internasional, terutama Singapura, Jepang, Amerika, dan beberapa negara Eropa.

Pengelolaan dan pengembangan perkebunan dilakukan oleh berbagai pihak baik pemerintah, BUMN, swasta maupun masyarakat yang menyebar di seluruh wilayah kabupaten/kota. Budidaya perkebunan di provinsi ini sebagian besar dikelola oleh perkebunan rakyat, dan sisanya dikelola oleh pemerintah dan swasta.

Sampai tahun 2010, tanaman kelapa sawit menunjukkan luas terbesar yaitu mencapai sekitar 353.300 Ha dan menunjukkan pertambahan dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena perluasan dan pembangunan kawasan perkebunan yang dilakukan oleh BUMN maupun perusahaan swasta cukup besar dalam sepuluh tahun terakhir. Dari segi produktivitas, kelapa sawit mempunyai produksi paling tinggi dibandingkan dengan komoditas perkebunan utama lainnya. Luas lahan Tanaman Karet tahun 2010 mencapai 175.985 Ha dan pada umumnya merupakan perkebunan rakyat. Luas tanaman Kakao tahun 2010 mencapai 101.014 ha, tanaman ini merupakan perkebunan rakyat yang ditanam pada lahan pekarangan dan tegalan.

▪ **Kawasan Peternakan**

Pembangunan peternakan di Provinsi Sumatera Barat merupakan usaha untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam upaya menyediakan protein hewani baik untuk konsumsi sendiri, pemasokan ke wilayah provinsi lain maupun ekspor. Usaha pengembangan peternakan di provinsi ini ditunjang dengan ketersediaan pakan ternak dan prasarana penunjang peternakan. Pakan ternak untuk ternak besar dan kecil tersedia cukup banyak, yang terdiri dari rumput alam maupun rumput unggul, sisa pertanian (daun jagung dan jerami), dan limbah industri. Prasarana penunjang yang lain meliputi Rumah Potong Hewan sebanyak 7 unit, pasar ternak 29 unit, TPH 32 unit, poskeswan 41 unit, pos Inseminasi Buatan (IB) 110 unit, dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) 1 unit.

▪ **Kawasan Industri**

Kawasan industri membutuhkan hamparan areal cukup luas, dan berpengaruh terhadap perubahan lingkungan, baik bentang alam, maupun kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya. Kawasan industri diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan.

Adapun rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman seluas \pm 70 Ha dan Kota Padang seluas \pm 220 Ha berupa kawasan Padang Industrial Park (PIP).

Disamping itu ditetapkan juga untuk pengembangan industri di kawasan pesisir yang mengolah hasil budidaya laut komersial, seperti industri perikanan tangkap.

Kegiatan industri yang telah berkembang di Provinsi Sumatera Barat dikelompokkan menjadi industri besar, menengah dan kecil. Bahan baku industri memanfaatkan bahan baku lokal. Industri besar yang berkembang seperti Semen Padang, industri menengah meliputi industri pengolahan, sedangkan industri kecil meliputi industri pengolahan hasil tanaman pangan, industri sandang kulit; industri kimia bangunan; industri logam elektronika dan industri kerajinan seperti industri bordir, konveksi, tenun, batik tanah liat, mebel kayu, rotan, dan kerajinan tanah liat.

Sampai tahun 2009 jumlah industri kecil baik formal maupun non formal memiliki 34.757 unit usaha, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 128.563 orang, dengan total investasi sebesar Rp.795.202.263.000.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan 10 (sepuluh) industri unggulan yaitu : Industri Pengolahan Kakao, Industri Gambir, Industri Minyak Atsiri, Industri Pengolahan Makanan Ringan, Industri Kulit dan Alas Kaki, Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Industri Pengolahan Hasil Laut, Industri Maritim (Perkapalan), Industri Alsintan, Industri Semen.

▪ **Kawasan Pertambangan**

Kawasan Pertambangan, yang meliputi Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung dengan produksi utama adalah batubara. Walaupun sejak beberapa tahun terakhir ini terjadi penurunan jumlah produksi karena berkurangnya produksi tambang luar, namun demikian potensi tambang dalam sebenarnya masih sangat besar. Disamping itu kualitas batubara produksi daerah ini terkenal cukup baik dan mempunyai harga yang relatif cukup tinggi. Dalam rangka peningkatan produksi batubara daerah ini, pemerintah daerah telah mengundang beberapa investor asing baik dari Australia, Polandia dan China untuk mengelola tambang dalam yang memerlukan teknologi pertambangan yang lebih tinggi.

Pengelolaan usaha pertambangan yang ditetapkan dalam wilayah pertambangan (WP), terdiri dari wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan wilayah pencadangan negara

(WPN), sedangkan untuk potensi usaha pertambangan dapat dikelompokkan menjadi pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Selanjutnya pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan.

Bahan pertambangan batubara potensinya cukup besar dan telah diusahakan untuk memasok kebutuhan bahan bakar di beberapa industri dan pembangkit listrik tenaga uap, baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat. Penyebaran lokasi pertambangan batubara diantaranya di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan.

Sebaran bahan pertambangan mineral logam seperti emas berada di wilayah Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Bahan mineral bijih besi diantaranya di Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Pasaman Barat. Bahan pertambangan mineral logam lainnya berupa mangan ditemukan di Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar. Sedang timah hitam ditemukan di Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman.

Pertambangan mineral bukan logam, seperti pertambangan pasir besi menyebar di kawasan pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman. Tembaga dapat ditemukan di wilayah Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Solok. Untuk bahan tambang yang berupa belerang ditemukan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, sementara air raksa potensinya ditemukan di Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung.

Selanjutnya bahan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan untuk industri yang berupa batu kapur menyebar di wilayah Kabupaten Agam, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat. Dolomit ditemukan di Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Solok. Bahan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan lain yang ditemukan di provinsi ini adalah marmer (Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Pasaman Barat); granit

(Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Dharmasraya); andesit dan basalt (Kabupaten Limapuluh Kota dan Kabupaten Pesisir Selatan), batu apung (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok), Batu tulis (Kabupaten Solok, dan Kota Sawahlunto); feldspar (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok); obsidian (Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar); perlit (Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Padang Pariaman); Trass (Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Payakumbuh); kaolin (Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, dan Kota Sawahlunto); pasir kuarsa (Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Sijunjung); fosfat (Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, dan Kota Padang); dan tawas (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan).

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagian besar lokasi usaha pertambangan tersebut berada di dalam kawasan hutan lindung yang perlu dijaga kelestariannya, sementara metode penambangan umumnya dilakukan secara terbuka yang dapat mengancam keberadaan hutan lindung di atasnya. Kondisi fisik provinsi ini sangat membutuhkan kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor).

▪ **Kawasan Perikanan dan Kelautan**

Kawasan Perikanan dan Kelautan yang meliputi Kabupaten Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai daerah pantai, potensi pembangunan yang dimiliki kawasan ini tentunya adalah dalam bidang perikanan dan kelautan. Dewasa ini daerah-daerah perikanan yang cukup potensial untuk dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah adalah Painan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Bungus di Kota Padang, Kota Pariaman dan Kecamatan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat. Kawasan Bungus sudah sejak beberapa tahun yang lalu ditetapkan sebagai pusat perikanan laut untuk kawasan Pantai Barat Pulau Sumatera ini. Hal ini dilakukan mengingat hasil penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa lautan Samudra Indonesia yang terletak di kawasan pantai Barat Sumatera Barat ini ternyata mempunyai potensi ikan tuna yang besar dengan kualitas yang sangat baik.

Produksi ikan dari perikanan laut di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sebanyak 197.345 ton, dengan jumlah nelayan penuh sebanyak 16.073 orang nelayan dan 30.061 orang nelayan sambilan. Potensi

pembudidayaan perikanan darat (perairan umum dan budidaya) di Provinsi Sumatera Barat cukup besar.

Pengembangan sub sektor perikanan masih ada peluang untuk memanfaatkan potensi yang ada seperti :

1. Masih tersedianya lahan budidaya di darat seperti danau, sungai, kolam, sawah dan perairan umum lainnya untuk budidaya ikan air tawar,
2. Adanya potensi ikan tuna dan cakalang di perairan ZEE yang belum sepenuhnya dieksploitasi.
3. Adanya potensi pengembangan perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di kawasan barat Provinsi Sumatera Barat, yang belum tersentuh oleh nelayan setempat.

Selanjutnya sumberdaya kelautan yang ada meliputi terumbu karang, hutan mangrove, moluska, teripang, dan penyu laut. Ekosistem terumbu karang di Provinsi Sumatera Barat luasnya 25.984 Ha dan menyebar di perairan pesisir kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai persentase tutupan karang rendah, sehingga dapat dikategorikan rusak dan rusak berat. Tutupan terumbu karang dengan kondisi baik hanya ditemukan pada 4 lokasi sebaran, yaitu Pulau Pieh di Kabupaten Padang Pariaman, Pulau Simangke Kecil, Pulau Cingkuak dan Pulau Penyu di Kabupaten Pesisir Selatan.

Potensi mangrove di Provinsi Sumatera Barat sebesar 39.832 Ha yang terdapat di sepanjang pesisir Kabupaten Pasaman Barat (6.273,5 hektar) sampai Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 32.600 hektar. Di Kota Padang, luas hutan mangrove tidak lebih dari 10 hektar, yang terdapat di kawasan Sungai Pisang. Budidaya rumput laut di Provinsi Sumatera Barat diusahakan masih dalam taraf skala rumah tangga, sehingga besaran tingkat pemanfaatan rumput laut masih sulit terdata. Jenis rumput laut yang diambil adalah jenis *Grasillaria sp* dan *Gellidum sp*.

Penyebaran kerang-kerangan meliputi seluruh perairan pantai yang berlumpur, terutama pada kawasan hutan bakau (mangrove), sepanjang pantai di Provinsi Sumatera Barat. Penyebaran cumi-cumi meliputi seluruh perairan di Provinsi Sumatera Barat.

▪ **Kawasan Hutan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 422/KPTS-II/1999, kawasan hutan Sumatera Barat ditetapkan seluas 2,6 juta Ha,

yang terdiri atas Hutan suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam (0,85 juta Ha), hutan lindung (0,91 juta Ha), hutan produksi terbatas (0,25 juta Ha), hutan produksi tetap (0,40 juta Ha), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (0,19 juta Ha). Luasan kawasan hutan tersebut diatas meliputi seluas 61% wilayah provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data tersebut, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang paling luas.

Permasalahan yang dihadapi sektor kehutanan selain menurunnya produktivitas hasil hutan karena semakin berkurangnya potensi hutan produksi, juga masalah perluasan kawasan budidaya ke dalam kawasan hutan, kondisi ini telah banyak menimbulkan bencana alam terutama banjir dan tanah longsor, bahkan berpengaruh terhadap perubahan iklim mikro.

Penetapan Kawasan Perairan seluas 39.900 Ha berupa Taman Wisata Laut Pulau Pieh di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan penunjukan SK Menhut 070/Kpts-II/2000.

2.1.2 Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Analisis potensi pengembangan ekonomi wilayah diperlukan untuk dapat mengetahui secara kongkrit sektor dan subsektor yang mempunyai potensi pengembangan yang mempengaruhi perkembangan ekonomi wilayah. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi daerah bersangkutan. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah guna dapat menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah, dapat diwujudkan secara optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih maksimal.

Potensi pengembangan ekonomi suatu daerah dari sisi pembangunan sektoral ditentukan oleh Keuntungan Komperatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dibandingkan dengan kinerja sektor yang sama secara nasional. Tingkat Keuntungan Komperatif sektor dan subsektor suatu daerah dapat diukur dengan Indek Koefisien Lokasi (*Location Quotient*, LQ). Indikator ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan karena dalam era globalisasi seperti halnya dewasa ini, tingkat persaingan adalah sangat tajam. Dalam kondisi yang demikian, sektor dan subsektor yang dapat berkembang dengan pesat adalah sektor dan subsektor yang mempunyai daya saing yang didukung oleh keuntungan komperatif yang cukup tinggi. Sedangkan potensi pembangunan wilayah lebih banyak ditentukan oleh kandungan

sumberdaya alam yang dimiliki oleh wilayah bersangkutan sehingga menentukan arah pembangunan daerah terkait.

Berdasarkan Indeks Koefisien Lokasi maka potensi pengembangan ekonomi daerah menurut sektor dan subsektor di Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2005-2009 adalah seperti digambarkan pada Tabel 2.1. Disini terlihat bahwa nilai LQ dalam periode waktu 5 tahun sebelumnya sedikit mengalami fluktuasi, karena itu analisis didasarkan pada nilai rata-rata untuk periode 2005-2009 yang memperlihatkan kondisi umum daerah bersangkutan.

Hasil perhitungan pada Tabel 2.1 menunjukkan bahwa sektor pertanian ternyata masih merupakan salah satu potensi ekonomi wilayah yang cukup penting bagi pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini ditunjukkan oleh nilai LQ lebih besar dari satu yaitu 1,75 yang memperlihatkan bahwa sektor ini mempunyai Keuntungan Komperatif yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama secara rata-rata pada provinsi lainnya di Indonesia.

Di dalam sektor pertanian tersebut terlihat pula bahwa subsektor tanaman pangan ternyata merupakan potensi ekonomi utama Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini terlihat dari nilai LQ yang cukup tinggi yaitu rata-rata 1,78. Sedangkan subsektor perkebunan merupakan potensi ekonomi wilayah terbesar dengan nilai LQ rata-rata mencapai 2,75. Sedangkan subsektor Kehutanan mempunyai potensi pengembangan yang juga cukup tinggi dengan nilai LQ sebesar 1,71. Sedangkan subsektor perikanan dan peternakan mempunyai potensi pengembangan yang cukup besar yang terlihat dari nilai LQ yang lebih besar dari satu.

Potensi pengembangan sektor jasa cukup besar dalam perekonomian daerah Sumatera Barat dan cenderung meningkat. Sektor jasa yang dimaksudkan disini adalah dalam pengertian luas yang meliputi sektor: perdagangan, perhubungan dan komunikasi, dan jasa-jasa lainnya, termasuk juga jasa pendidikan dan kesehatan. Seperti terlihat pada Tabel 2.1 potensi pembangunan yang dimiliki oleh sektor perdagangan cukup besar dengan nilai LQ 1,26. Potensi pengembangan subsektor perdagangan ini terutama terletak pada kegiatan perdagangan besar dan eceran.

Perdagangan luar negeri Sumatera Barat masih didominasi oleh komoditi pertanian yang sebahagian besar merupakan bahan mentah dan setengah jadi atau hasil olahannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa sektor industri olahan di Sumatera Barat masih belum berkembang. Ekspor produk industri utama berupa Karet Olahan, Semen, CPO, Minyak Inti Sawit dan

Kayu Lapis. Struktur ekspor demikian semakin memperkuat peranan sektor pertanian sebagai basis ekonomi Sumatera Barat di mana sekitar 47,4% tenaga kerja berada di sektor pertanian. Sektor penting berikutnya adalah perdagangan, hotel dan restoran yang menampung sekitar 18% jumlah angkatan kerja.

Tabel 2.1
Perkembangan Nilai Indek Koefisien Lokasi
Menurut Sektor dan Subsektor di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2009

No.	Sektor/Sub-sektor	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
1.	Pertanian	1.72	1.74	1.77	1.76	1.76	1.75
a.	Tanaman Pangan	1.76	1.78	1.80	1.77	1.78	1.78
b.	Perkebunan	2.57	2.69	2.80	2.85	2.83	2.75
c.	Perternakan	1.11	1.09	1.10	1.11	1.13	1.11
d.	Kehutanan	1.73	1.75	1.69	1.68	1.68	1.71
e.	Perikanan	1.24	1.21	1.21	1.23	1.22	1.22
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.35	0.35	0.36	0.37	0.37	0.36
a.	Pertambangan tanpa gas	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.20
b.	Penggalian	2.97	2.81	2.72	2.67	2.62	2.76
3.	Industri Pengolahan	0.52	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52
a.	Industri tanpa migas	0.52	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52
4.	Listrik dan Air Minum	1.76	1.80	1.74	1.62	1.51	1.68
a.	Listrik	2.31	2.36	2.34	2.25	2.23	2.30
b.	Air bersih	1.04	1.06	1.10	1.13	1.17	1.10
5.	Bangunan	0.83	0.82	0.80	0.79	0.77	0.80
6.	Perdagangan	1.08	1.08	1.06	1.06	1.08	1.07
a.	Perdagangan Besar dan Eceran	1.27	1.27	1.24	1.23	1.28	1.26
b.	Hotel	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23
c.	Restoran	0.21	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2.06	1.98	1.90	1.76	1.62	1.87
a.	Pengangkutan	2.71	2.71	2.81	2.89	2.89	2.80
b.	Komunikasi	1.06	1.02	0.94	0.00	0.73	0.75
8.	Kuangan, Persewaan , dan Jasa Perusahaan	0.76	0.55	0.55	0.38	0.54	0.56
a.	Bank	0.43	0.45	0.45	1.28	0.46	0.61
b.	Lembaga keuangan tanpa bank	1.63	1.65	1.61	2.27	1.54	1.74
c.	Jasa Perusahaan	0.09	0.09	0.09	1.14	0.08	0.30
9.	Jasa- jasa	1.79	1.76	1.75	1.75	1.74	1.76
a.	Pemerintahan	2.65	2.61	2.61	2.64	2.64	2.63
b.	Swasta	1.07	1.07	1.07	1.07	1.05	1.06

Sumber Data : BPS Sumatera Barat, diolah

Sektor jasa lainnya yang juga sangat potensial untuk dikembangkan adalah sektor perhubungan dan komunikasi dengan nilai LQ sebesar 1,87. Subsektor perhubungan, baik darat, laut dan udara, ternyata merupakan

potensi utama dengan nilai LQ mencapai 2,80. Disamping itu subsektor jasa-jasa juga mempunyai potensi yang cukup memadai dengan nilai LQ sebesar 1,76, dengan subsektor jasa pemerintah merupakan potensi pembangunan yang berperan cukup penting dengan nilai LQ mencapai 2,63.

Salah satu potensi Sumatera Barat adalah penyediaan tenaga listrik dan air minum karena didukung oleh sumberdaya alam. Sebagaimana diketahui bahwa daerah ini mempunyai beberapa sumberdaya yang sangat potensial digunakan untuk pembangkit tenaga listrik seperti tenaga air dan batubara. Dewasa ini telah berjalan dua Pusat Listrik Tenaga Air, yaitu PLTA Maninjau dan PLTA Singkarak dengan kapasitas yang cukup besar. Karena daerah ini juga mempunyai tambang batubara, telah dibangun pula PLTU Ombilin dan sedang dibangun pula sekarang PLTU Bungus yang keduanya juga mempunyai kapasitas cukup besar. Potensi pembangkit tenaga listrik yang cukup besar ini menyebabkan Indek Koefisien Lokasi sektor ini menjadi cukup tinggi yaitu 1,68. Dengan subsektor listrik merupakan potensi utama dengan nilai LQ mencapai 2,30.

Sektor industri pengolahan belum banyak berkembang di Sumatera Barat yang terlihat dari nilai LQ yang kurang dari satu. Hal yang sama juga terjadi dengan sektor pertambangan yang ternyata pertumbuhannya terus menurun karena semakin menipisnya deposit tambang luar, sedangkan eksploitasi tambang dalam memerlukan biaya produksi yang jauh lebih besar dan sebagian besar berada pada kawasan lindung. Sektor jasa keuangan belum berkembang secara optimal di Sumatera Barat yang terlihat dari nilai LQ kurang dari satu. Namun demikian, potensi pengembangan jasa keuangan non bank kelihatannya cukup tinggi dengan nilai LQ mencapai 1,74.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Dengan banyaknya jenis bahaya alam yang mengancam, Provinsi Sumatera Barat dapat disebut sebagai wilayah "Supermarket Bencana Alam". Selain potensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas alam, provinsi ini juga memiliki potensi bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial, epidemi wabah penyakit dan kegagalan teknologi. Pada paragraf berikut akan disajikan gambaran umum potensi bencana yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Potensi bencana ini diperoleh berdasarkan hasil identifikasi data melalui survey secara tidak langsung maupun secara langsung.

1. Ancaman Bahaya

Posisi Sumatera Barat yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euro Asia di Samudera Hindia sebelah barat Mentawai serta dilalui jalur patahan Semangka dari Solok Selatan sampai Pasaman sangat rentan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami.

Sejarah telah mencatat beberapa bencana yang ditimbulkan oleh gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 28 Juni 1926, telah terjadi gempa bumi di Padang Panjang dengan kekuatan 7 Skala Richter yang merenggut 354 korban meninggal dunia dan \pm 3.000 rumah rusak. Gempa ini sangat populer diantara para orang-orang tua masyarakat yang berada di wilayah yang terkena gempa dan menjadikan kejadian ini sebagai referensi penunjuk waktu untuk mencatat sesuatu kejadian. Pada tanggal 6 Maret 2007, siklus gempa yang sama terjadi lagi dengan kekuatan 6,3 Sekala Richter dan merenggut 66 korban meninggal dunia dan \pm 35.000 rumah rusak di 10 kabupaten/kota yang berdekatan dengan pusat gempa ini. Begitu juga gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 yang berdampak pada 10 Kabupaten/Kota. Jumlah korban 1.195 orang meninggal. Kerusakan rumah lebih dari 249.000 dan kerusakan infrastruktur sosial ekonomi yang parah. Walaupun jumlah korban tidak sebanyak yang pertama, namun banyaknya rumah yang rusak telah membuat masyarakat trauma dan merasa tidak aman terhadap kehidupan yang akan datang. Setelah gempa dan tsunami Aceh pada bulan Oktober 2004, bencana gempa bumi telah menjadi momok bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Lebih-lebih lagi kejadian gempa yang terjadi secara beruntun pada tahun berikutnya seperti pada bulan April 2005, Maret 2007, September 2007, dan juga gempa-gempa kecil yang mengikutinya telah membuat bencana gempa bumi menjadi isu utama di provinsi ini yang menggerakkan semua pihak untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Disamping itu, Peraturan Gempa Indonesia (SNI-1726, 2002) menempatkan Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang memiliki percepatan gempa maksimum (PGA) tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat bisa dipastikan adalah daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Dari hasil kajian yang dilakukan para ahli geologi dan juga didukung oleh dokumen dari Pemerintahan Belanda menunjukkan bahwa di Kota Padang telah terjadi

tsunami yang cukup besar yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1797 dan 24 November 1833. Dilaporkan ketinggian tsunami saat itu lebih kurang 3 sampai 4 meter dan landaannya menjangkau lebih kurang 1 km. Dalam waktu dekat para ahli juga memperkirakan akan terjadi gempa besar yang merupakan siklus gempa yang sama yang berpusat pada zona subduksi Sumatera yang berada di dekat Kepulauan Mentawai di pantai barat pulau Sumatera dan memiliki potensi menimbulkan tsunami yang akan menggenangi daerah pantai wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 gunung berapi yaitu Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Keempat gunung ini berpotensi menimbulkan bencana terhadap wilayah di sekitarnya. Tahun 2006, aktifitas Gunung Talang yang sempat menyemburkan lahar, meskipun tidak sampai menimbulkan bencana besar, telah menarik para ahli nasional maupun internasional untuk mengkaji lebih lanjut karakteristik gunung untuk memprediksi aktifitasnya dimasa yang akan datang.

Begitu juga Gunung Marapi masih terus mengeluarkan asap pada beberapa tahun belakangan ini, sehingga potensi bencana yang ditimbulkannya terhadap penduduk di sekitar gunung yang cukup padat saat ini sangat besar. Provinsi Sumatera Barat juga memiliki sungai-sungai besar yang mengalir dari wilayah pegunungan di sebelah timur menuju ke arah pantai di bagian barat. Secara tradisional, perkembangan penduduk di Provinsi Sumatera Barat dimulai dari daerah tepian sungai-sungai besar seperti asal usul masyarakat di Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, dan Kabupaten Agam. Lokasi yang berada di sekitar sungai menyebabkan potensi terjadinya banjir juga besar terutama pada saat musim hujan. Telah dilaporkan bahwa banyak korban dan infrastruktur rusak ketika bencana banjir terjadi. Bencana longsor telah terjadi pada tanggal 4 Mei 1987 di Padang Panjang. Bencana ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 143 orang meninggal dunia, 49 rumah rusak, dan 1 buah bangunan sekolah tertimbun. Bencana ini diperkirakan merupakan bencana longsor terbesar di Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat berbatasan secara langsung dengan Lautan India di arah barat. Perbatasan dengan laut lepas ini menyebabkan Provinsi Sumatera Barat masuk dalam siklus aliran air laut yang berpotensi menimbulkan abrasi pantai. Dilaporkan telah terjadi perubahan garis pantai di Provinsi Sumatera Barat akibat abrasi pantai yang tentunya juga menyebabkan bangunan-bangunan yang ada di atasnya runtuh.

2. Kerentanan

Kerentanan (vulnerability) adalah tingkat kekurang-mampuan masyarakat untuk menanggulangi dampak suatu bencana. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Kerentanan dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu kerentanan fisik dan kerentanan non-fisik. Secara umum kerentanan fisik dan non-fisik yang dimiliki oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat terhadap semua jenis bahaya dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Kerentanan Umum di Provinsi Sumatera Barat

Jenis Bahaya	Uraian Jenis Kerentanan	
	Fisik	Non-fisik
Semua Ancaman	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan sistem peringatan dini akan bahaya belum ada/lengkap - Peta risiko belum ada/lengkap - Jalur evakuasi belum definitif - Bangunan/tempat pengungsian belum ada - Listrik dan air bersih belum lengkap - Peralatan tanggap darurat belum tersedia - Tidak ada terminal khusus bantuan bencana - Peralatan kesehatan masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada lembaga khusus kebencanaan - Masyarakat tidak/kurang terdidik - Sistem informasi bencana lambat - Rencana pembangunan tidak berorientasi bencana - Anggaran khusus kebencanaan di daerah masih kurang - Prosedur tanggap bencana tidak tersedia - Kurangnya pelatihan kebencanaan - Peraturan daerah/local kebencanaan kurang memadai - Kurangnya komitmen bersama antar lembaga (egosektoral)

Sumber Data : BPBD Sumatera Barat, RAD, Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2009-2011

Berdasarkan data-data sekunder dan survey yang dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Barat terhadap suatu ancaman bahaya yang ada, telah teridentifikasi khusus kerentanan seperti terlihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Kerentanan Khusus di Provinsi Sumatera Barat

No	Jenis Bahaya	Uraian Jenis Kerentanan	
		Fisik	Non-fisik
	Gempa-bumi	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada panduan konstruksi bangunan tahan gempa - Belum ada peta risiko gempa-bumi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan aparaturnya dan Masyarakat tentang kegempaan kurang
	Tsunami	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada sistem peringatan dini - Peta risiko belum definitif - Peta evakuasi belum definitif 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan aparaturnya dan Masyarakat tentang tsunami kurang
	Banjir	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan pendeteksi banjir belum memadai - Belum ada sistem peringatan dini - Peta risiko banjir belum lengkap - Bangunan penanggulangan banjir belum banyak/cukup 	<ul style="list-style-type: none"> - Tata ruang tidak berorientasi bahaya banjir - Masyarakat masih memanfaatkan aliran alam untuk keperluan hidupnya - Masih banyak masyarakat membuang sampah di aliran sungai

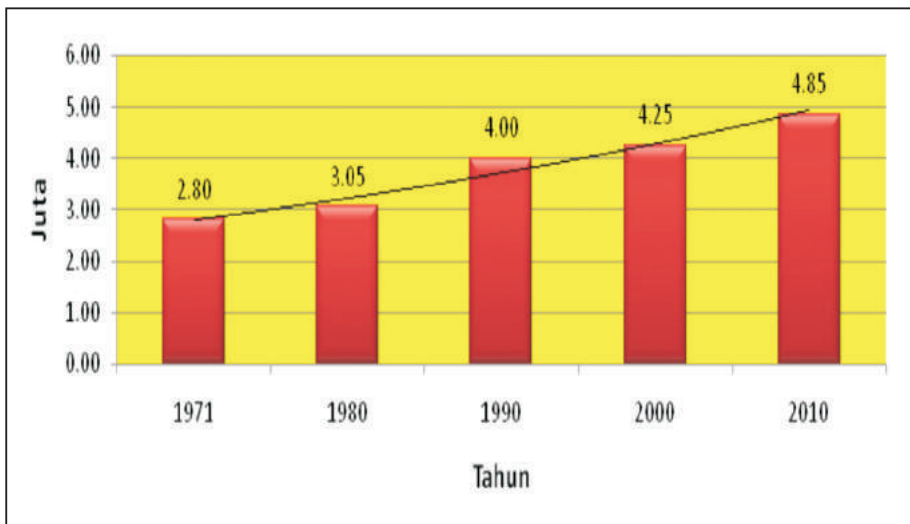
No	Jenis Bahaya	Uraian Jenis Kerentanan	
		Fisik	Non-fisik
	Kebakaran bangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peralatan pemadam kebakaran kurang - Belum ada standar pemadam kebakaran pada bangunan - Peralatan pemadam api di bangunan umum kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada latihan secara rutin untuk kebakaran - Rencana detail pembangunan tidak berorientasi kebakaran
	Badai/ Putting beliung	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada sistem peringatan dini untuk bahaya badai - Belum ada peta risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan rumah tidak tahan badai/angin
	Gelombang pasang	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada peralatan sistem terpasang untuk peringatan - Belum ada peta risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terdidik - Budaya tinggal dekat pantai masih melekat
	Kekeringan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada peramalan bahaya kekeringan di daerah - Belum ada peta risiko kekeringan belum ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terdidik - Rencana pembangunan tidak berorientasi bencana
	Epidemi wabah penyakit (termasuk AID/HIV)	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada panduan bahaya epidemic yang harus diwaspadai. - Masih ada tempat-tempat dimana sumber bahaya berkembang 	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan 10mog masih lemah - Masyarakat tidak terlibat secara langsung - Pengetahuan masyarakat/ aparaturnya masih kurang
	Penggunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang	<ul style="list-style-type: none"> - Buku panduan untuk bahaya narkoba bagi masyarakat umum kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi kurang gencar dari semua media - Pendidikan khusus di sekolah tidak ada
	Gagal Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya peralatan pendikteksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terinformasikan akan bahaya - Pengetahuan masyarakat/ aparaturnya masih kurang
	Konflik Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Batas administrasi antar wilayah belum definitif - Kurangnya fasilitas khusus/ umum untuk berkomunikasi/ silaturahmi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan masih beragam (senjang) - Kesenjangan ekonomi
	Pencemaran Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada peralatan pendeteksi pencemaran - Kurangnya rambu-rambu peringatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terdidik untuk ramah terhadap lingkungan - Perilaku tradisional tidak berwawasan lingkungan (lading berpindah, dll) - Rencana pembangunan tidak/kurang berwawasan lingkungan
	Longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada (sangat kurang) tanda-tanda pada lokasi bahaya - Belum ada/lengkap peta risiko gempabumi - Belum terpasang alat peringatan dini 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terdidik untuk menghindari bahaya - Keterbatasan lahan pembuatan pemukiman - Sistem pemilikan tanah melibatkan budaya lokal
	Letusan Gunung Api	<ul style="list-style-type: none"> - Peralatan sistem peringatan dini perlu diperbaharui 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat tidak terinformasi akan bahaya - Tidak ada organisasi khusus
	Kebakaran hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi hutan masih terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat masih tinggal dan memanfaatkan hutan sebagai penopang hidup - Masih ada budaya pembukaan lahan baru oleh masyarakat
	Abrasi pantai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada peringatan bahaya abrasi - Organisasi masyarakat belum terbentuk di lokasi bahaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat di lokasi kurang terdidik

Sumber Data : BPBD Sumatera Barat, RAD, Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2009-2011

2.1.4 Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2000, total penduduk Provinsi Sumatera Barat berjumlah 4.241.605 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki 2.0778.572 jiwa dan perempuan 2.163.033 jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk terakhir 2010, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 4.845.998 orang, yang terdiri atas 2.404.472 laki-laki dan 2.441.526 perempuan. Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Dalam kaitannya peran penduduk tersebut, maka kualitas penduduk perlu ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan.

Pada umumnya penduduk Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun 1971 jumlah penduduk Sumatera Barat berjumlah 2,80 juta jiwa, pada tahun 1980 telah bertambah menjadi 3,05 juta jiwa, tahun 1990 meningkat terus menjadi 4,00 juta jiwa, tahun 2000 sebanyak 4,25 juta jiwa, dan pada tahun 2010 sudah mencapai 4,85 juta jiwa. Tren tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1
Penduduk Sumatera Barat Hasil Sensus Penduduk 1971-2010

Sesuai hasil Sensus Penduduk 2010 tersebut tampak bahwa sebaran penduduk Sumatera Barat 73,10 persen berada di daerah Kabupaten dan 26,90 persen berada di Kota. Kota Padang, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan 3 (tiga) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling kecil. Seperti terlihat pada Tabel 2.4

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Hasil Sensus Penduduk 2010

Kabupaten/Kota	Penduduk			Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
Kabupaten				
Kep. Mentawai	39.629	36.792	76.421	108
Pesisir Selatan	212.640	217.059	429.699	98
Solok	172.004	176.987	348.991	97
Sijunjung	100.759	100.868	201.627	100
Tanah Datar	164.857	173.727	338.584	95
Padang Pariaman	191.496	198.708	390.204	96
Agam	223.544	231.940	455.484	96
Lima Puluh Kota	172.507	175.742	348.249	98
Pasaman	125.289	127.692	252.981	98
Solok Selatan	72.614	71.622	144.236	101
Dharmasraya	98.871	92.406	191.277	107
Pasaman Barat	183.828	180.759	364.587	102
Kota				
Padang	412.235	418.349	833.584	99
Solok	29.261	30.056	59.317	97
Sawahlunto	28.127	28.685	56.812	98
Padang Panjang	23.290	23.718	47.008	98
Bukittinggi	53.745	57.2009	110.954	94
Payakumbuh	57.890	59.020	116.910	98
Pariaman	38.886	40.187	79.073	97
Sumatera Barat	2.404.472	2.441.526	4.845.998	98

Sumber Data : Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Sumatera Barat adalah sebesar 1,34% per tahun jika dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2000. Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan angka proyeksi penduduk secara terperinci tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2006 - 2010

NO	URAIAN	TAHUN				
		2006	2007	2008	2009	2010
1.	Jumlah Penduduk	4.632.152	4.697.764	4.763.099	4.827.973	4.845.998
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,45	1,42	1,39	1,36	1,34

Sumber Data : Angka proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2000

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia muda dan kecendrungan laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Kendali yang dilakukan selama ini adalah melalui Program Keluarga Berencana (KB) melalui akseptor KB dengan jumlah akseptor KB tahun 2006 sebesar 104.369, tahun 2007 sebesar 108.296, tahun 2008 sebesar 122.589, tahun 2009 sebesar 140.369 dengan rata-rata pertumbuhan per tahun 10,30%.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja. Keadaan ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat pada Februari 2010 menunjukkan adanya peningkatan pada kelompok penduduk yang bekerja dan sehingga terjadi penurunan tingkat pengangguran. Angkatan kerja mencapai 2,27 juta orang, naik sebanyak lebih dari 92,1 ribu orang dibanding Februari 2009. Jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 92,3 ribu orang dan jumlah pengangguran terbuka turun sebanyak 169 orang, atau angka penganggurannya turun dari 7,90 persen menjadi 7,57 persen. Peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan jumlah penganggur telah menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 1,43 persen, dari 64,91 persen pada Februari 2009 menjadi 66,39 persen pada Februari 2010.

Penduduk dipandang dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja di suatu negara. Namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang berusia kerjalah yang bisa menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang termasuk bukan angkatan kerja. Penggolongan usia kerja di Indonesia mengikuti standar internasional yaitu usia 15 tahun atau lebih.

Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang terakhir itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan dan lain-lain.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Barat (66,39%) lebih rendah dibandingkan TPAK Nasional (67,83) pada Februari 2010. Tingkat pengangguran Provinsi Sumatera Barat (9,73 %) lebih tinggi dari angka Nasional (8,46 %) pada Februari 2008, tetapi Februari 2009

(7,90 %) lebih rendah dari angka nasional (8,14 %), dan menariknya pada Februari 2010 (7,57 %) kembali lebih tinggi dari angka Nasional (7,41%). Perkembangan ini mengungkapkan bahwa percepatan penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat lebih lambat dibanding tingkat Nasional. Salah satu penyebabnya adalah dampak dari gempa 7,6 SR pada 30 September 2009 yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, atau ada kemungkinan lain penyebabnya yang perlu dianalisis lebih lanjut.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, indeks ketimpangan wilayah menurut Williamson, jumlah penduduk diatas garis kemiskinan, dan jumlah angka kriminalitas yang tertangani.

Sektor yang memiliki nilai terbesar dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat pada periode RPJMD I tahun 2005-2010 adalah sektor pertanian yang pada tahun 2005 berjumlah Rp 7.293 milyar atau kontribusinya adalah sebesar 25,01% dari total PDRB tahun 2005. Hal ini terus mengalami kenaikan dalam nilainya yang tahun 2010 mencapai Rp 9.094 milyar atau kontribusinya sebesar 23,40%, lihat Tabel 2.6 di bawah.

Tabel 2.6
Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat Periode 2005-2010 atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor Ekonomi	2005		2006		2007		2008		2009		2010*	
		Rp Milyar	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Pertanian	7.293	25,01	7.658	24,74	8.039	24,43	8.437	24,10	8.761	24,03	9.094	23,40
2.	Pertambangan dan pengalihan	951	3,26	980	3,17	1.029	3,13	1.081	3,09	1.125	3,09	1.204	3,10
3.	Industri Pengolahan	3.808	13,06	3.978	12,85	4.209	12,79	4.464	12,75	4.586	12,58	4.788	12,32
4.	Listrik, Gas, air bersih	338	1,16	368	1,19	394	1,20	408	1,17	431	1,18	441	1,13
5.	Bangunan	1.440	4,94	1.544	4,99	1.627	4,94	1.739	4,97	1.814	4,97	2.074	5,34
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	5.305	18,19	5.662	18,29	6.057	18,40	6.463	18,46	6.673	18,30	6.941	17,86
7.	Pengangkutan dan komunikasi	3.754	12,87	4.140	13,38	4.527	13,75	4.916	14,04	5.206	14,28	5.778	14,87
8.	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	1.464	5,02	1.579	5,10	1.693	5,14	1.811	5,17	1.895	5,20	2.011	5,17
9.	Jasa-jasa	4.802	16,47	5.035	16,27	5.339	16,22	5.688	16,25	5.972	16,38	6.531	16,81
	PDRB	29.159	100	30.950	100	32.912	100	35.008	100	36.465	100	38.860	100

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

*Angka Sementara

Selama periode 2005-2010 sektor pertanian telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat, tetapi perkembangan kontribusinya telah mengalami penurunan. Tahun 2005 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 25,01% terhadap nilai PDRB dan tahun 2010 telah menurun menjadi 23,40%. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini diiringi oleh kenaikan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran, dimana tahun 2005 sektor ini berkontribusi sebesar 18,19% dan mengalami peningkatan yang tajam sampai tahun 2009 menjadi 18,30%. Sementara itu, industri pengolahan justru kontribusinya semakin menurun, dimana tahun 2005 adalah sebesar 13,06% tetapi tahun 2009 menurun menjadi 12,58%. Hal ini berimplikasi bahwa perkembangan perekonomian Sumatera Barat telah mengalami perubahan dari dominan sektor pertanian perlahan-lahan ke dominan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sehingga perekonomian Sumatera Barat menjadi lebih berorientasi ke luar (ekspor), sedangkan seharusnya, keberhasilan sektor pertanian diikuti oleh sektor industri pengolahan yang mengolah produk pertanian menjadi produk setengah jadi dan barang jadi, sehingga nilai ekspor akan lebih memberikan nilai tambah yang lebih besar lagi.

Tabel 2.7
Nilai dan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi
Dalam Pembentukan Nilai PDRB Sumatera Barat Periode 2005-2010
Atas Dasar Harga Berlaku

No	Sektor Ekonomi	2005		2006		2007		2008		2009		2010*	
		Rp Milyar	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1.	Pertanian	11.433	25,59	13.397	25,26	14.744	24,66	17.273	24,46	18.120	23,75	20.792	23,84
2.	Pertambangan dan pengalihan	1.514	3,39	1.829	3,45	2.060	3,44	2.351	3,33	2.545	3,34	2.764	3,17
3.	Industri Pengolahan	5.084	11,38	6.056	11,42	7.179	12,01	8.554	12,11	9.195	12,05	10.197	11,69
4.	Listrik, Gas, air bersih	667	1,49	755	1,42	822	1,37	863	1,22	899	1,18	925	1,06
5.	Bangunan	2.473	5,54	2.972	5,60	3.290	5,50	3.905	5,53	4.314	5,65	5.499	6,30
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	7.800	17,46	8.992	16,96	10.368	17,34	12.529	17,74	13.727	17,99	15.475	17,74
7.	Pengangkutan dan komunikasi	6.167	13,80	8.022	15,13	9.009	15,07	10.603	15,02	11.543	15,13	13.439	15,41
8.	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	2.249	5,03	2.632	4,96	2.963	4,95	3.463	4,90	3.783	4,96	4.145	4,75
9.	Jasa-jasa	7.287	16,31	8.374	15,79	9.352	15,64	11.073	15,68	12.171	15,95	13.985	16,03
	PDRB	44.675	100	53.030	100	59.799	100	70.614	100	76.295	100	87.221	100

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

*Angka Sementara

Kelemahan yang akan ditemui, jika keberhasilan sektor pertanian diiringi oleh sektor perdagangan hotel dan restoran bukan industri pengolahan, adalah produk pertanian yang pada umumnya masih bahan mentah (primer), lebih rentan terhadap guncangan fluktuasi nilai tukar rupiah, dan guncangan krisis moneter yang melanda negara-negara tujuan ekspor.

Oleh karena itu, kedepan, pengembangan sektor pertanian haruslah diiringi dengan pengembangan sektor industri pengolahan, agar terjadi peningkatan nilai tambah, dan perekonomian lebih tahan terhadap berbagai guncangan yang disebabkan oleh perkembangan perekonomian negara tujuan ekspor seperti krisis finansial global, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas, terlihat bahwa dari sisi harga berlaku kontribusi sektor pertanian pada tahun 2005 adalah sebesar 25,59% terus mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 23,75%. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan nilai PDRB pada harga berlaku ini diiringi oleh semakin meningkatnya kontribusi industri pengolahan dari 11,38% pada tahun 2005 menjadi 12,05% tahun 2009. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran tahun 2005 berkontribusi sebesar 17,46% dan terus mengalami kenaikan tahun 2009 menjadi 17,99%. Sehingga dari sisi harga berlaku ini, terlihat bahwa kontribusi sektor pertanian masih tetap dominan, tetapi perlahan-lahan digantikan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan.

Apabila dibandingkan antara kontribusi sektor ekonomi terhadap pembentukan nilai PDRB antara harga berlaku dengan harga konstan, maka terlihat bahwa sektor industri pengolahan terlihat semakin meningkat perannya sejalan dengan menurunnya peran sektor pertanian. Peningkatan peran industri pengolahan ini lebih besar disebabkan karena peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi. Besarnya laju inflasi umum pada tahun 2005 adalah sebesar 65,27%, dan inflasi yang paling tinggi itu terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 93% disusul oleh pertanian yang mencapai 58%, sedangkan pada sektor bangunan sebesar 6%. Sektor ekonomi yang tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga itu adalah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran, dan jasa-jasa.

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.8 yang memperlihatkan bahwa laju inflasi umum tahun 2009 adalah sebesar 47,79% jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi umum tahun 2005 yang mencapai

65,27%, sehingga selama lima tahun terakhir laju inflasi umum telah mampu ditekan sebesar 17,48%. Pada tahun 2009 laju inflasi tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 85%, di susul oleh sektor bangunan sebesar 68%, dan diiringi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 25% (laju inflasi umum dihitung berdasarkan PDRB HK di bagi PDRB HB dikalikan 100%).

Tabel 2.8
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB pada tahun 2005-2010
atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
di Provinsi Sumatera Barat.

No	Sektor Ekonomi	2005		2006		2007		2008		2009		2010*	
		%HB	%HK	%HB	%HK	%HB	%HK	%HB	%HK	%HB	%HK	%HB	%HK
1.	Pertanian	25,59	25,01	25,26	24,74	24,66	24,43	24,46	24,10	23,75	24,70	23,84	23,40
2.	Pertambangan dan penggalian	3,39	3,26	3,45	3,17	3,44	3,13	3,33	3,09	3,34	3,09	3,17	3,10
3.	Industri Pengolahan	11,38	13,06	11,42	12,85	12,01	12,79	12,11	12,75	12,05	12,58	11,69	12,32
4.	Listrik, Gas, air bersih	1,49	1,16	1,42	1,19	1,37	1,20	1,22	1,17	1,18	1,18	1,06	1,13
5.	Bangunan	5,54	4,94	5,60	4,99	5,50	4,94	5,53	4,97	5,65	4,97	6,30	5,34
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	17,46	18,19	16,96	18,29	17,34	18,40	17,74	18,46	17,99	18,30	17,74	17,86
7.	Pengangkutan dan komunikasi	13,80	12,87	15,13	13,38	15,07	13,75	15,02	14,04	15,13	14,28	15,41	14,87
8.	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	5,03	5,02	4,96	5,10	4,95	5,14	4,90	5,17	4,96	5,20	4,75	5,17
9.	Jasa-jasa	16,31	16,47	15,79	16,27	15,64	16,22	15,68	16,25	15,95	16,38	16,03	16,81
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

*Angka Sementara

Menurunnya kontribusi sektor pertanian pada harga berlaku pada tahun 2010 memperlihatkan juga bahwa nilai komoditi pertanian ini semakin lebih rendah kontribusinya terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat. Sedangkan pada sektor industri pengolahan nilainya semakin lebih tinggi dari tahun ke tahun, terkecuali untuk tahun 2009 yang mengalami perkembangan nilainya yang lebih rendah. Hal ini berimplikasi bahwa pengembangan industri pengolahan akan lebih baik dibandingkan dengan pengembangan sektor pertanian, karena lebih rentannya terhadap perubahan harga.

Selanjutnya, pertumbuhan nilai PDRB Sumatera Barat sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 telah mencapai 25,06% pada harga konstan. Pertumbuhan tertinggi telah dicapai oleh sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 38,68%, disusul oleh pertumbuhan sektor keuangan dan jasa perusahaan sebesar 29,44%, sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 27,51%, sektor bangunan adalah sebesar 25,97%, Sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 25,79%. Sektor

pertambangan dan pengalihan serta sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan yang lambat selama ini, masing-masing hanya sebesar 18,30% dan 20,13%.

Masih rendahnya pertumbuhan sektor pertanian dalam mendorong pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat selama ini adalah disebabkan oleh masing rendahnya nilai tambah sektor pertanian ini dalam system pertukaran ekonomi. Sektor pertanian masih mengalami hambatan dalam system produksi (*production plan*), karena komoditinya masih didominasi oleh produk primer, dan sub sektor yang menjadi andalan dalam peningkatan nilai sektor ini terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat selama ini yakni sub sektor perkebunan komoditinya masih dalam bentuk produk primer, dan belum dikembangkan kearah industri pengolahannya seperti karet, kayu manis, sawit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ke depan, pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambahnya dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor industri pengolahan produk-produk pertanian yang merupakan komoditi ekspor utama selama ini.

Tabel 2.9
Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB
pada Harga Belaku dan Harga Konstan Tahun 2005-2009
di Provinsi Sumatera Barat.

No	Sektor Ekonomi	Pertumbuhan	
		%HB 2005-2009	%HK 2005-2009
1.	Pertanian	58,48	20,13
2.	Pertambangan dan pengalihan	68,10	18,30
3.	Industri Pengolahan	80,86	20,43
4.	Listrik, Gas, air bersih	34,78	27,51
5.	Bangunan	74,44	25,97
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	75,99	25,79
7.	Pengangkutan dan komunikasi	87,17	38,68
8.	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	68,21	29,44
9.	Jasa-jasa	67,02	24,36
	PDRB	70,78	25,06

Table 2.9 diatas memperlihatkan bahwa sektor industri pengolahan yang diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, ternyata juga belum berarti sumbangannya dalam pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan sektor industri pengolahan selama ini hanyalah sebesar 20,43%. Pada hal nilai transaksinya pada sektor industri pengolahan ini sangat besar yang terlihat dari pertumbuhan sektor ini pada harga berlaku sebesar 80,86%.

Dari sisi harga berlaku, pertumbuhan nilai PDRB Sumatera Barat selama 2005-2009 adalah sebesar 70,78% pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 87,17%, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 80,86%, dan sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 75,99%. Artinya, aktifitas perekonomian Sumatera Barat selama ini telah didorong oleh kegiatan industri pengolahan yakni industri minyak sawit dan lemak hewan, industri tekstil, dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki, serta industri semen. Namun, nilai tambah yang ditangkap dari kegiatan ini adalah pada sektor pentransportasiannya, karena besarnya pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan komunikasi, disamping sektor perdagangan, hotel dan restoran. Artinya, kegiatan perekonomian Sumatera Barat yang didominasi oleh sub sektor perkebunan terutama perkebunan sawit, karet, dan kakao, ternyata lebih besar diperdagangkan ke luar wilayah dan eksternal wilayah, yang ditandai dengan besarnya pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi, terutama angkutan darat.

Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan ke depan, upaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan raya, akan terus mendapat perhatian, terutama jalan arteri primer yang menghubungkan antara Kota Padang dengan kota-kota pusat kegiatan wilayah (PKW) yang ada di Sumatera Barat seperti dengan Kota Solok, Kota Bukittinggi, Pulau Punjung, dan Simpang Empat. Kota-kota pusat kegiatan wilayah ini merupakan simpul-simpul pusat pertumbuhan pada kawasan perkebunan utama yang ada di Sumatera Barat. Besarnya, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi ini tentunya mengimplikasikan bahwa masih tingginya biaya transportasi melalui jalur angkutan jalan raya ini, sehingga apabila di masa depan dapat dikembangkan angkutan kereta api yang lebih efisien untuk pengangkutan barang, tentunya sektor-sektor pengangkutan dan perdagangan ini akan semakin lebih berkembang lagi dan pada gilirannya akan mampu memberikan sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat di masa yang akan datang.

Perkembangan nilai PDRB Sumatera Barat dari tahun 2005 sampai tahun 2009 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2005 nilai PDRB Sumatera Barat mencapai Rp 44.675 milyar pada harga berlaku dan sebesar Rp 29.159 milyar pada harga konstan. Angka ini terus meningkat sampai tahun 2009, dimana nilai PDRB telah mencapai Rp 76.295 milyar pada harga berlaku dan sebesar Rp 36.465 milyar pada harga konstan. Berarti selama tahun 2005-2009 nilai PDRB Sumatera Barat telah mengalami pertumbuhan sebesar 70,78% pada harga berlaku dan sebesar

25,06%. Rata-rata pertumbuhan pertahunnya menurut harga berlaku adalah sebesar 14,16% dan pada harga konstan adalah sebesar 5,01% setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Perkembangan PDRB Tahun 2005-2010
menurut Kabupaten dan Kota
Berdasarkan pada harga berlaku dan harga Konstan

No	Kabupaten/Kota	PDRB											
		2005		2006		2007		2008		2009		2010*	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
1.	Kep Mentawai	671	429	797	446	913	466	1.100	487	1.295	509	1.439	534
2.	Kab. Pesisir Selatan	2.275	1.626	2.654	1.711	3.081	1.801	3.581	1.899	4.081	2.002	4.619	2.108
3.	Kab Solok	2.439	1.609	2.888	1.705	3.421	1.812	4.043	1.927	4.639	2.048	5.309	2.175
4.	Kab. Sijunjung	1.532	1.023	1.821	1.084	2.072	1.145	2.418	1.206	2.713	1.273	3.065	1.343
5.	Kab. Tanah Datar	2.867	1.962	3.395	2.076	3.814	2.202	4.377	2.332	4.844	2.469	5.425	2.614
6.	Kab. Padang Pariaman	2.987	1.972	3.890	2.346	4.382	2.490	5.128	2.645	5.594	2.749	6.021	2.891
7.	Kab.Agam	3.378	2.325	3.925	2.469	4.463	2.626	5.206	2.793	5.822	2.930	6.593	3.096
8.	Kab. 50 Kota	3.081	2.126	3.650	2.255	4.197	2.399	5.022	2.546	5.529	2.685	6.296	2.846
9.	Kab. Pasaman	1.592	1.022	1.909	1.081	2.234	1.145	2.578	1.215	2.889	1.289	3.283	1.368
10.	Kab. Solok Selatan	710	486	818	515	921	546	1.067	579	1.221	615	1.408	653
11.	Kab. Dharmasraya	1.290	846	1.513	899	1.787	958	2.110	1.020	2.346	1.088	2.678	1.159
12.	Kab. Pasaman Barat	2.983	1.989	3.507	2.115	4.116	2.251	4.868	2.395	5.518	2.545	6.320	2.707
13.	Kota Padang	13.266	9.111	15.294	9.577	17.369	10.166	20.142	10.797	21.837	11.346	24.586	12.022
14.	Kota Solok	575	394	676	419	757	445	891	473	982	498	1.091	527
15.	Kota Sawah Lunto	620	445	678	449	756	459	862	474	976	494	1.121	520
16.	Kota Padang Panjang	468	311	549	330	623	351	730	373	852	387	919	421
17.	Kota Bukittinggi	1.086	762	1.269	810	1.436	862	1.699	919	1.881	970	2.182	1.029
18.	Kota Payakumbuh	952	644	1.133	684	1.295	728	1.501	774	1.653	818	1.886	872
19.	Kota Pariaman	866	562	1.020	590	1.126	622	1.318	656	1.488	686	1.581	722
	Sumbang	44.675	29.159	53.030	30.950	59.799	32.913	70.614	35.008	76.295	37.408	86.004	39.607
	Pertumbuhan Ekonomi		5,73		6,14		6,34		6,37		4,16		5,93

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Diantara kabupaten yang ada, maka kabupaten Agam memiliki nilai PDRB tahun 2005 yang paling tinggi yakni mencapai Rp 3.378 milyar atau sebesar 7,56% dari PDRB Sumatera Barat tahun 2005 pada harga berlaku dan sebesar Rp 2.325 milyar atau (7,97%), disusul oleh kabupaten 50 Kota yang mencapai Rp 3.081 milyar, atau sebesar 6,90% dari PDRB Sumatera Barat, dan tempat ketiga diduduki oleh kabupaten Padang Pariaman yang mencapai Rp 2.987 milyar atau sebesar 6,69% dari PDRB Sumatera Barat. Diantara wilayah kabupaten yang memiliki nilai PDRB yang masih relative rendah adalah kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 671 milyar, dan kabupten Solok Selatan yang berjumlah Rp 710 milyar tahun 2005 pada harga berlaku. Dominasi kabupaten Agam ini terus terjadi pada tahun 2009 yang mencapai Rp 5.822 milyar pada harga berlaku atau sebesar 7,63%

dan sebesar Rp 2.930 milyar atau sebesar perkembangan perekonomian yang baik selama ini adalah kabupaten Agam, kabupaten 50 Kota, kabupaten Padang Pariaman, dan kabupaten Tanah Datar. Sedangkan kabupaten lain relative masih belum berkembangnya perekonomiannya dibandingkan dengan empat kabupaten maju ini.

Tabel 2.11
Perkembangan PDRB Per Kapita
Tahun 2005 s/d 2010 Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita Harga Konstan (Rp Juta)					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010*
1.	Kep Mentawai	6.65	6.73	6.93	7.15	7.38	6,98
2.	Kab. Pesisir Selatan	3.84	3.98	4.13	4.29	4.46	4,90
3.	Kab Solok	4.69	4.91	5.15	5.42	5.69	6,23
4.	Kab. Sijunjung	5.43	5.62	5.79	5.96	6.15	6,65
5.	Kab. Tanah Datar	5.92	6.21	6.57	6.94	7.34	7,71
6.	Kab. Padang Pariaman	5.21	6.14	6.48	6.83	7.05	7,40
7.	Kab.Agam	5.47	5.78	6.13	6.50	6.80	6,79
8.	Kab. 50 Kota	6.56	6.89	7.28	7.67	8.04	8,16
9.	Kab. Pasaman	4.18	4.34	4.52	4.72	4.93	5,40
10.	Kab. Solok Selatan	3.83	4.00	4.19	4.38	4.60	4,53
11.	Kab. Dharmasraya	5.12	5.28	5.46	5.64	5.84	6,05
12.	Kab. Pasaman Barat	6.28	6.56	6.87	7.19	7.52	7,42
13.	Kota Padang	11.39	11.68	12.13	12.60	12.96	14,41
14.	Kota Solok	7.29	7.51	7.79	8.09	8.32	8,88
15.	Kota Sawah Lunto	8.38	8.42	8.51	8.73	9.03	9,14
16.	Kota Padang Panjang	6.84	6.63	6.75	6.88	6.85	8,94
17.	Kota Bukittinggi	7.58	7.90	8.27	8.67	9.00	9,26
18.	Kota Payakumbuh	6.32	6.57	6.93	7.30	7.65	7,45
19.	Kota Pariaman	8.02	8.38	8.82	9.29	9.70	9,12
20.	Sumbar	6.40	6.68	7.01	7.35	7.55	8,16

Sumber Data: BPS, Nilai tahun 2006 s.d 2009 dihitung berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, Nilai tahun 2010 dihitung berdasarkan sensus penduduk tahun 2010

*Angka Sementara

Sedangkan pada seluruh wilayah Kota, maka kota Padang memiliki nilai PDRB yang tertinggi yakni mencapai Rp 13.266 milyar atau sebesar 29,69% pada tahun 2005 dan pada harga berlaku. Kota Bukittinggi menempati urutan kedua terbesar yakni Rp 1.086 milyar atau sebesar 2,43%. Sedangkan kota Payakumbuh memiliki nilai PDRB Rp 952 milyar, dan Kota Pariaman sebesar Rp 866 milyar. Pada harga konstan, nilai PDRB Kota Padang adalah berjumlah Rp 9.111 milyar atau sebesar 31,25% dari nilai

PDRB provinsi Sumatera Barat, disusul oleh Kota Bukittinggi sebesar Rp 762 milyar atau sebesar 2,61%. Sedangkan kota yang memiliki nilai PDRB tahun 2005 pada harga berlaku yang paling rendah adalah Kota Padangpanjang sebesar Rp 468 milyar atau hanya 1,05% dari nilai PDRB Sumatera Barat.

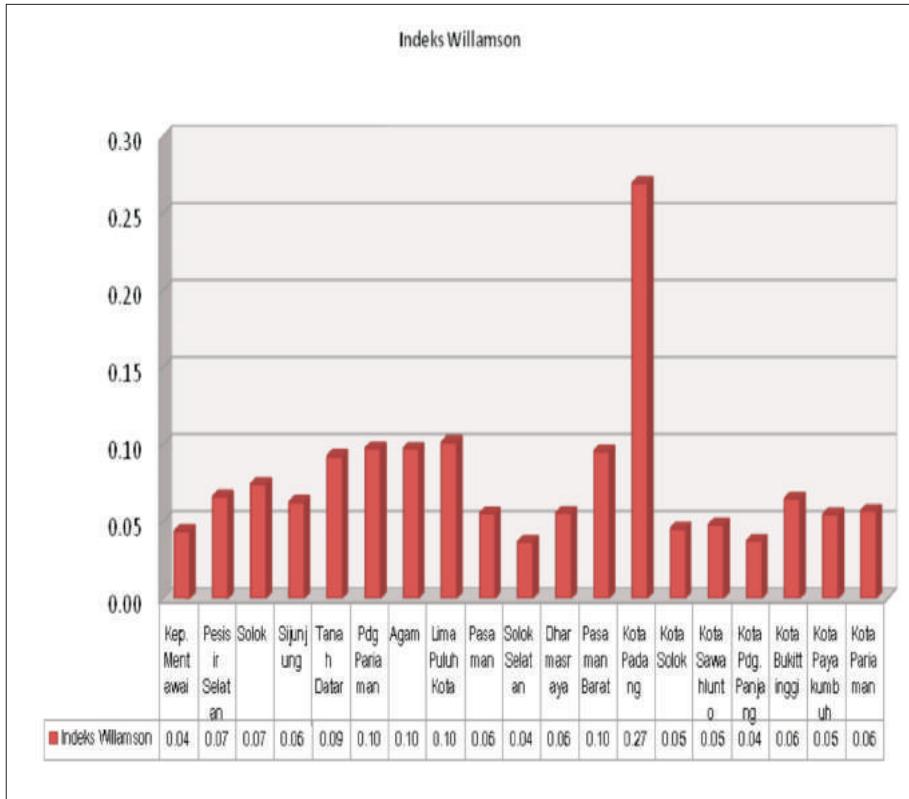
Pada tahun 2009, nilai PDRB Kota Padang pada harga berlaku berjumlah Rp 21.837 milyar atau sebesar 28,62%, sedangkan Kota Bukittinggi berjumlah Rp 970 milyar atau sebesar 2,66% dari nilai PDRB Sumatera Barat. Setelah itu, disusul oleh Kota Payakumbuh sebesar Rp 1.653 milyar atau sebesar 2,17%, dan Kota Pariaman sebesar Rp 1.488 milyar atau sebesar 1,95%.

Nilai PDRB per Kapita Sumatera Barat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD pertama. Tahun 2005 besarnya PDRB per kapita Sumatera Barat adalah sebesar Rp 6,40 juta/jiwa terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan sampai tahun 2010 yang mencapai Rp 8,16 juta/jiwa, dengan pertumbuhan sebesar 27,50% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya adalah sebesar 5,50% per tahun.

Pada tahun 2005, terdapat delapan kabupaten dan Kota yang memiliki nilai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata PDRB per kapita Sumatera Barat, diantaranya adalah kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 6,65 juta, kabupaten 50 Kota yang mencapai Rp 6,56 juta, Kota Padang sebesar Rp 11,39 juta, dan Kota Payakumbuh yang berada di bawah angka provinsi Sumatera Barat yakni sebesar Rp 6,32 juta. Pada tahun 2009 masih terdapat delapan wilayah kabupaten dan Kota yang memiliki PDRB per Kapita yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi yakni Kabupaten 50 Kota sebesar Rp 8,04 juta, Kota Padang sebesar Rp 12,96 juta, dan semua kota lainnya kecuali Kota Padangpanjang yang hanya sebesar Rp 6,85 juta.

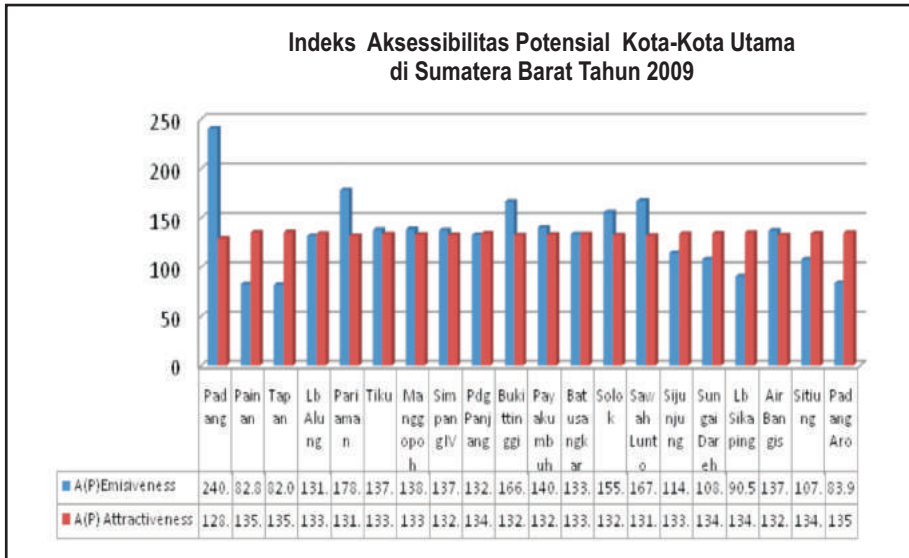
Gambar 2.2 memperlihatkan bahwa indeks ketimpangan wilayah yang paling tinggi terdapat pada Kota Padang yang ditunjukkan oleh nilai *indeks Williamson* sebesar 0,27 yang mendekati satu; yang berarti sangat timpang. Ketimpangan wilayah ini dilihat dari nilai pendapatan per kapita Kota Padang yang mencapai Rp 12,1 juta dengan jumlah penduduk tahun 2008 adalah sebanyak 838.190 jiwa dan besarnya PDRBnya adalah Rp 17,4 milyar. terdapat empat kabupaten yang lebih mendekati kemajuan wilayah Kota Padang yakni kabupaten Agam, 50 Kota, Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman, serta kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan kabupaten

lain relatif merata. Sedangkan wilayah kabupaten/kota yang paling merata adalah Kabupaten Solok Selatan dan Kota Padangpanjang.



Gambar 2.2
Ketimpangan Wilayah Menurut Indeks Williamson
di Sumatera Barat

Besarnya ketimpangan wilayah yang terjadi ini lebih disebabkan karena lebih terfokusnya kegiatan ekonomi pada Kota Padang sebagai pusat kegiatan nasional, sedangkan transaksi ekonomi antara kota Padang dengan kota-kota pusat kegiatan wilayah lainnya, lebih dominan pada pendistribusian barang dan jasa dari Kota Padang ke Kota PKW lainnya, sedangkan arus masuk barang dan jasa dari PKW menuju Kota Padang lebih rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan industri belum berfungsi dengan baik selama ini.



Gambar 2.3
Gambar Grafik Indeks Aksesibilitas Potensial Kota-Kota Utama di Sumatera Barat, Tahun 2009

Gambar 2.3 diatas memperlihatkan bahwa terdapat lima kota yang memiliki tingkat daya sebar arus barang dan jasa yang tinggi menuju ke luar wilayahnya yakni Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto. Artinya, kota-kota ini arus barang dan orang lebih besar meninggalkan wilayahnya jika dibandingkan dengan arus barang dan orang yang masuk ke wilayah sendiri. Kota-kota yang berfungsi sebagai wilayah pusat pertumbuhan local dengan aktifitas ekonomi industri haruslah memiliki kekuatan arus barang masuknya lebih tinggi dari pada arus keluar barang dan orangnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan wilayah ke depan, bagaimana memfungsikan pusat-pusat pertumbuhan local ini saling terkait dengan pusat pertumbuhan utama di Sumatera Barat, sehingga saling hubungan wilayah pembangunan di Sumatera Barat dapat dikembangkan kearah transaksi ekonomi yang saling menguntungkan ke dalam wilayah sendiri. Apabila pusat-pusat pertumbuhan local ini lebih tertarik ke pusat pertumbuhan wilayah provinsi tetangga, tentunya akan terjadi kebocoran ekonomi wilayah (*economics of leakage*) di Sumatera Barat. Oleh karena itu, dalam pembangunan Sumatera Barat ke depan harus memperhatikan saling keterkaitan spatial diantara wilayah-wilayahnya terutama keterkaitan wilayah pusat pertumbuhan utama dengan wilayah hinterlandnya.

Tabel 2.12
Nilai Inflasi PDRB Rata-rata Tahun 2005- 2009
Provinsi Sumatera Barat

No	Sektor Ekonomi	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Pertanian	19,95	11,59	4,93	11,54	1,02
2.	Pertambangan dan pengalihan	11,69	17,26	7,34	8,61	3,98
3.	Industri Pengolahan	5,90	14,01	12,06	12,34	4,65
4.	Listrik, Gas, air bersih	7,88	3,93	1,90	1,60	1,60
5.	Bangunan	17,68	12,08	5,09	11,03	5,92
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	4,81	8,02	7,80	13,25	6,10
7.	Pengangkutan dan komunikasi	22,81	17,96	2,72	8,36	2,81
8.	Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan	9,53	8,48	5,06	9,22	4,40
9.	Jasa-jasa	10,94	9,59	5,34	11,13	4,68
	Sumatera Barat	13,10	11,84	6,04	11,02	3,73

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju inflasi PDRB Sumatera Barat tahun 2005 adalah sebesar 13,10 dan terus mengalami penurunan hingga sampai tahun 2009 yang hanya mencapai 3,73. Artinya selama periode 2005-2009 perkembangan harga produk sektor ekonomi semakin lebih baik. Pada tahun 2005 sektor ekonomi yang memiliki nilai inflasi yang paling tinggi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 22,81, disusul oleh sektor pertanian sebesar 19,95 dan sektor bangunan sebesar 17,68. Sedangkan sektor industri pengolahan hanya sebesar 5,90, dan perdagangan hotel dan restotan memiliki nilai inflasi yang paling rendah yakni mencapai 4,81. Rendahnya nilai inflasi sektor industri pengolahan dan perdagangan ini berimplikasi bahwa perkembangan harga-harga pada sektor ini masih rendah, karena produk yang dihasilkan masih barang primer atau bahan mentah.

Apabila dilihat per sektor, pada tahun 2009, sektor pertanian memiliki nilai inflasi yang paling rendah yakni hanya 1,02, sedangkan laju inflasi yang tertinggi ada pada sektor perdagangan hotel dan restoran sebesar 6,10, disusul oleh sektor bangunan sebesar 5,92. Sektor industri pengolahan hanya sebesar 4,64 telah mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga peningkatan nilai produk industri pengolahan ini perlu terus ditingkatkan, dengan mengembangkan kearah pengolahan barang setengah jadi menjadi barang jadi.

Angka laju inflasi lainnya seperti yang dipublikasikan oleh BPS pada setiap bulannya dihitung dengan menggunakan Indek Harga Konsumen (IHK) Kota Padang, dimana Kota Padang termasuk salah satu dari 66 kota di Indonesia yang dijadikan dasar perhitungan Indek Harga Konsumen Nasional/Gabungan.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Visi Sumatera Barat Tahun 2025 yang menjadikan pembangunan di Sumatera Barat berbasiskan kepada penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Pembangunan manusia seutuhnya meliputi manusia sebagai insan manusia dan sumber daya pembangunan. Dalam perwujudannya selalu memperhatikan insan manusia yang beriman dan bertaqwa, memiliki harkat dan martabat sebagai manusia, bermoral, memiliki jati diri serta berkarakter; mempunyai sikap mental positif; berdaya pikir, cipta dan karsa dan karya. Dilain pihak pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi dan berkualitas, sehat jasmani dan rohani serta memiliki etos kerja, produktif, terampil, kreatif dan inovatif, disiplin dan profesional, serta berorientasi pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pembangunan sumber daya manusia sebagai insan manusia dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan tercapai apabila pendidikan yang baik dan benar dilaksanakan sejak dini dan mampu membentuk karakter sumber daya manusia itu sendiri yang kreatif serta seimbang antara kemampuan intelektual, emosional serta spiritual. Sehingga pendidikan dalam konteks ini, harus membuat seimbang antara pembentukan dan pembinaan karakter dan pendidikan yang menekankan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Selama periode 2005-2010, berbagai upaya pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Sumatera Barat telah dilakukan. Kecenderungan (*trend*) keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia sampai dengan tahun 2008, menunjukkan kemajuan yang berarti.

Sampai dengan tahun 2008, antara besaran target dan realisasi program berjalan seimbang, namun terjadinya gempa pada tanggal 30 September 2009, di Sumatera Barat telah membawa kemunduran (*setback*) terhadap perkembangan pendidikan. Hasil survey setelah

terjadinya gempa yang dilakukan UNDP : Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Manusia (UNDP tahun 2009) (N = 500), menunjukkan:

- a. Kabupaten/Kota yang mengalami kerusakan akibat gempa adalah : Kota Padang, Kota Pariaman, kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman , Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Pola bencana akibat gempa: (1) tingginya tingkat kehancuran rumah-rumah pedesaan, (2) tingginya tingkat kehancuran/ kerusakan pada sekolah baik yang mengalami rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan (3) putusnya jalan akses pedesaan akibat longsor yang dipicu oleh gempa dan diperparah oleh degradasi hutan
- c. Salah satu dampak umum bencana: Terganggunya pendidikan anak, Lebih dari separuh gedung sekolah memerlukan rehabilitasi dan rekonstruksi, tiga puluh tujuh persen (37 %) tidak ada bangunan yang tersedia, 19,2% tersedia, tetapi tidak aman
- d. Menurut laporan data Satkorlak Provinsi Sumatera Barat yang kemudian diadopsi dalam laporan UNDP tahun 2009, sarana dan prasarana sekolah yang rusak akibat gempa yakni :
 1. Rusak Berat : 2.146 unit (perlu pembongkaran),
 2. Rusak Sedang : 1.447 unit (perlu penilaian dari insinyur struktural)
 3. Rusak Ringan : 1.137 unit (perlu rehab ringan).

2. Kebudayaan

Pembangunan bidang kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat, sumberdaya manusia adalah salah satu kekuatan bagi pembangunan Sumatera Barat. Kekuatan ini telah melahirkan kreativitas dari orang Minangkabau untuk turut serta dalam pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Sumatera Barat dewasa ini telah berkembang kepada masyarakat yang heterogen dan multikultural sebagai konsekuensi dari masuknya budaya luar. Faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut antara lain disebabkan karena keterbukaan masyarakat dan pemerintah daerah untuk : (1) terbuka terhadap warga luar daerah untuk bermukim dalam wilayah Sumatera Barat; (2) terbuka terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan berbasis ekonomi di Kabupaten/Kota; (3) terbuka terhadap perbedaan tingkat pendidikan dalam masyarakat; (4) terbuka terhadap perbedaan orientasi dan gaya hidup anggota masyarakat; dan (5) terbuka terhadap efek pembangunan fisik dan infrastruktur.

Selama RPJMD ke 1 (tahun 2006-2010) beberapa kegiatan yang melampaui target sasaran yang telah ditetapkan yaitu: (1) Pengembangan lembaga seni dan budaya target 446 lembaga/sanggar, sedangkan realisasinya adalah 510, dan (2) Pembinaan seni budaya langka, target 35 kegiatan, sedangkan realisasinya adalah 37 kegiatan.

Untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan kebudayaan, maka diperlukan gerakan terpadu untuk peningkatan nilai-nilai seni dan kebudayaan berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" (ABS-SBK). Nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat. Sistem nilai merupakan tingkat tertinggi dan abstrak yang mengatur adat istiadat, karena sifatnya yang abstrak, nilai budaya terletak dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga pendukung suatu kebudayaan tersebut. Dalam tiap masyarakat, terdapat sejumlah nilai budaya yang saling berkaitan yang digunakan sebagai pedoman dan pendorong bagi kehidupan warga masyarakat.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Dasar Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan pendidikan Sumatera Barat secara umum menunjukkan hasil cukup baik, antara lain dilihat dari perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, tata kelola, akuntabilitas, dan dalam kurun waktu tahun 2006-2009. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan pendidikan pada periode ini di Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada masyarakat antara lain dilihat dari pencapaian angka partisipasi kasar

(APK), bahwa tingkat pendidikan SD/MI/Paket A, tahun 2006 dari target 113,36 % terealisasi 113,37 %. Selanjutnya dari tahun 2006 sampai tahun 2009 realisasi indikatornya selalu mengalami peningkatan yang cukup berarti dan berdampak positif terhadap perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/SMTLB/Paket B, dapat dikatakan menunjukkan keberhasilan, hal ini dapat dilihat bahwa pencapaian realisasi dari tahun 2006-2009 sudah melampaui target yang direncanakan, yaitu tahun 2006 target 88,18 %, terealisasi sebesar 88,28 % dan seterusnya tahun 2009 target 96,07 % terealisasi 97,42 %. Untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C, perlu mendapatkan perhatian karena pencapaian realisasi belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan yaitu tahun 2006 dengan target 64,90% terealisasi 64,71 %, selanjutnya tahun 2009 dengan target sebesar 76,84 % hanya terealisasi sebesar 72,51 %. Namun demikian realisasinya dari mulai tahun 2006 sampai tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup baik.

Pencapaian pendidikan yang menyelenggarakan pelayanan unggul seperti Sekolah Berstandar Internasional (SBI) dimulai pada tahun 2008, meliputi SBI SD sebanyak 2 sekolah, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP 17 sekolah, RSBI SAM 17 sekolah, RSBI SMK 21 sekolah dan SMA bersertifikat ISO 1900-2000 sebanyak 29 sekolah.

Untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM), pada seluruh jenjang pendidikan dapat dikatakan menggambarkan hasil yang menggembirakan. Hal ini dapat terlihat pada Tingkat SD/MI/Paket A dari tahun 2006-2009 pada setiap tahunnya, hasil realisasi pencapaian indikator pembangunan mengalami peningkatan dan bahkan melebihi target yang direncanakan. Data tersebut dapat dicermati pada tabel di atas yaitu tahun 2006 dengan target 97,61 % terealisasi 97,61 %, seterusnya 2009 target 98,57 % telah direalisasikan sebesar 99,85 %. Tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga mengalami hal yang sama dengan tingkat pendidikan SD/MI/Paket A. Pada tahun 2006 dicapai realisasi 70,62 % dari target 67,16 % dan tahun 2009 target 77,25 % direalisasikan 78,56 %. Tingkat SMA/MA/SMK/Paket C rata-rata setiap tahunnya pencapaian realisasi juga melebihi target yang telah direncanakan.

Untuk indikator Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/Diploma IV, pada setiap jenjang tingkat SD, SMP, SMA dan SMK, dalam kurun waktu 2006-2009, dapat digambarkan realisasi pelaksanaannya belum memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini, perlu mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait pada tahun-tahun mendatang, sehingga pencapaian realisasi dapat memenuhi target yang telah direncanakan.

Pada Indikator Sertifikasi Guru dari evaluasi kinerja secara makro berdasarkan Tabel 2.13. menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, hal ini dapat dilihat dari setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK, SLB, SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2006-2009, realisasi pelaksanaan program selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data indikator makro pada tabel di atas, realisasi kegiatan dari tahun ke tahun mulai tahun 2006 sampai tahun 2009, menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Selain itu, sampai dengan tahun 2009, terjadi peningkatan terhadap rata-rata lama sekolah menjadi 8,45 tahun.

Pendidikan merupakan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk diantaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi memainkan peran penting untuk meningkatkan daya saing Sumatera Barat. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis, dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama secara keseluruhan. Oleh karena itu pembangunan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas serta penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Barat perlu dilakukan dengan pendekatan komprehensif, holistik, dan menyenangkan dengan menekankan pada pembinaan dan perkembangan pribadi anak didik secara utuh, berkarakter dan mandiri.

Tabel 2.13
Perkembangan Kinerja Makro Bidang Pendidikan Tahun 2006–2010

Indikator Kinerja	Satuan	2006		2007		2008		2009		2010	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)											
1. SD/MI/SDLB/Paket A	%	113,36	113,37	117,27	114,50	119,67	115,82	122,08	116,11	124,48	112,54
2. SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	88,15	88,28	90,20	93,90	93,13	96,08	96,07	97,42	99,15	98,31
3. SMA/SMK/ MA/SMALB/ Paket C	%	64,90	64,71	70,52	65,98	73,68	68,56	76,84	72,51	80,25	83,92
b. Angka Partisipasi Murni (APM)											
1. SD/MI/SDLB/Paket A	%	97,61	97,61	97,69	98,60	98,13	99,67	98,57	99,85	99,01	99,67
2. SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	67,16	70,62	71,75	72,44	74,70	75,91	77,25	78,56	80,30	77,25
3. SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C	%	49,16	49,13	48,77	53,36	49,84	55,55	50,90	62,13	51,97	55,50
c. Kualifikasi Pendidikan Guru Setara S1/ Diploma IV											
1. SD	%	15,00	15,00	17,50	17,50	20,00	14,79	22,50	16,49	25,00	20,00
2. SMP	%	74,13	74,13	80,38	80,38	86,63	56,33	92,88	59,94	100,00	86,63
3. SMA	%	83,12	83,12	87,37	87,37	91,62	86,88	95,87	87,35	100,00	91,01
4. SMK	%	81,51	81,37	86,26	66,26	91,01	82,40	95,76	85,00	100,00	91,01
d. Sertifikasi Guru (Pem. Pusat)											
1. TK	Org	-	6	30	30	30	38	40	84	50	30
2. SLB	Org	-	5	30	30	30	23	40	74	50	30
3. SD/MI	Org	-	65	500	500	600	1.870	700	3.175	2.500	600
4. SMP/MTs	Org	-	84	1.240	1.240	1.440	1.499	1.620	2.458	2.900	1.440
5. SMA/SMK/MA	Org	-	-	-	1.700	-	1.743	-	2.889	-	2.400
Persentase penduduk Buta Huruf menurut kelompok umur											
a. 15+	%	-	4,12	-	3,90	-	3,34	-	-	-	-
b. 15 - 44	%	-	1,50	-	1,78	-	0,83	-	-	-	-
c. 45 +	%	-	9,43	-	7,97	-	7,99	-	-	-	-
Rata-rata lama sekolah warga masyarakat	th	-	8	-	8,18	-	8,26	-	8,45	-	8,79

Sumber Data : Dinas Pendidikan Provinsi

2. Kesehatan

Gempa yang terjadi 30 September 2009, memberikan dampak di segala sektor bagi Provinsi Sumatera Barat, khususnya Bidang Kesehatan. Hal ini akan makin menambah permasalahan kesehatan yang telah ada sebelumnya.

Pencapaian target bukan semata-mata menunjukkan kinerja pemerintah di bidang Kesehatan, namun target indikator bidang Kesehatan yang dibuat berdasarkan indikator 4 tahun pencapaian kinerja pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 - 2010, dimana dijadikan suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat merupakan rujukan dan gambaran kondisi derajat kesehatan di Provinsi Sumatera Barat dan sekaligus sebagai bahan masukan dalam pengembangan dan peningkatan kinerja bidang kesehatan pada masa yang akan datang. Target kesehatan yang ingin dicapai mengacu untuk tahun Indikator Sumbang Sehat yang ingin dicapai pada Tahun 2010.

Pencapaian target kinerja program bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Tahun 2006-2010, penilaian dilakukan dengan index antara target dan realisasi. Indeks lebih besar atau sama dengan 1,00 termasuk *Klasifikasi A*, Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006- 2010 terlampaui dengan klasifikasi Sangat memuaskan, namun target tersebut perlu tetap ditingkatkan. Indeks antara 0,75 dengan 1,00 termasuk *Klasifikasi B*, Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006- 2010 belum tercapai, sehingga perlu perhatian dan langkah peningkatan, indeks antara 0,55 sampai 0,75 termasuk *Klasifikasi C*, Target belum terpenuhi dan perlu perbaikan terhadap kinerja pencapaian target. Indeks dibawah 0,55 termasuk *Klasifikasi D*, target masih jauh dari harapan, perlu penanganan dan tindakan khusus terhadap kinerja pencapaian target.

Perkembangan pencapaian indikator derajat Kesehatan selama Tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel Pencapaian Target Derajat Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Terhadap target Indikator Kinerja Target RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006- 2010.

Berdasarkan hasil kompilasi data, diperoleh indeks rata-rata derajat Kesehatan Sumatera Barat sebesar 1.00, artinya termasuk ke dalam kelompok dengan Klasifikasi A, sangat memuaskan, dimana target rata-rata dapat dicapai. Selanjutnya masih diperlukan langkah-langkah peningkatan

pencapaian dari masing-masing parameter indikator, dimana pencapaian tidak hanya untuk menyamai target angka pada tahun 2010, namun yang lebih penting adalah agar derajat Kesehatan Sumatera Barat tercapai setinggi-tingginya dan memiliki ketahanan Kesehatan yang handal.

Tabel 2.14
Perkembangan Kinerja Makro Bidang Kesehatan Sumatera Barat
Tahun 2006-2010

INDIKATOR KINERJA	Sat	2006			2007			2008			2009			2010		
		Tar get	Reali sasi	Index	Tar get	Reali sasi	Index	Tar get	Reali sasi	Ind ex	Tar get	Reali sasi	Index	Tar get	Reali sasi	Index
1. Angka harapan hidup (Th)	TH	66.52	68.60	1.03	66.7	68.80	1.03	67.00	68.90	1.03	67.20	70.40	1.06	70.9	70.9	1.00
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (KH)	KH	42.10	36.00	1.14	41.7	34.00	1.18	40.12	28.50	1.29	39.25	26.00	1.34	26	26	1.00
3. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (KH)	KH	274.6	230	1.16	258.4	229	1.11	242.2	215.9	1.11	226	208	1.08	214	207	0.97
4. Cakupan kunjungan ibu hamil (KA) Jumlah ibu hamil yang berkunjung 4 kali sebelum melahirkan (%)	%	81	76.2	0.94	84	84.8	1.01	87	87.1	1.00	90	90	1.00	90	93.5	1.04
5. Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi (%)	%	79.5	75.6	0.95	82	82.7	1.01	84.5	85.97	1.02	87	87.1	1.00	90	90.8	1.01
6. Desa Universal Child Immunization (Desal Jorong/ Kelurahan Cakupan Imunisasi) (%)	%	80	84.7	1.06	85	88.8	1.04	90	90.2	1.00	95	95.4	1.00	100	96.6	0.97
7. Prevalensi Gizi Kurang pada anak balita (%)	%	14.2	12.9	1.09	13.5	12.8	1.05	12.8	12.7	1.01	12.1	10.5	1.13	11.4	8.2	0.72
8. Cakupan Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Puskesmas (Visit Rate)	Ka li	1.6	1.3	0.81	1.7	2.2	1.29	1.8	1.81	1.01	1.9	1.93	1.02	2	2	1.00
9. BOR (Bed Occupation Rate) (Persentase pemanfaatan Tempat Tidur di Rumah Sakit) (%)	%	62	68.6	1.11	65	71.2	1.10	70	62	0.89	77	65.1	0.85	85	70.4	0.83
10. Terakreditasinya Rumah Sakit (Pemerintah dan Swasta) (%)	%	80	33	0.41	83	35.18	0.42	88	37.03	0.42	93	33.88	0.36	40.74	43.4	1.07
11. Ketersediaan obat esensial dan obat generik pada puskesmas dan rumah sakit	%	80	81.7	1.02	85	85.4	1.00	90	91.07	1.01	95	92.5	0.97	100	100	1.00
12. Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	%	37	37	1.00	44	44.8	1.02	51	58	1.14	58	69.38	1.20	65	69.3	1.07
total				12.75			13.28			12.93			12.98			11.66
INDEX RERATA/TAHUN				0.98			1.02			0.99			1.00			0.97
INDEX RERATA													1.00			1.24

Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi, Desember 2010

Indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja pada perencanaan mendatang adalah terakreditasinya rumah sakit (pemerintah dan swasta) yang baru mencapai 33.88%. Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu syarat Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jika dipertahankan seperti ini, maka dengan laju pertumbuhan yang sangat kecil, maka pada akhir tahun 2015 hanya akan mencapai 33.8% saja. Sangat diperlukan program

peningkatan untuk terakreditasinya rumah sakit (pemerintah dan swasta)
agar bisa mencapai 100% pada tahun 2015

dan upah pekerja non pertanian (Rp.000). sedangkan Indeks pembangunan gender meliputi Angka Harapan Hidup (AHH) laki-laki dan perempuan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) laki-laki dan perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) laki-laki dan perempuan dan persentasi angkatan kerja.

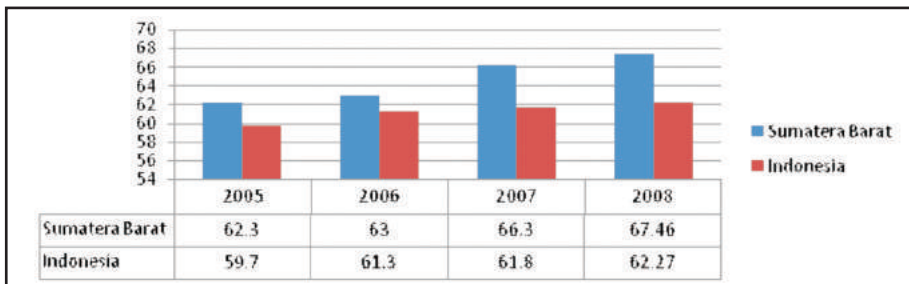
Pembangunan gender di Sumatera Barat dihitung berdasarkan Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mengukur tingkat pencapaian dalam kemampuan dasar dan Indeks Pemberdayaan Jender (IDG). Angka IPG dan IDG Sumatera Barat tahun 2007 sudah berada diatas angka nasional. Berikut tabel pencapaiannya:

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2007

Lokasi	Angka harapan hidup		Angka melek huruf		Rata-rata lama sekolah		% angkatan kerja		IPG	Rangking
	L	P	L	P	L	P	L	P		
Sumatera Barat	66.5	70.5	97.6	94.6	8.3	7.8	61.80	38.20	66.3	5
Indonesia	66.50	70.5	94.6	88.4	7.9	6.9	63.61	36.39	65.3	

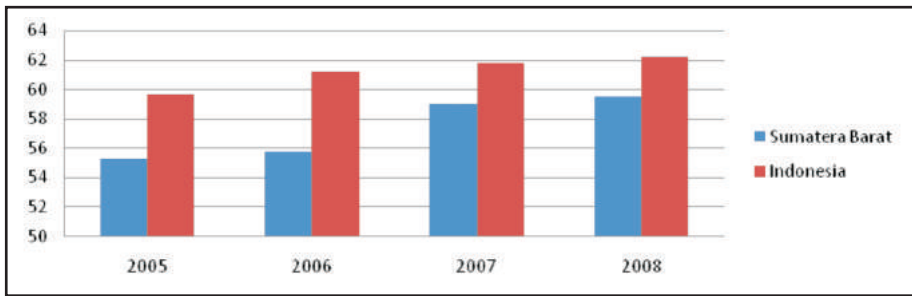
Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan BPS

Jika dilihat trend Indeks Pembangunan Gender sejak tahun 2005 sampai 2008, yang diambil sumbernya dari Pembangunan Berbasis Gender 2006, 2007 & 2008 Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak bekerjasama BPS terlihat capaian trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut pencapaian dari tahun 2005-2008



Gambar. 2.4
Indeks Pembangunan Gender Indonesia Tahun 2005 – 2008

Akan tetapi pada trend Indeks Pemberdayaan Gender sejak tahun 2005 sampai 2008, yang diambil sumbernya dari Pembangunan Berbasis Gender 2006, 2007 & 2008 Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak bekerjasama BPS terlihat capaian trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi pencapaian ini masih dibawah angka nasional. Berikut pencapaian dari tahun 2005-2008



Sumber Data : Pembangunan Berbasis Gender 2006.2007 & 2008.
Kementerian PP&PA bekerjasama BPS

Gambar. 2.5
Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia Tahun 2005 – 2008

Berdasarkan kondisi ini tentunya upaya pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan pemahaman tentang pengarusutamaan gender kepada seluruh lapisan masyarakat, peningkatan komitmen pemerintah, serta peningkatan pengarusutamaan gender kepada seluruh program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender, yang selanjutnya disebut PUG, adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pencapaian rendahnya angka indeks pemberdayaan wanita tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan Sumatera Barat belum responsif. Persentase berdasarkan jumlah wanita di parlemen, perempuan yang menjadi pejabat tinggi, manajer, dan posisi staf teknis, serta angkatan kerja wanita masih kurang.

Permasalahan lainnya, di Sumatera Barat jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak, seperti data yang dikumpulkan oleh Dirjen pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM jumlahnya mencapai kurang lebih 375 anak baik laki-laki maupun perempuan. Tapi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti Sumatera Utara 6.061 kasus

dan Jawa Tengah 2.280 kasus. Tapi angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Propinsi Maluku Utara 30 kasus dan Papua Barat 42 kasus.

Anak yang berhadapan dengan hukum menunjukkan bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh anak tidak hanya disebabkan oleh tindakan orang per orang tetapi juga dapat disebabkan oleh sistem yang dibuat oleh manusia, seperti halnya sistem hukum.

Data anak berhadapan dengan hukum menurut jenis kelamin Tahun 2008 yang didapat dari Dirjen pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM untuk Provinsi Sumatera Barat meliputi tahanan anak laki-laki 263 orang, perempuan 9 orang, untuk anak didik pemasyarakatan, terdiri dari anak sipil, anak negara dan anak pidana. Anak didik pemasyarakatan yang berstatus anak negara laki-laki 24 orang, berstatus anak pidana laki-laki 374 orang dan perempuan 1 orang.

4. Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan bidang pemuda dan olah raga memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pemberdayaan dan prestasi olah raga. Hal itu merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai salah satu rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga selama RPJMD ke 1, telah memberikan kemajuan yang cukup berarti dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan pemuda dan olahraga pada RPJMD ke 2 Sumatera Barat.

Berbagai kemajuan yang dicapai di bidang pemuda, antara lain;

- a. Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) pemuda, yaitu APS penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari 46,96 persen pada tahun 2005 menjadi 55,50 persen pada tahun 2008; APS penduduk usia 19-24 tahun, meningkat dari 12,23 persen pada 2005 menjadi 14,35 pada 2008.
- b. Meningkatnya program peran serta kepemudaan dalam berbagai kegiatan seperti; a). Paskibraka, b). Pramuka, c). Siswa/Osis.
- c. Percepatan/Akselerasi program sekolah sehat, pada TP UKS, UKS SD/MI, UKS SMP/MTs/UKS SMA/MA/K, UKS PONPES dan UKS PAUD.
- d. Meningkatnya kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Hal ini ditandai oleh banyaknya sarjana pelopor pembangunan yang turun ke nagari-nagari di Sumatera Barat.

Berbagai kemajuan pembangunan di bidang olahraga, antara lain ditandai oleh;

- a. Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama di satuan pendidikan.
- b. Meningkatnya program pemasyarakatan olahraga seperti; a). pembinaan atlet dari 0% pada tahun 2005 menjadi 28,02 % tahun 2009. b). Penggalan Potensi Atlet pelajar dari 0% pada tahun 2005 menjadi 40,13 % pada tahun 2009. c). Penggalan Potensi Atlet Klub Olahraga dari 0% tahun 2005 menjadi 19,12 % tahun 2009. d). Penggalan Potensi Atlet Yuniior dari 0% pada tahun 2005 menjadi 15,92 % tahun 2009. e). Pembudayaan Olahraga Massal dari 0% pada tahun 2005 menjadi 26,27 tahun 2009.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah penyelesaian substansi masalah kemiskinan dan kebodohan secara sistemik dengan menggerakkan segenap lingkungan dan pelaku melalui pengelolaan kegiatan yang bersifat bottom-up, partisipasi, akuntabel terpadu dan berkelanjutan.

Pemberdayaan memberi peran kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai aktor "yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya". Konsekuensinya, pembangunan yang berpusat pada rakyat memberikan nilai yang sangat tinggi pada inisiatif lokal dan sistem-sistem untuk mengorganisasi diri sendiri melalui satuan-satuan organisasional yang berskala manusiawi dan komunitas-komunitas yang mandiri.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membantu masyarakat agar dapat menolong diri mereka sendiri, atau upaya untuk memimpin masyarakat agar belajar memimpin diri mereka sendiri, sehingga masyarakat tersebut dapat memecahkan masalahnya sendiri sesuai dengan kemampuan sumberdaya lokal yang ada dalam masyarakat tersebut. Program pemberdayaan hendaknya menyentuh tiga level pemberdayaan, yakni: 1) pemberdayaan pada level individu, berupa pengembangan potensi dan keterampilan; 2) pemberdayaan pada level

kelompok / organisasi, yakni yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi kelompok dalam pembangunan; serta 3) pemberdayaan pada level kesisteman, yakni berwujud meningkatnya kemandirian masyarakat baik secara ekonomis, sosiologis maupun politis.

Pemberdayaan masyarakat desa/nagari yang telah dilaksanakan selama periode RPJMD pertama dalam agenda mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan. Melalui agenda mempercepat tingkat kemiskinan telah diperoleh penurunan jumlah penduduk miskin dari 550.250 jiwa pada tahun 2006 menjadi 429.250 jiwa pada tahun 2009. RTM penerima bantuan juga menurun dari 312.640 RTM tahun 2006 menjadi 257.412 RTM pada 2008. Namun pada agenda memberdayakan nagari sebagai basis pembangunan terlihat bahwa kegiatan Penataan Administrasi, Keuangan dan Aset Nagari, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perantau Dalam Pembangunan Nagari, dan pengembangan Lembaga Keuangan Nagari (BPR dan LPN) belum terlaksana sepenuhnya sesuai harapan.

Disamping itu, bagi Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, pemberdayaan usaha mikro juga menjadi fokus perhatian, terlihat dari komitmen pemerintah untuk meluncurkan kredit tanpa bunga kepada masyarakat yang merupakan spesifiknya Sumatera Barat yaitu Kredit Mikro Nagari (KMN) yang direalisasikan melalui APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota mulai tahun 2007.

Pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro tidaklah mudah mengingat jumlah usaha mikro di Sumatera Barat cukup besar dan sulit didata. Menurut Survey Ekonomi Tahun 2006 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah usaha mikro kecil berjumlah lebih kurang 57.000 unit. Didalam pelaksanaannya program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro sebagian besar tergabung kedalam program/kegiatan urusan pertanian, kelautan perikanan, industri, perdagangan serta koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Capaian kinerja pembangunan pemberdayaan usaha mikro cukup sulit untuk diukur, karena ketersediaan data usaha mikro sangat minim, namun dengan meningkatnya pelaku usaha mikro yang dilatih setiap tahunnya selama kurun waktu 2006 – 2008 serta meningkatnya jumlah bantuan sarana usaha dan modal yang disalurkan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah serta BUMN/BUMD dan swasta, maka tentunya terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas usaha mikro, sehingga tidak lagi hanya untuk sekedar bertahan hidup bagi pelakunya.

6. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kealpaan dalam membangun dan meningkatkan perpustakaan, baik sarana maupun pelayanannya, berarti menutup sebagian sumber belajar warga masyarakat. Secara langsung dan tidak langsung mengganggu pembentukan dan pembinaan karakter individu yang matang dalam segala aspeknya serta mencederai pembangunan karakter bangsa. Penyediaan perpustakaan yang memadai dan dapat di akses oleh semua warga masyarakat sebenarnya telah diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Untuk itu tidak perlu diragukan lagi pentingnya peran perpustakaan dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara demokratis menuju masyarakat madani, di samping sebagai pelestari nilai budaya dalam masyarakat yang terus berubah dan berkembang.

Sumatera Barat dengan jumlah penduduk 4,8 juta pada tahun 2010 sesungguhnya membutuhkan ketersediaan perpustakaan dalam jumlah yang relatif cukup banyak sebagai sumber dan media mentransformasikan ilmu pengetahuan, namun tidak dapat dipungkiri dewasa ini perpustakaan negara, perpustakaan nagari dan perpustakaan sekolah kurang memadai sesuai dengan tuntutan dan pengguna jasa baik dari kuantitas maupun kualitas. Demikian juga pelayanan yang di berikan. Oleh karena itu, pembangunan dan peningkatan perpustakaan sangat diperlukan dalam upaya peningkatan insan manusia dan membangun minat baca masyarakat. Hal itu merupakan bagian integral dari pembangunan Sumber Daya Manusia seutuhnya sebagai salah satu rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat Sumatera Barat.

7. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi atau lazim disebut sebagai UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi), menjadi isu sentral dalam program pemulihan ekonomi nasional dewasa ini. Ekonomi kerakyatan diartikan sebagai sistem perekonomian dimana kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi anggota masyarakat, hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat sementara penyelenggaraan kegiatan ekonomi juga berada dibawah pengendalian dan pengawasan anggota masyarakat.

Berlandaskan pengertian ekonomi kerakyatan tersebut diatas, maka diharapkan adanya peningkatan peran dari usaha kecil dan menengah serta individu wirausaha dalam kegiatan ekonomi. Namun upaya peningkatan peran tersebut terkendala oleh banyaknya kelemahan yang melekat dalam usaha kecil baik industri maupun perdagangan dan jasa sehingga memerlukan bantuan perkuatan yang sekarang sering disebut sebagai upaya perberdayaan UMKMK.

Kontribusi UMKMK terhadap pembentukan PDB dan PDRB sudah cukup besar namun memperlihatkan pertumbuhan yang berfluktuasi selama periode 2004-2008. Di tingkat nasional kontribusi output UMKMK terhadap pembentukan PDB Indonesia secara rata-rata dalam periode tersebut mencapai 53,41 % sementara kontribusi UMKMK terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat secara rata-rata adalah sebesar 26,87 %. Perkembangan capaian nasional dan daerah Sumatera Barat di bidang kontribusi UMKMK terhadap PDRB dapat disimak di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Perbandingan Output UMKMK Terhadap PDB/PDRB Indonesia dan Sumatera Barat Tahun 2004 – 2008 (dalam %)

% Output UMKMK Thdp PDRB	2004	2005	2006	2007	2008	Rata2 Kontribusi	Rata2 Pert.
Capaian Nasional	55,40	53,90	53,49	53,60	52,70	53,41	-1,23
Capaian Sum.Barat	25,43	24,29	25,30	32,47	-	26,87	9,34

Sumber Data : Bappenas RI, Laporan EKPD Sumatera Barat 2009

Kontribusi output UMKMK terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat dalam kurun waktu 2004 – 2007 menunjukkan peningkatan sebesar 9,34 % yang mengindikasikan bahwa sektor UMKMK mengalami pertumbuhan yang cukup berarti dan hal itu tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat di provinsi Sumatera Barat.

Gambaran mengenai perkembangan koperasi dan UKM di daerah Sumatera Barat selama periode 2006 – 2009 dapat dilihat pada tabel 2.17

Tabel 2.17
Perkembangan Koperasi di Sumatera Barat Tahun 2006 -2009

Tahun	Jumlah Koperasi (unit)	Jumlah Anggota (orang)	Rata-rata (Jumlah anggota/ kop)	Waserda (unit)	Vol.Usaha Waserda (Rp jt)	Rata-rata modal (Rp jt/ kop)
2006	3.254	536.068	165	286	56.998	230,2
2007	3.388	560.845	166	274	60.659	156,5
2008	3.424	540.418	158	265	57.762	285,7
2009	3.475	560.521	162	284	58.267	336,8

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009/2010

Dari segi jumlah badan usaha dan jumlah anggota dapat disimpulkan bahwa perkembangan koperasi cukup baik selama ini namun bila dilihat tingkat partisipasi anggota dan mutu pengelolaan koperasi, ternyata kondisinya tidak begitu baik. Sementara itu perkembangan UKM di daerah Sumatera Barat dapat disimak dari perkembangan industry kecil pangan, sandang, kimia & bangunan, logam & elektronik, kerajinan dan bengkel dan disajikan dalam tabel 2.18

Tabel 2.18
Perkembangan UKM di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2009

Tahun	Unit Usaha	T.Kerja (orang)	Vol.Uusaha (Rp jt)	Nilai Investasi (Rp jt)
2006	41.222	140.480	1.578,9	253,7
2007	42.483	147.002	1.665,4	297,8
2008	43.853	152.174	2.037,3	332,8
2009	35.391	132.895	2.167,2	628,5

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009/2010

Jumlah UKM cukup signifikan dengan penyerapan tenaga kerja yang juga cukup besar dimana secara rata-rata setiap UKM dapat menyerap 4 orang pekerja yang juga berarti bagi penyerapan tenaga kerja di Sumatera Barat. Namun demikian data diatas juga mengungkapkan rendahnya potensi perkembangan UKM mengingat rendahnya volume usaha dan investasi.

8. Perumahan dan Permukiman

Sejak tahun 2005 sampai saat ini, Sumatera Barat mengalami kejadian gempa bumi yang beruntun, baik dengan intensitas rendah dan tinggi. Kejadian tahun 2005, 2007, telah meninggalkan kerusakan sarana dan prasarana serta kerugian harta dan benda bagi masyarakat. Untuk kejadian terakhir yaitu gempa tahun 2009 saja, perkiraan kerusakan dan kerugian pasca bencana terparah terjadi pada komponen perumahan dengan nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp.15,41 triliun. Sektor infrastruktur lainnya mengalami kerusakan dan kerugian mencapai Rp.963 miliar, sektor social Rp.1,52 triliun, sektor ekonomi Rp.2,3 triliun, dan lintas sektor (sub-sektor pemerintahan dan lingkungan) menderita kerusakan dan kerugian sebesar Rp.674,6 miliar, sehingga total nilai kerusakan dan kerugian tercatat Rp 20,86 triliun.

Selain itu, sesuai hasil pemutakhiran data pada tanggal 28 Oktober 2009 oleh Pemerintah, total jumlah rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 249.833 unit dengan rincian: 114.797 unit rumah rusak berat, 67.198 unit rumah rusak sedang dan 67.838 unit rumah rusak ringan. Selain rumah juga telah merusak sarana dan prasarana publik lainnya, termasuk

kerusakan sejumlah gedung pemerintahan, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, hotel dan gedung/perkantoran keuangan dan perbankan.

Hasil dari observasi dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kualitas rumah bahwa dari rumah-rumah yang hancur dan rusak berat setelah terjadinya gempa 30 September 2009 yang lalu, terjadi pada umumnya pada rumah yang secara struktural bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis. Artinya rumah-rumah tersebut dibangun dengan tidak memperhatikan persyaratan teknis bagi rumah yang aman terhadap bencana gempa.

Permasalahan lain dalam sektor perumahan adalah masih tingginya backlog perumahan yang harus dipenuhi. Dengan backlog atau perbedaan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan yang masih besar tahun 2010, di Sumatera Barat, menyebabkan beban pemerintah dan pengembang semakin meningkat untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah di tahun berikutnya. Selain itu pada beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Barat, cenderung makin besarnya kawasan perumahan yang kumuh, yang memerlukan perhatian pihak yang terkait untuk melakukan peningkatan mutu perumahan tersebut. Kawasan tersebut ditandai dengan tidak lancarnya saluran drainase, sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan baik, air bersih atau minum yang tidak secara kontinue tersedia serta tata kelola ruang yang tidak terencana dengan baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang memasukkan faktor perumahan sebagai salah satu indikator, menempatkan Indonesia di urutan 107 dari 175 negara. Untuk Sumatera Barat, dibandingkan dengan Provinsi lainnya menempati urutan ke 9 dari 33 provinsi di Indonesia. Dari sisi investasi, pembangunan perumahan di Indonesia masih ketinggalan (dimana masih dibawah 5% dari PDB), sementara Malaysia dan Amerika pada tahun 2002 saja sudah mencapai mencapai 27,7% dan 45,3%.

Infrastruktur perumahan dan permukiman yang juga sangat mendukung kelangsungan dan kenyamanan hunian adalah drainase dan persampahan. Kondisi drainase saat ini beragam antar kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini terkait dengan topografi setempat. Di daerah yang terletak pada dataran tinggi drainasenya lebih lancar dibandingkan dengan dataran rendah. Keadaan ini terjadi karena sistem drainase yang dibuat relatif sama, sehingga kelancarannya lebih tinggi di daerah yang topografinya tidak datar. Kemudian saluran drainase sering mampet karena budaya masyarakat yang masih membuang sampah ke dalam saluran

drainase, disamping relatif rendahnya pemeliharaan saluran tersebut. Sistem pengelolaan limbah rumah tangga di Sumatera Barat masih sederhana dengan mengalirkan saluran air limbah rumah tangga ke saluran drainase. Sementara penampungan tinja dilakukan dengan membangun tangki septik pada masing-masing rumah tangga. Jika sudah penuh, mobil penyedot yang dikelola pemda atau swasta mendatangi tempat tersebut dan membuangnya pada tempat tertentu. Sebagian di antaranya telah mempunyai instalasi pengolahan limbah. Pertambahan penduduk yang semakin tinggi dengan aktifitas yang meningkat, menyebabkan pengelolaannya perlu ditingkatkan dan direncanakan antisipasinya untuk masa datang.

Secara umum pengelolaan sampah dilakukan adalah dengan mengumpulkan sampah rumah dalam kantong plastik atau karung dan ditempatkan di depan rumah. Kemudian petugas mengumpulkannya dalam *Tempat Penampungan Sementara* (TPS) yang ditempatkan di setiap kelurahan atau RW. Selanjutnya truk sampah mengangkutnya ke *Lokasi Pengolahan Akhir* (LPA). Penanganannya sederhana dengan membakar sebagian tumpukan sampah dan dijadikan kompos. Permasalahan umum dihadapi adalah bercampurnya sampah organik dan an-organik. Hal ini menyebabkan pengolahan lebih lanjut menjadi sulit. Pemisahan ini seyogyanya dilakukan mulai dari rumah tangga sampai ke tempat pembuangan akhir. Dengan cara ini teknologi pengolahan sampah yang lebih efektif dan efisien dapat dilaksanakan.

Dalam era otonomi daerah ini, pembangunan perumahan dan permukiman dilaksanakan swasta, masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota. Bila melihat fenomena tersebut maka dapat diperkirakan bahwa masa mendatang, kebutuhan akan perumahan dan permukiman akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, kemajuan pembangunan daerah dan peningkatan teknologi. Persoalan lain adalah meningkatkan kebutuhan atas sarana dan prasarana bagi perumahan dan permukiman seperti: jaringan air, listrik, telekomunikasi, saluran limbah, persampahan, jalan dan transportasi, dan lainnya. Sehingga sangat perlu menetapkan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman.

9. Komunikasi dan Informasi

Dari pengalaman selama ini di Indonesia, banyak pranata komunikasi dan informasi pada masa lalu dikontrol ketat oleh penguasa, sehingga mereka dapat dikendalikan. Keadaan itu terjadi karena penguasa mengembangkan

sistem kekuasaan birokrasi otoriter (*authoritarian bureaucratic state*) yang memposisikan seluruh pranata komunikasi sebagai pendukung kekuasaan. Saluran-saluran komunikasi dan pusat-pusat penyebaran informasi berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah, sensor dilakukan dengan ketat, monopoli posisi untuk melakukan interpretasi disentralisir guna mempertahankan hegemoni dan sekaligus mematahkan resistensi. Oleh karena itu, pada saat ini perkembangan pembangunan sangat ditentukan juga oleh perkembangan bidang komunikasi dan informasi. Globalisasi informasi dan gerakan reformasi telah memaksa semua pihak (pemerintah, swasta, masyarakat) yang bergerak di bidang komunikasi dan informasi merumuskan kembali dan menata ulang posisi, peran, cara kerja dan bentuk-bentuk pelayanannya. Arus globalisasi dan gerakan reformasi secara paradigmatik telah mengubah konsep dan praktek di bidang komunikasi dan informasi. perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini secara mendasar telah membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam.

Untuk Sumatera Barat, bidang komunikasi dan informatika sedang berkembang, membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Keberadaan komunikasi dan informatika sangat diperlukan, terutama karena Sumatera Barat, yang rawan terhadap bencana yang jika terjadi bencana bisa memutuskan hubungan transportasi, sehingga pilihan penggunaan media telekomunikasi dan informasi menjadi hal sangat diperlukan.

10. Hukum dan Hak Azasi Manusia

Berangkat dari visi dan misi pembangunan daerah Sumatera Barat dalam bidang Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, terutama untuk menciptakan jaminan perlindungan hukum dan HAM, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2006- 2010, pengembangan produk hukum, serta penegakan hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat telah dicapai beberapa kemajuan.

Dalam periode jabatan Gubernur hasil Pilkada tahun 2005 (sampai bulan Juni 2010) telah dihasilkan berbagai produk hukum daerah, baik dalam bentuk Peraturan Daerah sebanyak 60 buah, Peraturan Gubernur sebanyak 488 buah, dan Keputusan Gubernur sebanyak 2.321 buah serta Instruksi Gubernur sebanyak 18 buah, sebagai bagian untuk mendukung

pencapaian misi pembangunan daerah. Dengan memperhatikan prioritas pembangunan hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam pelaksanaan RPJMD dengan telah dihasilkan berbagai produk hukum dimaksud, juga merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan urusan yang khusus/khas dimiliki oleh Sumatera Barat. Walaupun disadari di luar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, maka Keputusan Gubernur dan Intruksi Gubernur merupakan instrumen hukum yang secara tidak langsung berhubungan dengan pembangunan bidang hukum.

Apabila dilihat dari sisi lain, keberhasilan dalam membentuk peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai bentuk produk hukum yang bersifat pengaturan (*regeling*) pada dasarnya diupayakan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahun 2005-2025. Apabila dianalisis dari berbagai produk hukum daerah dimaksud, khususnya peraturan daerah yang dihasilkan dalam periode jabatan Gubernur tersebut diatas (sampai bulan Juni 2010) sebanyak 60 buah, secara kuantitatif memang relatif sedikit, tetapi secara kualitatif telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan program pembangunan di Sumatera Barat dalam aspek, ekonomi, sosial dan budaya serta pembangunan lainnya.

Sebagai bahan analisis lanjutan, maka beberapa materi Peraturan Daerah (Perda) akomodatif terhadap pengembangan nilai-nilai lokal sehingga cukup efektif, seperti Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, Perda Nomor 3 tahun 2007 tentang Pendidikan Al-quran, Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat, dan Perda Nomor 11 tahun 2001 tentang Pemberantasan Maksiat, Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009), serta Perda lainnya. Peraturan Daerah yang mendukung kegiatan ekonomi seperti Perda Nomor 2 tahun 2006 Pembinaan dan Pengembangan perkoperasian, Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang Investasi pemerintahan Daerah yang diamanatkan dalam RPJMD 2006-2010 telah dapat diwujudkan. Kemudian selama tahun 2010 (data sampai Juni 2010), telah dihasilkan sebanyak 7 buah peraturan daerah. Salah satu yang terpenting di antaranya adalah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Perda Nomor 2 Tahun 2010).

Walaupun berbagai produk hukum daerah telah dapat dihasilkan, namun beberapa permasalahan masih menjadi tantangan dalam pembangunan hukum terutama dalam pembentukan Perda, pada umumnya Perda tersebut dibuat tanpa melalui kajian akademis dan belum partisipatif. Dalam bidang kesadaran hukum, pengetahuan masyarakat akan hukum cukup meningkat baik, tetapi kesadaran masyarakat tetap masih rendah. Langkah harmonisasi hukum, sinkronisasi hukum dalam menciptakan produk hukum daerah belum menunjukkan hasil yang signifikan, hal itu ditandai banyaknya produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Hal itu mempunyai korelasi langsung bahwa masih lemahnya profesionalisme dalam perancangan produk hukum di daerah.

Persoalan penegakan hukum masih dikeluhkan oleh banyak pihak, independensi peradilan masih dipertanyakan terutama oleh lembaga swadaya masyarakat yang kritis manakala terdakwanya menyangkut pejabat pemerintah dan anggota legislatif. Persoalan Hak Asasi Manusia masih merupakan persoalan yang harus diatasi dalam pembangunan masa datang, baik hak asasi berkaitan dengan hak milik, hak pendidikan dan pekerjaan dan lain-lain.

Walaupun pembangunan hukum terutama melalui pembentukan Peraturan Daerah, serta penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia telah dilakukan, termasuk pengawasan terhadap berbagai produk hukum Kabupaten dan Kota, pembinaan dan pengembangan jaringan informasi dan dokumentasi hukum. Namun perlu upaya peningkatan dalam menghasilkan produk hukum yang lebih baik dan berkualitas, melalui melibatkan masyarakat, pengkajian akademis, pembinaan sumberdaya aparatur perancang perundang-undangan, pengkajian produk hukum yang melanggar HAM, pengembangan jaringan informasi hukum. Untuk penegakan hukum yang optimal, perlu dilakukan koordinasi antar berbagai aparatur penegak hukum, termasuk penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi yang merupakan kewenangan dari daerah, terutama dalam penegakan peraturan daerah. Peningkatan budaya hukum masyarakat, juga perlu dioptimalkan melalui pendidikan hukum dan sosialisasi berbagai produk hukum yang dibentuk.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025, bahwa sasaran pembangunan bidang hukum diarahkan pada pembangunan materi hukum, struktur, dan kelembagaan serta budaya hukum. Pembangunan materi hukum dilakukan melalui kebijakan pembaharuan produk-produk hukum daerah untuk

menyesuaikan dengan perubahan hukum nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan dan pemantapan desentralisasi, demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejalan dengan hal ini perlu pula dilakukan transformasi berbagai nilai-nilai kebajikan Minangkabau ke dalam produk-produk hukum daerah sebagai bagian dari pembangunan materi hukum. Disamping itu, perlu pula dilakukan pembangunan struktur atau kelembagaan hukum dalam upaya penegakan hukum, serta diarahkan pada upaya terwujudnya aparatur pemerintah daerah dan masyarakat yang sadar hukum dan menghormati hak-hak asasi manusia.

11. Pemerintahan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005- 2025, yang kemudian dijabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat agenda pembangunan bidang pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan "Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik" dengan berbagai prioritas program yang akan dicapai, terutama berkaitan dengan: Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara makro penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada provinsi merupakan gambaran keseluruhan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada seluruh kabupaten dan kota yang merupakan bagian integral dari Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal itu pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan di provinsi sangat ditentukan oleh keterpaduan kebijakan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Pembangunan penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan agenda sangat strategis karena merupakan lokomotif bagi pencapaian agenda RPJM lainnya. Penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan bidang otonomi dan pemerintahan umum, dan administrasi keuangan dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih mantap dan sesuai dengan prinsip yang terkandung pada *good governance*. Program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah koordinasi penyelenggaraan, penyelenggaraan pelayanan, pengawasan, pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Secara umum dapat digambarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, telah dilakukan berbagai penataan kelembagaan melalui peraturan daerah, sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Terwujudnya Peningkatan kemampuan pemerintahan daerah juga ditentukan oleh indikator peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), capaian terhadap hal ini dimana telah dilakupan peningkatan strata pendidikan aparatur baik S-3, S-2, S-1 dan DIII sesuai dengan kemampuan daerah. Untuk mewujudkan transparansi pemerintahan telah ditata Pola Rekrutmen pegawai dalam 3 tahun terakhir lebih objektif Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk tidak ada nepotisme dalam penerimaan pegawai dan selanjutnya pemeriksaan terhadap seleksi penerimaan pegawai melibatkan Perguruan Tinggi.

Langkah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan memberikan kemudahan dalam pelayanan untuk kepentingan publik juga telah dicapai privatisasi BUMD yakni dengan ditetapkannya berbagai peraturan daerah. Langkah itu adalah untuk mengurangi peran pemerintah dan menciptakan profesionalisme dalam pengelolaan kekayaan daerah, peraturan daerah tersebut antara lain adalah :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).
- b. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penataan PT ATS.
- c. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Grafika.
- d. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian PT Dinamika.

Agenda penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada RPJMD 2006-2010 telah memperlihatkan peningkatan terhadap kemampuan

pemerintah dan itu terlihat dari capaian kinerja, tetapi untuk promosi pegawai yang duduk pada jabatan, mutasi pegawai/aparatur yang akan menduduki jabatan, aspek transparansi dan profesionalisme pengisian jabatan masih banyak dipersoalkan dan dikritisi karena dirasakan masih belum dilakukan secara terbuka dan belum berbasis kompetensi.

Pembangunan prioritas peningkatan kemampuan pemerintahan telah dilakukan dengan menetapkan berbagai kebijakan daerah dalam hal ini penetapan SOTK yang lebih efisien, kebijakan swastanisasi fungsi pemerintahan, transparansi pengisian jabatan publik dan rekrutmen pegawai dengan cara penyempurnaan manajemen pegawai, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Namun, pelaksanaan prioritas ini masih perlu ditingkatkan karena masih banyak hal yang perlu dicapai untuk mewujudkan *good governance*, seperti antara lain :

- a. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
- b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan;
- c. Masih belum optimalnya standarisasi baik untuk rekrutmen pegawai, dalam penentuan jabatan publik (promosi).
- d. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintahan dan antar instansi.
- e. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan dan jenis, dan sifat pekerjaan;
- f. Terbatasnya kualitas SDM aparatur sehingga dapat mengganggu kinerja pemerintahan
- g. Sistem insentif/perbaikan penghasilan yang belum didasarkan atas beban kerja, tanggung jawab dan kompetensi/kecakapan, kerajinan aparatur;
- h. Terbatasnya SDM pengelola Diklat dan belum terpenuhi semua spesialisasi/mengajar terutama keuangan dan pembangunan.

Upaya pembangunan pada prioritas pelayanan publik pada beberapa jenis pelayanan publik telah dilakukan antara lain melalui penggunaan teknologi informasi/elektronik seperti layanan pengadaan barang dan jasa yang dikenal dengan *electronic procurement (e-procurement)*. Partisipasi publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, telah dilakukan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol

terhadap pemerintah. Masyarakat dapat mempertanyakan segala persoalan tentang pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui media masa.

Pembangunan dalam bidang pelayanan publik secara umum telah dilakukan perbaikan dengan penetapan standar pelayanan, penetapan kebijakan pelayanan, penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan dan pelibatan masyarakat dalam kontrol pelayanan publik, namun masih terdapatnya beberapa hal yang harus dibenahi. Namun, pengembangan manajemen pelayanan publik, peningkatan pengembangan partisipasi, pengembangan sistem informasi penduduk sesuai dengan amanat RPJM perlu dicapai sesuai agenda yang ditetapkan.

12. Perencanaan Pembangunan

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (*participatory planning*). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan mencakup lima pendekatan, yaitu : Politik; Teknokratik; Partisipatif; Atas-bawah (*top-down*); dan Bawah atas (*bottom-up*).

Sedangkan perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana;

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, secara umum, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat cukup mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

- a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, SKPD Lembaga masyarakat lainnya, organisasi profesi, dan sektor swasta;
- b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- c. Terselenggaranya forum SKPD, dan Forum Musrenbang;
- d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
- b. Tersedianya hasil-hasil kajian dan dokumen perencanaan, meliputi: RPJPD, RPJMD RTRW, RKPD, KUA-PPAS, data base pembangunan, data base kemiskinan, dan data-data pembangunan serta kajian-kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
- c. Fasilitasi berbagai forum *multistakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
- d. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui rapat-rapat koordinasi dan *focused group discussion* (FGD);
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Selama lima tahun terakhir perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan tersebut adalah disamping membuat perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, RKPD, dan KUA/PPAS), juga telah membuat perencanaan

yang bersifat khusus, misalnya perencanaan pembangunan bidang Ekonomi antara lain Penyusunan *Grand Design* Industri Unggulan Sumatera Barat, Kajian Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD), Bidang Sosial Budaya antara lain Penyusunan Database Perencanaan Pendidikan berbasis spasial, Bidang Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup antara lain Perencanaan pengembangan kawasan konservasi lingkungan hijau asri dan lestari.

Tabel 2.19
Data Perencanaan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Jenis	Jumlah dokumen				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2006-2010	1	-	-	-	-
2	Penyusunan Ranperda RPJMD Tahun 2006-2010	-	1	-	-	-
3	Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025	-	1	-	-	-
4	Penyusunan Ranperda Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025	-	-	1	-	-
5	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1	1	1	1	1
6	Penyusunan KUA-PPAS APBD	1	1	1	1	1
7	Penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD	-	1	1	1	1
8	Penyusunan Buku Tujuh Agenda Pembangunan Sumatera Barat	1	-	-	-	-
9	Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada) Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Aksi Daerah	-	1	-	-	-

Sumber Data : Bappeda Propinsi Sumatera Barat tahun 2010

13. Pengembangan IPTEK

Perkembangan kegiatan penelitian dan pengembangan di Sumatera Barat yang dikelola oleh sebuah Badan Litbang baik diperguruan tinggi maupun oleh lembaga litbang lainnya yang telah menghasilkan temuan dan berbagai rekomendasi untuk dimanfaatkan oleh lembaga dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program pembangunan. Pada Tabel dibawah dapat dilihat perkembangan hasil penelitian dari tahun 2006 – 2010.

Tabel 2.20
Perkembangan Jumlah Judul Penelitian di SumateraBarat Tahun 2006-2009.

No	Bidang/Jenis	Jumlah Judul Penelitian			
		Tahun			
		2006	2007	2008	2009
1.	Riset Murni	195	243	221	123
2.	Riset Aplikatif	109	154	104	142
	Jumlah	304	397	325	265

Sumber Data : Data sementara Stakeholder terkait bidang Litbang Sumatera Barat Tahun 2009

Secara umum hasil-hasil penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga Litbang dan perguruan tinggi belum dimanfaatkan oleh dinas dan instansi terkait. Lembaga-lembaga pemerintah belum merasakan adanya kebutuhan terhadap hasil penelitian dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dalam bidang masing-masing.

Kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan nilai tambah proses produksi usaha kecil menengah masih rendah. Usaha kecil dan menengah, yang merupakan usaha dominasi di Sumatera Barat, masih mengandalkan proses produksi dengan teknologi yang konvensional, sehingga nilai tambah proses produksi masih sangat rendah malahan sebagian besar produk usaha masyarakat dijual dalam bentuk produk primer tanpa melalui pengolahan dengan teknologi yang berbasis IPTEK.

Publikasi dan sosialisasi hasil litbang masih terbatas yang disebabkan oleh relatif kecilnya jurnal ilmiah yang terakreditasi di Sumatera Barat. Demikian pula teknologi yang telah dihasilkan dari kegiatan litbang tidak banyak masyarakat dan kalangan dunia usaha yang memanfaatkannya untuk kepentingan peningkatan hasil usahanya. Disamping itu hasil penelitian perguruan tinggi dan lembaga-lembaga litbang pada taraf keilmuan telah cukup banyak malah sudah ada yang mengajukan paten namun tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya, sehingga hasil penelitian tersebut baru digunakan penemuan sebagai sekedar tambahan kredit untuk naik pangkat. Manfaat bagi masyarakat belum banyak dirasakan.

Budaya ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum berkembang dalam masyarakat, hal ini bisa dilihat dari kondisi masyarakat yang cenderung konsumtif, lebih suka membeli dan memakai produk yang dihasilkan pihak lain ketimbang menghasilkan karya inovasi yang dihasilkan sendiri. Demikian juga dari lembaga-lembaga birokrasi masih banyak kebijakan dan program yang dicanangkan tidak didasarkan pada hasil litbang yang umumnya membutuhkan waktu, serta belum dialokasikannya dana penelitian yang memadai.

Koordinasi dan sinergi lembaga penelitian dalam menghadirkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah masih lemah. Perguruan tinggi melaksanakan kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan arahan para penyandang dana. Demikian juga balai penelitian sebagai perpanjangan tangan litbang departemen pusat melaksanakan penelitian sesuai arahan pusat. Sebagian dari dinas provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota juga melaksanakan penelitian, tetapi

sampai saat ini belum ada koordinasi antara lembaga tersebut untuk mengarahkan kegiatan penelitian bagi kepentingan agar produk yang dihasilkan lebih bermanfaat.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas dan dalam upaya memperkuat daya saing produk di daerah maka diperlukan sinergi pengembangan dan penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) maupun Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

14. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, baik secara nasional maupun Daerah. Penyebab terjadinya kemiskinan antara lain karena penduduk mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi; keterbatasan akses modal, sarana produksi, pemasaran, peningkatan kuantitas dan kualitas produk; pengaruh eksternal seperti lonjakan kenaikan harga BBM, tarif, dan regulasi lain yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa serta semakin terbatasnya kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada RPJMD Tahun 2006-2010, telah ditetapkan indikator kemiskinan yaitu penduduk miskin dan Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan (berdasarkan 14 indikator, menurut data PPLS 06). Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin sebesar 12,51 % dan RTM sebanyak 312.640 KK atau sebesar 29,28 %, yang dijadikan sebagai sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.

Percepatan penanggulangan kemiskinan antara lain dilakukan melalui penguatan lembaga Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) baik Provinsi maupun daerah kabupaten/kota, peningkatan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program/Kegiatan penanggulangan kemiskinan baik Nasional, Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, berdasarkan data BPS, mengalami kenaikan dari tahun 2006 sampai dengan 2008 dari laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,14% tahun 2006 menjadi 6,37% pada tahun 2008. Hal ini berdampak kepada capaian penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Pada tahun 2006 tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 12,52% dengan jumlah penduduk miskin 550.251 jiwa dengan garis kemiskinan Rp. 146.781 perkapita / bulan. Pada tahun 2007, tingkat kemiskinan mencapai 11,90% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 529.200 jiwa dengan garis kemiskinan

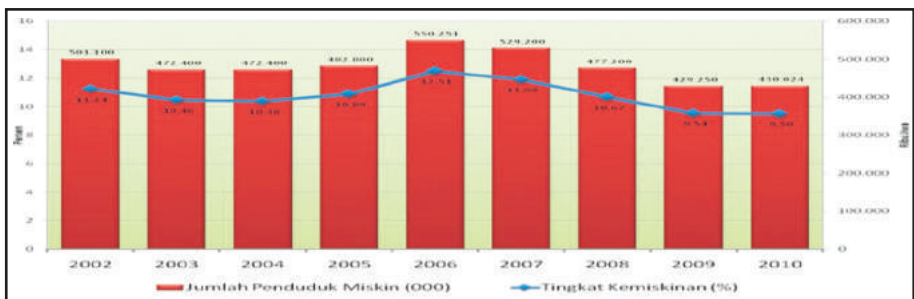
Rp.180.669 perkapita/bulan dan pada tahun 2009, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mencapai 9,54% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 429.250 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 217.649 perkapita / bulan. Tren penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat 2006-2009 mencapai 0,6% pertahunnya. Namun pada tahun 2009, laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat mengalami penurunan secara signifikan, hal ini dikarenakan pada tanggal 30 September 2009, Sumatera Barat dan sebagian besar Kabupaten/Kota yang berada dipesisir pantai barat Sumatera mengalami bencana Gempa Bumi sehingga mengakibatkan tingkatkemiskinan di Sumatera Barat dan pada tahun 2010 (kondisi Maret), dapat diturunkan sedikit menjadi 9,5% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 430.024 jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 230.823 perkapita / bulan.

Capaian tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tersebut dari tahun 2006-2010 selalu berada dibawah rata-rata Nasional dimana pada tahun 2010, tingkat kemiskinan di Nasional mencapai sebesar 13,3%. (pada gambar 2.6). Selain itu, tingkat pengangguran di Sumatera Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2006 yang mencapai 11,87% menjadi 7,9% pada tahun 2009,dan pada tahun 2010 menjadi 6,95%.

Tabel 2.21
Persandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran & Kemiskinan Antara Nasional dengan Sumatera Barat

	2005		2006		2007		2008		2009	
	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7	5,73	5,5	6,14	6,3	6,34	6,1	6,37	4,5	4,16
Pengangguran (%)	11,24	13,34	10,28	11,87	9,11	10,31	8,39	8,04	7,87	7,90
Kemiskinan (%)	15,97	10,89	17,75	12,51	15,42	11,90	15,42	9,80	14,15	9,54

Sumber Data : RPJMN 2010-2014

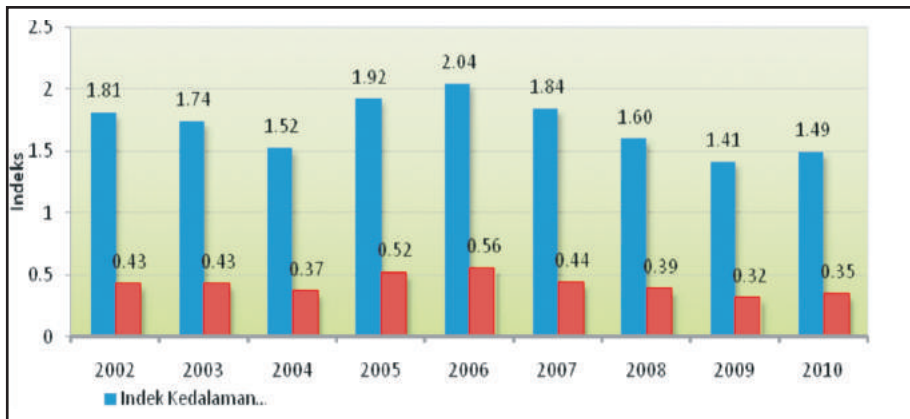


Sumber Data : Susenas Panel BPS, berbagai edisi penerbitan.

Gambar 2.6
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2002 – 2010

Berdasarkan BPS Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tahun 2006 sebesar 12,51% dan menjadi 9,50% pada tahun 2010 (maret) atau penduduk miskin sebesar 430.024 jiwa (trend 0,6% per tahun).

Pada perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Sumatera Barat (Gambar 2.7) menunjukkan kecenderungan penurunan dari 2006 sd. 2009 dan sedikit meningkat di tahun 2010. Secara umum indek ini dipengaruhi oleh penurunan di perkotaan yang menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan penduduk miskin di perkotaan lebih baik daripada di pedesaan.



Gambar 2.7
Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keperahan (P2)
Kemiskinan Tahun 2002 – 2010

Kondisi Indeks keparahan kemiskinan tidak jauh berbeda dengan indeks kedalaman kemiskinan . Indeks ini sedikit meningkat di tahun 2009-2010. Indeks keparahan kemiskinan untuk daerah perkotaan lebih rendah daripada daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi penduduk miskin di daerah perkotaan memiliki disparitas yang lebih rendah

Tabel 2.22
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan
Nasional dan Sumbar Tahun 2010-2015

	2010		2011		2012		2013		2014		2015
	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar	Nas	Sumbar	Sumbar
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5-5,6	5,93	6,0-6,3	6,37	6,4-6,9	6,56	6,7-7,4	6,78	7,0-7,7	6,99	7,21
Pengangguran (%)	7,6-7,6	6,95	7,3-7,4	6,59	6,7-7,0	6,22	6,0-6,6	5,86	5,0-6,0	5,50	5,13
Kemiskinan (%)	12,0-13,5	9,5	11,5-12,5	8,55	10,5-11,5	8,15	9,5-10,5	7,75	8,0-10,0	7,35	6,95

2.3.2 Pelayanan Penunjang Urusan Pilihan

1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Secara umum peran sektor pertanian dalam pembangunan di Sumatera Barat tahun 2006- 2009 terlihat pada Tabel 2.23

Tabel 2.23
Peranan Pertanian dalam Pembangunan
di Sumatera Barat 2006-2010

No	Aspek	2006	2007	2008	2009	2010
1	Angkatan Kerja Yg Bekerja pada lapangan pekerjaan pertanian (%)	45,46	47,93	47,25	46,50	44,10
2	Kontribusi Pertanian dalam PDRB (%)	25,26	24,67	24,46	23,92	23,40
	Tanaman Pangan dan Hortikultura	13,11	12,52	12,56	12,36	12,42
	Perkebunan	5,61	5,61	5,45	5,03	5,18
	Peternakan	2,04	2,02	1,97	1,97	1,97
	Kehutanan	1,50	1,56	1,56	1,50	1,43
	Perikanan	3,01	2,96	2,94	2,98	2,81
3	Nilai Tukar Petani	74,21	75,19	105,09	103,73	105,60
4	Produktivitas Tenaga kerja Pertanian (Juta Rp)	9,32	8,88	9,13	9,66	-

Sumber Data : SKPD Terkait

Dalam sektor pertanian, yang memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan nilai PDRB Sumatera Barat diantaranya adalah sub sektor tanaman pangan dan Hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Ke empat sub sektor ini perlu dikembangkan ke arah peningkatan nilai tambah produknya dengan mendorongnya melangkah ke agroprosesing dan agroindustri. Pengembangan industri unggulan berbasis produk pertanian rakyat untuk peningkatan kualitas perekonomian Sumatera Barat, juga merupakan upaya peningkatan kesejahteraan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan nelayan. Gambaran umum produksi komoditi utama pertanian di Sumatera Barat tahun 2006-2009 dapat dilihat pada Tabel 2.24

Tabel 2.24
Produksi Beberapa Komoditi Utama Pertanian di Sumatera Barat
Tahun 2006 – 2010 (Ton)

NO	KOMODITI	2006	2007	2008	2009	2010
1	PADI	1.889.489	1.938.120	1.965.634	2.105.790	2.211.248
2	JAGUNG	202.298	223.233	351.843	404.799	354.262
3	DAGING SAPI	15.561,7	16.367,9	17.609,4	18.322.349	19.426.163
4	TELUR	58.346,5	57.339,8	60.288,5	65.361.496	76.464.967
5	SUSU	2.502,6	1.092,4	3.209,0	3.293.752	4.073.406
6	KARET	89.631	89.714	103.880	10.993	10.993
7	KELAPA SAWIT	694.234	771.406	794.167	833.483	850.237
8	KAKAO	18.721	20.917	32.359	40.250	49.769

Sumber Data : SKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang terdiri dari tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat merupakan komoditas sangat prospektif untuk dikembangkan, mengingat potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, ketersediaan teknologi, serta potensi serapan pasar ekspor yang terus meningkat.

Produk hortikultura Sumatera Barat juga merupakan komoditi andalan karena disamping untuk memenuhi kebutuhan lokal, Komoditi hortikultura terutama sayuran dan buah-buahan telah di pasarkan keluar Sumatera Barat. Sebagian besar sayuran Sumatera Barat juga untuk memenuhi kebutuhan propinsi tetangga.

Secara umum produktifitas komoditi utama pangan mengalami kenaikan, kecuali Kacang tanah dan kacang hijau yang menurun dari tahun 2008 dan 2009 (Tabel 2.25).

Tabel 2.25
Produktivitas Beberapa Komoditi Tanaman Pangan
Tahun 2006-2010 (kwintal/ha)

No	Komoditi	2006	2007	2008	2009	2010
1	padi	45,22	45,75	46,59	47,91	48,02
2	jagung	47,04	51,7	55,65	57,11	59,00
3	Kedele	12,23	12,81	12,97	16,87	16,00
4	kacang tanah	12,62	13,46	13,16	11,92	12,59
5	kacang hijau	11,52	11,78	11,69	11,67	11,75
6	ubikayu	170,63	185,78	194,27	230,06	349,85
7	ubijalar	129,66	136,98	151,44	186,55	238

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Pada tahun 2009 juga telah dilakukan pembinaan penumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian organik melalui DPA-SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat dan Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) dalam bentuk demplot-demplot, peningkatan penggunaan kompos jerami, pengembangan Kawasan Pertanian Organik di beberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Tanah Datar, Solok, Agam, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, dan Padang Panjang, serta pelaksanaan magang ke Istitut Pertanian Organik Aie Angek. Aktivitas dan operasional yang dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan / sentra produksi pertanian organik selama tahun anggaran. Pengembangan pertanian organik tidak hanya terfokus pada komoditi hortikultura, melainkan juga diterapkan pada komoditi tanaman pangan terutama padi.

2. Perkebunan

Sumatera Barat memiliki potensi cukup besar di bidang perkebunan, karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan iklim yang sesuai. Komoditi unggulan perkebunan Sumatera Barat adalah karet, pala, kelapa sawit, kopi, dan kakao. Sedangkan yang ditetapkan sebagai komoditi spesifik daerah Sumatera Barat adalah casia vera, gambir, kelapa dan nilam. Usaha perkebunan mempunyai peran cukup besar dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan serta devisa untuk negara, juga berpeluang besar menggerakkan kegiatan ekonomi di Sumatera Barat karena hasilnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk. Pemasaran hasil perkebunan Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir ini juga meningkat cukup signifikan, terlihat dari ekspor mencapai nilai (90,77 % dari nilai ekspor pertanian pada tahun 2008).

Usaha dibidang perkebunan cukup kompleks, diusahakan oleh petani kecil (perkebunan rakyat), pengusaha besar swasta dan perkebunan Negara (perkebunan Besar). Perkebunan Rakyat diusahakan di lahan usaha dengan status hak milik petani atau tanah kaum /ulayat, dan umumnya diusahakan oleh pemilik beserta keluarganya. Rata-rata luas kepemilik kecil dan tersebar tidak merata, sehingga tidak memenuhi skala ekonomi (*economic of scale*). Luas tanaman perkebunan di Sumatera Barat tahun 2008 adalah 728.535 Ha, tahun 2009 menjadi 782.815 Ha dengan kenaikan seluas 54.280 Ha (7,45 %). Perkembangan luas dan produksi komoditi utama perkebunan dapat dilihat pada Tabel 2.26

Tabel 2.26
Perkembangan Luas Dan Produksi Komditi Utama Perkebunan Tahun 2008-2010

NO	KOMODITI	LUAS (Ha)			PRODUKSI (Ton)		
		2008	2009	2010	2008	2009	2010
1	Kelapa sawit	327.653	344.351	353.300	794.167	833.485	850.237
2	Kelapa Dalam	91.272	91.767	91.672	82.595	85.715	86.459
3	Kopi	22.883	22.986	47.764	33.339	37.991	37.621
4	Casia vera	38.566	38.741	38.701	36.648	19.827	19.782
5	Cengkeh	6.954	6.987	6.997	1.741	1.749	1.717
6	Gambir	19.663	18.335	18.910	13.930	13.932	13.919
7	Kakao	61.464	84.254	101.014	32.359	40.250	49.769
8	Karet	151.032	166.719	175.985	103.880	133.816	134.401
9	Pinang	9.035	9.007	9.077	4.655	4.834	4.845
10	Nilam	2.976	2.997	3.880	396	397	416

Sumber Data : Dinas Perkebunan Prov. Sumbar Tahun 2009

Penambahan produksi tahun 2009 sebesar 819 ton (+0,07 %), terjadi pada Perkebunan Rakyat (PR), sedangkan pada Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) naik 21 ton dan PT. Perkebunan Negara (PT.PN) produksinya naik 1 ton. Namun demikian, Produktivitas komoditi perkebunan masih jauh dari potensi produksi dari masing-masing komoditi,

untuk itu perlu inovasi baru untuk meningkatkan produksi terutama pada aspek budi daya serta peran aktif penyuluh dalam penerapan teknologi budi daya.

Produktifitas yang rendah menyebabkan pendapatan petani komoditi perkebunan juga relatif rendah. Penyebabnya antara lain karena: pemakaian benih unggul masih rendah, pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) belum maksimal, pemanfaatan kemampuan lahan masih belum optimal, penggunaan teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan belum sepenuhnya sesuai petunjuk teknis, jaringan pemasaran belum luas, kualitas mutu produk belum mampu bersaing di pasar internasional karena belum sesuai dengan permintaan pasar.

Disamping masalah produktifitas, Komoditi perkebunan sebagai komoditi ekspor juga menghadapi persaingan yang cukup besar di pasaran, yaitu dari negara-negara penghasil komoditi yang serupa dan dipasarkan di pasar yang sama. Persaingan semakin ketat karena jumlah negara-negara penghasil komoditi yang sama bertambah, juga dengan adanya produk-produk sintesis yang bersifat substitusi dengan proses produksi yang sangat efisien.

Dalam bidang pengolahan hasil tanaman perkebunan, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan adalah pengadaan bantuan alat pengolahan beberapa komoditi perkebunan seperti alat pengolahan kakao terpadu, alat penyulingan nilam, alat pengolahan gambir dan alat pengolahan kelapa terpadu.

Disamping itu, Sumatera Barat akan dijadikan sebagai salah satu sentra pengembangan tanaman kakao di wilayah barat Indonesia yang dicanangkan oleh Wakil Presiden pada tanggal 3 Agustus 2006.

3. Peternakan

Secara umum program pengembangan usaha peternakan di Sumatera Barat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan asal hewani, meningkatkan mutu generik, populasi dan produksi daging ternak sehingga mampu menyediakan protein hewani asal ternak seperti daging, telur dan susu untuk dikonsumsi memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun provinsi tetangga. Khusus untuk usaha peternakan sapi, dalam peningkatan populasi secara umum dapat dilakukan melalui bioteknologi reproduksi kawin suntik/inseminasi buatan (IB), merupakan upaya penerapan teknologi tepat guna yang dalam peningkatan mutu genetik dan jumlah ternak serta pembentukan bibit ternak yang berkualitas.

Populasi dan produksi daging ternak di Sumatera Barat tahun 2008 memperlihatkan perkembangan yang cukup berarti. Populasi ternak besar sebanyak 671.207 ekor, ternak kecil sebanyak 245.766 ekor, dan unggas sebanyak 26.580.470 ekor. Produksi daging Sumatera Barat tahun 2008 paling banyak berasal dari ternak unggas sebesar 25.161.890 kg, ternak besar yaitu 20.266.119 kg, ternak kecil sebesar 3,580,084 kg.

Capaian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak adalah terlaksananya pemberantasan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk wabah Penyakit Hewan Menular (PHM) pada wilayah 5 Kab/Kota, Pemberantasan Penyakit *Septichemia Epizootica* (SE) di Kab. Mentawai serta Terkoordinasinya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit Flu Burung (AI) pada 8 Kabupaten/Kota. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan adalah dalam rangka melindungi wilayah Sumatera Barat terhadap penyakit hewan eksotik dan melindungi konsumen serta memberikan keamanan dalam mengkonsumsi produk pangan asal hewan; mengetahui ada tidaknya pencemaran lingkungan peternakan sehingga berkurangnya kasus penyakit hewan ternak.

Capaian selanjutnya adalah terlaksananya pengambilan spesimen darah dan faeces sapi; Tersedianya obat-obatan pada Klinik dan Labor Keswan, terlaksananya pembinaan ke kawasan agropolitan dalam rangka persiapan kelompok tani dalam kegiatan agropolitan di Kab. Agam, Tanah Datar, Solok, Pessel, Padang Pariaman dan 50 Kota terlaksananya pertemuan deklarasi Brucellosis.

4. Kelautan dan Perikanan

Sub sektor Kelautan dan Perikanan merupakan sektor ekonomi yang dapat dijadikan sebagai andalan masa depan Provinsi Sumatera Barat, karena sub sektor ini dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sebagai pemasok kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, serta sebagai tulang punggung ekspor komoditi non migas daerah ini. Pertimbangan ini didasarkan, karena Sumatera Barat memiliki kawasan laut yang sangat luas yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, memiliki 185 pulau-pulau kecil, serta kawasan budidaya (baik budidaya air tawar maupun budidaya laut) yang juga cukup luas. Disamping potensi lautan, Sumatera Barat juga mempunyai potensi perikanan budidaya (baik laut maupun daratan) yang juga cukup luas. Potensi ini akan dapat mendongkrak produksi perikanan daerah ini guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, sekaligus meningkatkan pendapatan / kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah / devisa Negara.

Propinsi Sumatera Barat terletak pada kawasan yang sangat strategis dari segi kawasan laut sebagai daerah penangkapan ikan yaitu pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Samudera Hindia seluas 186.580 Km², ditunjang dengan panjang garis pantai 375 Km, dimulai dari Kabupaten Pasaman Barat hingga ke Kabupaten Pesisir Selatan. Jika dimasukkan garis pantai pulau-pulau di Kabupaten Kepulauan Mentawai maka panjang keseluruhan pantai di Propinsi Sumatera Barat mencapai 2.420 Km.

Potensi ikan diperairan laut Sumatera Barat tercatat sebesar 248.708,40 ton (289.936 ton) dengan produksi ikan tahun 2008 sebesar 187.043,0 ton menjadi sebesar 191.343,9 ton pada tahun 2009 atau sejak 5 tahun terakhir produksi meningkat rata-rata sebesar 16,97% pertahun, dengan perkataan lain pada tahun 2009 produksi perikanan laut sudah mencapai 75,22% dari potensi perikanan.

Komoditi yang menjadi unggulan dari perikanan laut, yaitu ; ikan tuna, dengan potensi lestari sebesar 43,343 ton dan ikan cakalang yang terdapat di perairan barat Sumatera Barat adalah sebesar 64.965 ton, pada tahun 2008 tingkat pemanfaatannya baru sekitar 14,6% dari potensi lestarinya. Dengan demikian potensi perikanan tuna masih mempunyai peluang besar untuk dikembangkan, dan dapat dijadikan sebagai program prioritas pengembangan perikanan didaerah ini. Disamping ikan tuna masih terdapat jenis-jenis ikan ekonomis penting lainnya, seperti kakap, kerapu, udang, dll.

Disamping potensi sumberdaya perikanan laut, masih terdapat potensi kelautan lainnya, diantaranya:

- a. Hutan mangrove (Hutan bakau), merupakan ekosistem utama kehidupan yang penting diwilayah pesisir dan laut. Potensi hutan bakau (mangrove) adalah sebesar 3.700 Ha, yang terdapat sepanjang pesisir Kabupaten Pasaman sampai Kabupaten Pesisir Selatan), dan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sekitar 15.000 Ha);
- b. Terumbu Karang, ekosistem ini mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis, dimana terdapatnya berbagai jenis ikan yang bernilai ekonomis penting. Di perairan Sumatera Barat terdapat seluas 40.804 Ha Terumbu Karang, dengan tingkat kerusakan sudah mencapai 80 %,
- c. Padang lamun dan rumput laut, ekosistem ini juga mempunyai prospek untuk dikembangkan dan dibudidayakan secara berkelompok oleh masyarakat pesisir.

- d. Pulau-pulau kecil, jumlahnya mencapai 185 pulau besar dan kecil yang sudah diberi nama dan diusulkan kepada PBB, juga mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikelola dan dikembangkan. Beberapa kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat potensial untuk dikembangkan budidaya laut, pariwisata bahari, pertambangan, jasa-jasa kelautan lainnya.

Potensi perikanan darat di Sumatera Barat cukup besar, antara lain terdiri dari potensi perairan danau, perairan sungai, telaga maupun perairan umum lainnya. Aktivitas budidaya dilakukan melalui; budidaya kolam air deras, air tenang serta budidaya di keramba / jaring apung dan disawah. Luas areal dan produksi perikanan darat; dimana perikanan perairan umum seluas 51.645,6 Ha, sedangkan luas areal budidaya adalah 8.449,7 Ha.

Tabel 2.27
Perkembangan Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2006-2010

No	Jenis Kegiatan	2006	2007	2008	2009	2010	Pertumb (%)
A	Perikanan Tangkap	130.100,5	196.448,8	195.585,0	199.895,4	202.599,5	16,01
1.	Penangkapan di Laut	123.527,4	187.088,8	187.043,0	191.344,9	192.658,4	16,79
2.	Penangkapan di Perairan Umum	6.373,1	9.360,0	8.542,0	8.550,5	9.941,1	3,98
B	Perikanan Budidaya	41.870	54.787,2	65.653	84.864,7	115.602,15	21,64
1.	Budidaya Air Tawar	41.824,9	54.750,2	58.614,3	84.794,6	115.577,37	22,4
2.	Budidaya Air Payau	5,1	3,5	4,8	10,0	12,11	31,8
3.	Budidaya Laut	40	33,5	33,9	60,1	12,67	4386,3

Sumber Data : Laporan tahunan dan Perikanan dalam Angka, Dinas Kelautan dan Perikanan Dalam beberapa tahun terbitan

Perikanan air tawar dilakukan pada daerah yang mempunyai sumber air yang banyak seperti di Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2008 adalah sebesar 58.614 ton dan sebesar 84.794 pada tahun 2009, atau mengalami loncatan kenaikan yang sangat tinggi yaitu sebesar 45%. Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budidaya selama 5 tahun terakhir adalah 21,64%

Untuk menunjang perikanan budidaya telah tersedia sumber-sumber benih ikan yang dilaksanakan oleh berbagai BBI.

Berdasarkan produksi diatas, maka tingkat konsumsi ikan masyarakat Sumatera Barat pada tahun 2008 sudah mencapai 26,20 kg / capita / tahun, lebih rendah dari konsumsi rata-rata nasional. Angka ini baru mencapai sekitar 75 % dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004 menetapkan sebesar 35 kg / capita / tahun.

Dilihat dari armada penangkapan ikan di laut, secara kuantitatif terjadi penurunan rata-rata sebesar 12 %/tahun dalam masa 4 tahun terakhir, dimana pada tahun 2006 tercatat sebesar 9.950 unit, dan pada tahun 2009 menjadi 9.913 unit. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya program pengadaan motor long tail di berbagai kabupaten / kota, sehingga terjadi pengalihan dari perahu tanpa motor menjadi perahu motor tempel. Hal yang sama juga terjadi armada penangkapan di perairan umum, Lihat Tabel 2.28.

Tabel 2.28
Perkembangan Armada Perikanan di Sumatera Barat Tahun 2006-2010

Jenis Armada	2006	2007	2008	2009	2010	Pertumbuhan (%)
A. Perikanan Laut	9.950	9.130	9.095	8.819	8.725	10,28
1.Perahu Tanpa Motor	5.623	4.023	3.793	3.215	3.093	-2,92
2.Motor Tempel	2.235	3.070	3.286	3.563	3.583	36,16
3.Kapal Motor	2.092	2.037	2.016	2.041	2.049	4,54
B. Perikanan Perairan Umum	5.803	2.557	2.340	2.365	3.470	-19,63
1.Jukung	208	216	114	1.183	625	223,58
2.Perahu Tanpa Motor	5.770	2.520	2.043	851	2.764	-37,15
3.Motor Tempel	33	37	25	25	81	-14,21
4.Kapal Motor	-	-	3	3	-	0

Sumber Data : Laporan Tahunan dan Perikanan Dalam Angka, Dinas Kelautan Perikanan Prov Sumbar. Dalam beberapa tahun terbitan

Seiring dengan pertumbuhan produksi perikanan, maka dari segi nilai produksi perikanan juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dalam 5 tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan sebesar 639 % per tahunnya. Peningkatan tersebut didominasi oleh produk perikanan laut, yaitu pada tahun 2009 sekitar 67% dari total nilai produksi perikanan Sumatera Barat, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7.55. Dari produksi perikanan tersebut pada tahun 2009 telah berhasil diekspor sebesar 723 ton ikan, dengan nilai Rp. 10,3 juta US \$. Ekspor komoditi perikanan selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan rata-rata sebesar 887 % / tahun. Kenaikan ini terutama karena hadirnya perusahaan industry perikanan PT. DEMPO dan berbagai perusahaan penangkapan ikan tuna.

Tabel 2.29
Perkembangan Nilai Produksi (Rp. Milyar)
dan Ekspor Hasil Perikanan (Rp. Milyar) Tahun 2006-2010

No	Jenis Kegiatan	2006	2007	2008	2009	2010	Pertumb (%)
1.	Perikanan Tangkap	3.194,4	3.403,0	3.061,4	3.089,9	202.599,5	1,52
a	Penangkapan di Laut	3.121,6	3.297,8	2.904,4	2.968,9	192.658,4	1,37
b	Penangkapan di Perairan Umum	72,8	105,2	157,0	121,0	9.941,1	12,75
2.	Perikanan Budidaya	607,8	646,1	766,8	1.599,5	2.058,7	43,33
a	Air Tawar	606,8	644,3	765,3	1.596,7	2.056,8	43,42
b	Tambak	0,204	0,087	0,266	0,179	0,388	22,81
c	Laut	0,677	1,702	1,234	2,555	1,452	44,02
3.	Ekspor						
	Jumlah (*000 kg)	593,0	496,2	391,0	723,3	1.122,9	639,94
	Nilai (*000 US \$)	2.279,3	992,4	4.292,0	10.288,4	7.848,15	887,19

Sumber Data : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Sumatera Barat, berbagai tahun

Dilihat dari segi sumberdaya manusianya, maka pada tahun 2009 tercatat sebanyak 150.940 orang yang bekerja dalam bidang perikanan, antara lain sebagai nelayan laut, nelayan perairan umum dan pembudidaya ikan (Lihat Tabel 2.30). Jumlah ini mengalami peningkatan setiap tahunnya rata-rata sebesar 1,13% setiap tahun. Jumlah terbanyak tercatat pada pembudidaya ikan, yaitu mendominasi sebesar 62,40% dari angkatan kerja perikanan. Dominasi ini juga selaras dengan target pengembangan produksi perikanan secara nasional, yaitu yang mengarah kepada produksi perikanan budidaya.

Tabel 2.30
Jumlah Tenaga Kerja Masyarakat Perikanan tahun 2006 – 2009

Angkatan Kerja	2006	2007	2008	2009	Pertumbuhan (%)
1.Nelayan Laut	34.220	34.220	34.220	34.984	0,58
2.Nelayan Perairan Umum	24.506	24.506	21.763	21.775	-10,04
3.Pembudidaya Ikan	81.678	82.825	84.027	94.181	4,23
Jumlah	140.404	141.551	140.010	150.940	1,13

Sumber Data : Laporan Tahunan Dinas Kelautan Perikanan Prov Sumbar, dari berbagai tahun

5. Ketahanan Pangan

Pangan adalah makanan/minuman yang berasal dari hayati, air dan bahan tambahan dalam proses pengolahan (PP. NO : 68 TAHUN 2002). Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/ atau pengawasan terhadap kegiatan proses produksi dan peredaran pangan sampai dengan siap di konsumsi masyarakat (PP 28 Tahun 2004).

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas Karbohidrat, Protein, Lemak, Vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya secara merata dan terjangkau (UU. N0.7/ 1996).

Peningkatan ketahanan pangan sebagai suatu sistim bertumpu kepada empat pilar, yaitu produksi, konsumsi, distribusi, dan penunjang seperti kelembagaan. Pengembangan ketahanan pangan adalah untuk terpenuhinya pangan dengan kondisi; Cukup, Berkelanjutan, Beragam, Bergizi, Berimbang, Aman, Merata. Terjangkau

Kondisi 2008 telah menghasilkan capaian antara lain berkembagnya perbenihan/pembibitan benih padi untuk seluas 4 ha, palawija 4 ton, kentang 0,5 ha dan bibit jeruk 19.000 batang , bibit rambutan dan mangga

1000 btg.di UPTD BBI Lubuk Minturun untuk memenuhi kebutuhan benih sebar oleh petani terutama benih padi, palawija dan hortikultura oleh Balai Benih Induk (BBI/BBU); Pengembangan Informasi Pasar (Pemberdayaan Kelompok Pangan melalui PENAS Tani XII di Palembang), Pencatatan Harga Pasar di Sentra 6 Lokasi di Pasaman Barat, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Kota Bukittinggi dan Pariaman, Pengiriman Harga ke RRI sehingga petani mengetahui tingkat perkembangan harga komoditi TPH setiap saat dan meningkatkan posisi tawar petani / produsen. Selanjutnya meningkatnya mutu dan keamanan pangan melalui pengawasan pupuk dan pestisida, terlaksananya penanggulangan serangan hama penyakit yang bersifat eksplosif di 19 Kabupaten/Kota, Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan serta Pendamping Pemberdayaan P3 A melalui pembinaan kelompok Petani Pemakai Air (P3A) dan pelatihan P3A.

Program ketahanan pangan ini juga menghasilkan pengembangan desa mandiri pangan dalam bentuk pembentukan kelompok desa mandiri pangan sebanyak 8 kelompok pada 2 Kabupaten, yakni Dharmasraya dan Pasaman dengan sasaran dengan dengan KK miskin minimal 30% dan kepada kelompok diberikan bantuan penguatan modal usaha; Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dalam bentuk pemberian LUEP kepada 108 LUEP gabah dan 14 LUEP jagung. Apresiasi diarahkan dalam rangka pengamanan penerapan Harga Pembelian oleh Pemerintah (HPP) minimal Rp. 2.000,-/kg (GKP), pengembangan dan peningkatan SDM petugas serta masyarakat tentang keamanan pangan dalam bentuk pembinaan terhadap petugas provinsi dan kabupaten kota, masyarakat produsen (kelompok tani dan pengusaha) dan konsumen.

Capaian program ketahanan pangan juga telah melaksanakan penyusunan database potensi produksi pangan Pemantauan analisis harga pangan masyarakat (Advokasi Penyusunan dan Koordinasi Pencapaian Target Tahunan Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2006-2010, pengembangan Lumbung Pangan Desa (Koordinasi Pengembangan kelembagaan Pangan) dalam bentuk pengembangan jaringan informasi, baik dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maupun dengan Provinsi tetangga; Pengembangan Lumbung Pangan Desa (pelatihan petugas kecamatan pembina lumbung pangan) dalam bentuk monitoring dan pembinaan terhadap kelompok penerima pinjaman Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pada 13 kabupaten/kota. Pelatihan penyusunan peta kerawanan pangan (FIA) untuk petugas FIA yang telah dilatih di 4 (empat) Kabupaten yakni Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat.

Walaupun telah dicapai beberapa kemajuan dalam pembangunan pertanian tetapi masih banyak permasalahan yang dihadapi, seperti: Masih belum optimalnya peningkatan produktivitas pada masing-masing komoditi, Masih rendahnya penerapan dan adopsi teknologi oleh petani, Lemahnya akses petani ke sumber modal, Masih lemahnya lembaga petani dan lembaga pendukung pertanian, Belum terpadunya di dalam pengelolaan pengembangan kawasan pertanian, Kapasitas SDM pelaku usaha pertanian dan penyuluhan belum memadai, Rendahnya pemanfaatan potensi pertanian dan peluang pasar, Lemahnya sistem jaringan distribusi sarana produksi, serta Terbatasnya prasarana penunjang pembangunan pertanian.

Dalam mengantisipasi kerentanan masyarakat miskin terhadap kebutuhan pokok terutama kebutuhan pangan, pemerintah mengeluarkan pemberian bantuan beras terhadap masyarakat miskin. Program bantuan pangan berupa pemberian beras bersubsidi dikenal dengan istilah Bantuan Beras Keluarga Miskin (Raskin). Selama 3 tahun pelaksanaan RPJMD sudah disalurkan sebanyak 109.650 ton yang sebar ke 462 titik pendistribusian di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, masing-masingnya tahun 2006 sebanyak 22.060 ton, tahun 2007 meningkat menjadi 32.870 ton untuk 247.255 RT miskin pada tahun 2007 ini pendistribusian tidak mencapai 100 % karena tidak terdistribusinya Raskin sesuai target di Kaupaten Kepulauan Mentawai, dan tahun 2008 menjadi 54.710 ton untuk 312.475 RT miskin. Untuk itu perlu pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Provinsi Sumatera Barat secara mendalam.

Ketersediaan energi dan protein untuk dikonsumsi cenderung meningkat setiap tahunnya. Tingkat pencapaian ketersediaan energi dan protein di Sumatera Barat sudah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan menurut PPH, sebagaimana tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Komposisi Ketersediaan Energi dan Protein
di Sumatera Barat Tahun 2005 - 2009

No.	Tahun	Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hr)			Ketersediaan Protein (Gr/kap/hr)		
		Pencapaian	Dianjurkan	(%)	Pencapaian	Dianjurkan	(%)
1	2005	4.238	2.500	169,5	86,13	52,0	165,6
2	2006	5.565	2.200	253,0	88,59	57,0	155,4
3	2007	5.744	2.200	261,1	91,30	57,0	160,2
4	2008	4.637	2.200	210,8	94,75	57,0	166,2
5	2009*)	4.898	2.200	222,6	103,32	57,0	181,3

Sumber Data : Badan Ketahanan Pangan Sumbar, 2009

Keterangan : *) angka sementara

Meskipun Sumatera Barat terlihat surplus dalam penyediaan bahan pangan, namun, kondisi kualitas konsumsi penduduk di Sumatera Barat masih berada dibawah standar skor PPH optimal sebesar 100. Berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan fluktuasi dimana pada tahun 2006 skor PPH sebesar 75,79. mengalami peningkatan di tahun 2007 dengan skor PPH sebesar 77,87 dan 2008 skor PPH sebesar 79,83, kemudian tahun 2009 mengalami penurunan kembali dengan skor PPH menjadi 76,93. Untuk itu masih perlu strategi mencapai kualitas konsumsi pangan ideal di Sumatera Barat.

6. Kehutanan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 422/KPTS-II/1999, kawasan hutan Sumatera Barat ditetapkan seluas 2,6 juta Ha, yang terdiri atas Hutan suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam (0,85 juta Ha), hutan lindung 0,91 juta Ha, hutan produksi terbatas 0,25 juta Ha, hutan produksi tetap 0,40 juta Ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi 0,19 juta Ha. Luasan kawasan hutan tersebut diatas meliputi seluas 61% wilayah provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data tersebut, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi merupakan kawasan yang paling luas.

Sesuai dengan usulan Provinsi Sumatera Barat terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan dalam rangka perubahan tata ruang luas kawasan hutan menjadi 57,2 % meliputi: Hutan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (0,77 juta Ha), hutan lindung 0,79 juta Ha), hutan produksi terbatas (0,23 juta Ha), hutan produksi tetap (0,36 juta Ha), dan hutan produksi yang dapat dikonversi (0,19 juta Ha). Berdasarkan data tersebut, kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi masih tetap merupakan kawasan yang paling luas.

Izin usaha dalam rangka pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam maupun hutan tanaman terdapat pada 5 (lima) kabupaten. Bentuk-bentuk hasil hutan yang dihasilkan Sumatera Barat adalah dalam bentuk Kayu Bulat, Kayu Olahan dan Hasil Hutan Bukan Kayu. Produksi hasil hutan berupa kayu bulat dari Sumatera Barat (dari IUPHHK, IPK, dan IPKTM), pada tahun 2005 adalah 257.287 m³, dan pada tahun 2009 produksi tersebut mengalami penurunan. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh karena adanya program pembatasan produksi hutan dalam rangka perlindungan lingkungan hidup.

7. Perindustrian

Pembangunan ekonomi Sumatera Barat dalam jangka panjang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 diarahkan kepada mewujudkan perekonomian yang produktif dan mampu bersaing di dunia global, maka dapat ditempuh dengan empat strategi yakni: (1). Meningkatkan usaha pertanian moderen dan agribisnis yang maju, (2). Melaksanakan kegiatan industri dan jasa yang efisien, (3). Menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata nasional dan Internasional, (4). Menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat pertumbuhan dan pintu gerbang pantai Barat Sumatera. Dalam kegiatan pengembangan industri dan jasa yang efisien, maka pada RPJMD II tahun 2010-2015 ini terutama dititikberatkan kepada: 1). Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sub sector perikanan terutama peningkatan sarana dan prasarana pendukung, kelembagaan usaha, 2), mengwujudkan kegiatan perdagangan yang mampu bersaing, 3). Pengembangan kewirausahaan yang mampu bersaing, dan pengembangan UMKM dan koperasi yang tangguh dan berdaya saing tinggi. 4). Pengembangan kewirausahaan dan manajemen usaha secara lebih intensif.

Berdasarkan kepada arahan RPJPD Sumatera Barat ini, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi Sumatera Barat pada saat sekarang dalam RPJMD II 2010-2015 adalah pengembangan industri pertanian dan melalui pengembangan kegiatan agroindustri dan agro bisnis, sebagai pengembangan industri unggulan Sumatera Barat.

Sementara itu, Perpres No: 28 Tahun 2008 tentang kebijakan industri nasional menetapkan 10 industri unggulan Sumatera Barat yakni: industri hasil laut, industri pengolahan kakao, industri pengolahan makanan ringan, industri kulit dan alas kaki, industri tekstil dan produk tekstil, industri gambir, industri minyak atsiri, industri maritim, industri semen, industri alsintan.

Dari sepuluh industri unggulan Sumatera Barat yang ditetapkan di atas, maka enam diantaranya adalah industri yang berbasis produk pertanian yakni agro industri dan agro bisnis. Tentu saja industri agro ini merupakan tahap awal dalam pengembangan industri di suatu daerah dalam menuju industri manufaktur lainnya. Perekonomian Sumatera Barat sampai saat ini masih berada pada tahap pengembangan industri pengolahan produk pertanian ini, terutama pada industri pengolahan produk perkebunan tanaman perenial.

Dalam struktur perekonomian Sumatera Barat, terdapat sebanyak 21 kelompok usaha industri (KBLI) yang memberikan sumbangan terhadap nilai PDRB Sumatera dalam sub sektor industri besar dan kecil. Diantaranya yang memiliki jumlah output yang besar dan jumlah ekspor yang tinggi itu adalah industri minyak dan lemak hewan, industri tekstil, pakaian, dan kulit, industri beras, industri semen dan industri makanan lainnya. Untuk lebih lengkapnya lihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.32

Kondisi Jumlah Output dan Ekspor Industri Pengolahan Sumatera Barat Tahun 2008

No	Jenis Industri	Jumlah Output (Rp Juta)	Jumlah Ekspor (Rp Juta)	Persentase Ekspor Terhadap Output
1.	Industri Pemotongan hewan	290,365.27	-	0.00
2.	Industri Pengolahan dan pengawetan makan	-	11,499.00	0.00
3.	Industri Minyak dan Lemak	3,871,817.52	1,983,741.49	51.24
4.	Industri Beras	2,883,729.33	737,315.39	25.57
5.	Industri Tepung	126,204.39	885.86	0.70
6.	Industri Gula	44,802.88	9,202.37	20.54
7.	Industri Makanan lainnya	1,707,057.35	332,239.71	19.46
8.	Industri Minuman	667,347.60	98,554.41	14.77
9.	Industri Pemintalan	1,441,982.45	177,468.28	12.31
10.	Industri Tekstil, Pakaian, Kulit	3,980,618.43	545,076.83	13.69
11.	Industri Bambu, kayu, dan rotan	334,813.93	99,227.15	29.64
12.	Industri Kertas	51,273.88	1,316.74	2.57
13.	Industri Pupuk dan Pestisida	41,094.93	-	0.00
14.	Industri Kimia	22,763.59	1,379.23	6.06
15.	industri barang karet dan Plastik	705,675.80	56,349.16	7.99
16.	Industri barang mineral dan logam	458,810.68	104,284.06	22.73
17.	Industri Semen	1,856,855.56	943,748.83	50.83
18.	Industri barang dan logam	62,380.05	6,613.27	10.60
19.	Industri Mesin dan alat-alat perlengkapan listrik	136,604.42	6,248.27	4.57
20.	Industri alat pengangkutan	8,381.68	1,536.84	18.34
21.	Industri barang lain yg belum digolongkan dimanapun	23,646.64	-	0.00
	Total	18,716,226.38	5,116,686.89	27.34

Sumber Data : Tabel I-O Sumatera Barat, BPS Sumbar 2008

Tabel 2.32 di atas memperlihatkan bahwa struktur industri pengolahan Sumatera Barat outputnya paling tinggi didominasi oleh 4 usaha industri yakni: industri tekstil, pakaian, kulit, industri minyak dan lemak hewan dan industri beras, serta industri semen. Namun output industri yang diekspor yang besar hanyalah industri minyak dan lemak hewan, industri semen dan industri beras, dan industri tekstil, pakaian, dan kulit. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kecilnya nilai tambah industri pengolahan Sumatera Barat ini diduga disebabkan karena rendahnya jumlah ekspor dari kelompok industri lain terutama ekspor ke negara lain. Sedangkan, kelompok industri yang outputnya besar tetapi, jumlah eksportnya kecil, diduga ditransaksikan ke wilayah provinsi tetangga seperti industri tepung, industri tekstil, pakaian, dan kulit.

Penetapan beberapa industri unggulan Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 sesuai dengan potensi industri dalam analisa input dan output seperti : industri tekstil dan produk tekstil, industri kulit dan alas kaki serta industri semen. Sedangkan untuk industri unggulan lainnya merupakan industri yang potensial yang akan dikembangkan di Provinsi Sumatera Barat.

Ke sepuluh Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari industri berbasis agro seperti : industri kakao, industri pengolahan hasil laut, industri gambir, industri makanan ringan, industri kulit dan alas kaki, industri minyak atsiri dan industri unggulan berbasis manufaktur seperti : industri semen, industri perkapalan, industri alsintan dan industri tekstil dan produk tekstil.

Disamping memiliki industri-industri unggulan, juga telah dikembangkan beberapan sentra-sentra industri potensial seperti : sentra industri bordir dan sulaman, sentra industri makanan ringan, sentra industri tenun, sentra batubata, sentra kerajinan, sentra perabot rotan dan terdapat satu klaster industri yang telah dikembangkan yaitu klaster industri semen.

Pengembangan industri pengolahan Sumatera Barat harus dimulai dari pengolahan produk pertanian masyarakat yang telah memberikan pendapatan yang luas kepada masyarakat selama ini. Produk unggulan pertanian yang mendatangkan aliran keuntungan kepada masyarakat petani.

8. Perdagangan

A. Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek penting dalam bidang perdagangan yang besar pengaruhnya terhadap pembangunan daerah. Kegiatan utama yang dilakukan adalah dalam bentuk ekspor dan impor. Pengalaman masa lalu di banyak negara menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri ini merupakan salah satu faktor penggerak yang sangat penting bagi peningkatan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan perkembangan permintaan di luar negeri. Dengan demikian, peningkatan perdagangan luar negeri dapat berfungsi sebagai faktor penggerak pertumbuhan ekonomi (*Export led Growth*) untuk suatu daerah maupun nasional dalam rangka meningkatkan proses pembangunan.

Perkembangan ekspor Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2006-2008 ternyata menunjukkan tendensi peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian pada tahun 2009 terjadi penurunan nilai ekspor yang cukup drastis. Kondisi ini terjadi sebagai akibat adanya *Krisis Finansial Global* yang mengakibatkan terjadinya penurunan drastis terhadap permintaan komoditi ekspor Sumatera Barat, khususnya karet, minyak sawit dan lilita manis. Disamping itu terjadinya gempa dengan kekuatan 7,9 skala Richter pada tahun 2009 juga telah mengakibatkan menurunnya kegiatan ekspor daerah sebagai akibat dari hancurnya beberapa kantor dan pergudangan perusahaan ekspor yang berada di Kota Padang. Tabel 2.33 memperlihatkan perkembangan kegiatan ekspor menurut negara tujuan.

Tabel 2.33
Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat Menurut Negara Tujuan
Tahun 2006-2009 (Dalam US\$)

No	Negara Tujuan	Tahun				Pertumbuhan (%)
		2006	2007	2008	2009	
1	Amerika	406,296	325,104	609,739	158,972	-26,9
2	India	204,069	160,943	674,432	489,744	33,9
3	Singapura	87,065.	583,334	355,591	179,406	27,3
4	Belanda	150,031	69,736	177,753	17,321	-51,3
5	China	107,582	27,265	180,124	187,564	20,4
6	Malaysia	17,049	28,977	54,819	55,933	48,6
7	Italia	15,559	1,081	10,368	17,652	4,3
8	Pakistan	13,383	7,035	59,312	7,278	-18,4
9	Negara Lainnya	141,955	230,470	262,451	262,451	22,7
	Jumlah	1,074,134	1,512.799	2,384,568	1,273,717	4,4

Sumber Data : BPS, Sumatera Barat Dalam Angka, beberapa terbitan.

Seperti terlihat pada Tabel 2.33 ternyata laju pertumbuhan nilai ekspor dalam periode 2006-2008 adalah 9,5 % dan menurun drastis pada tahun 2009. Sedangkan perkembangan ekspor menurut negara tujuan memperlihatkan bahwa telah terjadi pergeseran daerah pemasaran komoditi ekspor Sumatera Barat dari pasar tradisional di Amerika Serikat dan Eropa menuju Asia, khususnya India, Pakistan dan Malaysia. Pergeseran pemasaran ekspor ini juga dipicu oleh terjadinya Krisis Finansial Global pada tahun 2008 sehingga permintaan komoditi ekspor di Amerika dan Eropa mengalami penurunan drastis. Sungguhpun demikian, ekspor Sumatera Barat ke negara-negara ASEAN masih tetap rendah, kecuali Malaysia.

Bila dilihat perkembangan nilai ekspor Provinsi Sumatera Barat menurut kelompok komoditi pada tahun 2009, laju pertumbuhan nilai ekspor hasil pertanian ternyata cukup tinggi yaitu mencapai 41,8% rata-rata setiap tahunnya untuk periode 2006-2009. Dari ekspor hasil pertanian ini, ternyata ekspor biji coklat (cocoa beans) merupakan komoditi ekspor

utama daerah dengan kontribusi mencapai 79,4% sedangkan komoditi lainnya mempunyai kontribusi yang relatif kecil. Sedangkan dalam kelompok komoditi hasil industri, komoditi minyak kelapa sawit merupakan komoditi ekspor utama dengan kontribusi sekitar 63,8% dan disusul oleh crumb-rubber dengan kontribusi sebesar 21,2%. Sedangkan komoditi ekspor lainnya ternyata tidak terlalu penting dengan sumbangan yang sangat kecil. Tabel 2.34 menunjukkan perkembangan nilai ekspor Provinsi Sumatera Barat menurut komoditi untuk periode 2006-2009.

Tabel 2.34
Perkembangan Nilai Ekspor Sumatera Barat
Menurut Kelompok Komoditi 2006-2009 (Dalam 000 US\$)

No	Kelompok Komoditi	Tahun				Pertumbuhan (%)
		2006	2007	2008	2009	
A	Hasil Pertanian	15.914	24.900	53.118	64.378	41,8
1.	Biji Coklat	3.040	13.205	34.878	51.095	57,0
2.	Kulit Manis	6.104	7.588	8.712	5.005	-4,8
3	Biji Lainnya	146	356	4.731	5.403	100,4
4	Buah-buahan	2.107	2.291	2.076	1.010	-16,8
5	Hasil Pertanian Lainnya	4.517	1.460	2.721	1.865	-19,8
B	Hasil Industri	1.053.083	1.460.754	2.244.993	1.241.896	-4,2
1.	Minyak Kelapa Sawit	-	717.805	1.276.769	791.867	5,0
2.	Crumb-rubber	496.361	560.497	651.341	263.628	-14,6
3.	Minyak Biji Sawit	-	107.193	204.066	123.210	3,5
4.	Hasil Industri Lainnya	556.722	75.259	112.817	63.191	-42,0
C.	Hasil Tambang	5.137	27.145	86.457	37.983	64,9
1.	Batubara	4.219	26.758	83.783	30.147	63,5
2.	Hasil Tambang Lainnya	918	387	2.674	7.836	70,9
	Jumlah	1.074.134	1.512.799	2,384,568	1,273,717	4,4

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka, beberapa terbitan

Kalau dilihat komposisi jumlah nilai impor Sumatera Barat menurut jenis barang, ternyata sebagian besar dari barang impor tersebut adalah bahan penunjang kegiatan produksi dalam daerah seperti bahan mentah, bahan kimia, barang hasil industri dan mesin-mesin untuk perlengkapan pabrik dan pengangkutan. Sedangkan sisanya lebih banyak merupakan barang konsumsi seperti bahan makanan dan minuman.

Perkembangan kegiatan impor Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tendensi peningkatan yang cukup signifikan, mulai pada tahun 2007 dan 2008. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya terlihat adanya tendensi penurunan yang cukup berarti. Fluktuasi ini terutama akibat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998 karena menurun drastisnya kegiatan produksi dalam negeri sehingga kebutuhan akan barang impor juga otomatis menurun. Akan tetapi mulai tahun 2006 pemulihan ekonomi mulai terjadi dan hal ini terlihat dari mulai meningkatnya kegiatan produksi dalam negeri sehingga impor juga mulai menunjukkan tendensi kembali meningkat. Tabel 2.35 memberikan perkembangan nilai impor Sumatera Barat tahun 2006-2009.

Tabel 2.35
Nilai Impor Sumatera Barat Menurut Golongan Barang 2006-2009

Kode SITC	Golongan Barang	Tahun			
		2006	2007	2008	2009
0	Bahan Makanan dan Binatang Hidup	3.797	16.448	7.826	-
1	Minuman dan Tembakau	-	-	-	-
2	Bahan Mentah Tidak untuk Dimakan	3.276	8.129	36.042	1.890
3	Bahan Bakar Mineral, Pelumas dan Bahan terkait	-	-	278.536	302.103
4	Bahan Kimia	15.581	37.011	112.928	9.992
5	Barang Buatan Pabrik	8100	15.154	27.914	8.596
6	Perlengkapan mesin dan pengangkut	6.058	18.674	12.903	11.263
7	Barang-barang Lainnya	-	444	307	404
	Jumlah	36.812	95.861	476.457	346.247

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka tahun 2009/2010

Mengingat komoditi impor Sumatera Barat adalah barang-barang yang relatif berat untuk mendukung kegiatan produksi dalam negeri, kebanyakan kegiatan impor tersebut dilakukan melalui pelabuhan Teluk Bayur di Padang. Sedangkan kegiatan ekspor yang dilakukan melalui bandar udara minangkabau masih relatif kecil. Namun demikian, sebenarnya nilai impor Sumatera Barat yang dibawa melalui pelabuhan lain seperti: Tanjung Periuk (Jakarta), Belawan (Medan) dan Dumai (Pekanbaru) juga cukup besar karena adanya variasi dalam ongkos angkut dan muat barang di pelabuhan serta jadwal kedatangan kapal. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi ongkos transpor dan biaya muat bongkar di pelabuhan Teluk Bayur sangat penting artinya untuk meningkatkan kegiatan impor Sumatera Barat dimasa mendatang.

Dalam perdagangan luar negeri, kendala dan permasalahan pokok Sumatera Barat adalah masih rendahnya daya saing komoditi ekspor yang dapat dihasilkan daerah. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan relatif sulitnya dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah dan nilai ekspor daerah karena kalah bersaing dengan produk yang sama dihasilkan oleh negara dan daerah lainnya. Kesulitnya ini semakin serius dalam era globalisasi dewasa ini dimana tingkat persaingan di dunia internasional semakin tajam.

Rendahnya daya saing tersebut terutama disebabkan karena komoditi ekspor Sumatera Barat umumnya masih barang-barang hasil pertanian dan barang setengah jadi yang diproduksi dengan menggunakan teknologi produksi yang masih bersifat tradisional. Disamping itu, pola manajemen usaha yang digunakan oleh produsen dan pengusaha ekspor dalam daerah umumnya juga masih bersifat usaha kecil dan menengah dan usaha keluarga yang belum banyak menggunakan tenaga profesional terkait. Akibatnya, tingkat produktipitas menjadi rendah dan harga pokok rata-rata cenderung akan lebih tinggi sehingga daya saing produk menjadi rendah.

B. Perdagangan Dalam Negeri

Perkembangan kegiatan perdagangan dalam negeri Sumatera Barat dapat dilihat dari 3 indikator utama yaitu: perkembangan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), distribusi dan perkembangan harga 9 bahan pokok dan perkembangan kegiatan pengujian mutu barang. Melalui perkembangan pemberian SIUP akan dapat memberikan gambaran umum tentang banyaknya pengusaha yang meminta izin usaha baru dan pelaksanaan kemetrolagian dalam bentuk pelaksanaan tera baru dan tera ulang. Perkembangan distribusi serta harga barang akan dapat memberikan gambaran tentang volume perdagangan dalam negeri serta tingkat kestabilan harga. Sedangkan perkembangan pelaksanaan tera baru dan ulang menggambarkan perkembangan kegiatan pengujian barang sehingga mutu barang yang diperdagangkan akan menjadi lebih terjamin dan tidak merugikan konsumen.

Tabel 2.36
Perkembangan Jumlah Penerbitan SIUP di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2009

Tahun	PB	PM	PK	Jumlah
2005	235	543	4.619	5.397
2006	252	699	3.955	4.906
2007	343	990	3.616	4.949
2008	375	1.239	4.418	6.032
2009	341	705	4.336	5.382
Jumlah	1.546	4.176	20.944	26.666
Pertumbuhan (%)	9,6	6,7	-0.02	-0.01

Sumber Data : Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Perkembangan pemberian izin usaha perdagangan di Provinsi Sumatera Barat ternyata kurang menggembirakan. Seperti terlihat pada Tabel 2.36, bahwa SIUP yang telah dikeluarkan sejak tahun 2005-2009 telah berjumlah 26.666 Namun demikian, bila dilihat laju pertumbuhannya ternyata negatif yang berarti kegiatan perdagangan di Provinsi Sumatera Barat tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Bila dilihat pemberian SIUP tersebut menurut jenisnya ternyata perkembangan distribusi barang ditekankan pada distribusi 9 bahan pokok yang merupakan kebutuhan utama masyarakat secara umum, seperti; beras, minuman dan dan barang kebutuhan masyarakat lainnya. Barang-barang tersebut umumnya adalah hasil produksi dalam daerah dan impor baik dari daerah lain di Indonesia, maupun dari luar negeri. Sedangkan jenis barang kebutuhan lainnya umumnya merupakan peralatan mesin dan elektronik untuk kebutuhan rumah tangga yang umumnya di datang dari kota-kota besar di Jawa.

Data tentang distribusi sembilan bahan pokok sebegitu jauh tidak tersedia dengan baik. Namun demikian, dari gejolak harga akan dapat pula diketahui kondisi distribusi produk-produk tersebut. Bila harga cukup stabil, maka ini berarti bahwa distribusi barang tersebut cukup baik. Akan tetapi bila terjadi gejolak harga yang cukup tinggi maka hal ini memberikan indikasi bahwa distribusi barang belum baik dan banyak daerah yang mengalami kelangkaan barang sehingga memicu kenaikan harga.

Pada Table 2.37 ini, terlihat bahwa harga makanan meningkat berkisar antara 9%- 16,0% yang berarti lebih tinggi dari tingkat inflasi secara keseluruhan. Ini berarti bahwa kenaikan harga bahan makanan tersebut dapat dikatakan relatif tinggi yang mengidentifikasi adanya kendala dalam pengadaan dan distribusi barang kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Dengan demikian upaya untuk meningkatkan distribusi 9 bahan pokok tersebut keseluruh pelosok daerah Provinsi Sumatera Barat akan sangat penting sekali dalam pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri.

Tabel 2.37
Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2009

No	Jenis Barang	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	Pertumbuhan (%)
1	Beras							
	- IR. 42 Solok	L	5.079	6.067	6.770	6.774	8.053	12,2
	- Bukittinggi	L	5.080	6.903	7.250	7.500	7.766	11,2
2	Gula Pasir							
	- Dalam Negeri	Kg	6.386	6.840	6.600	6.500	8.981	8,9
	- Impor	Kg	5.648	6.881	-	-	-	-
3	Tepung Terigu							
	- Segi tiga Biru	Kg	4.040	5.005	6.100	7.500	7.474	16,6
4	Daging							
	-Daging sapi		39.331	49.837	52.000	60.000	60.094	11,1
	- Dagig ayam boiler	Kg	12.502	15.176	16.500	20.387	25.323	19,3
5	Telur ayam	Kg	13.500	16.156	15.200	13.500	13.505	0,1
6	Ikan Teri asin No. 2	Kg	19.513	20.843	28.200	31.226	31.830	13,0
7	Cabe merah keriting	Kg	13.213	15.130	18.000	21.935	17.552	7,4
8	Bawang Merah	Kg	7.975	8.865	9.550	10.465	11.707	10,1
9	Minyak Goreng							
	- Merek Bimoli	Lt/btl	7.542	10.681	11.500	13.210	13.074	14,7
	- Tanpa Merek	kg	4.804	7.670	7.200	7.103	8.311	14,7

Sumber Data : Renstra Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Kendala dan permasalahan pokok yang dihadapi pada perdagangan dalam negeri adalah relatif rendahnya daya saing produk yang dihasilkan oleh daerah Sumatera Barat. Permasalahan ini menjadi semakin serius sejak diberlakukannya sistem perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA) mulai tahun 2010. Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya produk-produk yang dihasilkan China umumnya lebih murah, tetapi mempunyai kualitas yang relatif lebih baik sehingga mempunyai daya saing yang relatif lebih kuat dibandingkan produk hasil produksi Sumatera Barat.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah pada dasarnya adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Indikator utama yang dapat digunakan untuk menentukan peringkat daya saing daerah tersebut antara lain adalah: (1) Kemampuan Ekonomi Daerah, (2) Ketersediaan Infrastruktur, (3) Iklim Investasi dan (4) Kualitas Sumberdaya Manusia. Dalam hal ini peringkat ditentukan secara komperatif antar provinsi yang ada di Indonesia sesuai dengan ketersediaan data.

Gambaran umum tentang daya saing daerah dapat diketahui dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh *Pusat Pendidikan dan Studi Kebangsentralan Bank Indonesia* (2002). Dengan melakukan sedikit modifikasi, yaitu hanya menggunakan hanya 4 indikator utama saja, maka rangkuman hasil studi tentang daya saing daerah tersebut adalah seperti terlihat pada Tabel 2.38. Pada tabel ini terlihat bahwa daya saing daerah Provinsi Sumatera Barat hanya terletak pada peringkat 16 dari 25 provinsi di Indonesia yang dinilai. Ini berarti bahwa peringkat daya saing Provinsi Sumatera berada dibawah rata-rata nasional yang berarti cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Provinsi yang mempunyai daya saing tertinggi adalah DKI Jakarta sedangkan provinsi sedang daya saing terendah adalah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Namun demikian, sangat disadari bahwa karena studi ini dilakukan pada tahun 2002 yang lalu, sehingga besar kemungkinan peringkat daya saing daerah ini sudah mengalami perubahan dewasa ini. Disamping itu, karena penilaian dilakukan berdasarkan aspek yang cukup luas dan sebagian tidak bisa dinilai secara kuantitatif, maka penilaian juga akan cenderung menjadi kurang tepat dibandingkan dengan kondisi sesungguhnya dilapangan.

Kondisi daya saing yang relatif rendah tersebut tentunya akan menyebabkan daya tarik investor untuk melakukan investasi di Sumatera Barat menjadi relatif kecil. Hal ini selanjutnya akan mengakibatkan pula relatif rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja di daerah, sehingga peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan juga akan relatif lambat. Dengan demikian terlihat bahwa upaya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Barat dimasa mendatang akan menjadi tantangan daerah yang cukup besar dan perlu segera dilakukan dalam rangka menggerakkan proses pembangunan

daerah secara lebih cepat dan terarah. Dalam kaitan dengan hal ini pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya perlu mendapatkan perhatian lebih besar dimasa mendatang.

Tabel 2.38
Peringkat Daya Saing Daerah Sumatera Barat di Indonesia

Provinsi	Kemampuan Ekonomi Daerah	Ketersediaan Infrastruktur	Iklm Investasi	Kualitas Sumberdaya Manusia	Peringkat Keseluruhan
DKI Jakarta	1	1	1	1	1
Kalimantan Timur	3	2	6	6	2
Jawa Timur	9	3	2	5	3
Jawa Tengah	4	9	8	3	4
Jawa Barat	2	13	5	4	5
DIY Yogyakarta	7	15	3	2	6
Bali	12	8	7	7	7
Sumatera Utara	6	7	11	8	8
Sulawesi Selatan	10	5	9	14	9
Riau	5	4	10	20	10
Kalimantan Tengah	8	12	15	18	11
Lampung	19	18	4	10	12
Jambi	20	22	13	17	13
Sumatera Selatan	14	16	14	11	14
Kalimantan Selatan	23	6	12	16	15
Sumatera Barat	16	14	17	13	16
Kalimantan Barat	11	20	19	23	17
Sulawesi Tengah	21	17	18	21	18
Nusa Tenggara Barat	24	19	23	24	19
Sulawesi Tenggara	18	23	20	19	20
Nusa Tenggara Timur	13	21	22	25	21
Maluku	26	26	21	12	22
Irian jaya	17	11	25	26	23
Bengkulu	25	25	24	18	24
Aceh	22	24	26	22	25

Sumber Data : Bank Indonesia, *Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*, Yogyakarta; BPFE, 2002, halaman 101-110 dengan melakukan beberapa modifikasi.

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka kepada persaingan dengan provinsi lain. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Pada bagian ini akan dianalisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah Sumatera Barat dengan menggunakan indicator pengeluaran konsumsi rumahtangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktifitas total daerah dan nilai tukar petani.

Tabel 2.39
Perkembangan Konsumsi Rumah tangga Per Kapita
Tahun 2005 s/d 2010 Provinsi Sumatera Barat

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
1.	Total Pengeluaran Rumah tangga (Rp milyar)	16.362	17.038	17.739	18.541	18.846	19.123
2.	Jumlah Pengeluaran bahan makanan (Rp milyar)	10.464	10.892	11.312	11.756	12.039	12.393
3.	Jumlah Pengeluaran non makanan (Rp milyar)	5.898	6.146	6.426	6.798	6.876	6.730
4.	Jumlah Rumah tangga (jiwa)	1.070.543	1.109.731	1.121.904	1.073.923	1.086.792	1.086.792
5.	Konsumsi perkapita (Rp juta)	15,28	15,35	15,81	17,26	17,34	17,60

Sumber Data : BPS Si,atera Barat Tahun 2010

*angka sementara

Berdasarkan kepada tabel di atas terlihat bahwa total pengeluaran rumah tangga di Sumatera Barat terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, tahun 2005 berjumlah Rp 16.362 milyar didominasi oleh pengeluaran jenis bahan makanan yakni sebesar Rp 10.464 milyar atau 63,95% dari total pengeluaran rumah tangga, sisanya untuk pengeluaran non pangan. Jumlah pengeluaran rumah tangga ini mengalami kenaikan yang sangat berarti sampai tahun 2009 yang mencapai Rp 18.846 milyar sehingga telah mengalami pertumbuhan sebesar 15,18% selama periode 2005 sampai 2009, sehingga rata-rata kenaikan per tahunnya adalah 3,04%. Besarnya proporsi untuk pengeluaran bahan makanan tahun 2009 adalah sebesar 63,58%, hal ini telah mengalami penurunan sejak tahun 2005.

Semakin berkurangnya proporsi pengeluaran untuk bahan makanan ini tentunya telah diiringi oleh peningkatan untuk konsumsi non pangan dari 36,05% tahun 2005 menjadi 36,42% tahun 2009. Semakin meningkatnya proporsi rumah tangga untuk konsumsi non pangan tentunya memperlihatkan kemajuan yang lebih baik, karena konsumsi non pangan dalam bentuk investasi rumah tangga ke peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kemampuan dan keahlian tenaga kerjanya, seperti pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara umum, meningkatnya proporsi pengeluaran untuk jenis pengeluaran non pangan telah memperlihatkan adanya pengurangan keadaan kemiskinan di tengah penduduk. Menurut ukuran kemiskinan yang diyakini benar selama ini adalah bahwa rumah tangga miskin adalah rumah tangga yang proporsi pendapatannya digunakan untuk konsumsi pangan lebih besar. Sehingga secara umum kemiskinan masih ada di tengah masyarakat Sumatera Barat, tetapi secara umum, angka

kemiskinan itu secara perlahan mulai menurun, yang ditandai secara makro oleh semakin meningkatnya pengeluaran non pangan rumahtangga.

Konsumsi perkapita Sumatera Barat telah mencapai Rp 17,34 juta tahun 2009 yang didominasi oleh pengeluaran untuk bahan makanan sebesar Rp 11.982 milyar dan konsumsi non pangan sebesar Rp 6.864 milyar. Apabila dibandingkan dengan tahun 2005, berarti telah mengalami pertumbuhan konsumsi per kapita sebesar 13,48 selama periode 2005 s/d 2009 dengan rata-rata pertumbuhan adalah sebesar 2,70% per tahun.

Kemampuan perekonomian masyarakat juga dapat dilihat dari besarnya nilai tukar petani yang menggambarkan rasio antara jumlah penerimaan petani dalam system produksinya dengan jumlah harga yang dibayarkan petani dalam konsumsinya. Selama periode 2005 sampai 2010 nilai tukar petani terus mengalami peningkatan dari 70,3 tahun 2005 terus meningkat menjadi 105,60 tahun 2010, sehingga pertumbuhan nilai tukar petani selama 2006 sampai dengan 2009 adalah sebesar 39,78% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,95%. Nilai tukar petani tertinggi selama lima periode lalu adalah pada tahun 2008 yang mencapai 105,09, artinya kemampuan daya beli petani lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun begitu apabila dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami penurunan, memperlihatkan bahwa kemampuan daya beli petani mulai menurun apabila dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.40
Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2005-2010
Provinsi Sumatera Barat.

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
1.	Indeks yang diterima Petani	368,8	439.6	455.7	119.8	125.1	137.66
2.	Indeks yang dibayar petani	524,7	592.4	606.1	114.0	120.6	130.36
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	70,3	74,21	75,19	105,09	103,73	105.60

Sumber Data : berita resmi statistik beberapa edisi

**angka sementara*

Pertumbuhan indeks yang diterima petani selama tahun 2005 sampai 2009 adalah telah mengalami pertumbuhan negative sebesar 66,16%, artinya terjadi penurunan penerimaan petani selama ini, hal ini tentu saja disebabkan oleh karena harga relative komoditi pertanian yang dihasilkan petani mengalami penurunan nilainya, terutama produk yang berasal dari bahan mentah. Sedangkan pertumbuhan indeks pembayaran petani selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah mengalami pertumbuhan negative sebesar 77,11%. Data ini mengimplikasikan telah

terjadi penurunan tingkat daya beli petani terhadap barang-barang bahan makanan dan bukan makanan selama periode 2005-2009. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan rumahtangga tani, dan di lain sisi juga dapat dilakukan upaya peningkatan kemampuan daya beli petani untuk barang-barang makanan dan bukan makanan. Masih kecilnya indeks nilai tukar petani (<100) selama periode 2005 sampai 2007 memperlihatkan bahwa kemampuan daya beli petani masih rendah, barulah sejak tahun 2008 sampai tahun 2010 kemampuan daya beli petani menjadi lebih baik.

Tabel 2.41
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja						Standar (RPJPD)	Interpretasi Belum tercapai (<) sesuai (=) Melampaui (>)
		2005	2006	2007	2008	2009	2010		
1.	Kesejahteraan Masyarakat								
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1.	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian								
1.1.1.1.	Pertumbuhan PDRB	5,73	6,14	6,34	6,37	4,19	5,93	6,90	(<)
1.1.1.2.	Laju Inflasi	13,10	11,84	6,04	11,02	3,73	-	6,50	(<)
1.1.1.3.	PDRB perkapita	6,40	6,68	7,01	7,35	7,55	8,16	8,50	(<)
1.1.1.4.	PDRB Harga Berlaku (milyar)	44.675	53.030	59.799	70.614	76.295	87.221	68,4	(>)
1.1.1.5.	PDRB Harga Konstant (milyar)	29.159	30.950	32.913	35.008	36.465	38.860	40,7	(<)
1.1.1.6.	Kontribusi Sektor Pertanian	25,01	24,74	24,43	24,10	24,03	23,40		
1.1.1.7.	Kontribusi sektor Industri Pengolahan	13,06	12,85	12,79	12,75	12,58	12,32		
1.1.1.8.	Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel Restoran	18,19	18,29	18,40	18,46	18,30	17,86		
1.1.1.9.	Kontribusi Sektor Jasa	16,47	16,27	16,22	16,25	16,38	16,81		
1.1.1.10.	Konsumsi Masyarakat (%)	56,11	55,05	54,03	52,96	44,35	49,21		
1.1.1.11.	Konsumsi Swasta (%)	0,96	0,94	0,91	0,90	0,83	0,89		
1.1.1.12.	Konsumsi Pemerintah (%)	11,99	11,82	11,05	11,48	11,08	12,91		
1.1.1.13.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	18,48	18,11	10,04	17,46	13,46	18,43		
1.1.1.14.	Eksport (%)	20,67	23,02	22,07	31,98	16,57	34,28		
1.1.1.15.	Impor (%)	7,95	8,17	6,09	14,29	13,71	13,59		
1.1.1.16.	ICOR (dihitung berdasarkan pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok kapital)	3,46	3,26	2,72	2,92	4,41	3,65	4,06	(>)
	ICOR (berdasarkan BPS)		3,60	3,60	3,51	3,60	3,63		

Sumber Data : evaluasi kinerja pemerintah daerah beberapa edisi

Pembangunan pertanian ke depan haruslah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penerimaan petani dengan meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan petani, sehingga nilai tukarnya menjadi lebih baik. Peningkatan nilai tambah produk petani dapat dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan produk pertanian.

Upaya lain yang harus mendapat perhatian besar pula adalah memperbaiki system tataniaga pertanian masyarakat terutama pada komoditi ekspor yang selama ini menjadi tumpuan rumahtangga petani dalam memperoleh pendapatannya, seperti karet, kayu manis, coklat, gambir, dan lain sebagainya, termasuk juga untuk tanaman palawija. Disamping peningkatan system tataniaga yang memberikan margin keuntungan lebih besar kepada rumahtangga tani, juga yang tidak kalah penting dapat dilakukan adalah peningkatan nilai tambah produk pertanian rumahtangga tani melalui agroindustri terutama agroprosesing pasca panen, dengan menurunkan teknologi tepat guna untuk peningkatan mutu ke tingkat rumahtangga tani. Produk pertanian yang dihasilkan di tingkat rumahtangga harus dalam bentuk barang setengah jadi bukan barang mentah, pengolahan atau prosesing bukan dilakukan oleh pedagang untuk mengup-grade mutu, tetapi rumahtangga tani. Sehingga harga di tingkat petani lebih tinggi dan keuntungan yang diterima akan lebih besar pula. Peran pemerintah disini adalah bagaimana pasar bersaing dalam keadaan sempurna dalam system tataniaga pertanian ini, mencegah terjadinya monopsoni alami yang diperankan oleh pedagang perantara pada pasar-pasar tradisional.

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Pekerjaan Umum

Kejadian bencana (gempa, longsor, banjir dan abrasi) beruntun dari tahun 2005, 2007 dan 2009 yang menimpa Sumatera Barat harus menjadi perhatian serius pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. Dampak yang demikian besar merusak berbagai prasarana fisik: Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air. Seperti akibat bencana gempa tahun 2007, berdampak jalan-jalan yang retak dan tertutup longsor berada di Kabupaten Solok, Tanah Datar dan Agam. Beberapa jaringan irigasi yang sebelumnya berfungsi dengan baik, mengalami kerusakan yang cukup berat. Kemudian kejadian gempa 30 September 2009, jalan yang berada di

kawasan Silaing dekat lokasi air terjun hingga pasar Padang Panjang mengalami kerusakan atau tertutup karena longsor. Akses jalan lain menuju ke Padang seperti melalui Maninjau Kabupaten Agam pun juga tidak luput dari longsor, kondisi jalannya menjadi rusak. Begitu juga jalan lingkar sepanjang Danau Maninjau, yang tidak dapat dilalui karena tertutup longsor.

Seringnya terjadi bencana alam, yang mengakibatkan banyaknya badan jalan yang rusak, terutama pada jalan Provinsi dan jalan kabupaten, sedangkan dana untuk penanggulangan bencana alam sangat terbatas. Untuk tahun 2009, akibat gempa cukup banyak infrastruktur di Sumatera Barat mengalami kerusakan. Dari data Satkorlak Penanggulangan Bencana Sumatera Barat, tercatat jembatan yang mengalami rusak akibat gempa sebanyak 68 buah yang terdiri dari 21 buah rusak berat, 30 buah rusak sedang, serta 17 rusak ringan. Empat titik kerusakan jalan yang parah di wilayah Padang Pariaman dan satu titik di jalur Padang-Solok Kilometer 18 mendesak untuk diperbaiki. Kerusakan empat titik jalan di wilayah Padang Pariaman relatif akan mengganggu pengiriman bantuan dan aktivitas pemulihan serta tahap rekonstruksi di sejumlah wilayah pedalaman di kabupaten tersebut. Empat titik tersebut semuanya terletak di Kecamatan V Koto Timur, yang menuju ke arah Nagari Padang Alai serta Patamuhan. Dua wilayah yang menjadi area terparah dampak gempa sebagian besar warganya masih dalam pengungsian. Di Jalur Padang -Solok di Km 18 juga mengkhawatirkan. Jalur ini merupakan jalan nasional yang menghubungkan Padang dengan Kabupaten Solok serta kabupaten-kabupaten lain di wilayah tenggara kota Padang.

Secara umum, persentase kondisi mantap dari jaringan jalan Nasional dan Provinsi di Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut. Pada jalan Nasional dari total 1022,09km terdapat 99.54% dengan kondisi mantap tahun 2005, pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan kondisi mantap menjadi 99,53% untuk tahun 2006; tetapi selanjutnya terjadi penurunan menjadi 98,17 tahun 2007; dan terus menurun menjadi 95,60% tahun 2008; kondisinya terus menurun menjadi hanya 92,19 pada tahun 2009. Sedangkan untuk jalan provinsi dari 1153,87km, dari tahun 2005 sampai tahun 2009 kecenderungannya meningkat, dimana kondisi mantap tahun 2005 adalah 80,91%, hanya pada tahun 2006 menurun menjadi 79,86, sedangkan hingga tahun 2009 menjadi 83,32% dengan kondisi mantap.



Gambar 2.7
Perbandingan Kondisi Mantap Jalan Nasional dan Provinsi
di Sumatera Barat Tahun 2004-2009

Walaupun kondisi mantap jalan nasional dan provinsi di Sumatera Barat cukup memadai, namun yang sangat penting selain itu adalah peningkatan kemampuan daya dukung ataupun kelas jalan yang mampu untuk mendukung peningkatan volume pergerakan orang dan volume serta beban dari barang yang akan melalui jaringan jalan yang ada.

Pada akhir tahun 2009, terdapat kondisi jembatan yang tidak mantap sebanyak 83 buah, dengan rincian kategori jembatan yang sempit sekitar 28 buah. Ditargetkan sampai tahun 2014 dapat ditingkatkan menjadi kondisi mantap sebanyak 31 buah. Selain dari pada itu saat ini, masih belum optimalnya kualitas pelayanan prasarana jalan, seperti masih banyaknya jalan rusak di jalur ekonomi; keterbatasan akses dari pusat - pusat produksi ke daerah pemasaran, outlet maupun ke perkotaan dan jalan lintas yang ada belum optimal mendukung pengembangan wilayah.

Permasalahan pembangunan bidang prasarana jalan dan jembatan di Sumatera Barat selama periode 2005-2009, antara lain: rendahnya daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari kejadian runtuhnya jembatan di Pesisir Selatan karena dilalui oleh kendaraan berat yang melebihi kapasitas jembatan yang tersedia. Dimana saat ini kelas jalan maksimal hanya kelas IIA, dengan beban sumbu gandar

yang diizinkan hanya 8 ton. Keadaan ini jelas tidak sejalan dengan peningkatan kemampuan kendaraan yang ada serta peningkatan volume produksi serta volume pengangkutan yang muncul dari dunia industri ataupun dari pertanian dan perkebunan. Hasil atau volume produksi pertanian dan perkebunan seperti CPO dan semen yang mendominasi angkutan barang perkebunan di Sumatera Barat jelas perlu didukung oleh kemampuan dan kapasitas jalan yang memadai agar angkutan hasil produksi perkebunan dan industri semen dapat didistribusikan/dialurkan melalui jaringan jalan yang terdapat di Sumatera Barat.

Hal ini terjadi karena rendahnya kesadaran dari pengguna jalan (terutama pengusaha angkutan barang), dimana mereka memuat kendaraannya dengan beban yang melebihi dari beban yang diizinkan. Keadaan ini diperburuk oleh pengawasan yang rendah dan lemah dari satuan kerja yang ada di jembatan timbangan, terhadap beban kendaraan berat yang melalui jalan dan jembatan yang ada, sehingga banyak kendaraan pengangkut barang yang melebihi beban yang diizinkan pada jalan tersebut tetap beroperasi melaluinya.

Biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan semakin tinggi karena faktor topografis daerah yang bergelombang dan berbukit. Kejadian gempa bumi tersebut mengakibatkan bencana yang bukan saja merusak infrastruktur tetapi juga memangsa korban jiwa. Dimulai pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2009, bencana gempa bumi yang terjadi merusak infrastruktur yang ada di Sumatera Barat dengan nilai kerugian yang sangat besar. Untuk bidang prasarana jalan, jelas membutuhkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat besar untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik.

Belum terpadunya penanganan sistem jaringan jalan kabupaten, kota, Provinsi dan nasional, merupakan permasalahan tambahan yang perlu mendapat perhatian pihak penyelenggara jalan dan transportasi. Hal lain adalah lemahnya informasi kondisi jalan kabupaten. Banyak kabupaten yang belum memberikan data valid yang dilakukan dengan survey yang baik dan benar, banyak data yang diterbitkan berupa data perkiraan ataupun hanya dengan bentuk pengamatan tanpa menggunakan alat survey atau uji yang selengkapnya.

Potensi sumberdaya air yang ada di Sumatera Barat yang terdapat pada 9 Satuan Wilayah Sungai dengan potensi air permukaan sebesar $80.2 \times 10^9 \text{ m}^3$ dan air tanah $2,67 \times 10^9 \text{ m}^3$ dengan luas catchment area seluas 42.297,21 Ha, dengan 30 sungai-sungai besar dan 260 anak sungainya, serta 4 buah danau terdiri dari Danau Singkarak dengan luas

13.011 Ha, Danau Diatas dengan luas 3.150 Ha, Danau Dibawah dengan luas 1.400 Ha dan Danau Maninjau 9.950 ha, potensi ini dalam mendukung kebutuhan air masyarakat perkotaan, pedesaan, pertanian, industri secara adil dan merata belum terwujud. Di bidang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya, telah dilakukan pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi. Selama rentang waktu 2005 sampai 2009, pemerintah telah melakukan peningkatan/ perbaikan jaringan sepanjang 4.867 m; 9.093 m, 5.325 m; dan 6000 m. Sedangkan untuk pemeliharaan dilakukan terhadap jaringan yang memiliki luas 35.541 Ha, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Peningkatan Perbaikan dan Pemeliharaan Irigasi
Tahun 2006-2010

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2006	2007	2008	2009	2010
1.	Peningkatan/perbaikan jaringan	m	4.867	9.093	5.325	6.000	9.356
2	Pemeliharaan fungsi jaringan	Ha	35.541	35.141	35.541	35.541	35.541

Sumber Data : Dinas PSDA Prov. Sumbang Tahun 2010

Terlihat bahwa terjadi peningkatan perbaikan terhadap jaringan irigasi pada tahun 2007. Hal ini terjadi karena banyaknya saluran irigasi yang rusak pada tahun tersebut karena dampak dari gempa yang terjadi pada tahun sebelumnya yang banyak merusak saluran irigasi, yang memerlukan perbaikan agar jaringan yang memberikan pelayanan pada lahan pertanian tetap berfungsi. Pembangunan jaringan dan pemeliharaan fungsi jaringan irigasi sangat diperlukan oleh Sumatera Barat, karena provinsi ini masih tergantung pada bidang pertanian yang membutuhkan dukungan dari infrastruktur irigasi. Pernyataan ini tidak cukup hanya dengan pernyataan di atas kertas, tetapi harus diiringi dengan perhatian dan pendanaan yang cukup pada bidang ini agar hasil produksi pertanian dan perkebunan yang menjadi pendukung utama perekonomian masyarakat Sumatera Barat dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan lahan yang ada.

Untuk bangunan pengendali banjir, pengaman abrasi pantai dan pengamanan daya rusak air selama periode 2006 sampai tahun 2009, telah cukup banyak pembangunan dibidang ini. Pembangunan bangunan pengendali banjir selama periode ini telah terbangun lebih kurang 21.021 m, dan untuk bangunan pengaman abrasi pantai sepanjang 1.300 m,

sedangkan untuk bangunan pengaman daya rusak air dibangun untuk seluas 3.000 Ha. Pembangunan dibidang ini jelas membutuhkan dana yang sangat besar, diperlukan perencanaan yang terintegrasi dengan pembangunan bidang lainnya, sehingga pembangunan infrastruktur dapat mendukung pembangunan bidang lainnya.

Tabel 2.43
Pembangunan Pengendalian Banjir, Pengamanan Abrasi Pantai
dan Pengamanan Daya Rusak Air Tahun 2006-2010

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2006	2007	2008	2009	2010
1.	Bangunan Pengendalian Banjir	M	5.123	4.434	4.264	7.200	3.228
2.	Pengamanan Abrasi Pantai	M	500	350	350	100	350
3.	Pengamanan Daya Rusak Air	Ha	750	950	500	800	500

Sumber Data : Dinas PSDA Prov. Sumbar Tahun 2010

Permasalahan Sumber Daya Air, relatif juga cukup banyak, antara lain: Tingkat Kerusakan DAS yang Makin Parah. Kondisi ini disebabkan antara lain oleh kerusakan daerah hulu sungai yang cenderung terus berlangsung dimana tutupan lahan hutan berubah menjadi lahan terbuka yang mengakibatkan besarnya limpasan air permukaan dan menyusutnya infiltrasi. Hal ini menyebabkan turunnya ketersediaan air permukaan dan ketersediaan air tanah. Ancaman keberlanjutan sumberdaya air juga disebabkan akibat terjadinya penggunaan air tanah yang tidak terkendali, baik penggunaan air permukaan maupun penyedotan air bawah tanah. Kerusakan sumberdaya juga menyebabkan pencemaran air seperti yang terjadi pada sungai-sungai yang mengalir melalui kawasan industri, kawasan permukiman, dan kawasan pertanian yang menghasilkan banyak limbah.

Kerusakan prasarana sumberdaya air akibat bencana alam. Banyak prasarana irigasi yang rusak akibat bencana alam seperti rusaknya bendungan Tongar di Pasaman Barat dan rusaknya prasarana irigasi yang berupa saluran irigasi primer, sekunder dan tersier akibat banjir dan longsor. Permasalahan banjir dan galodo yang semakin meningkat. Pada musin penghujan, suatu hal yang harus diwaspadai saat ini di Sumatera Barat adalah ancaman bencana banjir dan galodo. Pada tahun 2008, telah terjadi bencana galodo yang cukup besar didaerah Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Dampak bencana tersebut, menimbulkan merugikan material yang besar bagi masyarakat dan pemerintahan. Kejadian tersebut mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana umum, seperti Masjid, jembatan dan jalan penghubung. Sebelum itu telah terjadi pula bencana banjir di Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, dengan meluapnya

Batang Agam dan Sinamar, yang juga menimbulkan kerugian infrastruktur yang besar bagi masyarakat.

Kurang optimalnya layanan jaringan irigasi sehingga masih diperlukan pengembangan serta peningkatan fungsi jaringan irigasi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Setelah kejadian gempa yang sering melanda Sumatera Barat, yang terjadi pada tahun 2005, 2007 dan 2009, mengakibatkan kerusakan pada saluran irigasi sehingga distribusi air untuk lahan irigasi teknis, semi teknis menjadi terganggu. Terganggunya pelayanan irigasi ini mempengaruhi dan mengurangi hasil dan produksi dari lahan pertanian yang dialiri oleh jaringan irigasi tersebut. Operasi dan pemeliharaan prasarana sumberdaya air yang masih rendah. Kondisi ini akan mengakibatkan kerusakan tidak hanya jaringan irigasi, namun juga kerusakan sungai akibat erosi dan pendangkalan sehingga mengakibatkan inefisiensi pemanfaatan air irigasi dan air sungai.

Dampak perubahan iklim global yang semakin intens, menimbulkan gejala alam yang beragam. Gejala alam ini juga mempengaruhi Sumatera Barat, seperti gejala kenaikan level rata-rata permukaan laut, atau terjadinya fenomena alam badai dan arus gelombang laut yang besar. Sumatera Barat mempunyai panjang garis pantai daratan Sumatera Barat sekitar 541 km yang membujur dari Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan Kabupaten Pasaman Barat. Wilayah ini langsung berhadapan dengan Samudera Hindia yang mempunyai gelombang besar dan memberikan potensi untuk terjadinya abrasi pantai. Untuk melindungi daerah pantai dari abrasi juga telah dibangun bangunan pengaman pantai terutama di pantai Padang sedangkan pada daerah daerah rawan abrasi seperti di Sasak dan Air Bangis belum dapat ditangani.

Masih lemahnya penyediaan, pengelolaan data dan informasi sumber daya air. Data dan informasi yang berkualitas sangat diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, dengan tersedianya data dan informasi yang dapat diakses seluruh masyarakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pada kenyataannya ketersediaan data dan informasi sumberdaya air dirasa masih sangat kurang. Sehingga koordinasi dan partisipasi masyarakat juga belum begitu kuat. Peningkatan koordinasi dalam pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air sangat diperlukan dalam rangka mengendalikan potensi konflik yang cenderung semakin besar. Hal ini perlu didukung dengan tersedianya peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Partisipasi masyarakat diperlukan dalam rangka menjamin keberlanjutan sumberdaya air.

Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sumber daya air memerlukan dana yang sangat besar. Merupakan suatu tantangan yang besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperoleh dana yang dimaksudkan. Agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempertahankan tingkat layanan dari infrastruktur yang ada dapat diberikan sangat perlu diprioritaskan agar tidak mengganggu kegiatan dan produksi bidang lainnya yang menghasilkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Perhubungan

Sistem transportasi merupakan elemen dasar infrastruktur yang berpengaruh pada pola pengembangan wilayah. Sistem transportasi suatu wilayah merupakan suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan ke seluruh wilayah sedemikian sehingga: terakomodasi mobilitas penduduk; dimungkinkan adanya pergerakan barang; dimungkinkannya akses ke semua wilayah. Dari peranannya, transportasi juga mendukung aspek lainnya yang bekerja secara bersama-sama dan saling keterkaitan dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Sektor transportasi berhubungan erat dengan sektor ekonomi, sosial, politik dan kewilayahan. Pengembangan transportasi dan tata guna lahan memainkan peranan penting dalam kebijakan dan program pemerintah. Kondisi saat ini pengembangan infrastruktur dalam sektor transportasi pada akhirnya menimbulkan biaya tinggi. Kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan estandar perawatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, terutama transportasi jalan dan perkeretaapian. Begitu pula untuk pembangunan jaringan prasarana dan sarana transportasi yang baru ataupun peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi yang ada.

Provinsi Sumatera Barat dilayani oleh bermacam jenis moda angkutan penumpang dan barang yang beroperasi. Pergerakan penumpang di dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat saat ini didominasi oleh moda angkutan darat. Pengguna angkutan umum masih memiliki persentase terbesar yaitu kurang dari dua pertiga total pergerakan, diikuti pengguna kendaraan pribadi hampir sepertiga dan sisanya kendaraan tidak bermotor / becak. Dari berbagai jenis angkutan umum yang digunakan oleh pelaku perjalanan, yang mendominasi adalah bus sedang, sedangkan untuk kendaraan pribadi didominasi oleh pengguna mini bus/van. Untuk perjalanan antar Provinsi yang berskala regional, angkutan

moda antar pulau saat ini yang dominan adalah angkutan udara (dengan terminal Bandara Internasional Minangkabau). Untuk angkutan laut mendominasi angkutan barang menuju pulau Jawa ataupun untuk pengangkutan internasional, untuk angkutan laut saat ini dilayani oleh pelabuhan Teluk Bayur.

Hal yang perlu juga disikapi kedepannya adalah manajemen pengelolaan transportasi yang memungkinkan keterkaitan/integrasi antar moda maupun perkembangan angkutan multimoda yang memungkinkan pergerakan barang dan orang dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.

A. Angkutan Jalan Raya

Untuk angkutan darat jalan raya, Sumatera Barat memiliki empat daerah yang memiliki terminal dengan tipe A dan enam daerah yang memiliki terminal dengan tipe B. Dengan melihat data tersebut diatas dapat dilihat bahwa masih ada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang belum dilengkapi dengan sarana terminal. Kota/Kabupaten yang belum memiliki sarana terminal adalah Kab Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Mentawai, Kab Solok Selatan, Kab. Agam, dan Kab. Padang Pariaman.

Tabel 2.44
Lokasi Terminal di Provinsi Sumatera Barat

Kota/Kabupaten	Tipe A	Tipe B
	Padang Bukittinggi Solok Kiliranjao	Pariaman Padang Panjang Payakumbuh Batusangkar Sago (Painan) Lubuk Sikaping Sawah Lunto

Sumber Data : Dinas Perhubungan Sumatera Barat, 2009

Untuk wilayah pelayanan jaringan angkutan umum untuk masa mendatang pada dasarnya tidak berbeda jauh dari kondisi saat ini, karena wilayah pelayanan saat ini sudah cukup luas dan mampu menjangkau hampir seluruh wilayah Sumatera Barat. Jaringan Trayek Angkutan Umum di Sumatera Barat dibagi atas Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Taksi dan Angkutan Sewa (travel). Pada masa datang selain pelayanan angkutan tersebut, juga akan dikembangkan Angkutan Antar Jemput.

Sumatera Barat saat ini menghadapi kondisi rendahnya mutu pelayanan jasa transportasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, terutama dari keselamatan, mobilitas, akses, dan keterjangkauan oleh masyarakat serta kurangnya perawatan. Angkutan penumpang umum yang

beroperasi saat ini menghadapi kompetisi yang sangat gencar dari jenis angkutan penumpang liar. Didapati bahwa angkutan penumpang umum yang memiliki izin trayek, masih beroperasi dengan umur kendaraan yang relative tua, kurang memperhatikan aspek pelayanan terhadap kenyamanan, keamanan dan keselamatan, serta masih kurangnya dalam hal frekuensi operasi dan waktu operasi.

Walaupun angkutan penumpang umum liar (tanpa izin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan) juga mengabaikan aspek kenyamanan, keselamatan dan keamanan, namun mereka beroperasi menggunakan kendaraan minibus terbaru. Sehingga sebagian penumpang memilih angkutan penumpang tanpa izin ini untuk mereka gunakan karena relative cepat. Ancaman terhadap keberlangsungan pelayanan angkutan penumpang umum yang berizin trayek demikian beratnya, sehingga sebagian telah berhenti beroperasi. Menghadapi hal ini, diperlukan suatu aturan dan penanganan yang tegas terhadap angkutan penumpang liar yang mengabaikan sisi legalitas operasinya.

Disamping keberadaan angkutan tidak resmi (travel liar), angkutan bus AKDP juga dibebani oleh permasalahan tidak optimalnya fungsi terminal, sehingga bus AKDP semakin ditinggalkan akibat kurangnya aksesibilitas ke dan dari terminal tersebut. Berbagai permasalahan tidak optimalnya terminal sebagai simpul transportasi bukan saja karena masalah teknis semata, namun juga dipengaruhi oleh perilaku pengguna jasa serta *law enforcement* yang penegakannya masih belum maksimal. Kedepan diharapkan dengan perencanaan dan komitmen Pemerintah dalam penataan jaringan transportasi, keberadaan terminal-terminal tersebut mampu berfungsi optimal untuk pelayanan masyarakat pengguna jasa angkutan umum, baik untuk Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) maupun Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), sehingga dapat memperlancar dan mempermudah perpindahan orang yang sesuai dengan fungsi terminal.

Tingginya angka kecelakaan dan jumlah korban jiwa akibat kecelakaan. Pada tahun 2009, terdapat angka kematian sekitar 3,2 jiwa setiap harinya di Sumatera Barat. Setiap tahun angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa tersebut maupun harta benda semakin meningkat. Banyak penyebab hal tersebut, salah satu sebab kesadaran berlalu lintas yang rendah dari pengguna jalan dan kendaraan. Tingginya tingkat kerusakan jalan yang salah satunya diakibatkan operasional kendaraan yang kelebihan muatan sebagai dampak belum optimalnya pengawasan/ kontrol pada jembatan timbang. Banyaknya pelanggaran penggunaan kendaraan dengan muatan yang melebihi kelas jalan. Hal ini mengakibatkan kerusakan parah badan jalan.

B. Angkutan Udara

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT. Angkasa Pura II, yang mengoperasikan Bandara Internasional Minangkabau (BIM), terjadi peningkatan jumlah angkutan penumpang yang sangat signifikan. Pada tahun 2009, jumlah pesawat yang mendarat di Bandara Internasional Minangkabau mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Frekuensi penerbangan di BIM pada tahun 2009 cukup tinggi dimana sudah melayani 10 koneksitas dengan kota didalam dan luar negeri. Operasional BIM ini memberikan kemudahan aksesibilitas dan peningkatan mobilitas bagi masyarakat Sumatera Barat dan Sumatera Utara bagian selatan dalam pergerakannya. Pada tahun 2009, jumlah pesawat yang datang/berangkat tercatat 7,348 kali, dengan jumlah penumpang datang 915,012 orang. Kondisi terminal penumpang BIM saat ini pun sudah mencapai kapasitasnya yang hampir 1,000,000 penumpang/tahun, sehingga saat ini sedang dilaksanakan pembangunan / penambahan ruangan terminal untuk penumpang di bandara tersebut. Untuk cargo yang datang dan berangkat di BIM pada tahun 2009, untuk bongkar berjumlah 15.688 ton dan muat berjumlah 12,091 ton. Dari tahun 2007 hingga tahun 2009 terjadi peningkatan cargo bongkar rata-rata 500 ton/tahun, namun untuk cargo muat terjadi penurunan rata-rata 950 ton/tahunnya.

Peningkatan jumlah penerbangan dan penumpang tersebut, memerlukan pelayanan yang terorganisir dengan baik. Pemerintah hendaknya memberikan perhatian yang serius pada tingkat pelayanan yang dapat diberikan pada pengguna jasa angkutan umum. Untuk angkutan umum dari dan ke BIM saat ini dilayani oleh angkutan penumpang umum yang dilayani oleh PT. DAMRI dan PT. Tranex yang beroperasi tiap 30 menit, melayani dua jurusan dari/ke BIM dan kota Padang. Untuk saat ini layanan ini masih pada kondisi cukup memadai. Namun dengan akan terjadinya peningkatan dimasa datang diperlukan perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang memudahkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat pengguna angkutan darat dari dan ke BIM.

Bandara Internasional Minangkabau (BIM) sebagai prasarana moda transportasi udara di Sumatera Barat memiliki peran yang sangat strategis untuk meningkatkan kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat baik kunjungan wisata, bisnis dan sosial. Disamping sebagai prasarana, BIM adalah simpul transportasi udara yang merupakan Bandara Pusat Penyebaran, sehingga aktifitas dan fasilitasnya harus dikembangkan di masa mendatang.

Disamping BIM, sesuai dengan kondisi daerah yang rawan bencana

khususnya di Kepulauan Mentawai, maka perlu penyiapan bandara three in one (untuk penumpang, pariwisata serta penanganan bencana alam), yaitu perlu disetiap pulau besar (Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan)

C. Angkutan Laut

Angkutan laut di Sumatera Barat didukung oleh keberadaan pelabuhan laut yaitu 1 (satu) Pelabuhan Laut Internasional dan 5 (lima) Pelabuhan Laut Nasional. Pelabuhan Laut Internasional adalah Teluk Bayur, sedangkan Pelabuhan Laut Nasional adalah Air Bangis, Muara Padang, Muara Siberut, Sikakap dan Sioban. Keberadaan pelabuhan laut ini sangat mendukung angkutan barang menuju dan dari Sumatera Barat. Sedangkan angkutan penumpang mengalami kemunduran, dimana pada tahun 2007, penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut turun drastis, walaupun kapal yang berlabuh di Teluk Bayur mengalami kenaikan. Jumlah penumpang pada Pelabuhan Teluk Bayur turun sebesar 97,24 persen. Sedangkan untuk arus muat barang di pelabuhan Teluk Bayur dapat dilihat pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Angkutan Khusus Batu Bara dan Semen Melalui Pelabuhan Teluk Bayur
Tahun 2005-2009 (Ton)

NO	Uraian	T A H U N			
		2006	2007	2008	2009
A	LUAR NEGERI				
	a. Batu Bara	80.248	438.549	1.113.526	526.230
	b. Semen	983.900	1.557.694	911.021	441.666
	c. CPO	1.205.681	1101145	1.356.776	1.552.981
B	DALAM NEGERI				
	a. Batu Bara	16.063	14.079	80.093	53.440
	b. Semen	2.434.628	1.826.003	2.480.120	2.615.630
	c. CPO	13.707	8.013	19.032	19.948

Sumber Data : PT. Pelindo II Cabang Teluk Bayur Padang

Terlihat terjadi peningkatan untuk angkutan semen setiap tahunnya. Perkembangan pelabuhan Teluk Bayur, sangat menarik untuk diamati, Karena pada saat ini jika dilihat dari keberadaan kapal yang bongkar muat di Pelabuhan Teluk Bayur ini sudah mengalami antrian. Banyaknya kapal yang antri untuk membongkar barangnya di Teluk Bayur relatif tinggi, hal ini disebabkan oleh berbagai hal, pertama bongkar muat barang yang sudah mencapai kapasitas kemampuan pelayanan pelabuhan pada saat tertentu, hal lain adalah karena keterbatasan kemampuan angkutan feeder darat untuk mengangkut barang yang akan dibawa, kemudian karena keterbatasan area penampungan barang (kapasitas terminal yang terbatas). Hal lain juga adalah karena kemampuan pengelolaan bongkar muat barang yang masih terbatas.

D. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Keberadaan angkutan Sungai dan Danau di Provinsi Sumatera Barat masih terbatas. Jenis angkutan ini didominasi oleh angkutan wisata, sedangkan untuk kebutuhan angkutan penumpang dan barang saat ini adalah angkutan dari Padang ke Mentawai. ASDP di Sumatera Barat, khususnya untuk kepulauan Mentawai memegang peranan yang sangat penting, menjadi angkutan primer (moda utama) bagi masyarakat kepulauan Mentawai menuju Sumatera Barat. Masyarakat kepulauan Mentawai sangat tergantung pada angkutan ini, Keberadaannya menjadi sangat penting karena keterbatasan pilihan dan ketersediaan angkutan menuju dan dari Kepulauan Mentawai.

Keberadaan dan operasional angkutan ASDP Mentawai – Padang dipengaruhi oleh cuaca dan keadaan gelombang laut di perairan antara Sumatera dan kepulauan Mentawai menjadi penentu, dimana jika musim angin barat gelombang laut di perairan ini menjadi sangat besar, sehingga kapal feri yang beroperasi tidak mampu untuk mengarungi perairan ini. Sehingga transportasi antara Mentawai dan kota Padang menjadi terputus.

Permasalahan transportasi lainnya yang ada Sumatera Barat khususnya adalah tuntutan terhadap masalah yang ditimbulkan oleh sarana dan prasarana transportasi, dimana pemasalahannya sangat kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk. Lalu lintas dan angkutan semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Hal-hal yang berkaitan erat dengan transportasi menyinggung langsung kebutuhan masyarakat dan perekonomian kota. Persoalan-persoalan yang dikemukakan diatas, pada umumnya, meskipun dalam tingkat skala yang berbeda, hampir dijumpai diseluruh kota-kota. Masalah dampak lingkungan, keselamatan, dan pemborosan energi dibidang transportasi, akibat sistem lalu lintas dan tata guna lahan yang kurang efisien, perlu memperoleh perhatian khusus dalam rangka terwujudnya sistem lalu lintas dan angkutan yang handal dan terjangkau oleh masyarakat secara luas.

Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pembenahan sektor transportasi menjadi hal yang mendesak, untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah Sumatera Barat diperlukan peran serta masyarakat dan swasta, juga diperlukan tatanan transportasi nasional dan wilayah yang dapat mewujudkan ketersediaan transportasi di daratan dan antar pulau di Kepulauan Mentawai secara lebih terpadu dan efisien, baik menggunakan moda transportasi darat, laut dan udara yang bersinergis dengan pengembangan wilayah dan pembangunan sektor-sektor lainnya. Di dalam

perencanaan transportasi memuat perancangan sarana (mobil, kereta api, pesawat, dll), perancangan prasarana (jalan, rel, pelabuhan, bandara dll) dan perancangan operasional dan pengendalian (lalu lintas, transit, jadwal, dll)

3. Energi

Propinsi Sumatera Barat dengan luas 42.297,31 km² pada tahun 2010 mempunyai 4.845.998 Jiwa Penduduk. PDRB harga kosten tahun 2000 32.900.000 juta Rupiah dan PDRB per kapita 7.003,33 ribu Rupiah. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi sebesar 3,38 %. Sumatera Barat menghasilkan energi produksi energi primer berupa batubara dengan produksi 518.754 ton dan tenaga air sebesar 1.159.666 MWh Output.

Kebutuhan energi didominasi oleh sektor industri (42%) dan sektor transportasi (41%), kemudian disusul dengan sektor rumah tangga (16%), sektor komersial (1%), dan sektor lainnya (kurang dari 1%). Kebutuhan energi pada sektor industri kurang dari tiga kali lipat kebutuhan sektor rumah tangga. Kebutuhan energi pada sektor komersial bahkan hanya 6% dari kebutuhan energi pada sektor rumah tangga. Mengingat bahwa sektor rumah tangga adalah sektor non produktif, dengan demikian sebagian porsi kebutuhan energi belum digunakan untuk kegiatan produktif.

Di sektor industri, kebutuhan energi sebagian besar dicatu oleh batubara (85%), kemudian oleh listrik (10%), minyak bensin (4,5%), dan sebagian kecil lainnya minyak diesel dan minyak bakar. Sedangkan, pada sektor transportasi, kebutuhan energi sebagian besar berupa minyak bensin (58%), kemudian minyak diesel (35%), avtur (5%), dan sebagian kecil residual fuel oil. Pada sektor komersial, energi final yang digunakan sebagian besar adalah minyak diesel (87%) dan listrik (12,8%) serta dalam proporsi yang sangat kecil minyak tanah. Di sektor rumah tangga, kebutuhan energi dipenuhi oleh minyak tanah (58%), listrik (35%), dan sisanya adalah LPG. Rumah tangga juga menggunakan kayu bakar, namun data tentang jumlah penggunaan kayu bakar belum tersedia.

A. Energi dan Ekonomi

Pemakaian energi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009 menurut jenis energy meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 5.872.406,16 SBM, Liquid Petroleum Gas (LPG) sebesar 102.539,86 SBM, Batubara sebesar 3.406.747,33 SBM, dan energi Listrik sebesar 989.904,52 SBM

Konsumsi energi final per jenis di Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2009 Secara total konsumsi energi final meningkat dari 10,548 juta SBM pada tahun 2005 menjadi 11.086 ribu pada tahun 2009. Secara rata-rata konsumsi energi final di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan 5,10% per tahun. Jenis energi BBM yang dikonsumsi terdiri avgas, avtur, premium, minyak tanah dan minyak bakar. Sedangkan berdasarkan Konsumsi energi final per sektor di Provinsi Sumatera Barat tahun pada tahun 2009 konsumsi energi pada Sektor Transportasi sebesar 4.537.540 SBM, sektor industri sebesar 4.610.900 SBM, sektor rumah tangga sebesar 1.754.270 SBM, komersial sebesar 117.655 SBM dan sektor lainnya sebesar 65.711 SBM.

B. Batubara

Batubara yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat tersebar di beberapa wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok. Total sumber daya batubara yang ada pada 7 (tujuh) kabupaten/kota di atas berjumlah 951 juta ton, sedangkan total cadangan mencapai 948 juta ton.

Selama 5 tahun terakhir, penyediaan batubara dilakukan oleh beberapa perusahaan besar, seperti: PT. Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin di Kota Sawahlunto, PT. AIC di Kabupaten Sijunjung dan PT. Karbindo di Kabupaten Sijunjung. Selain itu, masih terdapat beberapa perusahaan tambang lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumatera Barat.

Tabel 2.46
Pemakaian Batubara di Sumatera Barat Tahun 2005-2009

Pemakai Batu Bara	Jumlah Pemakaian Batubara (Ton)				
	2005	2006	2007	2008	2009
PT. Semen Padang	678.123,37	846.353	703.118	908.714	800.688
PLTU Ombilin (PT. PLN)	547.904,58	520.967	543.505	407.628	456.044,1
Jumlah	1.226.027,95	1.367.320	1.246.623	934.967	1.256.732

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Batubara yang diproduksi Sumatera Barat sebagian besar untuk kebutuhan energi di PT. Semen Padang dan kebutuhan PLTU Ombilin, sedangkan sebagian lagi diekspor. Disamping itu, ada sebagian batubara untuk PT. Semen Padang dan PLTU Ombilin yang dipasok dari Propinsi Jambi dan Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan karena produksi batubara yang memenuhi spesifikasi yang diperlukan oleh PT. Semen Padang dan PLTU Ombilin belum mencukupi. Tabel 2.46 menunjukkan grafik pemakaian batubara di Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir.

C. Energi Listrik

Tabel 2.47
Produksi Pembangkit Listrik Tahun 2005 – 2009

Produksi (MWH)/ Jenis Produksi	Periode				
	2005	2006	2007	2008	2009
PLTD	26.126,10	48.857,48	40.927,26	30.695	-
PLTA	1.051.908,57	1.003.452,65	1.159.666	869.749	826.907,9
PLTG	54.871,39	123.605	54.127	40.595	123.660,1
PLTU	1.087.910,00	1.031.730	1.068.915	801.686	927.621,6
JUMLAH	2.220.816,06	2.207.654,13	2.323.635	1.742.725	1.878.189,6

Sumber Data : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Tabel 2.47 menunjukkan produksi energi listrik untuk pembangkit-pembangkit listrik PLN yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2005-2009. Produksi energi listrik selama 5 tahun terakhir menurun dari 2.220.816,06 MWh pada tahun 2005 menjadi 1.878.189,6 pada tahun 2009. Kontribusi terbesar dalam produksi energi listrik ini adalah PLTU dan terkecil PLTD. Pada tahun 2009, produksi PLTU memberikan kontribusi 49,38 % dari total energi listrik yang diproduksi, sedangkan PLTA, PLTG dan PLTD masing-masing 44,03 %, 6,5 % dan 0%.

Pemakaian energi listrik di Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir diperlihatkan oleh Gambar 7.3.11. Total pemakaian energi listrik meningkat dari 1.580.350 GWh pada tahun 2005 menjadi 1.846.064 GWh tahun 2009, dengan persentase pertumbuhan rata-rata per tahun mencapai 3,36%. Pada tahun 2009, pemakaian energi listrik pada sektor rumah tangga mencapai 43,75% dari total seluruh pemakaian, sedangkan sektor industri merupakan pemakai energi listrik terbesar kedua mencapai 34,85%, dan sektor bisnis & publik mengkonsumsi energi listrik masing-masing 12,44% dan 8,96%.

Tabel 2.48
Pemakaian Energi Listrik Tahun 2005 – 2009

Sektor	Pemakaian Energi Listrik (Gwh)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Rumah Tangga	669.198	696.012	751.519	501.013	807.671
Unit Usaha/Bisnis	147.456	147.960	193.411	128.941	229.674
Industri	634.344	732.204	665.314	443.543	643.387
Umum (Publik)	129.352	164.788	166.124	110.749	165.330
JUMLAH	1.580.350	1.740.964	1.776.368	1.184.246	1.846.064

Sumber Data : PT. PLN (Persero) Wilayah Sumbar Tahun 2009

Indikator kinerja makro bidang energi listrik. Terlihat bahwa daerah cakupan pelayanan listrik dari tahun 2005-2009 meningkat dan mencapai 90,1 % dengan rasio elektrifikasi hampir 70%.

Tabel 2.49
Indikator Kinerja Makro Bidang Energi Listrik
Tahun 2005-2009

No	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator kinerja makro RPJMD 2006-2009 bidang energi									
			2005		2006		2007		2008		2009	
			R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Daerah Cakupan Pelayanan Listrik	%	80,00	83,60	88,94	85,20	89,23	86,80	89,60	88,40	90,10	
2	Rasio Elektrifikasi	%	51,50	52,83	53,98	54,64	57,94	56,46	71,50	58,29	69,92	

Sumber Data : evaluasi kinerja pembangunan daerah beberapa edisi

Keterangan: T = Target; R = Realisasi

D. Potensi Energi Terbarukan

Pengembangan energi terbarukan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 dan Peraturan Presiden No.5 tahun 2006 yang menempatkan energi alternatif, khususnya bahan bakar nabati sebagai instrumen penting dalam perencanaan dan pengembangan energi nasional. Untuk mengatasi kekurangan bahan bakar minyak bumi, pemerintah telah menggalakkan peluang pencarian alternatif bahan bakar berbasis bahan baku yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan memberikan jaminan suplai bahan baku.

Sumber energi terbarukan tersebut meliputi tenaga air, panas bumi, biomassa, energi surya dan biofuel.

E. Tenaga Air

Potensi mikro/piko-hidro tersebar di Kabupaten-kabupaten Pesisir Selatan, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Pariaman, Agam, Pasaman, dan Pasaman Barat. Sejumlah kecil potensi juga ditemui di Kabupaten 50 Kota dan Sijunjung. Potensi mikro/piko-hidro diperkirakan mencapai 127 MW. Distribusi potensi PLTMH berdasarkan kabupaten. Potensi terbesar terletak di Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 39% dari potensi yang telah dikaji. Potensi yang relatif besar juga terdapat di Kabupaten Agam dan Solok dengan masing-masing sebesar 32% dan 26%. Potensi yang kecil terdapat di Kabupaten 50 Kota, Pasaman Barat, dan Tanah Datar. Pada Tabel 2.50 diperlihatkan jumlah unit serta kapasitas terpasang dari PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro). Sebagian besar unit dipasang di Kabupaten-kabupaten Agam, Pasaman, dan Solok dengan persentase kapasitas lebih dari 80% dari semua unit yang terpasang.

Tabel 2.50
Jumlah Unit dan Kapasitas Terpasang PLTMH

Kabupaten	Jumlah (Unit)	Variasi Daya(kVA)	Total Daya(kVA)
Kabupaten Agam	27	. . .	317
Kabupaten 50 Kota	8	3 – 10	51
Kabupaten Pasaman	30	2 – 60	280
Kabupaten Solok	14	3 – 60	338
Kabupaten Pesisir Selatan	8	2 – 40	85
Kabupaten Sijunjung	2	5 – 30	35
Kabupaten Tanah Datar	4	3 – 15	26
Total	93	2 – 60	1132

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat Tahun 2009

F. Panas Bumi

Kebanyakan, potensi energi panas bumi yang utama tersebar di Kabupaten Pasaman (termasuk Pasaman Barat) dan Solok (dan Solok Selatan). Potensi yang lebih kecil terdapat di Kabupaten Agam, Limapuluh Kota, dan Tanah Datar. Potensi energi panas bumi di Sumatera Barat diperkirakan mencapai 1598 MWe. Distribusi potensi panas bumi berdasarkan kabupaten. Dari gambar tersebut terlihat bahwa potensi terbesar terdapat di Kabupaten Solok, yaitu sebesar 55%, dan yang kedua adalah Kabupaten Pasaman dengan potensi sebesar 36%.

G. Biomassa

Secara garis besar, biomassa terdiri dari bahan bakar berbasis kayu (batang kayu, ranting, serbuk gergaji, dll.), hasil samping dan limbah pengolahan hasil pertanian/perkebunan, limbah peternakan, serta produk turunannya, seperti arang tempurung. Sampah rumah tangga kadang-kadang juga dipandang sebagai biomassa. Sumatera Barat memiliki potensi energi dari biomassa, khususnya yang berasal dari limbah atau hasil samping pertanian dan perkebunan, di samping dalam porsi yang lebih kecil dari limbah peternakan.

Tabel 2.51
Potensi Energi Biomassa

Komoditi	Produksi (kilo ton)*	Residu	RPR	Kadar air (%)	Jumlah residu (kilo ton)	Nilai kalor (MJ/kg)	Energi (TJ)
Kelapa sawit	3960.24	Tandan kosong	0.23	55	910.86	8.16	7,688
		Sabut	0.11	40	435.63	11.34	2,964
		Cangkang	0.06	10	237.61	18.83	4,027
Kelapa	75.33	Sabut	0.419	10.3	31.56	18.62	527
		Tempurung	0.12	8.7	9.04	18.09	149
Padi	1982.49	Sekam	0.267	12.37	529.32	19.33	8,966
		Jerami	1.757	12.71	3,483.23	16.02	48,709
Tebu	17.67	Bagasse	0.29	49	5.12	18.1	47
		Top/leaves	0.3	10	5.30	17.41	83
Kopi	24.65	husk	2.1	15	51.77	12.38	545
Ubi kayu	125.96	Batang	0.062	15	7.81	17.5	116
Jagung	211.91	Tongkol	0.273	7.53	57.85	16.28	871
		Batang	2	15	423.83	19.66	7,083

Sumber Data : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan

H. Energi Surya

Secara kasar, dari peta penerimaan energi surya dunia, Sumatera Barat terletak di wilayah dengan tingkat penyinaran matahari yang berkisar 4 – 5 kWh/m²/hari. Pemanfaatan energi surya dapat dilakukan dengan menggunakan sel surya (*photovoltaic*) maupun secara termal. Beberapa unit sel surya telah dipasang sejak tahun 1995. Secara keseluruhan, sampai tahun 2009 sebanyak 3.366 unit yang sudah terpasang. Berada di jalur khatulistiwa, Sumatra Barat menerima radiasi energi radiasi surya yang relatif merata sepanjang tahun. Namun demikian, besaran radiasi yang diterima rata-rata hanya sekitar 334 W/m².

I. Biofuel

Sebagai biofuel, biodiesel dan bioetanol merupakan sebuah alternatif bahan bakar diesel yang dihasilkan dari sumber terbarukan (*renewable resources*) seperti minyak nabati atau lemak hewan. Secara umum kedua bahan bakar tersebut ramah lingkungan, pembakarannya bersih, biodegradable, mudah dikemas dan disimpan, serta dapat diperbaharui.

Di Sumatera Barat pada 2006 terdapat tanaman kelapa 90.663 ha dan produksi buah 79.046 ton. Dari potensi buah kelapa, dapat diperoleh sekitar 7,24% minyak biodiesel yang berarti sekitar 5.720,7 ton biodiesel atau sekitar 6.350 kiloliter per tahunnya. Dengan asumsi 5% dari buah kelapa dapat diperoleh bioetanol air kelapa, maka dapat diperoleh sekitar 4.000 ton bioetanol (sekitar 4.400 kiloliter) per tahunnya.

Biodiesel dapat juga dibuat dari CPO yang banyak dihasilkan oleh perkebunan kelapa sawit Sumatera Barat.

J. Jenis Energi Terbarukan Lainnya

Beberapa jenis pembangkit listrik yang belum tergarap di Sumatera Barat (energi baru dan terbarukan) dapat dilihat pada Tabel 2.52

Tabel 2.52
Jenis Pembangkit Listrik Yang Belum Tergarap Di Sumatera Barat
(Energi Baru Dan Terbarukan)

No	JENIS PEMBANGKIT	LOKASI
1	Pembangkit Listrik Tenaga Angin	Sepanjang Pantai Barat
2	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Kab. Solok Selatan dan Kab. Pasaman
3	Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC)	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Kep. Mentawai, dan Kota Padang
4	Pembangkit Listrik Tenaga Ombak	Sepanjang Pantai Barat

Sumber Data : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat tahun 2009

Sesuai Kyoto Protocol, pengurangan emisi karbon Jepang sebesar 6% sampai tahun 2012. Jepang menawarkan bentuk kerjasama saling menguntungkan untuk mengurangi CO² yang dihasilkan Indonesia dengan menggunakan dana dan teknologi dari Jepang. Keunggulan: Selain menghasilkan listrik juga menghasilkan produk penyulingan air laut menjadi air tawar. Perkembangan OTEC di Sumatera Barat mesti dilakukan dengan pengajuan permohonan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Jepang melalui kedutaan besar pemerintah Jepang di Indonesia

Kesulitan mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) baik oleh karena sistem distribusinya maupun oleh karena relatif mahalnya harga BBM juga dialami oleh nelayan Propinsi Sumatera Barat. Sementara itu di sisi lain di lingkungan di sekitar nelayan terdapat potensi tanaman kelapa yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan Biodiesel yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternative untuk kapal nelayan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya fasilitasi pembuatan biodiesel dari minyak yang berasal dari tanaman kelapa, melalui teknologi dan system yang dapat dilakukan oleh industri pada skala rumah tangga, atau skala kecil.

4. Penataan Ruang

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat berlaku sampai dengan tahun 2005, namun dengan ditetapkannya undang-undang nomo 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, perlu dilakukan revisi RTRW Provinsi Sumbar dengan tahun perencanaan 2009-2029.

Sesuai dengan Undang-undang 26/2007 tentang Penataan Ruang, PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rancangan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera ditetapkan sebagai kawasan strategis dari segi lingkungan hidup, karena selain kondisi topografi yang berbukit dan bergunung juga beberapa sungai besar hulunya berada di Sumatera Barat.

Penataan ruang Provinsi Sumatera Barat mencakup struktur dan pola ruang. Berdasarkan Struktur Ruang Sumatera Barat yang berisi sistem perkotaan, dan system jaringan transportasi, system jaringan komunikasi, jaringan sumberdaya air, jaringan sistem energi serta sistem jaringan prasarana lingkungan. Berdasarkan struktur ruang RTRW Provinsi Sumbar 2009-2029, sistem perkotaan di Sumatera Barat terdiri dari 1 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Padang, 5 Pusat Kegiatan Wilayah

(PKW) yaitu Bukittinggi, Sawahlunto, Pariaman, Solok dan Muara Siberut. Disamping itu diusulkan beberapa kota akan menjadi pusat kegiatan wilayah yaitu Payakumbuh, Pulau Punjung, Tapan dan Simpang Empat. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebanyak 12 Kota, yaitu Painan, Padang Panjang, Lubuk Sikaping, Sari Lamak, Batusangkar, Padang Aro, Tuapejat, Lubuk Basung, Muaro Sijunjung, Lubuk Alung, Aro Suka dan Parik Malintang.

Berdasarkan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat kawasan lindung seluas 35,86% (516.593 Ha) dari luas provinsi Sumbar dan kawasan budidaya seluas 64,14% (2.713.137 Ha) dari luas provinsi Sumbar. Kawasan lindung meliputi kawasan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Lindung Lainnya. Kawasan Budidaya meliputi Kawasan hutan produksi, Kawasan hutan rakyat, Kawasan perkebunan, Kawasan pertanian pangan, Kawasan perikanan, Kawasan pertambangan, Kawasan industri, Kawasan pariwisata, Kawasan permukiman dan Kawasan peruntukan lainnya.

Berdasarkan PP Nomor 26 tahun 2008, Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan strategis nasional yaitu Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh, Taman Nasional Kerinci Seblat, Stasiun Pengamat Dirgantara Bukit Koto Tabang, dan kawasan pulau kecil terluar (pulau Sibaru-Baru dan pulau Sinyaunyuau Kab. Kep. Mentawai). Berdasarkan RTRW Sumbar 2009-2029 Provinsi Sumbar memiliki 14 kawasan strategis yang terdiri atas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yaitu kawasan ITBM (Indarung-Teluk Bayur-Bungus-Mandeh), kawasan industri PIP, kawasan poros barat timur (jalur Padang – batas Riau), kawasan Tapus Rao-Mapat Tunggul, Sungai Rumbai, Lunang Silaut, Pangkalan Koto Baru, Kamang Baru, Abai-Sangir-Taluak Aia Putih; kawasan strategi sosial budaya pada Kabupaten Tanah Datar dan kawasan startegis fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Ngarai Sianok, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Kembar dan Danau Talang.

5. Lingkungan Hidup

Sumatera Barat memiliki luas lahan 4,2 juta Ha. dengan kontur bergelombang, terdiri atas wilayah perbukitan dan pegunungan 2,2 juta Ha. (52,19%), wilayah daratan yang dapat dihuni hanya 13,31% (0,5 juta Ha). Dari luasan tersebut sekitar 60% diantaranya (2,6 juta Ha.) adalah kawasan hutan. Dengan keadaan tersebut sangat menyulitkan bagi

Sumatera Barat dalam pemanfaatan lahan. Sehubungan dengan pertumbuhan penduduk, kondisi perbukitan dan pegunungan tersebut juga memposisikan wilayah ini pada daerah rawan bencana dan rawan gempa.

Peningkatan jumlah sarana dan prasarana baik pemukiman, industri, transportasi serta penduduk tentunya membutuhkan sumber daya alam yang lebih banyak, serta menghasilkan bahan sisa yang lebih banyak. Hal ini telah mendorong terjadinya penurunan kualitas lingkungan, baik itu sumber daya air, udara, ketersediaan lahan yang sekaligus mempengaruhi aspek sosiologi masyarakat. Isu lingkungan yang terdapat dalam konteks kekinian adalah persoalan lingkungan yang terkait dengan tekanan akibat aktifitas kegiatan manusia dan kerentanan yang terkait dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh proses alami bumi.

Alam Sumatera Barat juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, antara lain; a) keanekaragaman ekosistem (suaka alam, cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata), b) keanekaragaman flora dan fauna (termasuk yang dilindungi), dan c) keanekaragaman genetik.

Keberadaan kuantitas air di Sumatera Barat, dapat dilihat dari perbedaan debit air antara musim kemarau dan musim hujan. Perbedaan debit yang sangat kontras terutama terjadi pada sungai utama di daerah perkotaan. Hal ini menandakan daerah tangkapan air (catchments area) dan daerah aliran sungai (DAS) telah mengalami kerusakan. Ketersediaan sumberdaya air di Sumatera Barat didukung oleh sebanyak 506 sungai besar dan kecil, serta 238 danau dan telaga.

Walaupun Sumatera Barat tidak menjadi sentra industri skala besar, isu terkait kualitas udara juga dapat dikontribusikan oleh dampak pemanfaatan lahan untuk pembukaan perkebunan dan dampak transportasi. Kualitas udara di Sumatera Barat umumnya masih baik pada saat keadaan normal, karena tidak ada kebakaran hutan yang signifikan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan perkembangan industri pabrik kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara yang potensial ke depannya. Namun yang penting juga untuk diperhatikan adalah perubahan fungsi lahan berkaitan dengan kontribusinya dalam penyediaan karbon.

Kerusakan hutan bakau pada daerah pesisir juga perlu menjadi perhatian sebagai akibat dari laju erosi dan pembalakan yang tinggi. Kerusakan hutan bakau bisa dilihat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dan Padang Pariaman. Pada kabupaten tersebut terlihat bahwa

keberadaan hutan bakaunya semakin terancam dengan kategori rusak cukup parah sekitar 70-80%. Disamping itu kondisi terumbu karang juga mengalami kerusakan yang parah, yang terjadi sebagai akibat penggunaan sistim penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, seperti menggunakan bom, potas maupun terumbu karang yang diambil secara langsung untuk diperdagangkan.

Fenomena lainnya di daerah pesisir yang perlu di cermati adalah potensi terjadinya abrasi pantai. Hal ini terutama pada daerah-daerah pesisir yang tekanan pada sempadan pantainya tinggi. Pemanfaatan sempadan dan daerah berbahaya sepanjang daerah pesisir sampai saat ini juga masih terjadi pada berbagai daerah, seperti halnya pemukiman nelayan yang sampai ke bibir pantai. Abrasi paling parah saat ini terlihat di kota Padang. Selain itu, yang perlu juga menjadi perhatian penting adalah kondisi terkait dengan lingkungan pemukiman, yang pada beberapa daerah belum memiliki sanitasi lingkungan yang memadai, terutama di kota-kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, seperti Padang dan Pariaman.

Tabel 2.53
Tingkat Kekritisan Lahan Tiap Wilayah Administrasi Pemerintah

No	Kab/Kota	Kritis (Ha)	Sangat Kritis (Ha)	Jumlah (Ha)
	Kabupaten			
1	Agam	6.182	1.064	7.246
2	Lima Puluh Kota	105.591	6.508	112.099
3	Padang Pariaman	2.539	-	2.539
4	Pasaman	59.078	10.567	69.645
5	Pasaman Barat	162	-	162
6	Pesisir Selatan	8.169	3	8.172
7	Solok	28.719	8.898	37.617
8	Solok Selatan	174	-	174
9	Tanah Datar	27.210	5.943	33.153
10	Sijunjung	73.923	1.230	75.153
11	Dharmasraya	1.589	-	1.589
12	Kep. Mentawai	-	-	-
	Kota			
13	Bukittinggi	104	-	104
14	Padang	2.292	-	2.292
15	Padang Panjang	326	31	357
16	Sawahlunto	14.966	3.320	18.286
17	Payakumbuh	586	854	1.440
18	Solok	1.829	529	2.358
19	Pariaman	-	-	-
	Jumlah	333.439	38.947	372.386

Sumber Data : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Sesuai dengan kondisinya Sumatera Barat memiliki iklim dengan curah hujan yang tinggi, dengan curah hujan rata-rata 4.000 mm/th. Kondisi alam yang penuh perbukitan ditambah dengan curah hujan yang tinggi menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah rawan dengan bencana alam, dan gempa.

6. Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan perluasan kesempatan kerja. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya bangsa dengan memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam, seni dan budaya tradisional. Sebagai Negara yang memiliki keindahan alam dan keragaman budaya, Indonesia telah menjadi salah satu tujuan wisata yang cukup populer di dunia. Kunjungan wisata ke Indonesia maupun ke daerah Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.

Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi tujuan wisata utama di pulau Sumatera untuk semua kategori wisatawan. Dari data yang diperoleh dari BPS Sumatera Barat, terungkap bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan manca negara dan nusantara ke provinsi Sumatera Barat dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, tahun 2007 jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Sumatera Barat sebanyak 4.843.822 orang dan wisatawan manca negara 27.978 orang. Pada tahun 2009 kunjungan wisatawan nusantara meningkat menjadi 7.412.910 orang dan wisatawan manca negara naik menjadi 47.6233 orang.

Walaupun daerah Sumatera Barat dilanda gempa bumi yang membawa kerusakan pada infrastruktur dan bangunan pada tahun 2009, namun infrastruktur pariwisata masih berfungsi dengan baik. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 267 hotel yang beroperasi dengan jumlah kamar 4.427 buah dan 8.827 tempat tidur. Tingkat hunian hotel juga masih cukup tinggi berkisar 35 – 50 % secara rata-rata yang mengindikasikan bahwa daerah Sumatera Barat masih banyak dikunjungi baik untuk tujuan wisata maupun social dan kekeluargaan. Tercatat juga sebanyak 231 obyek wisata alam, 401 obyek wisata budaya dan 147 obyek wisata khusus yang masih beroperasi dengan baik di berbagai wilayah Sumatera Barat.

2.4.3 Investasi Daerah

Salah satu faktor utama yang menentukan daya saing daerah adalah kondisi iklim investasi yang terdapat di daerah bersangkutan. Alasannya jelas karena kemampuan suatu daerah untuk bersaing dalam menarik investor dari luar daerah akan sangat ditentukan oleh kondisi iklim investasi daerah bersangkutan. Sedangkan peningkatan kegiatan investasi tersebut akan sangat menentukan kemampuan daerah bersangkutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian, kondisi iklim investasi akan sangat menentukan kemampuan daerah bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat secara keseluruhan dimasa mendatang.

Peningkatan iklim investasi diperlukan untuk memperbaiki kondisi dan situasi sehingga investor merasa nyaman untuk melakukan penanaman modal di daerah ini. Iklim investasi tersebut mencakup berbagai kondisi yang dapat mendukung kegiatan investasi di daerah seperti tersedianya prasarana dan sarana ekonomi yang baik, prosedur perizinan yang relatif singkat dan mempunyai kepastian hukum, aturan perpajakan, kondisi korupsi dan pungutan liar dan lain-lainnya. Belum optimalnya kinerja investasi di Provinsi Sumatera Barat saat ini selain disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi global juga disebabkan karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang belum bisa diatasi.

Tabel 2.54
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)
(Rp. Juta) Tahun 2006-2010

No	Institusi	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
	Atas Dasar Harga Berlaku					
1	Pemerintahan Umum	1.163.483,52	1.292.035,09	1.646.375,81	1.922.880,41	2.333.361,42
2	BUMN/D dan Swasta	4.162.865,50	4.558.840,08	5.292.647,29	6.017.754,62	7.869.747,51
3	Rumah Tangga	4.081.735,06	4.602.786,27	5.674.688,21	6.236.635,38	6.830.765,32
	Provinsi Sumatera Barat	9.408.084,08	10.453.661,43	12.613.711,31	14.177.270,42	17.033.874,25
	Atas Dasar Harga Konstan					
1	Pemerintahan Umum	731.770,51	765.968,46	804.208,00	865.907,29	1.000.359,97
2	BUMN/D dan Swasta	2.379.069,07	2.406.327,17	2.555.757,52	2.744.200,22	3.303.896,61
3	Rumah Tangga	2.493.806,29	2.651.977,83	2.771.924,63	2.825.765,51	2.856.839,59
	Provinsi Sumatera Barat	5.604.645,29	5.824.273,46	6.131.890,15	6.435.873,02	7.161.096,17

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Sebagai dampak dari kondisi ekonomi global yang akan menjadi salah satu tantangan terbesar yang masih akan dihadapi dalam beberapa tahun ke depan adalah kecenderungan menurunnya aliran investasi dari negara-negara maju. Namun demikian, prospek untuk berinvestasi di Indonesia cukup baik. UNCTAD (2009) dalam *World Investment Prospect*

2009-2011 melaporkan bahwa prospek untuk berinvestasi di Indonesia menduduki peringkat ke delapan atau cukup prospektif, terutama karena besarnya pasar dan ketersediaan sumber daya alam. Meskipun demikian, ke depan keunggulan berupa besarnya pasar dan sumberdaya alam yang dimiliki perlu didukung dengan pelayanan perizinan dan ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya tarik investasi bagi para investor.

Permasalahan lain yang menyebabkan masih rendahnya pertumbuhan realisasi PMDN dan PMA di Sumatera Barat disebabkan antara lain oleh potensi sumber alam dan kemampuan ekonomi daerah yang relatif rendah, jumlah dan kualitas infrastruktur yang kurang memadai, pengkajian dan promosi potensi investasi masih kurang intensif, kurang tersedianya mitra lokal pendamping investor dari luar, pelayanan publik kurang memadai, insentif investasi seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dan lain-lain masih kurang, adanya masalah/konflik tanah ulayat yang tidak kunjung selesai, dan kondisi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah investasi. Kegiatan penanaman modal menghasilkan proyek investasi yang akan terus menambah stok modal (*capital stock*). Peningkatan stok modal ini akan meningkatkan produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal adalah dengan memperbaiki iklim investasi. Peningkatan daya tarik investasi akan dipengaruhi oleh upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan oleh suatu daerah. Belum optimalnya kinerja investasi saat ini selain disebabkan oleh penurunan kegiatan ekonomi global juga karena masih adanya permasalahan iklim investasi yang belum bisa diatasi.

Perkembangan investasi di Sumatera Barat selama periode 2004 – 2009 terlihat cukup menggembirakan terutama realisasi PMDN. Investasi PMA terlihat menurun secara konsisten baik dari sisi persetujuan rencana penanaman modal maupun realisasinya. Rendahnya kinerja investasi asing berkaitan juga dengan krisis ekonomi global dan adanya isu negative tentang keamanan dan stabilitas politik selama masa pemilu dan pilkada di daerah Sumatera Barat.

Data lebih rinci mengenai perkembangan investasi PMDN dan PMA serta data penyerapan tenaga kerja sebagai hasil dari kegiatan penanaman modal dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Perkembangan Persetujuan dan Realisasi Investasi PMA/PMDN
di Sumatera Barat Tahun 2004 – 2009 (US \$ 000)

Tahun	PMA		PMDN	
	Persetujuan	Realisasi	Persetujuan	Realisasi
2004	18.443,95	29.532,64	712.333,44	631.733,95
2005	160.545,37	85.568,91	358.420,30	607.061,37
2006	38.527,41	87.423,70	1.113.992,50	234.856,62
2007	153.489,56	7.028,76	2.667.814,88	58.511,10
2008	207.738,30	20.626,32	731.089,78	608.917,89
2009	23.315,39	20.994,06	647.680,83	761.617,90

Sumber Data : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2009/2010

Ditinjau dari penyerapan tenaga kerja, terlihat bahwa rata-rata jumlah tenaga kerja per perusahaan PMDN adalah 256 orang, 1.149 orang dan, 656 orang masing-masing tahun 2007, 2008, dan 2009. Sementara itu PMA menyerap tenaga kerja sebanyak 163 orang, 115 orang dan 490 orang untuk periode yang sama. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa daya serap perusahaan PMA dan PMDN terhadap tenaga kerja relatif kecil karena kebanyakan berupa perusahaan yang menggunakan teknologi dan padat modal.

Realisasi investasi asing atau PMA di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang menurun dan pertumbuhannya sangat fluktuatif karena sangat berkaitan dengan kondisi keamanan dalam negeri, gejolak politik dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Gambaran yang hampir sama juga terlihat dalam perkembangan realisasi PMA di daerah Sumatera Barat walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang jauh berbeda. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2008 pertumbuhan realisasi PMA di tingkat nasional menunjukkan angka sekitar 23,39 % per tahun sedangkan untuk daerah Sumatera Barat pertumbuhannya hanya berkisar 0,50 %.

Capaian pertumbuhan realisasi PMA di Sumatera Barat jauh lebih rendah dari kinerja nasional di bidang investasi. Penyebabnya antara lain ; potensi sumber alam dan ekonomi daerah relatif rendah, infrastruktur kurang memadai, pengkajian dan promosi potensi investasi masih kurang intensif, kurang tersedianya mitra lokal pendamping investor dari luar, pelayanan publik kurang memadai, insentif investasi seperti kemudahan perizinan, keringanan pajak dan lain-lainnya masih kurang, adanya masalah/konflik tanah ulayat yang tidak kunjung selesai.

Walaupun angka pertumbuhan realisasi investasi PMA di daerah Sumatera Barat relatif kecil, namun kontribusinya bagi pembangunan ekonomi daerah cukup besar. Hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah badan usaha yang berstatus PMA, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja Indonesia dalam berbagai proyek investasi PMA tersebut.

Realisasi investasi domestik atau PMDN menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari waktu ke waktu dengan pertumbuhan yang juga berfluktuasi. Hal itu berkaitan dengan kondisi keamanan dalam negeri, gejolak politik dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan baik domestik maupun internasional. Gambaran yang hampir sama juga terlihat dalam perkembangan realisasi PMDN di daerah Sumatera Barat walaupun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2008 pertumbuhan realisasi PMDN di tingkat nasional menunjukkan angka sekitar 32,70 % per tahun sedangkan untuk daerah Sumatera Barat pertumbuhannya hanya berkisar 2,01 %. Rincian angka pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN dapat dilihat dalam Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Pertumbuhan PMA dan PMDN di Indonesia dan Sumatera Barat
Tahun 2006-2008

% Pertumbuhan Realisasi PMA/PMDN	2004	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata (%)
PMA						
Capaian Nasional	25,82	99,39	-32,79	68,91	-41,62	23,39
Capaian Sum.Barat	1,90	0,02	-0,92	1,93	-	0,50
PMDN						
Capaian Nasional	-15,04	94,90	-32,76	72,60	43,80	32,70
Capaian Sum.Barat	-0,04	-0,61	-0,75	9,41	-	2,01

Sumber Data : Bappenas RI, Laporan EKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pasal 5 ayat 2 undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pajak daerah untuk provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terutama berasal dari dana hibah dan dana darurat.

Pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2006 – 2010 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 16,02%. Pertumbuhan sebesar ini terutama didorong oleh pertumbuhan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dana perimbangan, yaitu 19,34% berbanding 9,07%. Pada tahun 2006 jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh adalah Rp494.930 juta dan meningkat menjadi Rp1.004.001 juta pada tahun 2010. Berarti dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,34%. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 9,07%, yaitu meningkat dari Rp554.232 juta pada tahun 2006 menjadi Rp784.476 juta pada tahun 2010.

Akibat dari pertumbuhan sumber dana perimbangan lebih rendah daripada pendapatan asli daerah, maka komposisi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat pun mengalami perubahan yang cukup mendasar, dimana pada tahun 2006 komposisi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih rendah daripada dana perimbangan, yaitu Rp494.930 juta (46,75%) berbanding Rp554.232 juta (52,35%). Sebaliknya, pada tahun 2010, komposisinya sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih besar dari pada dana

perimbangan, yaitu Rp1.004.001 juta (52,34%) berbanding Rp784.476 juta (40,90%). Hal ini berarti, bahwa pada tahun 2010 ketergantungan Provinsi Sumatera Barat terhadap sumber dana dari Pemerintah Pusat semakin rendah.

Komposisi sumber pendapatan daerah seperti dijelaskan di atas sedikit menguntungkan untuk pengembangan pembangunan daerah yang lebih baik. Akan tetapi, ketergantungan terhadap pemerintah pusat pada masa datang pun tidak dapat diharapkan banyak. Karena, pemerintah pusat pada akhir-akhir ini juga mengalami kesulitan keuangan. Hal ini, dapat dilihat dengan peningkatan penerimaan dana alokasi umum (DAU) pada banyak daerah hanya berkisar 5% saja. Untuk itu, pada masa datang harus diupayakan bagaimana meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi yang dimiliki daerah sendiri.

Sumber pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat yang paling besar berasal dari pajak daerah, yang dalam kurun waktu 2006 – 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 17,08%. Sekalipun pada tahun 2009 terjadi penurunan penerimaan pajak daerah dibandingkan tahun 2008, namun pada tahun 2010 pemerintah daerah membuat kebijakan sehubungan dengan pajak kendaraan yang mengakibatkan penerimaan dari pajak daerah kembali mengalami peningkatan. Penurunan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah terjadi pada tahun 2010. Salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah pendapatan ini adalah dampak Gempa 30 September 2009 dan perubahan status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga sumber penerimaan daerah dari RSUD ini dicatat sebagai pendapatan lain-lain PAD yang sah. Namun ke depan, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat harus lebih mengupayakan meningkatkan pendapatan yang berasal dari pajak daerah, yang didukung pula dengan adanya perubahan tentang undang-undang yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu dari UU No. 34 tahun 2000 menjadi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Penggalian sumber-sumber pendapatan dari aset dan potensi daerah yang dimiliki dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu terus ditingkatkan, agar ketergantungan terhadap pemerintahan pusat dapat dikurangi. Untuk itu, perubahan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah harus sesegera mungkin ditindak lanjuti dengan penyusunan peraturan daerah tentang pajak daerah dan atau retribusi daerah. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan

retribusi daerah. Sedangkan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah. Apalagi UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tersebut mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dilihat dari segi jenis objek pajak maupun tarif pajak. Misalkan untuk Pajak Kendaraan Bermotor akan dikenakan tarif pajak progresif bagi wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 buah kendaraan bermotor.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah dan pertumbuhan rata-rata per tahun dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Barat, tahun 2006 - tahun 2010

No	Uraian	TA 2006	TA 2007	TA 2008	TA 2009	TA 2010	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		(Rp'Juta)					
	PENDAPATAN	1.058.664	1.281.400	1.727.424	2.026.241	1.918.052	16,02
A	Pendapatan Asli Daerah	494.930	571.608	794.300	739.747	1.004.001	19,34
1	Pajak daerah	409.140	479.453	663.379	619.270	768.761	17,08
2	Retribusi daerah	10.786	32.386	54.374	51.932	28.267	(27,24)
3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	25.574	29.889	36.481	39.582	46.814	16,32
4	Lain-Lain PAD yang sah	49.430	29.879	40.066	28.963	160.159	34,17
B	Dana Perimbangan	554.232	633.866	744.202	789.840	784.476	9,07
1	Dana bagi hasil pajak	71.453	84.268	85.943	86.636	105.852	10,32
2	Dana bagi hasil bukan pajak	5.750	3.265	1.981	7.081	2.590	(18,07)
3	Dana alokasi umum	477.029	546.332	631.711	648.943	661.617	8,52
4	Dana alokasi khusus	-	-	24.567	47.179	14.415	
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.503	75.927	188.921	496.654	129.575	92,16
1	Hibah		2.857	188.921	495.775	80.678	
2	Dana darurat		53.000				
3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus		20.070		879	48.898	

Sumber Data : DPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang akan mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka akan terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka akan terjadi peningkatan investasi jangka panjang, dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka akan terjadi penurunan investasi jangka panjang, dana cadangan, sisa lebih perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Berdasarkan Neraca Provinsi Sumatera Barat tahun 2006 terlihat bahwa komposisi aset tetap lebih jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang, yaitu dengan perbandingan 88,57%, 5,16%, dan 6,24%, sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Namun demikian, komposisi aset tetap sedikit mengalami penurunan pada tahun 2010, yaitu menjadi 85,90%, dan komposisi aset lancar naik menjadi 7,22%. Perubahan komposisi aset ini disebabkan karena adanya peningkatan kewajiban bagi hasil kota/kabupaten yang belum dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai akhir tahun sehingga jumlah Kas di Kasda (bagian dari aset lancar) mengalami peningkatan dengan jumlah yang signifikan.

Aset yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan cukup signifikan, yaitu dari Rp 4.838.858 juta pada tahun 2006 menjadi Rp6.463.738 juta pada tahun 2010, yang berarti terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 7,51%. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui adanya peningkatan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) yang diperoleh dari tahun ke tahun, kemudian peningkatan investasi jangka panjang, dan peningkatan aset tetap. Namun pada sampai saat ini Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki Dana Cadangan dan Kewajiban Jangka Panjang. Hal ini antara lain disebabkan sulitnya prosedur dan izin untuk melakukan pinjaman dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan belum adanya rencana kerja yang membutuhkan dana besar sehingga perlu dicadangkan pada beberapa tahun sebelumnya.

Sesuai dengan konsep keseimbangan, pertumbuhan aset tersebut juga sama untuk pertumbuhan jumlah dari kewajiban dan ekuitas dana. Pertumbuhan ekuitas dana per tahun adalah 7,39% dan pertumbuhan kewajiban adalah 25,35%. Namun karena komposisi ekuitas dana jauh lebih besar (lebih kurang 99%) dibandingkan kewajiban, maka pertumbuhan kewajiban yang lebih besar tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas dana. Tabel 3.2 berikut menyajikan jumlah dan rata-rata aset, kewajiban, dan ekuitas dana Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memahami kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilakukan analisis ratio keuangan, meliputi rasio lancar, kas rasio, rasio total hutang terhadap aset, dan rasio hutang terhadap modal. Rasio lancar dan kas rasio kedua-duanya dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi kas rasio lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki. Sedangkan rasio total hutang terhadap total

aset dan rasio total hutang terhadap ekuitas dana, sama-sama menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset atau aset bersih digunakan.

Tabel 3.2
Jumlah dan Pertumbuhan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana
Provinsi Sumatera Barat, tahun 2006 – 2010

URAIAN	TA 2006	TA 2007	TA 2008	TA 2009	TA 2010	Pertumbuhan Rata-Rata (Persen)
	(Rp'Juta)					
ASET						
Aktiva Lancar	249.485	288.486	396.706	788.531	466.519	16,94
Investasi Jangka Panjang	301.831	290.263	340.572	368.791	401.302	7,38
Aset Tetap	4.285.753	4.542.084	4.773.401	5.038.199	5.552.048	6,69
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Aset Lainnya	1.789	1.570	23.378	74.763	43.870	122,52
JUMLAH ASET	4.838.859	5.122.403	5.534.057	6.270.283	6.463.739	7,51
KEWAJIBAN dan EKUITAS						
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek	24.605	30.104	78.018	60.056	60.738	25,35
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	24.605	30.104	78.018	60.056	60.738	25,35
EKUITAS DANA						
Ekuitas Dana Lancar	224.880	258.382	318.688	728.474	405.782	15,90
Ekuitas Dana Investasi		4.833.917	5.137.351	5.481.753	5.997.219	
Ekuitas Dana Cadangan						
JUMLAH EKUITAS DANA	4.814.253	5.092.299	5.456.039	6.210.227	6.403.001	7,39
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.838.859	5.122.403	5.534.057	6.270.283	6.463.739	7,51

Sumber Data : DPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Baik rasio lancar maupun kas rasio menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa, yaitu lebih 1.000%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang lancar lebih dari 10 kali lipat, dan atau jumlah hutang yang relative sangat kecil. Kondisi jumlah hutang yang sangat kecil itu juga dapat dilihat berdasarkan rasio total hutang terhadap ekuitas dana dan atau total aset, yaitu berkisar hanya 1% saja. Artinya, hutang yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat hanya 1% dari jumlah aset atau ekuitas dana-nya. Dengan demikian, ke empat rasio keuangan ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Provinsi

Sumatera Barat yang sangat kuat (baik) dalam melunasi seluruh hutangnya. Tabel 3.3 berikut menyajikan rasio keuangan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.3
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Barat,
Tahun 2006 – 2010 (%)

NO	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Rasio lancar (current ratio)	1.013,95	958,28	508,48	1,312,99	768,09
2	Rasio quick (quick ratio)	880,92	856,30	426,97	1,165,43	486,06
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0,51	0,59	1,41	0,96	0,94
4	Rasio hutang terhadap modal	0,51	0,59	1,43	0,97	0,95

Sumber Data : DPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengklasifikasi belanja berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung terkait dengan metode penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran berbasis kinerja yang mulai diterapkan dalam era otonomi daerah merupakan manifestasi untuk meningkatkan dan mempercepat efektivitas proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penganggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran daripada menitikberatkan alokasi biaya atau input semata dan mengabaikan keluaran yang akan dicapai. **Output** (keluaran) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input yang digunakan. **Input** (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Dalam anggaran berbasis kinerja, setiap penggunaan sumber daya yang direncanakan dalam APBD harus dapat dikaitkan dengan produk berupa barang atau jasa yang akan dihasilkan, kecuali untuk belanja tidak langsung yang memang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan barang dan jasa yang dihasilkan.

Pada tahun 2007 dan tahun 2008, jumlah belanja tidak langsung sedikit lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Akan tetapi, pada tahun 2009 dan tahun 2010 jumlah belanja langsung sedikit lebih besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Pada tahun 2007 jumlah belanja langsung Provinsi Sumatera Barat lebih lebih besar dibandingkan dengan tidak langsung, yaitu Rp668.009 juta berbanding

Rp577.432 juta. Sedangkan pada tahun 2010, jumlah belanja tidak langsung adalah Rp1.033.035 juta dan belanja langsung Rp1.208.010 juta.

Pertumbuhan belanja tidak langsung rata-rata per tahun adalah 15,64%, yaitu dari Rp668.009 pada tahun 2007 menjadi Rp1.033.035 juta pada tahun 2010. Analisis berdasarkan elemen pembentuk belanja tidak langsung menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja tidak langsung untuk belanja pegawai jauh lebih besar daripada belanja tidak langsung lainnya; seperti belanja sosial, belanja tak terduga, dan belanja hibah. Pada tahun 2007 jumlah belanja pegawai berjumlah Rp.308.430 juta dan meningkat menjadi Rp.452.839 juta pada tahun 2009. Di samping peningkatan jumlah pegawai Provinsi Sumatera Barat, peningkatan belanja pegawai ini juga disebabkan adanya kebijakan kenaikan gaji yang ditetapkan pemerintah, khususnya antara tahun 2007 dengan 2008.

Provinsi Sumatera Barat juga memberikan bagi hasil dan bantuan keuangan kepada kota/kabupaten yang jumlah juga relatif besar, sesuai dengan kewenangan dan kewajiban daerah provinsi. Pada tahun 2007, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan berjumlah Rp300.526 juta dan meningkat menjadi Rp463.591 juta pada tahun 2009, Sedangkan belanja tidak langsung lainnya memiliki jumlah dan proporsi yang relatif kecil. Antara tahun 2007 sampai tahun 2010, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak mengeluarkan belanja bunga karena sampai saat ini belum memiliki hutang jangka panjang.

Dalam kurun 2007 – 2010 pertumbuhan belanja langsung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu 27,90% berbanding 15,64%. Pertumbuhan komponen belanja langsung yang terbesar terjadi untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa, sedangkan belanja langsung untuk pegawai mengalami penurunan yang cukup berarti. Dengan demikian, kebijakan belanja Provinsi Sumatera Barat telah berubah ke arah yang lebih baik, yang menekankan belanja untuk meningkatkan kinerja dan mempunyai dampak pembangunan ekonomi yang lebih besar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya untuk memperbaiki komposisi belanja kearah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan memperbesar jumlah belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung, khususnya untuk belanja pegawai mengalami peningkatan yang relatif lebih rendah, bahkan untuk belanja langsung; pegawai mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007. Tabel 3.4 berikut memperlihatkan jumlah dan pertumbuhan realisasi belanja Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 – tahun 2010.

Tabel 3.4
Jumlah dan Pertumbuhan Realisasi Belanja
Provinsi Sumatera Barat, tahun 2007 - tahun 2010

No	Uraian	TA 2007	TA 2008	TA 2009	TA 2010	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		(Rp.Juta)				
A	Belanja Tidak Langsung	668.009	906.348	769.823	1.033.035	15,64
1	Belanja Pegawai	308.430	367.199	396.240	452.839	13,66
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	
4	Belanja Hibah	-	24.628	16.760	57.091	
5	Belanja Bantuan Sosial	54.987	35.067	29.514	55.848	0,52
6	Belanja Bagi Hasil	177.336	229.538	266.352	290.666	17,91
7	Belanja Bantuan Keuangan	123.189	249.799	58.531	172.925	11,97
8	Belanja Tidak Terduga	4.066	119	2.425	3.667	(3,39)
B	Belanja Langsung	577.432	735.008	887.581	1.208.010	27,90
1	Belanja Pegawai	76.255	59.173	66.105	79.095	1,23
2	Belanja Barang dan Jasa	241.916	313.732	359.444	545.847	31,16
3	Belanja Modal	259.261	362.103	462.032	583.068	31,02
	Total Belanja	1.245.441	1.641.357	1.657.404	2.241.045	21,63

Sumber Data : DPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Pengeluaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dimaksudkan untuk mengetahui jumlah belanja untuk aparatur, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, termasuk belanja untuk anggota DPRD dan Kepala Daerah serta belanja modal yang diperuntukkan bagi aparatur. Semakin tinggi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan belanja yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2007 – 2010 yang relatif baik sebagaimana di jelaskan di atas, kebijakan belanja aparatur juga menunjukkan kebijakan yang relatif baik. Hal ini juga ditunjukkan oleh realisasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur, dimana pada tahun 2007 berjumlah Rp619.186 dan meningkat menjadi Rp1.312.699 pada tahun 2010. Peningkatan yang lebih besar untuk belanja aparatur ini terutama adalah untuk belanja langsung; yang berhubungan untuk peningkatan kinerja aparatur, seperti belanja modal. Peningkatan belanja modal adalah 31,02% sedangkan peningkatan belanja pegawai baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung adalah sebesar 15% atau kurang.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Barat,
Tahun 2007 - 2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		(Rp' Juta)				
A	Belanja Tidak Langsung	308.430	367.199	404.300	460.067	14,26
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	218.127	245.710	307.148	327.188	14,47
2	Belanja Tambahan Penghasilan	76.873	108.355	63.640	91.902	6,13
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	13.430	13.134	13.480	12.455	(2,48)
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah			20.031	28.522	
B	Belanja Langsung	310.756	421.276	693.588	852.632	40,00
1	Belanja Pegawai	51.495	59.173	66.105	79.095	15,38
2	Belanja Honorarium PNS	n.a	n.a	31.010	46.948	51,39
3	Belanja Uang Lembur	n.a	n.a	13.965	15.558	11,40
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	n.a	n.a	9.494	6.626	(30,21)
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	n.a	n.a	23.610	26.154	10,78
6	Belanja premi asuransi kesehatan	n.a	n.a	8.417	4.567	(45,74)
7	Belanja makanan dan minuman pegawai	n.a	n.a	31.919	38.578	20,86
8	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	n.a	n.a	3.300	3.300	-
9	Belanja Pakaian Kerja, Khusus dan Hari-hari Tertentu	n.a	n.a	1.221	1.209	(0,98)
10	Belanja perjalanan dinas	n.a	n.a	87.299	109.862	25,85
11	Belanja perjalanan pindah tugas	n.a	n.a	190	173	(8,87)
12	Belanja Pemulangan Pegawai	n.a	n.a	-		
13	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	259.261	362.103	462.032	583.068	31,02
	TOTAL	619.186	788.475	1.097.888	1.312.699	28,46

Sumber Data : DPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Berdasarkan hasil pengolahan data perbandingan antara belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur dengan total belanja dan pembiayaan, terjadi sedikit fluktuasi proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur antara tahun 2007 – tahun 2010. Pada tahun 2007, proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan belanja aparatur adalah 49,72%, dan turun menjadi 48,04% pada tahun 2008. Tetapi, pada tahun 2009 proporsi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur meningkat kembali dan jauh lebih tinggi yaitu menjadi 66,24% dan 58,58% pada tahun 2010. Hal ini terutama terjadi karena adanya peningkatan belanja tidak langsung akibat peningkatan gaji dan jumlah pegawai serta peningkatan belanja modal untuk aparatur yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya karena Gempa 30 september

2009 maka jumlah belanja yang dapat direalisasikan pada tahun 2009 ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun 2008. Akibatnya, komposisi pemenuhan kebutuhan belanja aparatur mengalami peningkatan. Tabel 3.6 berikut menyajikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel 3.6
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2007 – 2010

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp juta)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp juta)	Prosentase
1	Tahun anggaran 2007	619.186	1.245.441	49,72
2	Tahun anggaran 2008	788.475	1.641.357	48,04
3	Tahun anggaran 2009	1.097.888	1.657.404	66,24
4	Tahun anggaran 2010	1.312.699	2.241.045	58,58

Sumber Data : DPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah dana yang dapat digunakan untuk mengerakkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat relatif terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus dapat meningkatkan Kualitas Belanja, baik dari segi ketepatan kegiatan yang harus didanai untuk mencapai sasaran tertentu maupun menerapkan konsep value for money dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat dicapai melalui tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas sehingga mampu menyusun perencanaan yang berkualitas dan penyusunan analisis standar belanja untuk kegiatan rutin serta menyusun standar harga yang lebih baik dan akurat.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dibedakan atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pasal 5 ayat 3 undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pembiayaan dibutuhkan untuk menutupi defisit yang

terjadi, sedangkan jika terjadi surplus maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk membiayaan kebutuhan dana pada masa datang.

Analisis terhadap pendapatan, belanja, dan pengeluaran pembiayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2007 – tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan belanja, termasuk pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus yang terjadi pada tahun 2007 relatif rendah, yaitu sebesar Rp30.722 juta dan meningkat menjadi Rp70.585 juta pada tahun 2008, dan menjadi Rp360.590 juta pada tahun 2009. Surplus yang sangat besar pada tahun 2009 tidak hanya disebabkan tertundanya dan atau terkendalanya pelaksanaan banyak kegiatan karena Gempa 30 September 2009 tetapi juga disebabkan adanya penerimaan pajak daerah yang lebih besar daripada yang dianggarkan.

Akibat lebih lanjut dari surplus yang terjadi pada 3 tahun terakhir tersebut dan ditambah dengan dana SILPA pada tahun 2006 sebesar Rp212.783 juta, maka jumlah SILPA yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat pada awal tahun 2010 berjumlah Rp674.679. Akumulasi Surplus yang cukup besar tersebut telah dibelanjakan pada tahun 2010, sehingga jumlah belanja pada tahun 2010 lebih dari Rp2,2 Triliun. Tabel 3.7 berikut memperlihatkan perkembangan Surplus Riil dan dan SILPA pada masing-masing tahun.

Tabel 3.7
Surplus (Defisit) Riil Anggaran Provinsi Sumatera Barat,
Tahun 2007 – 2010 (Rp juta)

NO	Uraian	TA 2007	TA 2008	TA 2009	TA 2010
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.281.400	1.727.424	2.026.241	1.918.052
	Dikurangi realisasi:				
2	Belanja Daerah	1.245.441	1.641.357	1.657.404	2.241.045
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.236	15.482	8.248	19.884
A	Surplus (Defisit) riil	30.722	70.585	360.590	(342.877)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:				
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	212.783	243.505	314.090	674.679
5	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	212.783	243.505	314.090	674.679
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	243.505	314.090	674.679	331.803

Sumber Data : DPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Pengeluaran mengikat bermakna pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Sedangkan belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk menganalisis jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan karena kewajiban, pemerintah baik karena peraturan maupun karena ada perjanjian. Semakin tinggi jumlah pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Karena selama ini Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki pinjaman, tidak ada dana cadangan, dan tidak memiliki kontrak sewa menyewa jangka panjang, maka pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama terbatas pada belanja tidak langsung; gaji dan tunjangan, belanja Dewan dan Kepala Daerah, belanja bagi hasil, serta belanja langsung; Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, dan belanja jasa kantor.

Karena terjadinya peningkatan belanja yang cukup signifikan antara tahun 2007 dengan tahun 2008 akibat kenaikan gaji, maka analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama akan dilakukan berdasarkan pertumbuhan belanja yang terjadi antara tahun 2008 – 2010. Hasil perhitungan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan jumlah yang cukup besar, yaitu Rp579.236 pada tahun 2008 dan meningkat menjadi Rp747.080 pada tahun 2010. Hal ini berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 13,57%. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Sumatera Barat

minimal harus menyediakan dana sebesar jumlah tersebut di atas karena ikatan kerjasama yang telah disepakati sebelumnya.

Tabel 3.8
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi Sumatera Barat, tahun 2007 – 2010

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	Pertumbuhan rata-rata (%)
		(Rp)				
A	Belanja Tidak Langsung	408.893	488.382	586.981	630.310	13,60
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	218.127	245.710	307.148	327.188	15,40
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	13.430	13.134	13.480	12.455	(2,62)
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	
4	Belanja bagi hasil	177.336	229.538	266.352	290.666	12,53
B	Belanja Langsung	86.856	90.854	98.794	116.770	13,37
1	Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.	16.469	14.209	20.938	28.774	42,30
2	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	5.993	-	9.494	6.626	(30,21)
3	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)	64.394	76.644	68.362	81.369	3,04
4	Belanja sewa gedung kantor(yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-
5	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-
C	Pembiayaan Pengeluaran	-	-	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B+C)	495.749	579.236	685.775	747.080	13,57

Sumber Data : DPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicapai Provinsi Sumatera Barat dalam periode 2006 – 2010 serta perubahan peraturan yang berlaku khususnya tentang pajak dan retribusi daerah dan perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Perubahan peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah melalui UU No. 28 tahun 2009, dengan mengizinkan pengenaan tarif pajak progresif sehingga diperkirakan akan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah. Akan tetapi pengalihan wewenang pengelolaan pajak air tanah dari propinsi ke kota/kabupaten akan mengakibatkan penurunan

penerimaan pajak daerah. Oleh sebab itu, diperkirakan pajak daerah akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2011, tetapi setelah itu hanya akan mengalami sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan rata-rata per tahun sebelumnya, yaitu 5% per tahun.

Retribusi daerah menunjukkan prestasi yang cukup baik dalam periode 2006 -2010, yaitu dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 17,08%. Prestasi seperti ini harus dipertahankan pada masa datang. Namun karena adanya perubahan status Rumah Sakit Umum menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka terjadi perubahan klasifikasi pendapatan, yaitu dari retribusi daerah menjadi lain-lain PAD yang sah.

Secara umum, penerimaan retribusi daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut. Dengan demikian, kalau pun kemungkinan akan terjadi fluktuasi sesuai dengan perkembangan kondisi perekonomian daerah, namun secara rata-rata diperkirakan akan mampu mempertahankan prestasinya pada tingkat pertumbuhan 9,14% per tahun sebagaimana pertumbuhan yang terjadi antara tahun 2009 dengan 2010.

Pembenahan manajemen pengelolaan dari usaha-usaha milik daerah yang ada saat ini diperkirakan masih mampu memberikan kontribusi yang memadai. Jika pada tahun 2006 sampai tahun 2010 terjadi pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 16,32%, tetapi antara tahun 2008 dengan tahun 2009 hanya sebesar 8,50%. Berdasarkan hal tersebut maka proyeksi sampai tahun 2015 didasarkan perkiraan pesimis dengan pertumbuhan sama besarnya dengan tahun 2008-2009, yaitu 8,50% pertahun. Dalam hal ini pemerintah daerah harus membuat kebijakan bahwa penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan ini dialokasikan kembali untuk pengembangan kapasitas pengembalian investasi daerah.

Sedangkan lain-lain PAD yang sah membutuhkan seseorang yang mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga dia mampu menyusun perencanaan kas dengan baik sehingga kelebihan dana dalam periode tertentu dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah. Hal seperti ini telah dibuktikan oleh beberapa daerah yang mempunyai seorang Manajer Keuangan yang baik. Di samping itu, pada pos pendapatan ini juga terdapat sumber PAD yang berasal dari Rumah Sakit Umum yang berstatus BLUD. Oleh sebab itu, diperkirakan pendapatan daerah akan dapat ditingkatkan dari lain-lain PAD sebesar 5% pertahun.

Pertumbuhan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil pajak diperkirakan dapat ditingkatkan menjadi 10,32% sejalan dengan perkiraan peningkatan pendapatan masyarakat. Sedangkan penerimaan daerah yang berasal dari bagi hasil bukan pajak dari tahun ke tahun sangat berfluktuasi, dengan standar deviasi yang cukup tinggi. Untuk periode 2006 – 2010 terjadi pertumbuhan bagi hasil bukan pajak sebesar minus 18,05%. Namun pada masa datang diperkirakan dapat ditingkatkan tetap dapat dipertahankan yaitu 5,00%. Hal ini dapat dilakukan di samping mengoptimalkan sumberdaya alam yang ada saat ini, juga meningkatkan penelitian untuk mendapatkan potensi pajak yang berasal dari sumberdaya alam lainnya.

Pertumbuhan dana alokasi umum antara tahun 2006 – tahun 2010 adalah 8,52%. Pertumbuhan yang sangat besar terjadi antara tahun 2005 sampai tahun 2007 yaitu rata-rata pertahun sebesar 48,58%. Tetapi antara tahun 2008 sampai tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu menjadi 2,34%% pertahun. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah dalam pemekaran daerah sehingga pertumbuhan dana alokasi umum menjadi jauh lebih rendah. Kebijakan pemekaran seperti ini pada tahun-tahun mendatang akan diperketat sehingga diperkirakan jumlah dana alokasi umum yang diterima daerah akan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, untuk memproyeksikan pendapatan daerah yang berasal dari dana alokasi umum akan dilakukan berdasarkan data yang lebih logis yaitu antara tahun 2007 sampai tahun 2010.

Pertumbuhan pendapatan daerah yang berasal dari dana alokasi umum pada tahun 2007 – tahun 2010 adalah 6,59%. Tingkat pertumbuhan 6,59% ini lebih logis dan digunakan untuk memproyeksikan dana alokasi umum sampai tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi untuk sumber dana yang berasal dari dana alokasi khusus, yang diperkirakan mengalami pertumbuhan menjadi 5%. Sedangkan sumber dana yang berasal dari hibah dan dana penyesuaian diperkirakan tidak akan mengalami perubahan yang berarti. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dihitung proyeksi pendapatan Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2011 – tahun 2015 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Analisis berikutnya adalah untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah antara tahun 2011 cukup besar, tetapi

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pada dasarnya adalah menyangkut dengan unsur dan aspek yang sangat penting dan strategis serta menentukan arah pembangunan Provinsi Sumatera Barat kedepan. Karakteristik isu-isu strategis adalah kondisi yang mendasar, berjangka panjang dan mendesak dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan daerah baik pada waktu sekarang maupun dimasa mendatang. Ini berarti bahwa, apabila isu-isu strategis ini tidak diantisipasi secara baik, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis mencakup berbagai aspek pembangunan daerah yang meliputi bidang agama dan budaya ekonomi, sosial dan fisik prasarana. Sedangkan tantangan masa depan merupakan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan masa yang lebih baik. Kesemua aspek ini akan dihadapi dan harus dipecahkan untuk dapat mewujudkan pembangunan daerah Sumatera Barat dimasa depan yang lebih baik dan diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini juga merupakan bagian penting dan perlu dipertimbangkan dalam menentukan visi, misi, arah dan prioritas pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 5 tahun mendatang.

4.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Daerah

Permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada dasarnya mencakup beberapa aspek, yang menyangkut dengan kendala dan tantangan yang harus segera dipecahkan dalam mendorong proses pembangunan daerah di masa depan. Permasalahan tersebut meliputi beberapa bidang yaitu ekonomi, sosial-budaya dan fisik prasarana. Kendala dan tantangan bidang ekonomi menyangkut dengan permasalahan dan kendala yang harus dipecahkan untuk dapat mendorong proses pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kemakmuran daerah. Tantang bidang sosial menyangkut dengan kendala dan permasalahan dalam bidang sosial yang perlu segera dipecahkan untuk dapat

mewujudkan kondisi sosial yang sejahtera dan harmonis dalam masyarakat. Sedangkan kendala dan tantangan bidang fisik prasarana adalah berbagai permasalahan pokok yang harus segera ditanggulangi untuk dapat mendorong proses pembangunan wilayah secara terarah dan berkelanjutan.

Permasalahan pokok pembangunan daerah yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat dewasa ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi pergeseran nilai sehingga terjadi ketidak selarasan antara tingkah laku masyarakat dengan hukum dan kaedah yang terdapat dalam ajaran agama, baik Islam maupun agama lainnya. Sudah menjadi kenyataan umum dalam masyarakat bahwa apa yang dilarang dalam agama justru dianggap hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada umumnya agama melarang umatnya menipu dan mencuri, tetapi dalam kenyataannya korupsi dan penipuan menjadi hal yang banyak terjadi dalam masyarakat. Akibatnya bagi proses pembangunan daerah adalah banyak sekali upaya-upaya pembangunan yang sebenarnya sangat baik yang telah direncanakan tetapi ternyata belum dapat diraih manfaatnya semaksimal mungkin untuk peningkatan proses pembangunan daerah dan penciptaan keadilan dalam masyarakat.
2. Adanya kondisi geografis dan posisi Sumatera Barat yang kurang strategis bagi pengembangan ekonomi daerah. Kondisi geografis daerah di Sumatera Barat adalah berbukit-bukit sehingga biaya angkutan barang menjadi relatif tinggi sehingga menimbulkan kendala bagi pengembangan kegiatan pertanian, industri, perdagangan dan jasa. Sementara itu, Sumatera Barat juga mempunyai hutan lindung yang cukup luas sehingga lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan pertambangan juga sangat terbatas. Selain itu, letak daerah yang berada di pantai Barat pulau Sumatera ternyata membelakangi pusat kegiatan ekonomi dunia, yaitu Singapura, Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan China, yang semuanya berada di Timur. Akibatnya sinergi antar perekonomian Sumatera Barat dengan negara-negara maju menjadi sangat lemah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah juga cenderung menjadi lambat.
3. Kondisi prasarana dan sarana, terutama berkaitan dengan sektor perhubungan yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat ternyata juga belum memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan sering terjadinya bencana alam (longsor, banjir, gempa bumi dan tsunami). Akibatnya kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dan pembangunan daerah umumnya mengalami kendala yang cukup besar dalam meningkatkan aktifitasnya sehingga peningkatan kegiatan ekonomi dan kemakmuran daerah belum dapat terwujud sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pada umumnya.

4. Kemampuan penerapan IPTEK daerah yang masih sangat rendah sehingga kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia menjadi sangat terbatas. Disamping itu, IPTEK yang rendah juga mengakibatkan mutu dan kualitas produk yang dapat dihasilkan dan kemampuan untuk menghasilkan produk baru menjadi relatif kurang. Hal ini terjadi terutama disebabkan oleh penggunaan teknologi produksi yang masih tradisional dan belum berkembangnya kegiatan penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) pada dunia usaha. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan masih rendahnya daya saing produk yang dapat dihasilkan daerah sehingga menimbulkan kendala sangat serius dalam mengembangkan kegiatan ekonomi daerah. Kendala ini menjadi semakin serius dalam era globalisasi dan perdagangan bebas dimana tingkat persaingan menjadi sangat tajam
5. Masih relatif rendahnya efisiensi kegiatan produksi dan pemasaran produk sebagai akibat dari kegiatan produksi yang umumnya mempunyai skala kecil dan dikelola dengan pola manajemen tradisional yang kurang efisien sehingga harga jual dipasaran relatif tinggi. Faktor penyebab kurang efisiennya kegiatan produksi adalah karena relatif rendahnya produktivitas tenaga kerja, potensi sumberdaya alam yang terbatas dan relatif tinggi ongkos transport sebagai akibat dari kondisi geografis yang umumnya berbukit-bukit. Rendahnya daya saing produk daerah ini menyebabkan kurang berkembangnya kegiatan bisnis dan ekspor serta kurang menariknya melakukan investasi di Sumatera Barat.
6. Masyarakat Sumatera Barat yang menganut budaya Minangkabau memiliki tanah ulayat cukup luas yang dimiliki oleh kaum. Permasalahan yang dihadapi adalah tanah ulayat yang dimiliki tidak mempunyai kepastian hukum, karena tidak mempunyai bukti kepemilikan serta batas-batas tanah yang jelas. Kondisi ini mengakibatkan pemanfaatan tanah ulayat sulit untuk mendukung

kegiatan usaha dan guna menarik investor menjadi sangat terbatas sehingga manfaat ekonomi yang dapat diperoleh masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat tersebut belum dapat diperoleh secara maksimal untuk mendorong kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

7. Walaupun proses pembangunan daerah secara terencana telah berjalan sejak dimulainya pelaksanaan *Rencana Pembangunan Lima Tahun* (REPELITA) tahun 1969 yang lalu, namun demikian sampai saat ini, permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang masih tinggi tetap merupakan permasalahan pokok pembangunan Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini. Namun demikian selama 5 tahun terakhir telah terabaikan perbaikan yang cukup signifikan. Kondisi ini terlihat dari perkembangan persentase penduduk menganggur yang mencapai 13,34% pada tahun 2005 dan menurun menjadi 7,90% pada tahun 2009. Sedangkan perkembangan tingkat kemiskinan juga memperlihatkan perbaikan yang cukup signifikan dari 12,07% pada tahun 2006 menjadi 9,54% pada tahun 2009. Pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat masih belum dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan. Karena itu, pengangguran dan kemiskinan masih tetap sebagai salah satu permasalahan pokok dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, Sumatera Barat sampai saat ini masih mempunyai 8 kabupaten daerah tertinggal yang perlu segera ditanggulangi.
8. Permasalahan dan sekaligus ancaman serius yang dialami oleh Sumatera Barat adalah bahwa daerah ini ternyata sangat rawan terhadap bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir dan tsunami. Bencana alam ini sudah sering terjadi dan yang paling serius akibatnya adalah gempa besar 7,9 skala Richter yang terjadi di daerah Pariaman pada tanggal 30 September tahun 2009 yang lalu yang menelan korban sebanyak 1,200 orang dan ratusan bangunan runtuh dan rusak berat. Akibat negatifnya sangat dirasakan terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah karena dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
9. Permasalahan dan ancaman lainnya yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah dalam bentuk peningkatan persaingan sebagai akibat dari adanya globalisasi dan pelaksanaan *Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN* (CAFTA) yang secara resmi mulai berlaku tahun 2010. Sejalan dengan hal tersebut telah disepakati pula oleh negara-negara

di kawasan Asia-Pasifik untuk melaksanakan perdagangan bebas pada tahun 2020 mendatang. Peningkatan persaingan ini segera akan menjadi permasalahan dan tantangan yang sangat serius dan bahkan menjadi ancaman karena daya saing produk yang dapat dihasilkan oleh daerah Sumatera Barat sampai saat ini umumnya masih rendah yang terjadi sebagai cerminan dari rendahnya tingkat efisiensi sehingga biaya produksi rata-rata masih relatif tinggi. Disamping itu penggunaan teknologi untuk kegiatan produksi yang belum maju sehingga kualitas produk yang dapat dihasilkan umumnya masih relatif rendah.

10. Permasalahan pengembangan Sumatera Barat selain karena kondisi fisik juga adanya kesenjangan perkembangan antara wilayah utara dengan wilayah selatan, seperti : (1) adanya disparitas pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan, sehingga wilayah selatan (Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, Pesisir Selatan) relatif kurang berkembang dibandingkan wilayah utara (2) Terdapatnya karakteristik alam yang berbukit dan bergunung, dimana dari luas Provinsi Sumatera Barat 4.229.721 Ha, lahan dengan kelerengan lebih dari 40% mencapai proporsi 39,03% dari luas wilayah provinsi, kawasan non hutan hanya 38,54% dan luas kawasan budidaya 54,83%, belum optimalnya pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam yang ada di Provinsi Sumatera Barat, pusat-pusat pertumbuhan yang ada belum mampu menciptakan rembesan kepada wilayah-wilayah belakangnya, masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
11. Permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat saat ini sampai beberapa tahun ke depan adalah terbatasnya kesempatan kerja, hal ini disebabkan karena pertambahan jumlah angkatan kerja baru tidak diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Akibatnya adalah lapangan pekerjaan yang terbatas harus diperebutkan oleh warga Provinsi Sumatera Barat dengan warga daerah sekitarnya.
12. Masalah utama kesehatan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat terutama masalah kekurusan, adalah sebesar 15.7%. Hal ini merupakan permasalahan kesehatan yang sudah dianggap Kritis. Dari 19 Kabupaten/Kota, hanya Padang Panjang dan Kota Bukittinggi yang prevalensi kekurusan dibawah 10%. Ada 7 Kabupaten/Kota yang menjadi permasalahan kesehatan yang serius yaitu: Kabupaten

Padang Pariaman, Pasaman, Payakumbuh, Kota Pariaman, Padang dan Sawahlunto, Kota Solok. Disamping itu yang ada 10 Kabupaten/Kota yang kritis, prevalensi diatas 15% yaitu Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Koto, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat.

4.2 ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu negara atau daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Isu-isu pembangunan pokok pembangunan daerah dan bersifat strategis yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat dewasa ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemahaman Agama dan Budaya

Isu strategis dibidang sosial budaya utama Sumatera Barat adalah pemahaman akan agama dan budaya dalam masyarakat yang dapat memberikan arah dan bimbingan terhadap pelaksanaan proses pembangunan daerah merupakan kekuatan utama yang terdapat dalam masyarakat. Aspek ini perlu diberikan tekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Sumatera Barat sebagai provinsi terkemuka berbasis sumberdaya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang;

2. Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik

Pengalaman masa lalu di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat, menunjukkan bahwa tata-pemerintah yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Karena itu, upaya perbaikan tata pemerintahan (*Good Governance*) merupakan isu strategis yang sangat penting untuk mendorong proses pembangunan daerah di Sumatera Barat. Perbaikan tata-pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan

pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode 5 tahun mendatang;

3. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Isu strategis lainnya yang juga cukup menentukan masa depan pembangunan adalah dilaksanakannya otonomi daerah sehingga kewenangan dan peranan pemerintah daerah dalam menggerakkan proses pembangunan daerah menjadi semakin besar. Hal ini sangat penting artinya untuk dapat mendorong aspirasi, inisiatif dan kreasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumberdaya pembangunan yang tersedia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat;

4. Kualitas Sumberdaya Manusia

Sejalan dengan hal tersebut, pengalaman di masa lalu menunjukkan pula bahwa kualitas sumberdaya manusia yang terdapat di Sumatera Barat adalah relatif baik. Kondisi ini tercermin dari perkembangan *Indek Pembangunan Manusia* (IPM) yang sudah cukup baik yang didalamnya mencakup pendapatan, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Kualitas sumberdaya yang relatif baik akan dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk dapat proses pembangunan daerah berbasis sumberdaya manusia dalam rangka proses pembangunan daerah yang berlandaskan pada IPTEK. Karena itu, unsur kualitas sumberdaya manusia ini juga dapat diberikan perhatian yang cukup tinggi dalam analisis faktor strategis sebagai faktor penggerak pembangunan daerah;

5. Kemampuan Wirausaha

Disamping itu, kenyataan menunjukkan pula bahwa masyarakat Sumatera Barat sampai saat ini terkenal mempunyai jiwa dan semangat wirausaha (*Entrepreneurship*) yang cukup tinggi dan ulet. Kondisi tersebut ditandai dengan banyaknya anggota masyarakat yang bergerak dan sukses dalam bidang perdagangan, industri dan jasa walaupun umumnya masih dalam skala kecil dan menengah (UKM). Semangat kewirausahaan ini merupakan modal dasar yang sangat penting dan perlu terus dikembangkan untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah ke depan pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah Sumatera Barat;

6. Daya Beli Masyarakat

Isu strategis berikutnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya kebutuhan dan daya beli masyarakat daerah sebagai hasil dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Peningkatan kebutuhan dan daya beli tersebut dapat pula memicu peningkatan permintaan efektif yang dapat mendorong kegiatan investasi masuk ke daerah. Peningkatan kegiatan investasi ini selanjutnya akan mendorong pula peningkatan penyediaan lapangan kerja dan sumber penghasilan masyarakat dan pemerintah daerah;

7. Daya Saing Daerah Untuk Menghadapi Globalisasi

Proses globalisasi kelihatannya sudah menjadi kenyataan umum yang tidak dapat lagi ditolak. Untuk kawasan ASEAN dimana Indonesia termasuk di dalamnya, proses globalisasi tersebut telah berjalan dengan dimulainya pelaksanaa *Asean Free Trade Area* (AFTA) sejak tahun 2003 yang lalu dan akan dikembangkan tahun 2010 dengan masuknya China ke dalamnya. Sedangkan Untuk kawasan Asia-Pasifik akan dimulai pada tahun 2020 mendatang. Kondisi ini dapat merupakan masalah dan kendala bagi pengembangan kegiatan ekonomi daerah, tetapi sekaligus juga adalah peluang untuk peningkatan hubungan ekonomi internasional. Isu strategis dalam hal ini adalah peningkatan daya saing komoditi produksi daerah sehingga dapat menembus pasaran dunia sehingga volume perdagangan internasional akan dapat ditingkatkan. Bila hal ini dapat diwujudkan, maka perekonomian daerah otomatis juga akan meningkat sehingga penyediaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan juga akan dapat diperbaiki;

8. Akses Dengan Daerah Tetangga

Untuk mengantisipasi peningkatan volume lalu lintas yang sangat tinggi dengan semakin berkembang pembangunan di Provinsi Riau dan selesainya pembangunan Fly Over Kelok Sembilan, maka pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan untuk membangun jalan dua jalur dari Padang sampai ke Kota Payakumbuh. Pembangunan Jalan 2 jalur ini dari Batas Kota Padang sampai dengan batas Kota Payakumbuh. Rencana perbaikan dan pelebaran jalan tersebut merupakan isu strategis yang cukup

penting dan dapat menjadikan hubungan ekonomi dan sosial antara Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Riau dan sebaliknya akan semakin lancar dan hal ini akan membawa pengaruh besar terhadap pembangunan daerah Sumatera Barat. Perkembangan masa depan yang akan muncul adalah semakin banyaknya arus lalu lintas barang dan orang, baik yang masuk maupun yang ke luar dari Provinsi Sumatera Barat menuju Provinsi Riau yang pertumbuhan ekonominya sejak 10 tahun terakhir ternyata sangat pesat;

9. Prasarana dan Sarana Daerah

Pembangunan bandar udara Minangkabau, Perluasan pelabuhan Teluk Bayur dan pengembangan prasarana dan sarana perhubungan juga diperkirakan merupakan isu strategis yang cukup penting bagi peningkatan peranan Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dikawasan pantai Barat Sumatera. Dengan adanya perluasan ini selanjutnya juga akan dapat mendorong peningkatan kegiatan ekonomi daerah yang terkait dengan provinsi kabupaten dan kota daerah tetangga yang berada di pantai Barat Pulau Sumatera. Disamping itu, melalui pengembangan bandar udara dan pelabuhan ini diperkirakan akan dapat pula mendorong pengembangan kegiatan ekspor daerah;

10. Dukungan Pemerintah Nasional

Isu strategis berikutnya yang masih tetap besarnya dukungan dan bantuan pemerintah nasional terhadap kegiatan pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat. Dukungan dan bantuan ini ditunjukkan dari masih cukup besarnya perhatian dan tanggung jawab serta dana dekonsentrasi (APBN) yang dialokasikan untuk pembangunan program dan kegiatan berskala besar yang berlokasi di daerah Sumatera Barat. Dana dekonsentrasi yang cukup besar ini perlu terus disinergikan dengan dana APBD Sumatera Barat sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal untuk meningkatkan kegiatan pembangunan daerah;

11. Daerah Tertinggal dan Ketimpangan Pembangunan

Untuk mengatasi disparitas pembangunan antara wilayah utara dan wilayah selatan (Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, Pesisir Selatan) perlu mengoptimalkan pemanfaatan potensi Sumberdaya Alam yang ada di Provinsi Sumatera Barat, menciptakan rembesan pusat-pusat pertumbuhan kepada wilayah-wilayah belakangnya,

meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk mengentaskan daerah tertinggal diperlukan peningkatan akses transportasi yang menghubungkan daerah tertinggal dengan daerah lainnya serta kegiatan-kegiatan sarana prasarana sosial ekonomi pada daerah tertinggal;

12. Bencana Alam

Lebih dari 50% luas Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang mempunyai zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan menengah. Kawasan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat tersebar di seluruh wilayah terutama pada sepanjang jalur sesar aktif (patahan semangka). Isu strategis dalam hal ini adalah menyediakan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana;

13. Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk penjagaan terhadap kualitas lingkungan hidup. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Karena peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan isu strategi yang juga sangat penting dalam proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Termasuk dalam isu strategis ini adalah: penjagaan daerah konservasi dan hutan lindung, pengawasan eksploitasi sumberdaya alam, pengawasan pencemaran udara, sungai dan laut, peningkatan kebersihan kota dan lain-lainnya.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, adalah rencana pelaksanaan tahap ke dua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2025 adalah "Menjadi Provinsi Berkemajuan Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamis Pada Tahun 2025".

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJM Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan pula 5 misi utama pembangunan daerah, meliputi : 1) Mewujudkan Kehidupan Agama dan Budaya Berdasarkan Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; 2) Mewujudkan Sistem Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik; 3) Mewujudkan Sumberdaya Insani yang Berkualitas, Amanah dan Berdaya Saing Tinggi; 4) Mewujudkan Ekonomi Produktif dan Mampu Bersaing di Dunia Global; 5) Mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang Baik dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam Berkelanjutan.

Penekanan dan skala prioritas pembangunan pada RPJM ke 2 ini secara umum ditujukan untuk terwujudnya pemantapan landasan pembangunan dengan penekanan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi maju di bidang pertanian, perdagangan dan jasa. Kondisi pemerintahan yang baik yang telah ditekankan pada RPJM ke 1 akan terus disempurnakan sehingga akan mempercepat proses pembangunan sektor pertanian yang modern. Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk barang dan jasa Sumatera Barat sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian akan dapat dikurangi tingkat pengangguran dan angka kemiskinan sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan dan kesehatan akan semakin membaik. Pada periode ini diharapkan pengembangan sektor pariwisata sudah semakin kondusif karena kesejahteraan masyarakat telah membaik ditunjukkan dengan tingkat pendidikan, kesehatan, disiplin atau keteraturan, kebersihan dan lain-lain. Disamping itu, pada periode ini juga diharapkan penggunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maju di bidang pertanian

sudah semakin meningkat dengan didorongnya upaya penguasaan teknologi maju melalui revitalisasi penyuluh pertanian dan pengelola usaha jasa.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terpadu dan bersinergi antara pembangunan nasional dan pembangunan daerah, diperlukan sinkronisasi prioritas nasional dan daerah. Sehubungan dengan itu perlu digambarkan terlebih dahulu visi dan misi serta prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2010-2014, yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam penentuan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran ringkas visi, misi, dan agenda pembangunan nasional.

Visi Indonesia dalam RPJMN Tahun 2010-2014 adalah "Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan". Sejahtera mencerminkan terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi mencerminkan terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia, dan keadilan. Mencerminkan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Sedangkan Misi Pembangunan Nasional adalah 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, 2) Memperkuat pilar demokrasi, dan 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Visi dan Misi pemerintah Tahun 2010-2014 dijabarkan lebih operasional ke dalam sebelas Prioritas Nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan dan memperhatikan prioritas nasional tersebut diatas, serta mengakomodir visi, misi, program kepala daerah terpilih, maka visi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah :

Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat

Masyarakat *Madani* yang dimaksudkan disini adalah suatu masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual

Adil yang dimaksudkan disini adalah suatu kondisi masyarakat yang dapat menjaga kebutuhan, kepentingan dan hak seluruh anggota masyarakat sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran. Karena itu dalam suatu masyarakat yang adil akan terdapat tingkat kesejahteraan yang relatif merata, mempunyai kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha, mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik, pemerintahan sudah berjalan secara demokratis, taat dan sadar hukum, terdapatnya kesamaan peranan pria dan wanita (kesetaraan gender), serta adanya jaminan sosial yang cukup untuk orang cacat dan penduduk usia lanjut.

Sejahtera dalam hal ini dimaksudkan adalah suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, pendidikan yang sudah cukup tinggi dan berbadan sehat dan kuat. Disamping itu, pada masyarakat ini prasarana dan sarana pembangunan sudah mencukupi, lingkungan pemukiman telah tertata dengan baik serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Bermartabat dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu kondisi masyarakat dimana hak azasi manusia sudah terjamin dengan baik, bebas dari tekanan dan rasa takut dan mendapat perlindungan hukum yang cukup dari negara. Dengan demikian masyarakat yang bermartabat adalah suatu masyarakat yang taat azas, dihormati, mempunyai harga diri dan kedudukan yang sama dalam pergaulan masyarakat baik nasional maupun internasional.

5.2 MISI

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan oleh masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah

sebagaimana dijelaskan terdahulu. Berdasarkan pengertian ini, maka misi pembangunan daerah dalam RPJP Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut: Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi : "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"; Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik; Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi; Mewujudkan ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global; dan Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Misi pembangunan jangka menengah daerah ini ditetapkan sejalan dengan RPJP Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah";**
- 2. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;**
- 3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi;**
- 4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global;**
- 5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.**

Misi untuk mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" adalah landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

Misi untuk mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi

demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Misi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

Misi untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global merupakan unsur penting untuk dapat mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Misi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga tidak kalah pentingnya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi

sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

5.3.1. Tujuan Pembangunan

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2010-2015 adalah :

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais
2. Diwarisinya dan diamalkannya nilai-nilai kearifan adat dan budaya
3. Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter
2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang sehat

Tujuan Misi 4 adalah :

1. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis
2. Berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi
3. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya
4. Berkurangnya penduduk miskin, pengangguran dan jumlah daerah tertinggal
5. Terpenuhinya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat

Tujuan Misi 5 adalah :

1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana
2. Tercapainya lingkungan hidup yang ber kualitas

5.3.2. Sasaran Pembangunan

1. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi pertama adalah:
a) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, b) Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama, c) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya, d) Berkembangnya nilai-nilai seni dan sosial budaya, e) Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.
2. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kedua adalah:
a) Meningkatnya efektivitas peraturan daerah, b) Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan, c) Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif, d) Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM, e) Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu, f) Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, g) Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu, h) Meningkatnya kemampuan pemerintahan Nagari/ Desa/ Kelurahan, i) Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, j) Meningkatnya kompetensi aparatur daerah, k) Meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam bekerja, l) Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, m) Berkurangnya temuan audit inspektorat, n) Terselenggaranya penatausahaan kearsipan secara efektif dan efisien, o) Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan, p) Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan.
3. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ketiga adalah:
a) Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD, b) Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar, c) Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah, d) Meningkatnya SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan, e) Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu

pengetahuan dan teknologi, f) Meningkatnya prestasi olah raga, g) Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan, h) Meningkatnya kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan, i) Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat, j) Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, k) Meningkatnya umur harapan hidup, l) Menurunnya persentase prevalensi gizi kurang, m) Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender, n) Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.

4. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi keempat adalah: a) Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; b) Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (*Fishery Processing*); c) Meningkatnya kesejahteraan petani, d) Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah; e) Meningkatnya serapan tenaga kerja pada industri olahan; f) Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; g) Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan; h) Meningkatnya ekspor daerah; i) Meningkatnya investasi daerah; j) Berkembangnya wisata seni dan budaya; k) Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik; l) Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara; m) Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); n) Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial; o) Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya; p) Menurunnya tingkat kemiskinan; q) Meningkatnya akses menuju daerah tertinggal; r) Meningkatnya sarana prasarana pada daerah tertinggal; s) Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan pada daerah tertinggal; t) Meningkatnya kualitas SDM pada daerah tertinggal; u) Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan; v) Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat; w) Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang; x) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air; y) Meningkatnya

sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara;
z) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.

5. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kelima adalah: a) Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana; b) Tersedianya informasi wilayah rawan bencana; c) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana; d) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup; e) Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem; f) Menurunnya jumlah illegal logging

Hubungan hirarkhis antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.1.
Hubungan Hirarkhis Antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

VISI Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah"	1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama 2. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama
	2. Diwarisinya dan diamalkannya nilai-nilai kearifan adat dan budaya	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya 2. Berkembangnya lembaga seni dan sosial budaya
	3. Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat	1. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat
Misi 2: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional	1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel	1. Meningkatnya efektivitas peraturan daerah 2. Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan 3. Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif 4. Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM
	2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu 2. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik 3. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu 4. Meningkatnya kemampuan pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan 5. Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN	1. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah 2. Meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam bekerja 3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 4. Berkurangnya temuan audit inspektorat 5. Terselenggaranya penatausahaan kearsipan secara efektif dan efisien
	4. Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif	1. Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan 2. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 3: Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi	1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD 2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar 3. Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah 4. Meningkatkan SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan 5. Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 6. Meningkatkan prestasi olah raga 7. Meningkatkan peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan 8. Meningkatkan kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan 9. Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat
	2. Terwujudnya sumberdaya manusia yang sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak 2. Meningkatkan umur harapan hidup 3. Menurunnya persentase prevalensi gizi kurang 4. Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender 5. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
Misi 4: Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global	1. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Meningkatkan jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 3. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing) 4. Meningkatkan kesejahteraan petani
	2. Berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah industri pengolahan unggulan daerah 2. Meningkatkan serapan tenaga kerja pada industri olahan 3. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi 4. Meningkatkan jumlah pasar yang layak bagi perdagangan 5. Meningkatkan ekspor daerah 6. Meningkatkan investasi daerah
	3. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya wisata seni dan budaya 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik 3. Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara
	4. Berkurangnya penduduk miskin, pengangguran dan jumlah daerah tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial 3. Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya 4. Menurunnya tingkat kemiskinan 5. Meningkatnya akses menuju daerah tertinggal 6. Meningkatnya sarana prasarana pada daerah tertinggal 7. Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan pada daerah tertinggal 8. Meningkatnya kualitas SDM pada daerah tertinggal
	5. Terpenuhinya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan 2. Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat 3. Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang 4. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air 5. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara 6. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik
Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana 2. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana 3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
	2. Tercapainya lingkungan hidup yang ber kualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 2. Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem 3. Menurunnya jumlah illegal logging

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. MISI 1: MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAM AIS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH ABS-SBK

Perwujudan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" merupakan landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau yang dijadikan sebagai persyaratan untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamais dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Ciri-ciri tata kehidupan yang demikian antara lain adalah: taat beragama, berakhlak mulia, jujur, peduli sesama manusia, menerapkan tata kehidupan beragama dan berbudaya yang baik, rukun dengan agama lain, serta peduli terhadap masa depan dan keselamatan masyarakat dan bumi ciptaan Tuhan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram melalui pengamalan ajaran agama dan adat istiadat yang berpedoman kepada falsafah berdasarkan "Adat Bersandi Sarak Sarak Bersandi Kitabullah". Sedangkan sasaran yang akan dicapai: a) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama, b) Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama, c) Meningkatnya kerukunan umat beragama, d) Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya, e) Berkembangnya nilai-nilai seni dan sosial budaya, f) Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia pemangku adat, dan g) Berkurangnya tingkat konflik dalam masyarakat.

6.1.1. Strategi untuk Misi 1

Untuk mencapai sasaran pada Misi 1, diperlukan strategi sebagai berikut: meningkatkan kualitas pendidikan agama, meningkatkan pelayanan pada rumah ibadah, mengembangkan komunikasi antar umat beragama, mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan budaya daerah, mengembangkan lembaga seni dan budaya, meningkatkan kelembagaan adat dan budaya daerah, meningkatkan peranan pemangku adat dalam pendidikan adat, meningkatkan pendidikan moral bagi remaja, dan menekan terjadinya perbuatan maksiat.

6.1.2. Arah Kebijakan untuk Misi 1

Dalam mengimplementasikan strategi yang telah disebutkan diatas, diperlukan arah kebijakan yang bermuara kepada program dan kegiatan yang tepat untuk dilaksanakan oleh lembaga yang menjalankan urusan tersebut.

Tabel 6.1.
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 1

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI 1 : Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terciptanya kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1. Meningkatkan akses informasi keagamaan	1. Meningkatkan akses informasi keagamaan 2. Menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak 3. Menambah jam pelajaran untuk praktek agama
	2. Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatkan pengelolaan potensi dan agihan zakat 2. Meningkatkan pelayahan haji 3. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan terhadap Al-Qur'an	1. Meningkatkan pengelolaan potensi dana agihan zakat 2. Meningkatkan kualitas pelayanan Jemaah haji 3. Meningkatkan kualitas pemahaman terhadap Al-Qur'an
2. Diwarisinya dan diamlkannya nilai-nilai kearifan adat dan budaya	1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	1. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah	1. Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat
	2. Berkembangnya lembaga seni dan sosial budaya	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat seni dan budaya daerah	1. Meningkatkan dan mengembangkan lembaga adat, seni dan budaya daerah 2. Menambah jam pelajaran praktek pendidikan adat dan budaya
1. Terwujudnya optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga agama dalam tata kehidupan masyarakat	1. Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	1. Menekan terjadinya perbuatan maksiat 2. Meningkatkan pendidikan bagi moral remaja	1. Fasilitasi pengawasan terhadap pelanggaran perbuatan maksiat

Arah kebijakan untuk melaksanakan strategi pada Misi 1 adalah: mengembangkan kurikulum pendidikan agama, mengembangkan keustakaan rumah ibadah, meningkatkan kapasitas guru-guru agama, meningkatkan kualitas pengelola rumah ibadah, menambah jam pelajaran untuk praktek agama, mengembangkan forum pertemuan antar agama, mengembangkan lembaga sosial keagamaan, mengembangkan kurikulum pendidikan ABS-SBK, memasyarakatkan nilai-nilai moral ABS-SBK, mengembangkan gerakan terpadu pengamalan agama dan ABS-SBK, mengembangkan keustakaan adat dan budaya, menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah, mengembangkan lembaga seni dan budaya

daerah, meningkatkan pengelolaan keberagaman sosial budaya, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pemangku adat, meningkatkan komunikasi pemangku adat dengan masyarakat, meningkatkan penyuluhan moral kepada remaja dan anggota masyarakat lainnya, serta meningkatkan koordinasi dalam pengawasan dan pencegahan perbuatan maksiat. hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 1 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

6.2 MISI 2: MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, DAN PROFESSIONAL

Pelaksanaan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat yang mendambakan tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, akuntabel, efektif, efisien menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terbangunnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional melalui penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good goverment*) terutama prinsip profesional, transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien. Sasaran yang hendak dicapai adalah : a) Meningkatnya kinerja aparatur daerah, b) Tersedianya data dan informasi statistik, c) Meningkatnya efektivitas peraturan daerah, d) Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu, e) Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, f) Meningkatnya kompetensi aparatur daerah, g) Berkurangnya temuan audit keuangan, h) Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan, i) Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan pembangunan.

6.2.1. Strategi untuk Misi 2

Untuk mencapai sasaran yang dinyatakan pada Misi 2, ditempuh strategi: meningkatkan jumlah dan kualitas peraturan daerah, meningkatkan jenis dan kualitas data statistik, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah, meningkatkan ketatalaksanaan pelayanan publik, mengembangkan kualitas pelayanan satu pintu, mengembangkan

elayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, meningkatkan kualitas rekrutmen aparatur, meningkatkan kemampuan aparatur dalam bidangnya, meningkatkan ketepatan penempatan aparatur, meningkatkan disiplin aparatur, meningkatkan motivasi kerja aparatur, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, mengembangkan kelembagaan yang adaptif, membangun produk hukum yang adil dan partisipatif, memantapkan manajemen kepegawaian melalui pembinaan karir, mengembangkan perencanaan berbasis data, dan meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan pembangunan.

6.2.2 Arah Kebijakan untuk Misi 2

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah: mengembangkan produk hukum yang efektif dalam rangka pemberantasan KKN, menyediakan data dan informasi statistik, meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengembangkan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu, memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas, mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas, meningkatkan pola karir aparatur yang terarah, meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur, megembangkan pola insentif yang efektif, melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang adaptif, mengembangkan kualitas musrenbang daerah, mengembangkan penelitian dan pengembangan terapan, mengembangkan basis data pembangunan, dan meningkatkan administrasi pengawasan pembangunan. hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 2 dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2.
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 2

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI 2 : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel	1. Meningkatnya efektivitas peraturan daerah	1. Meningkatkan jumlah dan kualitas peraturan daerah	1. Mengembangkan produk hukum yang efektif
	2. Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan	1. Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah 2. Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas 3. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan penganggaran pembangunan	1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah 2. Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah 3. Efektif dan efisien dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan
	3. Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif	1. Pembangunan Materi Hukum	1. Meningkatkan ketersediaan produk hukum daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	4. Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM	1. Mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan 2. Terwujudnya budaya sadar hukum dan taat hukum di masyarakat 3. Tersedianya sarana dan informasi hukum	1. Meningkatkan rancangan produk hukum 2. Meningkatkan budaya sadar dan taat hukum pada masyarakat 3. Meningkatkan saran dan informasi hukum
2. Terwujudnya pelayanan publik yang prima	1. Meningkatnya efektivitas pelayanan satu pintu	1. Mengembangkan kualitas pelayanan satu pintu	1. Mengembangkan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu 2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu
	2. Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	1. Mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	1. Memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
	3. Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan melalui pengembangan system informasi kependudukan yang terpadu	1. Meningkatkan pelayanan kependudukan melalui ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu
	4. Meningkatnya kemampuan pemerintahan Nagari/Desa/ Kelurahan	1. Peningkatan kemampuan Pemerintah Nagari/Desa/ Kelurahan	1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Nagari/Desa/Kelurahan 2. Meningkatkan kelembagaan Pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan
	5. Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Pengembangan komunikasi dan informasi 2. Peningkatan kerjasama dengan media cetak dan elektronik 3. Meningkatnya tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah 4. Meningkatnya kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 5. Terwujudnya good governance 6. Terwujudnya sinergitas pembangunan antar wilayah	1. Mengembangkan komunikasi dan informasi 2. Meningkatkan kerjasama dengan media cetak dan elektronik 3. Meningkatkan tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah 4. Meningkatkan kualitas lembaga perwakilan daerah 5. Mewujudkan good governance 6. Meningkatkan sinergitas pembangunan antar wilayah
3. Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN	1. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah	1. Meningkatkan kualitas rekrutmen aparatur	1. Mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas
	2. Meningkatnya kinerja aparatur daerah dalam bekerja	1. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam bidangnya 2. Meningkatkan ketepatan penempatan aparatur 3. Meningkatkan disiplin aparatur 4. Meningkatkan motivasi kerja aparatur	1. Mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas 2. Meningkatkan pembinaan karir aparatur yang terarah 3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur 4. Mengembangkan pola insentif yang efektif 5. Melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah 6. Meningkatkan manajemen kepegawaia
	3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN
	4. Berkurangnya temuan audit inspektorat	1. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur pelaksana pembangunan	1. Menyusun SOP 2. Meningkatkan SDM Aparatur
	5. Terselenggaranya penatausahaan kearsipan secara efektif dan efisien	1. Meningkatkan penambahan khasanah arsip 2. Peningkatan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan	1. Meningkatkan efektifitas penyusunan arsip instansi pemerintah 2. Menyempurnakan sistem dan pengelolaan kearsipan
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif	1. Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan jenis dan kualitas data statistik	1. Mengembangkan kualitas musrenbang daerah 2. Tersedianya data dan informasi statistik
	2. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan	1. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan	1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan

6.3 MISI 3 : MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN DAN BERKUALITAS TINGGI

Sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi merupakan prasyarat mutlak untuk dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruhan pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas melalui peningkatan partisipasi pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ini adalah: a) Meningkatnya angka partisipasi sekolah, b) Meningkatnya umur harapan hidup, c) Menurunnya persentase gizi buruk, d) Meningkatnya kualifikasi guru, d) Meningkatnya jumlah sekolah unggul dengan pendidikan berkarakter, e) Berkembangnya pendidikan bernuansa surau, f) Berkembangnya lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan, g) Meningkatnya jumlah wirausahawan yang profesional, h) Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat, i) Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

6.3.1. Strategi untuk Misi 3

Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada Misi 3, diperlukan strataegi sebagai berikut: meningkatkan akses pendidikan usia dini, dasar, dan menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas pembinaan pemuda dan olahraga, meningkatkan pelayanan kesehatan, penurunan persentase gizi buruk, meningkatkan strata pendidikan guru, meningkatkan sertifikasi guru, meningkatkan jumlah pendidikan berkarakter, mengembangkan pendidikan bernuansa surau, mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan, meningkatkan jumlah wirausahawan profesional, mengembangkan sumber-sumber belajar yang berkualitas, meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses produksi.

6.3.2. Arah kebijakan untuk Misi 3

Sedangkan arah kebijakan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah: meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, meningkatkan akses

dan kualitas pendidikan dasar, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah, mengembangkan organisasi pembina pemuda dan olah raga, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelayan kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, meningkatkan pendidikan guru minimal sarjana, meningkatkan kualitas proses sertifikasi guru, meningkatkan jumlah sekolah pendidikan berkarakter, mengembangkan pendidikan bernuansa surau, meningkatkan jumlah dan kuantitas sekolah kejuruan, mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan dan kewirausahaan, mengembangkan kemitraan lembaga pendidikan dengan dunia usaha, mengembangkan perpustakaan berkualitas, meningkatkan pelayanan perpustakaan, meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan, dan meningkatkan pertemuan antara peneliti dengan masyarakat dan swasta. hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 3 dapat dilihat pada Tabel 6.3.

**Tabel 6.3.
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3**

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI 3 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter	1. Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD	1. Meningkatnya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatnya kualifikasi guru PAUD	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD
	2. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar
	3. Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatnya kualifikasi guru menengah	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatnya kualifikasi guru menengah 3. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 4. Meningkatkan Pengelolaan, Pengawasan dan Manajemen
	4. Meningkatnya SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan berkualitas serta Dilandasi Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia	1. Tersedianya lembaga pendidikan berkarakter 2. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan boarding school 3. Meningkatnya jumlah sekolah bertaraf SBI dan RSBI 4. Meningkatkan kualitas sekolah sehat 5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik 6. Meningkatkan kompetensi pendidikan bernuansa surau
	5. Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses dan pelaksanaan pembangunan	1. Meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan 2. Meningkatkan kuantitas dan kapasitas peneliti 3. Meningkatkan alokasi dana penelitian dan pengembangan 4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang
	6. Meningkatnya prestasi olah raga	1. Meningkatnya pembinaan dan permasyarakatan olahraga 2. Terwujudnya sarana dan prasaran olah raga yang representatif	1. Meningkatkan pembinaan olahraga yang intensif dan konsisten 2. Meningkatkan sarana prasarana olah raga

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	7. Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan	1. Terwujudnya generasi muda yang berperan aktif dalam proses pembangunan	1. Meningkatkan kualitas dan peran serta pemuda dalam segala bidang pembangunan
2. Terwujudnya Sumberdaya manusia yang sehat	8. Meningkatnya kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan	1. Meningkatnya kualitas organisasi pemuda peran serta keterampilan pemuda	1. Meningkatkan kualitas organisasi pemuda 2. Meningkatkan keterampilan pemuda
	9. Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat	1. Terwujudnya pelayanan perpustakaan yang berkualitas	1. Meningkatkan efektifitas pelayanan perpustakaan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan 3. Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan
	10. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	1. Meningkatkan kualitas pendidikan perempuan dan anak	1. Meningkatkan pendidikan gender 2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak
	11. Meningkatnya umur harapan hidup	1. Terwujudnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat 2. Terwujudnya akses kesehatan bagi semua masyarakat 3. Meningkatnya peran aktif masyarakat, swasta dalam pembangunan kesehatan 4. Terwujudnya masyarakat yang terhindar dari penyakit menular/tidak menular 5. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan kondisi kesehatan sekitar 6. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan baik 7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan 8. Tersedianya akses pelayanan kesehatan pada masalah kebencanaan 9. Meningkatkan coverage pelayanan kesehatan masyarakat 10. Meningkatnya perencanaan pembangunan kesehatan 11. Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas	1. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat merata 2. Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang merata 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan 4. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara intensif 5. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan kondisi kesehatan sekitar 6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan 7. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu 8. Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan pada masalah kebencanaan 9. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan 10. Meningkatnya kualitas data dan informasi kesehatan 11. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan 12. Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin 13. Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna
	12. Menurunnya persentase prevalensi gizi kurang	1. Penurunan persentase prevalensi gizi kurang	1. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat
	13. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender	1. Terwujudnya kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak 2. Meningkatnya peran serta wanita dalam proses pembangunan 3. Meningkatnya pengarus utamaan gender dan hak anak	1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak 2. Meningkatkan peran serta wanita dalam proses pembangunan 3. Meningkatkan pengarus utamaan gender dan anak
	14. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	1. Meningkatnya jumlah akseptor KB 2. Tersedianya informasi yang cukup ttg KB kepada masyarakat 3. Meningkatnya ketersediaan tenaga pendamping terampil	1. Meningkatkan jumlah akseptor KB terutama pasangan usia subur 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi ttg KB 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping terampil

6.4. MISI 4: MEWUJUDKAN EKONOMI MASYARAKAT YANG TANGGUH, PRODUKTIF, BERBASIS KERAKYATAN, BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL

Pewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global merupakan unsur penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, terutama dalam era globalisasi dewasa ini. Kondisi tersebut diwujudkan melalui pengembangan ekonomi agribisnis dan agroindustri serta industri

jasa. Usaha ekonomi yang demikian akan dapat diwujudkan dengan penciptaan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, mencegah timbulnya monopoli dan monopsoni serta ketidakadilan dalam berusaha, mengembangkan kewirausahaan daerah, menyediakan prasarana dan sarana pembangunan yang berkualitas secara merata keseluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, wisata, dan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi ini adalah: a) Meningkatnya produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, b) Meningkatnya jumlah kawasan sentra produksi pertanian, c) Berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah, d) Meningkatnya industri unggulan daerah, e) Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan, f) Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya, g) Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, h) Menurunnya persentase penduduk miskin, i) Menurunnya persentase pengangguran, j) Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan, k) Tersedianya perumahan dan pemukiman masyarakat, l) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air, m) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara, n) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.

6.4.1. Strategi untuk Misi 4

Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi 4 pada prioritas pengembangan pertanian berbasis komoditi kawasan dan komoditi unggulan, adalah sebagai berikut: meningkatkan produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (*fishery processing*), memperkuat manajemen untuk mengelola resiko usaha pertanian, mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju, dan menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain.

Strategi pada prioritas pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi adalah sebagai berikut: mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah,

meningkatkan jumlah pelaku usaha industri pengolahan, mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, menyediakan pasar yang layak untuk perdagangan, melindungi konsumen dari kecurangan perdagangan, meningkatkan daya saing komoditi daerah, dan meningkatkan kerjasama promosi dan investasi.

Strategi pada prioritas pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya adalah: mengembangkan kawasan wisata alam unggulan utama Sumatera Barat, mengembangkan kawasan wisata budaya unggulan utama Sumatera Barat, meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata, dan meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha dan aparatur pariwisata.

Untuk percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran ditempuh strategi: mengembangkan pendataan penduduk miskin, membangun gerakan terpadu dalam mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pemberdayaan bagi penduduk miskin, memberikan bantuan bagi penduduk miskin dalam berbagai bidang, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja.

Sedangkan pada prioritas pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat ditempuh strategi sebagai berikut: meningkatkan jumlah jalan dan jembatan, meningkatkan pemeliharaan jalan dan jembatan, menyediakan perumahan dan pemukiman masyarakat, meningkatkan pengelolaan sumberdaya air, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara, dan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik.

6.4.2. Arah Kebijakan untuk Misi 4

Untuk melaksanakan strategi tersebut dalam prioritas pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani, membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan, mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan), mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri) hasil perikanan (*fishery processing*), memberikan bantuan dan

pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, dan perikanan, mengembangkan gerakan terpadu dalam memfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk keamanan pangan berbasis nagari, dan memfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah.

Untuk prioritas pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri, meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK, meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK, meningkatkan kualitas kelembagaan UMKMK, meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan aparatur UMKMK, meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK, membangun pasar daerah yang layak bagi perdagangan, meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen, memperpendek mata rantai pemasaran, meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi, mengembangkan pemberian insentif bagi para investor, meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor, dan mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal.

Arah kebijakan dalam pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya adalah: mengembangkan kawasan wisata alam Gunung Padang, mengembangkan kawasan wisata alam Mandeh, mengembangkan kawasan wisata alam Panorama Baru, mengembangkan kawasan wisata alam Danau Kembar, mengembangkan kawasan wisata alam Kawasan Harau, mengembangkan kawasan wisata tambang Sawahlunto, mengembangkan kawasan wisata budaya Ulakan Tapakis, mengembangkan kawasan wisata budaya Pagaruyung, mengembangkan kawasan wisata alam Danau Maninjau, mengembangkan kawasan wisata surfing Mentawai, meningkatkan promosi yang efektif, dan meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata, meningkatkan kualitas cagar budaya dan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah, meningkatkan Kualitas produk wisata budaya.

Untuk prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut: mengembangkan basis data penduduk miskin, melakukan koordinasi program pengentasan kemiskinan, meningkatkan keterampilan penduduk miskin, memberikan bantuan biaya pendidikan penduduk miskin, memberikan jaminan kesehatan penduduk miskin, melakukan gerakan terpadu pemberdayaan fakir miskin, memberi bantuan permodalan bagi usaha mikro, meningkatkan perlindungan bagi keluarga miskin,

meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, dan menambah lapangan usaha bagi angkatan kerja.

Sedangkan untuk prioritas pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat adalah diperlukan arah kebijakan: meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur, membangun jalan dan jembatan sesuai kebutuhan, membangun jalan dan jembatan penunjang ekonomi rakyat, membangun jalan dan jembatan penunjang pariwisata, membangun jalan dan jembatan untuk evakuasi bencana, mengembangkan infrastruktur kawasan khusus, membangun prasarana jalan strategis antar daerah, membangun perumahan masyarakat, menata bangunan dan lingkungan pemukiman, mengelola jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya, mengelola konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya, mengembangkan angkutan kereta api, membangun dan rehabilitasi sarana dan fasilitas jalan, membangun dan rehabilitasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, mengembangkan komunikasi dan informasi, mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut, mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara, merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang, menyusun regulasi dan pengelolaan energi, mengembangkan energi kelistrikan, menyusun regulasi dan mengendalikan pemanfaatan tambang mineral, hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 4 dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4.
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 4

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI 4 : Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi agribisnis	1. Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 3. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing) 4. Meningkatnya kesejahteraan petani	1. Meningkatkan produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 2. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan 3. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery Processing) 4. Memperkuat manajemen untuk mengelola resiko usaha pertanian 5. Mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju 6. Menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain	1. Meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan 2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 3. Merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani 5. Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan. 6. Mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan) 7. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan 8. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) hasil perikanan (Fishery Processing) 9. Memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, & perikanan 10. Mengembangkan gerakan terpadu dalam memfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya 11. Meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk keamanan pangan berbasis nagari

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
2. Berkembangnya industri olahan, perdagangan, UMKMK dan iklim investasi	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah Meningkatnya serapan tenaga kerja pada industri olahan Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan Meningkatnya ekspor daerah Meningkatnya investasi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah Meningkatkan jumlah pelaku usaha industri pengolahan Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi Menyediakan pasar yang layak untuk perdagangan Melindungi konsumen dari kecurangan perdagangan Meningkatkan daya saing komoditi daerah Meningkatkan kerjasama promosi dan investasi 	<ol style="list-style-type: none"> Menfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri Meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK Meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKMK Meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan aparatur UMKMK Meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK Membangun pasar daerah yang layak bagi perdagangan Meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen Memperpendek mata rantai pemasaran Meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi Mengembangkan pemberian insentif bagi para investor Meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor Mengembangkan kan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal
3. Terwujudnya Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> Berkembangnya wisata seni dan budaya Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara 	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan wisata seni dan budaya daerah Mengembangkan kawasan wisata alam unggulan utama Sumatera Barat Mengembangkan kawasan wisata budaya unggulan utama Sumatera Barat Meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata Meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha dan aparatur parawisata 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas cagar budaya dan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah Meningkatkan Kualitas produk wisata budaya Mengembangkan kawasan (kws) wisata alam Gunung Padang Mengembangkan kws. wisata alam Mandeh Mengembangkan kws. wisata alam Panorama Baru Mengembangkan kws. wisata budaya Pagaruyung Mengembangkan kws. wisata alam Hwaru Mengembangkan kws. wisata tambang Sawahlunto Mengembangkan kws. wisata budaya Ulakan Tapak is Mengembangkan kws. wisata alam Danau Maninjau Mengembangkan kws. wisata surfing Mentawai Meningkatkan promosi yang efektif Meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata
4. Berkurangnya penduduk miskin, pengangguran dan jumlah daerah tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya pelayanan terhadap PMKS 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan panti sosial untuk PMKS Meningkatkan keterampilan Fakir Miskin, KAT dan PMKS
	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya Sasaran program/kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien 	<ol style="list-style-type: none"> Sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan bidang kesejahteraan sosial
	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan keterampilan, keaktifan dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya 	<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya pengembangan sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu 	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu Meningkatkan kualitas tenaga kerja Memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja
	<ol style="list-style-type: none"> Menurunnya tingkat kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan integrasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tepat dan jaminan pelaksanaan program tepat pada sasaran keluarga miskin 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektivitas penggunaan data kemiskinan Meningkatkan efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat
	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses menuju daerah tertinggal Meningkatnya sarana prasarana pada daerah tertinggal Berkurangnya pengangguran dan kemiskinan pada daerah tertinggal Meningkatnya kualitas SDM pada daerah tertinggal 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan infrastruktur Meningkatkan rasio elektrifikasi Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan dasar Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Meningkatkan jaringan listrik dan telekomunikasi Meningkatkan sarana air bersih dan sanitasi Memperluas lapangan kerja Meningkatkan usaha ekonomi mikro Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana pendidikan Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana kesehatan
5. Terpenuhinya infrastruktur yang menunjang pengembangan ekonomi rakyat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan Tersedianya perumahan dan permukiman masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun jalan dan jembatan pada kawasan sentra produksi Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat Menyediakan perumahan dan permukiman masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan (pu) Meningkatkan aksesibilitas wil. yang sedang dan belum berkembang pada koridor-koridor utama, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil dan pulau (pu) Meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur (pu) Penataan kawasan perumahan dan permukiman yang bersih, sehat, dan asri (perumahan) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum (air bersih, limbah, sampah dan drainase) yang memadai dan terpadu (perumahan) Meningkatkan keamanan dan keselamatan bangunan gedung melalui pengawasan dan pembinaan teknis standar bangunan gedung serta peningkatan keserasiannya dengan tata ruang dan lingkungan (perumahan)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	3. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang	1. Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang	1. Merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang (tata ruang)
	4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air	1. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya air	1. Peningkatan dan mempertahankan kondisi saluran irigasi dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan (pu) 2. Mengelola konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya (pu) 3. Optimalisasi bendung dan embung yang telah dibangun untuk menunjang irigasi dan pengendalian (pu) 4. Mendayagunakan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga, pertanian, perkotaan, dan industri (pu) 5. Melindungi kawasan prioritas dari daya rusak air akibat banjir, abrasi pantai, dan lahar gunung berapi/sedimen (pu)
	5. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara	1. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara	1. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal (pu) 2. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut (perhubungan) 3. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara (perhubungan) 4. Mengembangkan angkutan kereta api (perhubungan)
	6. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik	1. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik	1. Mengembangkan energi kelistrikan (energi) 2. Menyusun regulasi dan pengelolaan energi (energi)

6.5. MISI 5 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan isu yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam jangka panjang. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata-ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.

Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penanggulangan resiko bencana dan pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi kelima ini adalah: a) Tersedianya informasi wilayah rawan bencana, b) Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana, c) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, d) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, e) Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem, f) Menurunnya jumlah *illegal logging* dan *illegal fishing*.

6.5.1. Strategi untuk Misi 5

Untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan Misi 5, ditempuh strategi sebagai berikut: menyediakan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem, dan menurunkan jumlah *illegal logging* dan *illegal fishing*.

6.5.2. Arah Kebijakan untuk Misi 5

Sedangkan arah kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut adalah : menyediakan peta dan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana prasarana evakuasi bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kesiagaan bencana, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup, mengembangkan konservasi sumberdaya alam, mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mengamankan hutan dari *illegal logging*, mengamankan laut dari *illegal fishing*, serta mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. hubungan antara strategi dan arah kebijakan untuk Misi 5 dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5.
Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 5

VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera, dan Bermartabat			
MISI 5 : Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	1. Meningkatnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	1. Meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana
	2. Tersedianya informasi wilayah rawan bencana	1. Menyediakan informasi wilayah rawan bencana	1. Mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiap-siagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu
	3. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
2. Tercapainya lingkungan hidup yang berkualitas	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup
	2. Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem	1. Meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem	1. Mengembangkan konservasi sumberdaya alam 2. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 3. Mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
	3. Menurunnya jumlah illegal logging	1. Menurunkan jumlah illegal logging	1. Mengamankan hutan dari illegal logging

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab VI telah dijabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur secara hirarkhis ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Berdasarkan hasil jabaran tersebut pada Bab ini akan diidentifikasi indikator-indikator kinerja, target capaian, serta program-program prioritas yang harus direalisasikan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode 5 tahun mendatang. Program-program tersebut, merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam implementasinya secara operasional, program-program yang telah dirumuskan harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sekaligus ditentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi penanggung jawab dari setiap program tersebut, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

7.1.1. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 1

Kebijakan umum untuk mencapai Misi 1 adalah: Meningkatkan akses informasi keagamaan, Meningkatkan kualitas pengelola rumah ibadah, Menambah jam pelajaran untuk praktek agama, menambah jam pelajaran praktek pendidikan akhlak, meningkatkan pengelolaan potensi dana agihan zakat, meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji, meningkatkan kualitas pemahaman terhadap Al-Quran, mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat, Meningkatkan dan mengembangkan lembaga seni dan budaya daerah, Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah, Fasilitasi pengawasan terhadap pelanggaran perbuatan maksiat.

Sedangkan program-program prioritas untuk mewujudkan Misi 1 adalah: Gerakan Terpadu Pengamalan Agama dan ABS-SBK, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat, Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, Peningkatan Pemahaman, Penghayatan,

Pengamalan dan Pengembangan Nilai Agama, Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan, Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Seni dan Budaya, Pengembangan Pendidikan Budaya. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1.
Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 1**

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
I Misi 1: Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah ABS-SBK										
1 Prioritas 1: Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat										
1.	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama	1. Meningkatkan akses informasi keagamaan 2. Meningkatkan pemahaman terhadap Al-Qur'an	1. Meningkatkan akses informasi keagamaan 2. Menambah jam pelajaran praktik pendidikan akhliak 3. Menambah jam pelajaran untuk praktik agama 4. Meningkatkan kualitas pemahaman terhadap Al-Qur'an	1. Meningkatnya syiar agama kepada masyarakat 2. Peringkat Sumbang dalam MTQ Nasional 3. Wird/pelatihan/kegiatan ibadah yang dilaksanakan	%	N/A	100	Program peningkatan pendidikan agama dan keagamaan	Kebudayaan	Infokom/ Biro Binsos
					Peringkat	5	4	Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengalaman dan pengembangan nilai agama	Kebudayaan	Binsos
					%	N/A	100			
2.	Meningkatnya pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatkan pengelolaan potensi dan agihan zakat haji 2. Meningkatkan pelayanan pada rumah ibadah 3. Meningkatkan pelayanan pada rumah ibadah	1. Meningkatkan pengelolaan potensi dana agihan zakat 2. Meningkatkan kualitas pelayan haji 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan rumah ibadah	1. Meningkatnya kualitas SDM lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan 2. Meningkatnya pelayanan Jemaah haji	%	N/A	100	Pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	Kebudayaan	Biro Binsos
					%	N/A	100	Peningkatan pelayanan kehidupan beragama		Binsos

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
3.	Meningkatnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya	1. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan budaya daerah	1. Mengaktualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat	1. Persentase pemahaman terhadap nilai-nilai tradisional dan peningkatan kesejahteraan kesejateraan 2. Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat adat 3. Sinkronisasi program pemerintah dengan lembaga adat	%	N/A	100	Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinsos, Binsos,
4.	Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat	1. Menekan terjadinya perbuatan maksiat 2. Meningkatkan pendidikan bagi moral remaja	1. Fasilitasi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembuatan maksiat	Persentase penurunan pelanggaran perbuatan maksiat	%	N/A	100	Pemberdayaan kelembagaan masyarakat adat	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbang linmas, Satpol pp
5.	Berkembangnya lembaga seni dan sosial budaya	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan adat dan budaya daerah	1. Meningkatkan dan mengembangkan lembaga seni dan budaya daerah	Berkembangnya kapasitas kelembagaan adat, seni dan budaya	Lembaga	2	3	Pemberdayaan lembaga-lembaga adat, seni dan budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	1. Mengembangkan pendidikan adat dan budaya daerah	<ol style="list-style-type: none"> Mengakualisasikan ABS-SBK dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah Menambah jam pelajaran praktik pendidikan adat dan budaya 	<p>Tersosialisasinya nilai-nilai adat, seni dan budaya</p> <p>Pelaksanaan praktik pendidikan adat, seni dan budaya daerah</p>	Kali	21	30	Pengembangan Pendidikan Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan
					kali	2	10			

7.1.2. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 2

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 2 adalah: mengembangkan produk hukum yang efektif dalam rangka pemberantasan KKN, menyediakan data dan informasi statistik, meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah, mengembangkan prosedur operasional standar pelayanan satu pintu, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelayanan satu pintu, memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas, mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas, meningkatkan pola karir aparatur yang terarah, meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur, mengembangkan pola insentif yang efektif, melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang adaptif, mengembangkan kualitas musrenbang daerah, mengembangkan penelitian dan pengembangan terapan, mengembangkan basis data pembangunan, dan meningkatkan administrasi pengawasan pembangunan.

Sedangkan program prioritas untuk mencapai Misi 2 adalah: Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi, Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Pengembangan *E-Government* dan *E-Procurement*, Peningkatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Materi Hukum, Pengembangan Data dan Statistik, Peningkatan Supremasi dan Jaminan Perlindungan Hukum, Peningkatan Budaya Hukum, Peningkatan Sarana Informasi Hukum, Peningkatan Penataan Perundang-undangan, Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan, Peningkatan Ketatalaksanaan Pelayanan Publik, Peningkatan manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengembangan Komunikasi dan Informatika, Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Pendidikan Politik Masyarakat, Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah, Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan, Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Peningkatan Manajemen ADM Aparatur, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah, Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah, Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.2.

**Tabel 7.2.
Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 2**

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
II Misi 2: Mewujudkan Tata-Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional										
2 Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan										
	Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan jenis dan kualitas data statistic	1. Mengembangkan kualitas porses perencanaan daerah 2. Tersedianya data dan informasi statistik	Jumlah dokumen perencanaan Jumlah dokumen data dan statistic pembangunan/ publikasi statistik	Buah Buku	4 4	4 (t) 5	Program perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan data dan informasi statistik	Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan	Meningkatkan koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan kualitas koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan	Jumlah koordinasi dan k erjasama perencanaan pembangunan daerah	Kali	-	76	Program Koodinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	Terciptanya produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif	Pembangunan materi Hukum	Meningkatkan ketersediaan produk hukum daerah	Meningkatnya Ketersediaan Produk Hukum Daerah	Perda	11	21 (t)	Program Pembangunan Materi Hukum	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawain dan Persandian	Biro Hukum, Setwan
	Meningkatnya kualitas perlindungan Hukum dan HAM	1. Mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan 2. Terwujudnya budaya sadar hukum dan taat hukum di masyarakat	1. Meningkatkan rancangan produk hukum daerah 2. Meningkatkan budaya sadar dan taat hukum pada	1. Meningkatnya jumlah pembinaan Rancangan Produk Hukum Kab/Kota dalam rangka evaluasi	%	N/A	95	Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan	Biro Hukum

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		3. Tersedianya sarana dan informasi hukum	masyarakat 3. Meningkatkan sarana dan informasi hokum	2. Peningkatan budaya sadar dan taat hukum di masyarakat 3. Ketersediaan sarana dan informasi hukum 4. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan HAM	%	-	95	Program peningkatan budaya hukum Program Sarana Informasi Hukum Program Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM	Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Hukum Biro Hukum
	Meningkatnya ketersediaan sistem informasi kependudukan yang terpadu	Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan melalui sistem informasi kependudukan yang terpadu	Meningkatnya pelayanan kependudukan melalui sistem informasi kependudukan yang terpadu	Ketersediaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan yang akuntabel	Kab/kota	N/A	19	Program Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan	Otonomi daerah	Ro Pemduk dan Pem. Kab./Kota
	Meningkatnya kinerja aparatur daerah	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparatur pemerintahan propinsi yang lebih professional	1. Mengembangkan diklat aparatur yang berkualitas 2. Meningkatkan pembinaan karir aparatur yang terarah 3. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur 4. Mengembangkan pola insentif yang efektif 5. Melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah 6. Meningkatkan manajemen kepegawaian	1. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dan menyempurnakan ketatalaksanaan pemerintah daerah 2. Jumlah aparatur yang melaksanakan diklat	%	N/A	100	1. Program peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah 2. Program Pendidikan Kedinasan 3. Program Peningkatan manajemen SDM aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Biro Organisasi, Biro Pemduk

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Meningkatnya status opini BPK terhadap laporan keuangan dan aset	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan aset daerah Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas Meningkatnya efisiensi pelaksanaan dan efektifitas pelaksanaan anggaran pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah Peningkatan kualitas laporan keuangan daerah Efektif dan efisien dalam pelaksanaan anggaran pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kinerja aparatur. Kualitas LKPD Meningkatnya efisiensi ndan efektifitas dalam pelaksanaan anggaran pembangunan 	SKPD	5	38 (k)	Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Peringkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Inspektorat, DPKD
	Meningkatnya pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Memasyarakatkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Meningkatnya manajemen pelayanan publik yang bermutu, transparan, akuntabel, mudah, murah, cepat, patut, dan adil	%	15	100	Program Pengembangan manajemen pelayanan publik		Ro. Humas & Protokol, Bappeda (LPSE),
	Meningkatnya kompetensi aparatur daerah	Meningkatkan kualitas rekrutmen aparatur	Mengembangkan pola seleksi aparatur yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur	%	N/A	95	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		BKD, Badan Diklat

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Nagari/Desa/Kelurahan	Peningkatan kemampuan Pemerintah Nagari/Desa/Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Nagari/Desa/Kelurahan Meningkatkan Kelembagaan Pemerintahan 	Meningkatkan tertib pengelolaan administrasi pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan	%	N/A	100	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Biro Pemuduk
	Terselenggaranya penatausahaan kearsipan secara efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan penambahan khasanah arsip Peningkatan Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan Optimalisasi layanan kearsipan 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektivitas penyusutan arsip instansi pemerintah Menyempurnakan sistem dan pengelolaan kearsipan Meleaksanakan pengolahaan dan pemeliharaan arsip yang mempunyai nilai guna ilmiah dan kesejarahan Meningkatkan wawasan arsiparis pada SKPD 	Dokumen daerah yang terhimpun yang terselamatkan sebagai bahan pertanggungjawab daerah/nasional Jumlah SKPD yang terlayani dalam kersipan	%	N/A	95	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan dan pelestarian Dokumen arsip daerah Program Peningatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan komunikasi dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan komunikasi dan informasi 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan komunikasi dan informasi di 	%	N/A	80	Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika	Dinas – Perhub & Biro Humas

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	2. Peningkatan kerjasama dengan media cetak dan elektronik		2. Meningkatkan kerjasama dengan media cetak dan elektronik	2. Terlaksananya pembinaan komunikasi dan informasi	Paket	N/A	2 (t)	Program Pengembangan data dan informasi		Dinas – Perhub & Biro Humas
	3. Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah		3. Meningkatkan tertib manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Tersedianya data informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Buku	-	5 (k)	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Biro Humas
	4. Meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah governance		4. Meningkatkan kualitas lembaga perwakilan daerah	4. Penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui pemberitaan	Kali	-	60 (k)	Program peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah	Otonomi Daerah, Pemrth Umum, Adm	Biro Hukum, Biro Adm Pembangunan dan Kerjasama Rantau
	5. Terwujudnya sinergitas pembangunan antar wilayah		5. Mewujudkan good governance sinergitas pembangunan antar wilayah	5. Meningkatnya pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa	%	50	85	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Daerah	Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian	Setwan
				6. Jumlah kunjungan kerja	Kali kunjungan	N/A	21	Program Penerapan pemerintahan yang baik (good governance)		Biro Organisasi, Biro Pemduk
				7. Persentase daerah menerapkan prinsip pemerintah yang baik	%	N/A	100	Program Kerjasama Pembangunan		Biro Pemduk dan Biro Adm Pembangunan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				8. Kerjasama pembangunan antar lembaga daerah/wilayah dan luar negeri	%	65	100			
	1. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	1. Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	%	N/A	100	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Biro Hukum

7.1.3. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 3

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 3 adalah: meningkatkan akses dan kualitas pendidikan usia dini, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah, mengembangkan organisasi pembina pemuda dan olah raga, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelayan kesehatan, meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan kualitas gizi masyarakat, meningkatkan pendidikan guru minimal sarjana, meningkatkan kualitas proses sertifikasi guru, meningkatkan jumlah sekolah pendidikan berkarakter, mengembangkan pendidikan bernuansa surau, meningkatkan jumlah dan kuantitas sekolah kejuruan, mengembangkan kemitraan lembaga pendidikan dengan dunia usaha, mengembangkan perpustakaan berkualitas, meningkatkan pelayanan perpustakaan, meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan, dan meningkatkan pertemuan antara peneliti dengan masyarakat dan swasta.

Program prioritas untuk mencapai Misi 3 untuk prioritas pendidikan adalah: Gerakan Terpadu peningkatan SDM, Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun, Pendidikan Menengah, Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Non Formal, Manajemen Pelayanan Pendidikan, Pendidikan Berkarakter, Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olah Raga, Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga, Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Peningkatan Peranserta Kepemudaan, Peningkatan Penyadaran Kepemudaan, Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan Pendidikan Karakter, Peningkatan Kualitas Pendidikan Bernuansa Surau, Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan, Pengembangan "Sekolah Sahabat" regional dan internasional, Peningkatan kualitas pembelajaran dan pengelolaan pendidikan, Pengembangan sekolah sehat, Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintah dan pembangunan daerah.

Program prioritas untuk mencapai Misi 3 untuk prioritas kesehatan adalah: Penyediaan Obat dan Pembekalan Kesehatan, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Lingkungan Sehat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular, Pengadaan Sarana Prasarana Rumah sakit/RS. Paru/ RS Jiwa/RS. Mata,

Pengembangan Sumberdaya Kesehatan, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Keluarga Berencana, Pelayanan Alat Kontrasepsi, Kesehatan Reproduksi Remaja, Promosi Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak, Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Balita, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RS. Paru/ RS Jiwa/RS. Mata, Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD, Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan, Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.3.

**Tabel 7.3.
Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 3**

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
III Misi 3: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman dan Berkualitas Tinggi										
Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan										
	Meningkatkan angka partisipasi sekolah PAUD	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru PAUD	Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD	Jumlah APE Kali workshop penyusunan materi PAUD Org yang ikut sosialisasi materi PAUD	N/A N/A N/A	757 (k) 31 (k) 977 (k)	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Disdikpora
	Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan dasar	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru pendidikan dasar	Meningkatnya wajib belajar anak usia sekolah	% Pembinaan Pendidikan Dasar % Pembinaan Sekolah Sehat	N/A N/A	400 450	Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	Pendidikan	Disdikpora
	Meningkatkan angka partisipasi sekolah menengah	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru menengah	1. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan 2. Meningkatkan kualifikasi guru menengah 3. Meningkatkan Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan menengah	Sekolah terakreditasi Jumlah SBI % % sarana	N/A N/A N/A	190 35 370 415	Program Peningkatan Akses Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan	Pendidikan	Disdikpora

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			4. Meningkatkan Pengelolaan, Pengawasan dan Manajemen		<p>prasarana PLB</p> <p>% peserta didik PLB</p> <p>Dokumen Dapodik</p> <p>% pemanfaatan dan pengenalan program dan proses pendidikan</p>	N/A	100	Luar Biasa	Pendidikan	Disdikpora
	Meningkatnya SDM unggul yang berkarakter dan mutu pendidikan	<p>1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan berkualitas serta Dilandasi Iman, Taqwa dan Akhlak Mulia</p>	<p>1. Tersedianya lembaga pendidikan berkarakter</p> <p>2. Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan boarding school</p> <p>3. Meningkatnya jumlah sekolah bertaraf SBI dan RSBI</p> <p>4. Meningkatkan kualitas sekolah sehat</p> <p>5. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik</p> <p>6. Meningkatkan kompetensi pendidikan bermuansa surau</p>	<p>- SDM berkualitas yang berkarakter</p> <p>- Meningkatnya kompetensi pendidikan bermuansa surau</p>	<p>Kab/ Kota</p> <p>% buku pembelajaran bermuansa surau</p> <p>% sinkronisasi program</p>	19	100	Program Pendidikan Berkarakter	Pendidikan	Disdikpora, Binsos
						N/A	100	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Binsos

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Meningkatnya pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses dan pelaksanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan penelitian dan pengembangan terapan Meningkatkan kuantitas dan kapabilitas peneliti Meningkatkan alokasi dana penelitian dan pengembangan Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penelitian dan pengembangan terapan Jumlah diskusi aktual 	Judul	11	34 (k)	Penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintahan dan pembangunan daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	Meningkatnya prestasi olah raga	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pembinaan dan permasalahannya olahraga Terwujudnya sarana dan prasarana olah raga yang representatif 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembinaan olahraga yang intensif dan konsisten Meningkatkan sarana prasarana olah raga 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya budaya olah raga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat Persentase sarana olah raga 	%	N/A	95	Program Pembinaan dan Permasalahannya olahraga	Pemuda dan Olah Raga	Disdikpora, Binsos
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan	Terwujudnya generasi muda yang berperan aktif dalam proses pembangunan	Meningkatkan kualitas dan peran serta pemuda dalam segala bidang pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peran pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Persentase partisipasi pemuda dalam pembangunan Persentase 	%	N/A	95	Program Pembinaan Peran Pemuda dan Prasarana Olah Raga	Pemuda dan Olah Raga	Disdikpora
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam bidang olah raga dan pembangunan	Terwujudnya generasi muda yang berperan aktif dalam proses pembangunan	Meningkatkan kualitas dan peran serta pemuda dalam segala bidang pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase peran pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Persentase partisipasi pemuda dalam pembangunan Persentase 	%	N/A	100	Program Pembinaan Peran Pemuda dan Prasarana Olah Raga	Pemuda dan Olah Raga	Biro Binsos Disdikpora

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				kemandirian organisasi pemuda dan olah raga						
	Meningkatnya kemandirian pemuda dan organisasi kepemudaan	Meningkatnya kualitas pemuda peran serta keterampilan pemuda	1. Meningkatkan kualitas organisasi pemuda 2. Meningkatkan keterampilan pemuda	- Pengembangan kepemimpinan pemuda - Persentase keterampilan dansemangat wirausaha pemuda	%	N/A	100	Program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olah raga	Pemuda dan Olah Raga	Disdikpora
	Berkembangnya budaya dan minat baca masyarakat	Terwujudnya pelayanan perpustakaan yang berkualitas	1. Meningkatkan efektivitas pelayanan perpustakaan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan 3. Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan	Meningkatnya layanan perpustakaan, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno dan budaya gemar membaca di masyarakat	%	N/A	100	Program pengembangan kepemimpinan pemuda	Pemuda dan Olah Raga	Disdikpora
				Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat	Jenis paket buku	N/A	98 (k)	Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Kearsipan
4	Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat									
	Meningkatnya Umur Harapan hidup	Terwujudnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat	Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat	Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	%	N/A	100	Program obat dan pembekalan kesehatan	Kesehatan	Dinkes, RSJ, HB Saenin, RSUD Solok, RSUD Pariaman
		Terwujudnya akses kesehatan bagi semua masyarakat	Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan yang merata	- Persentase pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat	%	N/A	100	Program upaya kesehatan masyarakat	Kesehatan	Dinkes, RSJ, HB Saenin, RSUD Solok, Pariaman

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				- Persentase Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan kepada masyarakat	%	-	80	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.		Dinkes, RSJ, HB Saanin, RSUD Solok, RSUD Pariaman
		Meningkatnya peran aktif masyarakat, swasta dalam pembangunan kesehatan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan	Meningkatnya pemahaman akan lingkungan sehat	Kali pertemuan	N/A	15	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Kesehatan	Dinkes
		1. Terwujudnya masyarakat yang terhindar dari penyakit menular/tidak menular 2. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan kondisi kesehatan sekitar	1. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit secara intensif 2. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan kondisi kesehatan sekitar	Penemuan kasus baru Tuberculosis Meningkatnya Succes Rate TB Cakupan ODHA yang diobati Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index-API) Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat dan setelah haji	% % % Per 1000 pdck %	N/A N/A N/A N/A	90 92 90	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit (menular/tidak menular)	Kesehatan	Dinkes
		Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan baik	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan	Meningkatnya pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan	%	N/A	100	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rs. paru / rs.mata	Kesehatan	Dinkes, RSAM, RSJ HB, Saanin, RSUD Solok, RSUD Pariaman
				Sarana dan prasarana yang terpelihara	%	N/A	100	Program Pemeliharaan	Kesehatan	Dinkes, RSAM, RSJ HB.

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
								sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rs.paru/rs mata		Saanin, RSUD Solok, RSUD Pariaman
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan		Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas belajar dokter spesialis - Pertemuan peningkatan pelayanan kesehatan - Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan 	Org	N/A	6 (t) 20 (t)	Program sumber daya kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Tersedianya akses pelayanan kesehatan pada masalah kebencanaan		Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan pada masalah kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi program kesehatan - Jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan - Persentase ketersediaan data kesehatan secara akurat dan tepat - Persentase kesiap siagaan bencana 	%	N/A	100 100 100	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Kesehatan	Dinkes
	Meningkatkan coverage pelayanan kesehatan masyarakat		Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan	Jumlah masyarakat mendapat jaminan kesehatan	% penduduk	N/A	100		Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya perencanaan pembangunan kesehatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas data dan informasi kesehatan 2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan dibidang 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya ketersediaan data kesehatan secara cepat akurat dan tepat Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan dibidang 	%	N/A	100		Kesehatan	Dinkes dan RS
					Kali	N/A	5	Program penelitian dan pengembangan kesehatan		Dinkes

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			Kesehatan 3. Meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin	kesehatan Meningkatnya persentase masyarakat miskin menerima pelayanan kesehatan Rumah Sakit	%	60	95	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		RSAM, RSJ, HB Saanin, RSUD Solok
		Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas	Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna	Terselenggaranya standarisasi, akreditasi dan peningkatan BLUD, BOR	%	60	100	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	RSAM, RSJ HB, Saanin, RSUD Solok, RSUD Pariaman
		Penurunan persentase prevalensi gizi kurang	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat	Status gizi kurang	%	0	6.60	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RS	Kesehatan	Dinkes
	Menurunnya persentase gizi buruk Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender	1. Terwujudnya kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak 2. Meningkatkan peran serta wanita dalam proses pembangunan 3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan hak anak	1. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak 2. Meningkatkan peran serta wanita dalam proses pembangunan 3. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan anak	- Terlaksananya pemantauan terhadap KDRT dan KPA - Meningkatkan peran serta wanita dalam proses pembangunan - Pembinaan terhadap peran serta gender dalam pembangunan	%	N/A	100	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPPR & KB
					Kali rakor	N/A	4 (t)	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		BPPR & KB
				- Meningkatkan pengarusutamaan gender	Org perempuan aktif	N/A	16 (K)	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		BPPR & KB

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan - Terselenggaranya pengarusutamaan hak anak (PUHA) 	<p>Kali pertemuan</p> <p>Sistem informasi</p>	N/A	43 (k)	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan		BPPr & KB
				<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi KB pada masyarakat - Informasi KB - Tersedianya pelayanan informasi kontrasepsi - Menurunnya perkawinan - Meningkatnya keluarga bahagia sejahtera - Tersedianya tenaga pendamping terampil 	<p>%</p> <p>Kali sosialisasi</p> <p>%</p> <p>Kali</p> <p>%</p>	N/A	100	Program keluarga berencana	Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	BPPr & KB
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah akseptor KB terutama pasangan usia subur 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi ttg KB 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping terampil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah akseptor KB terutama pasangan usia subur 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi ttg KB 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping terampil 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan - Terselenggaranya pengarusutamaan hak anak (PUHA) - Tersedianya informasi KB pada masyarakat - Informasi KB - Tersedianya pelayanan informasi kontrasepsi - Menurunnya perkawinan - Meningkatnya keluarga bahagia sejahtera - Tersedianya tenaga pendamping terampil 	<p>%</p> <p>Kali sosialisasi</p> <p>%</p> <p>Kali</p> <p>%</p>	N/A	100	Program pelayanan alat kontrasepsi	Program kesehatan reproduksi remaja	BPPr & KB
				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan - Terselenggaranya pengarusutamaan hak anak (PUHA) - Tersedianya informasi KB pada masyarakat - Informasi KB - Tersedianya pelayanan informasi kontrasepsi - Menurunnya perkawinan - Meningkatnya keluarga bahagia sejahtera - Tersedianya tenaga pendamping terampil 	<p>Kali pertemuan</p> <p>Sistem informasi</p>	N/A	1 (t)	Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak		BPPr & KB
				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan - Terselenggaranya pengarusutamaan hak anak (PUHA) - Tersedianya informasi KB pada masyarakat - Informasi KB - Tersedianya pelayanan informasi kontrasepsi - Menurunnya perkawinan - Meningkatnya keluarga bahagia sejahtera - Tersedianya tenaga pendamping terampil 	<p>%</p> <p>Kali sosialisasi</p> <p>%</p> <p>Kali</p> <p>%</p>	N/A	100	Program kesehatan reproduksi remaja	Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	BPPr & KB
				<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan - Terselenggaranya pengarusutamaan hak anak (PUHA) - Tersedianya informasi KB pada masyarakat - Informasi KB - Tersedianya pelayanan informasi kontrasepsi - Menurunnya perkawinan - Meningkatnya keluarga bahagia sejahtera - Tersedianya tenaga pendamping terampil 	<p>%</p> <p>Kali sosialisasi</p> <p>%</p> <p>Kali</p> <p>%</p>	N/A	100	Program kesehatan reproduksi remaja	Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	BPPr & KB

7.1.4. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 4

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan adalah: meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani, membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan, mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan), mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri) hasil perikanan (*fishery processing*), memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, dan perikanan, mengembangkan gerakan terpadu dalam memfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk keamanan pangan berbasis nagari, dan memfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah.

Program prioritas untuk mencapai Misi 4 untuk dalam pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan adalah: Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani, Pengembangan Satu Petani Satu Sapi, Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Penyediaan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian, Pengembangan Teknologi Informasi Pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna, Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pelaku Usaha Pertanian dan masyarakat pesisir, Peningkatan Produksi dan Mutu Produk Pertanian Secara Berkelanjutan, Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan perikanan, Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Produk Hasil Pertanian dan perikanan, Peningkatan Ketahanan dan Keamanan serta diversifikasi Pangan, Pengamanan Sumberdaya Hewani, Pengembangan Budidaya Perikanan dan pengelolaan perikanan tangkap.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan industri olahan, perdagangan, dan iklim investasi adalah: meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri, meningkatkan kemudahan permodalan bagi UMKMK, meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK, meningkatkan kualitas kelembagaan UMKMK,

meningkatkan keterampilan pelaku usaha dan aparatur UMKMK, meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK, membangun pasar daerah yang layak bagi perdagangan, meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen, memperpendek mata rantai pemasaran, meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi, mengembangkan pemberian insentif bagi para investor, meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor, dan mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan industri olahan, perdagangan, dan iklim investasi adalah: Gerakan Terpadu Pengembangan UMKM dan Koperasi, Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, Peningkatan Iklim Usaha Industri, Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Agro dan Manufaktur, Revitalisasi dan Pengembangan IKM, Pengembangan SDM Industri Kecil dan Menengah, Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Klaster Industri Unggulan, Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar, Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Perdagangan, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah, Peningkatan Daya saing penanaman modal, Peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Penyiapan potensi sumberdaya daerah, Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan investasi sumberdaya mineral dan batubara, Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Peningkatan Kompetensi SDM dan Aparatur Pembina UMKMK, Dukungan Pemodal & peningkatan akses permodalan UMKMK kelembagaan keuangan, Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Dalam Mendukung UMKMK, Pengembangan Kemitraan, Kualitas Produk, Promosi, dan Jaringan Pemasaran Produk UMKMK, Peningkatan koperasi dalam perekonomian daerah, Program terpadu peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil, Peningkatan lembaga keuangan non bank dalam pembiayaan UMKMK.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya adalah: mengembangkan kawasan wisata alam Gunung Padang, mengembangkan kawasan wisata alam Mandeh, mengembangkan kawasan wisata alam Panorama Baru, mengembangkan kawasan wisata alam Danau Kembar, mengembangkan kawasan wisata alam Kawasan Harau, mengembangkan kawasan wisata tambang Sawahlunto, mengembangkan kawasan wisata budaya Ulakan Tapakis, mengembangkan kawasan wisata budaya Pagaruyung,

mengembangkan kawasan wisata alam Danau Maninjau, mengembangkan kawasan wisata surfing Mentawai, meningkatkan promosi yang efektif melalui berbagai media, dan meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan kawasan wisata alam dan wisata budaya adalah: Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Wisata, Pengembangan Wisata Alam, Pengembangan SDM Pariwisata, Peningkatan dan Pengembangan Produk Wisata Budaya Minangkabau, Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya, Pengelolaan Kekayaan Budaya, Pemberdayaan lembaga-lembaga seni dan budaya, dan Pengembangan Pendidikan Budaya.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal adalah: mengembangkan basis data penduduk miskin, melakukan koordinasi program pengentasan kemiskinan, meningkatkan keterampilan penduduk miskin, memberikan bantuan biaya pendidikan penduduk miskin, memberikan jaminan kesehatan penduduk miskin, melakukan gerakan terpadu pemberdayaan fakir miskin, memberi bantuan permodalan bagi usaha mikro, meningkatkan perlindungan bagi keluarga miskin, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, dan menambah lapangan usaha bagi angkatan kerja.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan daerah tertinggal adalah: Gerakan Terpadu peningkatan lapangan kerja dan penurunan tingkat kemiskinan, Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan, Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan/nagari, Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Peningkatan Perlindungan Terhadap Keluarga Miskin, Penyempurnaan Database dan Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha, Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, Perlindungan Tenaga Kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, Peningkatan aksesibilitas ke daerah tertinggal.

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 4 dalam pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat adalah diperlukan arah kebijakan: meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur,

membangun jalan dan jembatan sesuai kebutuhan, membangun jalan dan jembatan penunjang ekonomi rakyat, meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang pada koridor-koridor utama, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil dan pulau; meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum (air bersih, limbah, sampah dan drainase) yang memadai dan terpadu; membangun jalan dan jembatan penunjang pariwisata, membangun jalan dan jembatan untuk evakuasi bencana, mengembangkan infrastruktur kawasan khusus/tertinggal, membangun prasarana jalan strategis antar daerah, membangun perumahan masyarakat, menata bangunan dan lingkungan pemukiman, mengelola jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya, mengelola konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya, mengembangkan angkutan kereta api, membangun dan rehabilitasi sarana dan fasilitas jalan, membangun dan rehabilitasi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, mengembangkan komunikasi dan informasi, mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut, mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara, merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang, menyusun regulasi dan pengelolaan energy, mengembangkan energi kelistrikan.

Program prioritas untuk mewujudkan Misi 4 dalam pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat adalah: Peningkatan Partisipasi Investasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur (*Public Private Partnership*), Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air lainnya, Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus, Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Pengembangan Angkutan Kereta Api, Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara, Perencanaan Penataan Ruang, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan, Penyusunan Regulasi, Perencanaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Energi, Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus/Tertinggal, Pengembangan Komunikasi dan Informasi. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.4.

**Tabel 7.4.
Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 4**

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
IV 5	Meningkatnya kualitas dan produktivitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatnya produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan luas tanam komoditi unggulan pertanian, perkebunan, peternakan & perikanan Meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia petani 	<p>Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produksi pertanian, peternakan, perkebunan Menurunnya serangan hama dan penyakit tanaman Meningkatnya produksi benih unggul <p>Meningkatnya teknologi informasi pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> Terpenuhinya alisiantan bagi petani 	%	4	16	Program Peningkatan Produksi dan Mutu Secara Berkelanjutan	Pertanian	Disperta Disbun Disnak Diskel&ikan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, peternakan dan perikanan	Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan bidang pertanian, peternakan dan perikanan.	Meningkatnya jumlah KSP pertanian, peternakan dan perikanan	Berkembangnya KSP <ul style="list-style-type: none"> • KSP Hortikultura • KSP Perkebunan • KSP Peternakan • Meningkatkan luas tanam komoditi kakao (Ha) • Meningkatkan luas tanam komoditi kopi (Ha) • Meningkatkan produksi komoditi manggis (Ha) • Meningkatkan produksi komoditi jagung (Ha) • Meningkatkan produksi daging sapi (ton) • Meningkatkan produksi komoditi unggas (ekor) • Meningkatkan produksi komoditi kambing (ekor) 	Unit Unit Unit Ha	20 14 6 84	28 28 14 200	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Pertanian	Disperba Disbun Disnak Diskel&ikan
	Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang pertanian, peternakan dan perikanan			• Meningkatkan komoditi kakao (Ha) • Meningkatkan luas tanam komoditi kopi (Ha) • Meningkatkan produksi komoditi manggis (Ha) • Meningkatkan produksi komoditi jagung (Ha) • Meningkatkan produksi daging sapi (ton) • Meningkatkan produksi komoditi unggas (ekor) • Meningkatkan produksi komoditi kambing (ekor)	Ha Ha Ha Ha Ton Ekor Ekor	47 - - 18.322 27.678 254,45	75 48 629,618 64,450 630 396,23			

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				<p>Meningkatnya sarana prasarana pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Areal Pertanian (%) • Pengembangan balai Benih (Unit) • Evaluasi penggunaan dana kredit bagi petani (skim) • Berfungsinya pasar ternak (unit) • Peningkatan luas lahan budidaya sesuai target produksi (ha) • Rumah percontohan pembuatan pupuk organik (RPPPO) • Unit pengelolaan pupuk organik (UPPO) • Perluasan areal hortikultura 	% Unit Skim Unit Ha Unit Unit Ha	2 8 5 13 1 14 19 690	10 8 5 13 1 66 69 2690	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian		

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery)	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) dan pengolahan hasil perikanan laut (Fishery) Mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju 	<ol style="list-style-type: none"> Membangun sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah produksi dan cluster agroindustri pedesaan. Mengembangkan sistem dan kelembagaan pasar pertanian yang difokuskan kepada peningkatan kemampuan akses lokal (wilayah dan kawasan) Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan dengan menggunakan pendekatan wilayah dan kawasan 	<p>Terkembangkannya Balai Alih Teknologi Pertanian (BATP/Agro Techno Park).</p> <p>Terbanggunya Science/ Techno Park untuk mendukung pengembangan produk-produk inovatif.</p> <p>Berkembangnya Agrocity/Agropolitan</p> <p>Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produk Hasil Pertanian dan perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> Penerapan GHP & GMP produk segar olahan Peningkatan produksi olahan hasil pertanian Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian Register kebun buah Sertifikasi produk pangan Peningkatan jumlah UP3HP 	Unit	6	38		Pertanian	Disperta Disbun Disnak Diskel&ikan Koperindag
					Unit	1	2			
					Unit	5	9			
					Unit	20	100	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing Produk Hasil Pertanian dan perikanan		
					Ha	90	190			
					%	3	15			
					Ha	100	500			
					Unit	2	13			
					Unit	10	50			

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			4. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (Agro-industri) hasil perikanan (Fishery Processing) 5. Memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan, & perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan GHP dan olahan • GMP Produk segar • Peningkatan produksi olahan hasil perikanan • Peningkatan mutu dan daya saing produk perikanan • Peningkatan unit pengolahan ikan dan hasil perikanan (unit/tahun) • Terbentuknya kontrak kerjasama antara gapoktan dengan pengusaha agribisnis • Peningkatan tujuan pasar hasil kelautan dan perikanan baik regional maupun internasional (tujuan/tahun) • Jumlah unit pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memasuki standar (unit/tahun) 	% Ha % unit	- 4 0 -	5 25 10 10		Kelautan & Perikanan	Kelautan & Perikanan
					Negara	-	10	Program peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian dan perikanan	Urusan Pertanian dan Kelautan & Perikanan	Dinas Pertanian
					unit	-	3			Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perkebunan, peternakan dan perikanan Mengembangkan gerakan terpadu dalam memfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang sejahtera (KK) Meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang sejahtera di nagari tertinggal 	<p>(jumlah KK)</p> <p>Jumlah nagari</p> <p>Jumlah nagari</p>	108	1528	Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Urusan Pertanian	Disperta Disbun Disnak DKP
				<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya model budidaya tanaman hutan 150 Ha terbentuknya model pengembangan lebah madu/gula enau dll 99 unit Terbinanya Model social forestry dan Agroforestry 250 Ha Terfasilitasinya pembangunan hutan tanaman (HTR/HKm/ HR) oleh 10 unit Kelompok tani 	<p>Ha</p> <p>Unit</p> <p>Ha</p> <p>kelompok</p>	-	10	Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani	Urusan Pertanian	Disperta Disbun Disnak DKP
						-	22			
						-	50			
						-	2			

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Peningkatan produksi bibit	%	5	25	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Petani		
				Peningkatan kelembagaan	Unit	33	155			
				Peningkatan petani pengusaha organik	Unit	15	75			
				Peningkatan modal usaha petani	Kip/Th	25	125			
				Peningkatan KK petani pemilik sapi (KK)	KK	180	3100	Program pengembangan satu petani satu sapi	Urusan petani	Dinas pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan
		Peningkatan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	Meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk keamanan pangan berbasis negeri	Meningkatnya ketahanan pangan <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan ketahanan pangan terintegrasi • Tercapainya ketahanan pangan daerah dan RT • Tercapainya pola pangan harapan • Terjaminnya pangan pada daerah yg berisiko rawan • Berkembangnya LDPM, Tunda Jual 	Tahun	2	2	Program Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan	Urusan Ketahanan Pangan	BKP
					%	50	50			
					%	80	85			
					%	80	100			
					%	20	140			

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya keamanan pangan masyarakat • Terdistribusinya pangan sampai pada tingkat konsumen (rumah tangga) 	%	5	5			
				<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya keamanan pangan masyarakat • Terdistribusinya pangan sampai pada tingkat konsumen (rumah tangga) • Tercapainya penguatan cadangan pangan • Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di dunia • Terlaksananya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan • Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan 	%	5	5			
				<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya penguatan cadangan pangan • Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di dunia 	%	-	10			
				<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya penguatan cadangan pangan • Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di dunia 	%	-	60			
				<ul style="list-style-type: none"> • Tercapainya penguatan cadangan pangan • Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di dunia 	%	-	80			
				<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan • Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan 	%	-	70			
				<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan 	%	-	80			

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				Meningkatnya ketahanan pangan Melalui konsumsi , keamanan pangan, distribusi dan pemberdayaan ditingkat masy (diversifikasi pangan) <ul style="list-style-type: none"> • Termanfaatkan nya lahan perkarangan • Berkembannya kelompok pengolah tepung-tepungan • Konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi 	% %	25 10	125 50	Program Diversifikasi Pangan	Urusan Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
				Meningkatnya pengamanan sumberdaya hewan <ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan kasus penyakit hewan menular • Meningkatkan jumlah pelayanan keswan • Terpenuhinya sarana prasarana pelayanan keswan • Meningkatkan aplikasi teknologi medik veteriner 	Kasus Unit Unit Unit	30 65 1 1	10 75 2 1	Pengamanan Sumber daya hewani	Pertanian	Dinas Peternakan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Meningkatnya kualitas & produktivitas berbagai komoditi perikanan	Meningkatnya produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan perikanan	1. Meningkatkan luas tanam komoditi unggulan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi benih/bibit - Peningkatan kelembagaan pembenuha rakyat - Peningkatan luas lahan budidaya sesuai target produksi - Peningkatan produksi perikanan - Menurunnya serangan hama dan penyakit ikan 	% Unit Ha % %	2 1 12 26 2	15 7 100 27 12	Pengembangan Budidaya Perikanan	Kelautan dan Perikanan	Kelautan & Perikanan
			2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam bidang perikanan	Pengembangan balai benih	Unit	3	3	Penyediaan sarana dan prasarana		
			3. Merevitalisasi sistem kelembagaan penyuluhan	Peningkatan kapasitas Penyuluh	Orang	40	40	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian		
	Meningkatnya jumlah dan luas kawasan sentra produksi komoditi unggulan bidang perikanan	Mengembangkan sentra produksi komoditi perikanan.	4. Meningkatkan sumberdaya manusia petani Meningkatnya Jumlah KSP perikanan	Berkembangnya KSP Perikanan <ul style="list-style-type: none"> • KSP Perikanan Peningkatan Produksi Komoditi Unggulan <ul style="list-style-type: none"> • Tuna • Nila • Kerapu 	Kws Ton Ton Ton	15 22 49 15	15 1500 271 270	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi	Kelautan & Perikanan	Kelautan & Perikanan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				<p>Meningkatnya pengembangan dan pengelabaaan perikanan tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah lokasi dan ekosistem yang dilindungi dan diperkaya stok (lokasi/pertahun) Jumlah izin usaha perikanan tangkap sesuai ketentuan yg berlaku (dokumen/ Tahun Peningkatan KUB nelayan skala kecil yang mandiri (kimpk/tnr) Peningkatan Kapal, alat tangkap dan awak kapal 	Lokasi	2	2	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap		
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah izin usaha perikanan tangkap sesuai ketentuan yg berlaku (dokumen/ Tahun Peningkatan KUB nelayan skala kecil yang mandiri (kimpk/tnr) Peningkatan Kapal, alat tangkap dan awak kapal 	Dok	-	50			
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapal, alat tangkap dan awak kapal 	Kelompok	2	10			
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapal, alat tangkap dan awak kapal 	%	0,5	0,5			
	Meningkatnya kesejahteraan petani	Menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan bantuan dan pendampingan untuk usaha perikanan Mengembangkan gerakan terpadu dalam memfasilitasi petani untuk meningkatkan pendapatannya 	Meningkat jumlah rumah tangga nelayan sejahtera	KK	50	150	Pensejahteraan Ekonomi Nelayan	Kelautan & Perikanan	Kelautan & Perikanan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				<ul style="list-style-type: none"> Lokasi perairan yang bebas dari kerusakan dan pencemaran Pengembangan dan peningkatan data dan informasi 	Lokasi	-	12	Program pemberdayaan dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan perikanan (SDKP)	Kelautan & Perikanan	Kelautan & Perikanan
					%	-	90			
6.	Pengembangan Industri Olahan	UMKM Perdagangan dan Iklim Investasi								
	Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi	Strategi : Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi	1. Meningkatkan pembinaan manajemen dan pemasaran bagi UMKMK 2. Meningkatkan kualitas kelermbagaan UMKMK	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah koperasi yang ditingkatkan kualitasnya (unit) Jumlah koperasi yang bersertifikasi (Unit) Penurunan koperasi tidak aktif Jumlah koperasi yang berprestasi dan akuntabel (unit) 	Unit	38	54	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperindag
					Unit	0	25			
					%/th	2	2			
					unit	18	30			
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah pengelolaan Koperasi dan IKM yang di latih Jumlah Aparatur pembina yang di latih Jumlah UMK yang dilatih (Orang) 	Orang	120	600	2. Pogram Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperindag
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PKL yang diberi bantuan modal 	Orang	90	600			
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah UMK yang dilatih (Orang) 	Orang	90	540			
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah PKL yang diberi bantuan modal 	Unit	7000	13000	3. Program Peningkatan dukungan dan Akses Permodalan UMKMK	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperindag
				<ul style="list-style-type: none"> Jumlah UMK yang difasilitasi 	UMK	0	950	4. Program Terpadu peningkatan kesejahteraan pelaku usaha		

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				- Jumlah KSP/USP, KJKS/UJKS dan LKM yang berperan dalam pembiayaan	unit	20	70	5. Program peningkatan Lembaga Keuangan Non Bank dalam pembiayaan UMKMK		
			5. Meningkatkan kemitraan bisnis bagi UMKMK	- UMKMK yang bermitra dengan BUMIN dan Usaha skala menengah - Jumlah Koperasi yang berperan dalam sektor riil	%/th Unit	15 10	25 50	6. Pengembangan Kemitraan UMKMK 7. Peningkatan Peranan Koperasi dalam sektor riil	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Koperindag
	Meningkatnya investasi daerah	Meningkatkan kerjasama promosi dan investasi	1. Mengembangkan pelayanan satu pintu yang prima dalam penanaman modal 2. Mengembangkan pemberian insentif bagi para investor 3. Meningkatkan informasi peluang investasi bagi calon investor 4. Meningkatkan investasi dan pengawasan sumberdaya mineral dan batubara	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal dan realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none"> Unit Persetujuan Milyar rupiah Juta US \$ 	0 18 404,65 17,81	5 (k) 132 (k) 501 25	1. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3. Program Penyiapan Potensi Sumber daya daerah 4. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan investasi sumberdaya	Penanaman Modal Penanaman Modal Penanaman Modal Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPPMP) BKPPMP BKPPMP Dinas ESDM

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
				mempunyai Izin Usaha Pertambangan Rakyat				mineral dan batubara		
-	Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan	Menyediakan pasar yang layak untuk perdagangan	Membangun pasar daerah yang layak bagi perdagangan	Meningkatnya jumlah Sarana pasar - Jumlah Kab/kota yang mendapat bantuan sarana perdagangan	Kab/Kota	-	19	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar	Perdagangan	Koperindag
-	Meningkatnya ekspor daerah	Meningkatkan daya saing komoditi daerah	1. Memperpendek mata rantai pemasaran 2. Meningkatkan penerapan teknologi dalam proses produksi	- Persentase peningkatan transaksi pasar - Meningkatnya nilai ekspor daerah - Jumlah produk yang potensial diekspor - Jumlah negara tujuan ekspor - Jumlah peserta pelatihan	% US \$ Komoditi Negara Orang	1 2.219 1 40-45 0	20 4.464 10 60-65 150	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Perdagangan	Perdagangan	Koperindag
			Meningkatkan informasi pasar bagi produsen dan konsumen	- Berkurangnya konsumen yang dirugikan - Jumlah produk yang memenuhi SNI. - Peningkatan jumlah UTTP yang ditera / tera ulang	% Produk %	6 6 10	30 30 50	Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Koperindag
-	Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah	Mengembangkan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah	- Memfasilitasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah	- Jumlah sentra industri yang dibina	Unit sentra	5	25	Program pengembangan sentra-sentra industri Potensial	Perindustrian	Koperindag

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			-	- Meningkatkan investasi usaha IKM. - Jumlah unit usaha industri unggulan daerah	%/tahun unit	2 1	10 3	Program Peningkatan Iklim Usaha Industri Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Agro dan manufaktur	Perindustrian Perindustrian	Koperindag Koperindag
				- Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah secara profesional - Jumlah rekyasa teknologi tepat guna	Ratio	-	1: 40	Revitalisasi dan pengembangan industri kecil dan menengah	Perindustrian	Koperindag
				- Jumlah klaster yang dikembangkan	Unit	3	18	Pengembangan Teknologi Tepatguna	Perindustrian	Koperindag
				- Jumlah klaster yang dikembangkan	Klaster	1	3	Pengembangan Klaster Industri Unggulan	Perindustrian	Koperindag
			Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku industri	- Meningkatkan produktifitas SDM IKM	orang	50	250	Pengembangan SDM Industri kecil dan Menengah dan Aparat pembina	Perindustrian	Koperindag
7	Prioritas : Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya • Berkembangnya wisata seni dan budaya	Mengembangkan wisata seni dan budaya daerah	1. Meningkatkan kualitas cagar budaya dan kapasitas sumberdaya manusia seni dan budaya daerah 2. Meningkatkan Kualitas produk wisata budaya	- Meningkatkan jumlah event budaya - Meningkatkan kualitas cagar budaya - Meningkatkan kualitas produk wisata budaya yang dikembangkan	produk unit jenis produk wisata budaya	8 3 0	20 7 4	Peningkatan Diplomas Seni dan Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Peningkatan dan Pengembangan Produk Wisata Budaya Minangkabau	Pariwisata Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	-Meningkatnya jumlah dan kualitas kawasan	Mengembangkan kawasan wisata alam unggulan	1. Mengembangkan kawasan (kws)	Meningkatnya pemanfaatan wisata	Kawasan	2	7	Pengembangan Kawasan Wisata	Pariwisata	Dinas Kehutanan, ,

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	wisata alam dan wisata budaya yang sudah tertata dengan baik	utama Sumatera Barat	<p>wisata alam Gunung Padang</p> <p>2. Mengembangkan kws. wisata alam Mandeh</p> <p>3. Mengembangkan kws. wisata alam Panorama Baru</p> <p>4. Mengembangkan kws. wisata alam Danau Kembar</p> <p>5. Mengembangkan kws. wisata alam kws. Harau</p> <p>6. Mengembangkan kws. wisata alam danau maninjau</p> <p>7. Mengembangkan kws. wisata surfing Mentawai</p>	alam			Alam		Disbun, Disnaker, PSDA, Bepedalida, Dinas prasjal Tarkim	
		Mengembangkan kawasan wisata budaya unggulan utama Sumatera Barat	<p>- Mengembangkan kws. wisata tambang Sawahlunto</p> <p>- Mengembangkan kws. wisata budaya Uliakan Tapakis</p> <p>- Mengembangkan kws. wisata budaya</p>	Meningkatnya pemanfaatan wisata budaya	kawasan	0	3	Pengembangan Kawasan Destinasi Wisata Budaya	Pariwisata	Disnaker, Binsos, Dinas prasjal Tarkim
	Meningkatnya jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara	Meningkatkan kualitas promosi destinasi wisata	Meningkatkan promosi yang efektif	Meningkatnya jumlah wisatawan dalam dan luar negeri	%	-	20	Pengembangan Pemasaran Wisata	Pariwisata	Dinas Budpar, BKPM
		Meningkatkan kualitas sumberdaya pelaku usaha dan aparatatur parawisata	Meningkatkan sadar wisata di wilayah destinasi wisata	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM pelaku pariwisata	orang	100	220	Pengembangan SDM Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
8. Prioritas 8: Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal										
	Terwujudnya pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terwujudnya pelayanan terhadap PMKS	1. Meningkatkan pelayanan panti sosial untuk PMKS 2. Meningkatkan keterampilan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	- Meningkatnya Pelayanan terhadap PMKS - Persentase partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraan sosial - Jumlah fakir miskin, komoditas adat terpencil, PMKS	% penyuluhan kepada Eks penyandang penyakit sosial Orang peserta sosialisasi narkoba/AIDS % potensi sumber kesejahteraan sosial Org	N/A N/A N/A N/A	95 800 (k) 100 6.000 (k)	Program Eks Penyandang Penyakit Sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Program pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan eks taruna Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Sosial Sosial Sosial Sosial Sosial Sosial Sosial	Dinas Sosial Biro Binsos Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Terwujudnya koordinasi bidang kesejahteraan sosial	Terwujudnya Sasaran program/kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien	Sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan bidang kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi program/kegiatan bidang kesejahteraan sosial - Jumlah Kab/Kota 	Kali rakor	N/A	6 (t)	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Sosial	Biro Binsos
				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kab/Kota 	Kab/Kota	N/A	11 (t)	Program pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam	Sosial	Biro Binsos
				<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi pembinaan penanggulangan gizi masyarakat 	Kali rakor	N/A	43	Program koordinasi perbaikan gizi masyarakat	Sosial	Biro Binsos
	Meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitasnya	Terwujudnya pengembangan sistem ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu Meningkatkan kualitas tenaga kerja Memperluas kesempatan kerja bagi angkatan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan - Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan kesempatan kerja - Jumlah SPMN 	Org yg mengikuti pelatihan	N/A	416 (t)	Program Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Disnakertrans
				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan kesempatan kerja - Jumlah SPMN 	Orang	N/A	14.100 (k)	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan diversifikasi usaha Ketransmigrasian	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Disnakertrans
				<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi hubungan kerja antar pelaku produksi 	Orang SPMN	N/A	221	Pemberdayaan Masyarakat	Masyarakat	BPM
				<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi hubungan kerja antar pelaku produksi 	%	N/A	95	Program perlindungan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Disnakertrans
				<ul style="list-style-type: none"> - Persentase keakuratan hasil uji labor ketenagakerjaan 	%	N/A	90	Program pengadaan Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana laboratorium	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Disnakertrans

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatkan integrasi sasaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tepat dan jaminan pelaksanaan program tepat pada sasaran keluarga miskin	1. Meningkatkan efektivitas penggunaan data kemiskinan 2. Meningkatkan efektivitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat	- Kab/kota yang difasilitasi penyediaan poliklinik pada perusahaan - Meningkatkan keterpaduan dalam penanggulangan kemiskinan - Meningkatkan partisipasi masyarakat	Kab/Kota	N/A	19	Program perlindungan tenaga kerja dan sistem pengawasan tenaga kerja	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Disnakertrans
					Kali rapat	N/A	16 (k)	Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bappeda dan BPM
	Berkurangnya Jumlah Daerah tertinggal	Terwujudnya sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal yang tepat sasaran, efektif dan efisien.	1. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal 2. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur daerah	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal Berkurangnya jumlah daerah tertinggal Meningkatnya usaha ekonomi produktif di daerah pilot proyek pengembangan wilayah tertinggal	Jumlah koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah tertinggal Jumlah daerah tertinggal Kabupaten	19	15	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/nagari Program koordinasi perencanaan pembangunan daerah tertinggal Program percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan/nagari	Perencanaan Pembangunan Daerah Pekerjaan Umum Dinas prajlatkrim, perhubungan, PSDA, ESDM, Nakertrans Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bappeda

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
9.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan	Membangun jalan dan jembatan pada kawasan sentra produksi	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Meningkatkan aksesibilitas wli. yang sedang dan belum Meningkatkan perkembangan pada koridor-koridor utama, jembatan, perdesaan, wilayah perbatasan, terpencil dan pulau Meningkatkan investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur 	<p>Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan komunikasi dan informasi di Sumatera Barat.</p> <p>Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan di Sumbang</p> <p>Meningkatnya rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan di Sumbang</p> <p>Meningkatnya pembangunan infrastruktur pada kawasan khusus di Sumbang</p> <p>Meningkatnya kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur</p> <p>Meningkatnya pengelolaan sumber daya air</p>	% Paket	0 0	80 2	Program pengembangan komunikasi dan informatika	Komunikasi dan informatika	Dinas Perhubungan
Prioritas 9: Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat										
					Meter	-	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Prasja – Tarikim Balai Jalan
					Km	0	800	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Prasja – Tarikim
					kawasan	0	5 (k)	Percepatan pembangunan & pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus	Pekerjaan Umum	SKPD dan Instansi Terkait
					buku	0	1 (k)	Peningkatan Partisipasi Investasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur (Public Private Partnership)	Pekerjaan Umum	SKPD Prov. Dan Lembaga Terkait
					Km	0	15	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Pekerjaan Umum	PSDA, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			2. Mengelola konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya	Meningkatnya luas sumber daya air yang dikelola dari sumber daya air yang ada di Sumbang (%)	Buah unit	-	20 (k)	Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air lainnya	Pekerjaan Umum	PSDA, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian,
			3. Optimalisasi bendung dan embung yang telah dibangun untuk menunjang irigasi & pertanian							
			4. Mendayagunakan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga, pertanian, perkotaan, dan industri	Terpeliharanya persediaan air baku	kawasan	0	3 (k)	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
			5. Melindungi kawasan prioritas dari daya rusak air akibat banjir, abrasi pantai, dan lahar gunung berapi/sedimen	Pengamanan areal permukiman, pertanian dan jalan 220,5 Km	Paket	0	3 (k)	Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Pekerjaan Umum	Dinas PSDA
	Meningkatnya Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan ruang	1. Merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan ruang	Meningkatnya perencanaan penataan ruang di Sumbang	Buku	-	2	Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dis Prasjal Tarikim
				Meningkatnya keserasian dan program pembangunan di Sumbang (%)	Kawasan	0	4	Pengendalian Pemanfaatan Ruang		

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Tersedianya perumahan dan permukiman masyarakat	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat	1. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat	Meningkatnya Pembangunan perumahan & permukiman di Sumbang	Paket	-	1 (k)	Pengembangan Perumahan dan permukiman	Perumahan	Prasja – Tarkim
		Menyediakan perumahan dan permukiman masyarakat	1. Membangun perumahan masyarakat 2. Menata bangunan dan lingkungan permukiman	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan di Sumbang (%)	%	40	-	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Perumahan	Dinas Prastarkim
	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara	1. Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal	Meningkatnya pengembangan angkutan kereta api di Sumbang	Km	Kajian ganti rugi tanah dan fisik	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Perhubungan	Dinas Perhubungan
				Meningkatnya pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Sumbang (%)	unit	-	-		Perhubungan	Dinas Perhubungan
			2. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi laut	Meningkatnya penyelenggaraan Moda Transportasi Laut di Sumbang	Paket	1	1 (k)	Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut	Perhubungan	Dinas Perhubungan
			3. Mengembangkan dan memelihara moda transportasi udara	Meningkatnya pengembangan penyelenggaraan Moda Transportasi Udara di Sumbang	meter	2750	-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara	Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
			4. Mengembangkan angkutan kereta api	Terlaksananya Rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan prasarana, fasilitas Angkutan Kereta Api	Paket	-	1 (k)	Pen gembangan Angkutan Kereta Api	Perhubungan	Dinas Perhubu ngan
	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik	1. Mengembangkan energi kelistrikan 2. Menyusun regulasi dan dokumen pengelolaan energi	75 % rasio elektrifikasi 5 % pertumbuhan pemanfaatan energy terbarukan	% paket	0	75 3 (k)	Peminaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi dan Kelistrikan	Energi Energi	Dinas ESDM dan Instansi terkait Dinas ESDM dan Instansi terkait

7.1.5. Kebijakan Umum dan Program untuk Misi 5

Kebijakan umum untuk mewujudkan Misi 5 adalah : menyediakan peta dan informasi wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana prasarana evakuasi bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kesiagaan bencana, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup, mengembangkan konservasi sumberdaya alam, mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mengamankan hutan dari *illegal logging*, serta mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Sedangkan program prioritas untuk mewujudkan misi 5 adalah: Peningkatan Mitigasi Bencana, Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana, Penanganan Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan & Konservasi Sumberdaya Hutan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam, Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan, Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim, Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut. Penjabaran indikator kinerja, bidang urusan, dan SKPD penanggung jawab dari setiap program dapat dilihat pada Tabel 7.5.

**Tabel 7.5.
Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi 5**

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
V. Misi 5: Mewujudkan Pembangunan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup										
10. Prioritas 10: Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup										
	Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana	Meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana	1. Meningkatkan sarana prasarana evakuasi bencana	Berfungsinya sarana dan prasarana mitigasi bencana	%	10	60	Peningkatan Mitigasi Bencana	Lingkungan Hidup	SPKD terkait
	Tersedianya informasi wilayah rawan bencana	Menyediakan informasi wilayah rawan bencana	1. Mengurangi risiko bencana dilakukan dengan membangun kesiap-siagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu	Menjadi acuan program / kegiatan rencana PB	%	10	100		Lingkungan Hidup	Prasjal Tarkim
	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Berfungsinya data dan informasi	%	20	100	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Lingkungan Hidup	BPBD, Dinkes, DKP
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup	Berfungsinya dan meningkatnya kemam puan evakuasi korban	%	20	80	Penangan Tanggap Darurat	Lingkungan Hidup	BPBD
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	1. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup	Terkendalinya sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	kab	2	10	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	Bapedalda
								Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Bapedalda, DKP

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Meningkatnya konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem	Meningkatkan konservasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem	1. Mengembangkan konservasi sumberdaya alam 2. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Terlaksananya KLHS dan tertatanya RTH Berkurangnya lahan kritis baik di dalam maupun diluar kawasan hutan 10.000 ha/tahun Peningkatan kepastian hukum kawasan hutan 20% Terbentuknya model pengembangan sumberdaya hutan Peningkatan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan hutan 5% Luasan kawasan pesisir yang rusak pulih kembali	% Ha % unit % %	25 372.386 20 19 30	100 332.386 40 32 60	Tata lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pemantapan Kawasan Hutan Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani Peningkatan kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan - Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut - Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Kehutanan Pertanian Kehutnan Lingkungan Hidup	Bappedalda, Bappeda Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan DKP
	Menurunnya jumlah illegal logging dan illegal fishing	Menurunkan jumlah illegal logging dan illegal fishing	1. Mengamankan hutan dari illegal logging	Berkurangnya tekanan kerusakan hutan 20%	%	20	40	Pengamanan dan pengendalian hutan serta mitigasi perubahan iklim	Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan

NO	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	Menurunkan jumlah illegal logging dan illegal fishing	Menurunkan jumlah illegal logging dan illegal fishing			Paket	-	1 (t)	Perencanaan dan pengembangan hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan
			1. Peningkatan kapasitas hukum kawasan hutan 20 %	Terpeliharanya batas kawasan hutan 835 km	km	155	170	Pemantapan Kawasan Hutan	Kehutanan	Dinas Kehutanan

7.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

Pelaksanaan pembangunan selama ini telah mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan di berbagai daerah. Namun, perbedaan kondisi geografis, sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya dan kapasitas sumber daya manusia menyebabkan masih adanya kesenjangan antarwilayah. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat tidak selalu sama dan merata di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan arahan umum pembangunan wilayah RPJPD 2005-2025, dan prioritas dalam RPJMD 2010-2015, maka arah pengembangan wilayah ditujukan untuk (1) mendorong terwujudnya kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan secara adil dan merata di seluruh wilayah; (2) mendorong pengembangan dan pemerataan pembangunan wilayah secara terpadu sebagai kesatuan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungannya; (3) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya dalam satu ekosistem darat dan perairan pesisir; (4) menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan; (5) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional; (6) memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan;

Jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat sebesar 9,54% pada tahun 2009 yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Permasalahan kemiskinan di Sumatera Barat antara lain (1) masih terbatasnya akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, modal, sarana produksi dan perlindungan pemasaran produk (2) ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi lingkungan, air minum serta penerangan.

Provinsi Sumatera Barat, saat ini masih terdapat 8 daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Sijunjung dan Kepulauan Mentawai dengan total nagari sebanyak 253 nagari. Permasalahan yang dihadapi di daerah tertinggal antara lain (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah maju; (2) kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar; serta (3) miskin sumberdaya alam dan manusia (4) Sarana dan Prasarana Soisal Ekonomi Yang Terbatas, Salah satu indikator yang menggambarkan kondisi fisik penyebab

ketertinggalan yakni kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan, penggunaan listrik, telepon, air bersih, kesehatan, pendidikan, komunikasi, pasar dan pelayanan publik lainnya dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Tabel 7.6
Jumlah Nagari Tertinggal per Kabupaten

No	Kabupaten	Jumlah Nagari/Desa	Jumlah Nagari/Desa Tertinggal
1	Kabupaten Sijunjung	54	34
2	Kabupaten Solok Selatan	38	24
3	Kabupaten Dharmasraya	52	32
4	Kabupaten Solok	74	24
5	Kabupaten Pesisir Selatan	76	44
6	Kabupaten Pasaman Barat	19	18
7	Kabupaten Padang Pariaman	47	35
8	Kabupaten Kepulauan Mentawai	43	40
	Jumlah	403	253

Sumber Data : Biro Pemerintahan dan Kependudukan Serda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Pengembangan ekonomi wilayah sampai saat ini produksi terbesar adalah padi, sawit, karet, kakao, yang berada di seluruh wilayah. Hal ini karena masing-masing kabupaten dalam pengembangan produk pertanian belum berbasis pada kawasan dan komoditi unggulan masing-masing daerah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungannya.

1. Sasaran pembangunan berdimensi kewilayahan

- a. Perwujudan sistem perkotaan dan Peningkatan sarana dan prasarana pada pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL)
- b. Pemantapan kawasan lindung
- c. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana alam
- d. Peningkatan kawasan pengembangan pertanian berbasis potensi kawasan dan komoditi unggulan masing-masing Kabupaten/Kota serta sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah
- e. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dilakukan dengan strategi mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu;
- f. Pengembangan kawasan perbatasan dengan provinsi tetangga dilakukan dengan strategi:
 - Meningkatkan stabilitas kemanan dan ketertiban kawasan perbatasan;
 - Mengembangkan kegiatan ekonomi lokal kawasan perbatasan.
 - Peningkatan Fasilitas dan utilitas kawasan perbatasan
- g. Pengurangan daerah tertinggal dengan basis nagari sebanyak 180 nagari dari 253 nagari tertinggal sampai tahun 2015 atau dari 8 kabupaten tertinggal menjadi 4 kabupaten tertinggal.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arah pengembangan wilayah tersebut diatas, maka strategi pengembangan wilayah 2010-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan yang potensial untuk menjadi pusat-pusat perkotaan
- b. Mendorong wilayah-wilayah potensial yang masih tertinggal dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah yang telah maju;
- c. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik;
- d. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;
- e. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana;
- f. Mendorong pengentasan ketertinggalan daerah berbasis nagari atau kabupaten.

3. Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan wilayah perkotaan di Sumatera Barat terutama diarahkan kepada melayani kegiatan yang berskala kota yang meliputi sistem jaringan prasarana, antara lain, mencakup sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem persampahan dan sanitasi, serta sistem jaringan sumber daya air.

Rencana pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat juga mengacu pada kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Menurut RTRW provinsi Sumbar 2009-2029, untuk Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan oleh provinsi di sebut PKWp. Berdasarkan kriteria dan arahan kebijakan pengembangan yang telah disampaikan maka rencana struktur pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2029 terdiri dari 1 (satu) kota PKN, 5 (lima) kota PKW, 4 (empat) kota PKWp, dan 12 (duabelas) kota PKL.

Satu kota PKN yang ada di provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang, dengan criteria yang dimiliki sebagai pusat kegiatan Nasional, diantaranya adalah: kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekspor-impor nasional, memiliki pelabuhan udara sebagai pintu

gerbang menuju dunia Internasional, menjadi pusat industry dan jasa nasional, dan sebagai pusat pengembangan jaringan sistem transportasi yang menyatukan beberapa kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah di Sumatera Barat.

Berdasarkan arahan RTRW Sumatera Barat 2009 - 2029, maka terdapat 5 kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pengembangan wilayah (PKW) di Sumatera Barat yakni: Kota Bukittinggi, kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan Kota Muaro Siberut. Apabila dilihat dari kriteria yang harus melekat pada pusat kegiatan wilayah ini, dimana suatu PKW harus dapat berfungsi sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Tabel 7.7
Kriteria Fungsi Kota

No	Fungsi Kota	Kriteria
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	<ul style="list-style-type: none"> a. Merupakan ibukota Provinsi b. Merupakan gerbang nasional dan memiliki akses cepat dengan kota -kota internasional yang diindikasikan dengan bandara primer dan pelabuhan laut primer. c. Berfungsi sebagai simpul utama jaringan transportasi nasional dan lintas negara. d. Berfungsi sebagai pusat pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan nasional yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan jaringan jalan lintas negara atau jalur penerbangan internasional dan nasional sebagai jalur distribusi. e. Merupakan pusat lokasi ekonomi nasional yang memiliki potensi mendorong perkembangan secara nasional atau beberapa Provinsi. f. Memiliki fungsi pelayanan jasa -jasa pemerintahan dan jasa publik/kemasyarakatan untuk skala nasional atau beberapa Provinsi.
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfungsi sebagai pusat pengolahan, pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan wilayah berorientasi pasar yang melayani beberapa kabupaten. b. Berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi wilayah untuk beberapa kabupaten. c. Penghubung antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) . d. Umumnya merupakan kota simpul utama di kawasan prioritas (sentra produksi dan kawasan andalan). e. Memiliki bandar udara sekunder atau tersier atau pelabuhan pengumpan. f. Memiliki fungsi pelayanan jasa -jasa pemerintahan dan kemasyarakatan beberapa kabupaten.
3	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	<ul style="list-style-type: none"> a. Berfungsi sebagai pusat pengumpul dan pemasaran komoditi unggulan lokal berorientasi pasar wilayah beberapa kecamatan. b. Berfungsi sebagai simpul jaringan transportasi lokal c. Berfungsi sebagai pelayanan jasa -jasa pemerintahan dan kemasyarakatan beberapa kecamatan. d. Bersifat khusus mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya di wilayah kabupaten.

Sumber Data : PP 26 Tahun 2008

Rencana pengembangan hirarki kota-kota di Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk menggambarkan peran dan fungsi setiap kota dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan dalam lingkup provinsi Sumatera Barat. Penetapan tersebut selain didasarkan pada kondisi saat ini yang lebih penting adalah Rencana pengembangan kedepan dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Selain itu, dasar acuan penetapan fungsi juga mengacu pada ketentuan atau kriteria dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah menetapkan arahan hirarki pusat-pusat kegiatan atau permukiman perkotaan nasional, dengan kriteria seperti pada tabel 7.7.

Berdasarkan kriteria tersebut maka hirarki pusat-pusat permukiman perkotaan di Provinsi Sumatera Barat dapat ditentukan, sebagaimana disampaikan pada tabel 7.8

Tabel 7.8

Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2029

PKN	PKW	PKWp	PKL
Kota Padang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bukittinggi 2. Pariaman 3. Sawahlunto 4. Kota Solok 5. Muara Siberut 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Payakumbuh 2. Kota Pulau Punjung 3. Kota Tapan 4. Kota Simpang Empat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Painan 2. Kota Padang Panjang 3. Kota Lubuk Sikaping 4. Kota Sari Lamak 5. Kota Batusangkar 6. Kota Padang Aro 7. Kota Tuapejat 8. Kota Lubuk Basung 9. Kota Muaro Sijunjung 10. Kota Lubuk Alung 11. Kota Aro Suka

Sumber Data : PP 26 Tahun 2008, dan Hasil Analisis, 2008.

Pada Tabel diatas, terlihat bahwa pusat kegiatan pembangunan wilayah di provinsi Sumatera Barat itu adalah yang memiliki perkembangan aktifitas perekonomian yang mendukung kota utama Padang sebagai pusat kegiatan nasional yang aktifitas dominannya adalah kegiatan ekspor dan impor.

Pada sistem jaringan transportasi yang dapat dilihat pada aspek aksesibilitas menuju dan keluar kawasan Kota Padang, dan interaksi kota Padang dengan kota-kota yang menjadi pusat kegiatan wilayah (PKW). Diantara jaringan transportasi jalan raya pada PKN dan PKW provinsi Sumatera Barat, maka kota yang memiliki aksesibilitas geografis yang tinggi yang tercermin dari kecilnya indek aksesibilitas geografisnya adalah

Kota Padang, Bukittinggi, dan Kota Solok, dengan besaran matrik A(G)nya secara berturut-turut adalah 138,1 dan 130,9 serta 127,7. Hal ini berimplikasi bahwa dua kota yang tersebut terakhir ini memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap Kota Padang sebagai PKN. Jumlah arus penumpang yang datang ke kota Padang dari Kota Bukittinggi tahun 2005 mencapai 268.657 orang, yang meninggalkan Kota Padang menuju kota Bukittinggi mencapai 301.871 orang, telah meningkat menjadi 686.628 orang dan 689.627 orang tahun 2009 ini.

Terdapat tiga kota PKWp yang memiliki indek aksesibilitas yang tinggi yakni kota Tapan 287,4 Simpang Empat: 223,8 dan Pulau Punjung 173,6. Tingginya indeks aksesibilitas geografis mengimplikasikan semakin sulitnya akses yang terlihat dari jauhnya jarak tempuh dan lamanya waktu tempuh menuju dan keluar kota-kota PKW ini. Dalam perencanaan pembangunan ke depan, selama RPJM II ini, maka program peningkatan aksesibilitas geografis diantara kota-kota PKW dengan PKNnya, maupun antara kota-kota PKL dengan PKW dan PKN harus menjadi pertimbangan prioritas, agar saling keterkaitan fisik diantara pusat kegiatan nasional yakni Kota Padang, dengan pusat kegiatan wilayahnya semakin tinggi, yang berimplikasi semakin tingginya keterkaitan ekonominya.

Tabel 7.9
Indeks Aksesibilitas Geografis PKN dan PKW
Sumatera Barat Selama RPJM I 2005-2010

No	PKN dan PKW serta PKWp	Indeks Aksesibilitas Geografis (AG) Berdasarkan Jarak
1.	Padang	138.1
2.	Bukittinggi	130.9
3.	Pariaman	145.7
4.	Sawah Lunto	156.7
5.	Solok	127.7
6.	Muara Siberut	na
7.	Payakumbuh	149.1
8.	Pulau Punjung	173.6
9.	Tapan	287.4
10.	Simpang IV	223.8

Sumber Data : Dinas Prasjald Tarkim Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Pada tabel di atas terlihat bahwa kota-kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pengembangan wilayah di provinsi Sumatera Barat memiliki indeks geografis yang lebih kecil dari kota-kota lainnya yang bukan PKW. Kota yang memiliki indek aksesibilitas geografis yang paling tinggi adalah Kota Tapan, sebesar 287,4 Simpang IV yakni 223,8. Sehingga semakin

tinggi indeks aksesibilitas geografis, maka semakin sulit akses masuk dan keluar kota tersebut. Semakin sulitnya akses mengimplikasikan jaringan transportasi terutama jalan darat belum memadai untuk meningkatkan aksesibilitas dengan daerah lain baik sebagai kota PKN maupun dengan kota PKW dan PKL. Sehingga, agar indeks aksesibilitas geografis menjadi lebih kecil seperti Kota Padang, Kota Solok, dan Kota Bukittinggi, maka jaringan transportasi darat harus semakin lebih baik. Oleh sebab itu, dalam pembangunan jaringan transportasi ke depan, wilayah PKW yang terletak di ujung Utara dan Ujung Selatan pada wilayah Sumatera Baat haruslah dapat ditingkatkan aksesibilitasnya dengan menambah panjang jalan beraspal sehingga mempercepat waktu tempuh orang dan barang menuju kota Padang sebagai kota yang melayani kegiatan ekspor dan impor.

4. Arahan Pengembangan Kawasan Lindung

Tabel 7.10
Rencana Luas dan Perubahan Luas Hutan Lindung Provinsi Sumatera Barat
Hingga Tahun 2028 per Kabupaten/Kota

No	Kabupat/Kota	Luas (Ha)	Luas Hutan Lindung		Rencana Perubahan Luas		
			Sk. 422 th 1999	Rencana th 2028	Ha	% 1)	% 2)
A	Kabupaten						
1	Agam	223.230	32.134	22.451	-9.683	-30,13	5,08
2	Dharmasraya	296.113	12.336	8.660	-3.676	-29,80	1,93
3	Kep. Mentawai	601.135	4.614	6.406	1.792	38,84	-0,94
4	Limapuluh Kota	335.430	123.003	99.022	-23.981	-19,50	12,59
5	Padang Pariaman	132.879	22.268	13.334	-8.934	-40,12	4,69
6	Pasaman	444.763	237.044	158.455	-78.589	-33,15	41,24
7	Pasaman Barat	338.777	95.461	78.264	-17.197	-18,01	9,03
8	Pesisir Selatan	579.495	41.672	23.096	-18.576	-44,58	9,75
9	Sijunjung	313.080	88.262	78.015	-10.247	-11,61	5,38
10	Solok	373.800	119.646	118.603	-1.043	-0,87	0,55
11	Solok Selatan	334.620	89.286	80.040	-9.246	-10,36	4,85
12	Tanah Datar	133.600	29.208	18.480	-10.728	-36,73	5,63
B	Kota						
13	Bukittinggi	2.524	-	-	-	-	-
14	Padang	69.496	13.778	13.433	-345	-2,50	0,18
15	Padang Panjang	2.300	36	-	-36	-100,00	0,02
16	Pariaman	7.336	-	-	-	-	-
17	Payakumbuh	8.043	148	295	147	99,32	-0,08
18	Sawahlunto	27.345	496	294	-202	-40,73	0,11
19	Solok	5.764	1.141	1.141	-	-	-
	Jumlah	4.229.730	910.532	719.989	-190.544	-20,93	100,00

Sumber Data : Hasil rencana perubahan fungsi hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008

Keterangan :

- 1) Terhadap luas hutan lindung per kabupaten/kota
- 2) Terhadap jumlah perubahan luas hutan lindung provinsi

Penyebaran kawasan perlindungan setempat tersebut, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 7.11

Tabel 7.11
Rencana Sebaran Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi Sumatera Barat
Dirinci Menurut Kabupaten /Kota

No	Kawasan Perlindungan Setempat	
1	Sempadan Pantai	Kab. Pesisir Selatan
		Kota Padang
		Kab. Padang Pariaman
		Kota Pariaman
		Kab. Agam
		Kab. Pasaman Barat
		Kab. Kepulauan Mentawai
2	Sempadan Sungai	Seluruh Kota dan Kabupaten
3	Kawasan Sekitar Danau dan Waduk	Kab. Agam
		Kab. Tanah Datar
		Kab. Solok
4	Kawasan Sekitar Mata Air	Seluruh Kabupaten dan Kota
5	Kawasan Terbuka Hijau perkotaan	Kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kota Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kota Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Provinsi Sumatera Barat

Sumber Data : Hasil rencana perubahan fungsi hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008

5. Arahan Pengembangan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pembangunan di Provinsi Sumatera Barat berkembang dengan pesat, dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka diambil langkah-langkah perlindungan hutan dan pelestarian alam, diantaranya dengan menetapkan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Kawasan suaka alam dan cagar budaya adalah meliputi : kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

a. Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam merupakan kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alam yang memberikan perlindungan bagi flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam. Kawasan ini terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa.

Kawasan ini ditetapkan dengan kriteria :

- Memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun perairan; dan/atau
- Mempunyai fungsi utama pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang ada di dalamnya.

b. Kawasan Suaka Alam Laut

Sesuai dengan karakteristik fisiografi yang dijumpai di wilayah provinsi Sumatera Barat serta berdasarkan hasil scoring dan hasil perubahan bahwa luasan kawasan yang termasuk Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, kawasan suaka alam dan cagar budaya terdiri dari :

- Cagar alam, dijumpai di Kab. Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Pasaman, dan Agam. Dengan luasan terbesar di Kabupaten Pasaman (570 Ha), dan terendah di Kab.Agam. seluas 3,4 Ha.
- Kawasan Suaka Margasatwa terdapat di kawasan Suaka margasatwa di Pulau Pagai Selatan
- Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya, Kawasan konservasi laut daerah Pulau Penyu, Kawasan konservasi laut daerah di Pulau Pasumpahan dan Pulau Pisang, Kawasan pengawasan keanekaragaman hayati boita laut di Pulau Sikuai, Kawasan konservasi laut daerah Pulau Ujung Agam, Daerah perlindungan laut Tiku Agam, Kawasan perlindungan laut daerah berbatasan dengan Sumatera Utara (Pulau Batu Bakudung) dengan Bengkulu (Pulau Baringin), Kawasan konservasi biota laut langka di Pulau Penyu dan Pulau Pasumpahan.
- Kawasan Pantai Berhutan Bakau, kawasan ini terletak di Batang Tomak Air Bangis, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat ; Lunang Silaut Pesisir Selatan ; Sebagian besar kawasan pantai Kepulauan Mentawai; Agam, Pariaman dan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
- Pelestarian Alam, dengan distribusi berupa : 1. Taman Nasional didominasi di kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Solok, dan Kab. Dharmasraya, dengan luas mencapai sekitar 348.126 Ha. Sedangkan taman hutan raya, taman wisata alam, dan cagar

budaya masing-masing dijumpai di: Kota Padang, kab. Solok, dan Kab. Tanah Datar.

6. Arahan Pengembangan Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2008, disebutkan bahwa yang termasuk kawasan bencana alam meliputi: rawan bencana alam tanah longsor, rawan gelombang pasang, rawan banjir, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, rawan gerakan tanah, zona patahan aktif, rawan tsunami, dan rawan bahaya gas beracun.

Secara lebih rinci dan lengkap peluang bencana yang dapat terjadi diwilayah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan Rawan Tanah Longsor tersebar hampir merata di seluruh Sumatera Barat terutama pada sepanjang jalur patahan samangko, pada zona ini banyak terdapat morfologi dan relief yang terjal serta banyak daerah hancuran menjadi zona rentan gerakan tanah karena terkena patahan. Selain itu pada kawasan gunung api, hal ini disebabkan oleh batuan produk gunung api kuarter merupakan batuan yang tidak solid, menempati morfologi perbukitan sehingga mudah longsor akibat curah hujan tinggi maupun akibat getaran gempa bumi. Lebih dari 50% I dari seluruh luas provinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan zona kerentanan gerakan tanah tinggi dan Zona gerakan tanah menengah. Kawasan ini tersebar mulai dari Kabupaten Pasaman, sampai pada perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai wilayah perbatasan dengan Provinsi Riau, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan hingga ke perbatasan Propinsi Bengkulu.
- b. Kawasan Rawan Banjir di Sumatera Barat terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan: daerah berlereng landai, pertemuan dua sungai besar, banyak terdapat meander sungai, adanya perubahan kelerengan yang tiba-tiba, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Wilayah dengan ciri-ciri seperti ini terdapat di Kinali, Air Bangis, dan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat; Painan, Air Haji, dan sekitar Lunang Silaut, di Kabupaten Pesisir Selatan; Kota Solok, Kota Padang, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

7. Arahlan Pengembangan Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memiliki keunikan baik dari jenis bebatuan, bentang alam, proses geologi maupun kawasan imbuhan air tanah. Untuk kawasan lindung geologi yang ada di Provinsi Sumatera Barat, tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, diantaranya :

a. kawasan cagar alam geologi;

Kawasan lindung Kars, kawasan lindung kars kubah Batusangkar, bukit-bukit kars di sungaidareh di kab. Dharmasraya dan sijunjung,

b. kawasan rawan bencana alam geologi; meliputi:

- Kawasan rawan gempa tektonik, dengan sumber gempa penunjaman Jawa-Sumatra yang berpusat di laut sebelah barat sepanjang pantai barat Sumatera, dengan tingkat intensitas kerusakan pada skala VI-VII MMI tingkat resiko sedang tingkat tiga, yaitu mencakup Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kawasan rawan gempa tektonik dengan sumber pada zona patahan aktif Sumatra yaitu sepanjang patahan Semangko dengan tingkat intensitas kerusakan mencapai skala VIII-IX MMI, dengan tingkat resiko besar satu yang mencakup wilayah Kabupaten Sijunjung, Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Solok, Solok Selatan, Agam. Sedangkan kawasan rawan gempa bumi dengan skala V-VII dengan tingkat resiko kecil yang disebabkan oleh guncangan akibat gempa tektonik dan vulkanik yang mencakup hampir seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kawasan ini terjadi umumnya pada daerah yang berada di sepanjang pantai barat Sumatera: Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah gempa tektonik yang berpusat di laut. Sedangkan kawasan rawan gempa tektonik yang berada zona sepanjang patahan Semangko meliputi mulai dari Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Solok, sampai Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

- Kawasan Rawan Letusan Gunung Api terdapat di kawasan gunung api aktif yaitu kawasan sekitar Gunung Merapi, Gunung Tandikat,

Gunung Talang dan Gunung Kerinci dengan klasifikasi: kawasan bahaya I dengan radius 3 km dari puncak gunung, kawasan bahaya II dengan radius 3-7 km dari puncak gunung, dan kawasan bahaya III dengan radius 8-14 km dari puncak gunung. Kawasan rawan letusan gunung api terdapat juga pada daerah sekitar lembah sungai yang berhulu di lereng atas gunung api memanjang hingga ke lereng bawah, sebagai akibat adanya aliran lahar, dan abu vulkanik.

Kawasan ini umumnya terjadi di Kabupaten dan Kota yang berada < 10 Km dari pusat erupsi gunung api pada Kawasan gunung api aktif yaitu Gunung Merapi, Gunung Tandikat, Gunung Talang dan Gunung Kerinci.

- Kawasan Rawan Bencana Tsunami meliputi seluruh kawasan pesisir pantai Pulau Sumatera dan Kepulauan Mentawai beserta pulau-pulau kecil lainnya. Kawasan rawan tsunami di pesisir Provinsi Sumatera Barat dapat dikelompokkan dalam tiga kategori zona kerawanan tsunami yaitu

Zona Kerawanan tinggi, wilayah dengan jarak garis pantai 50 m, sepanjang pantai dengan ketinggian kontur kurang dari 10 m dpl.

Zona Kerawanan menengah yaitu daerah sepanjang pantai dengan kontur ketinggian 10 – 15 m dpl, dengan kemiringan lereng cukup terjal.

Zona kerawanan rendah yaitu wilayah sepanjang pantai dengan ketinggian 15 – 30m dpl, dengan morfologi curam dan relief tinggi atau berbukit, dan daerah ini dapat dimanfaatkan untuk evakuasi dan lokasi pengungsian.

- Kawasan Rawan Abrasi Pantai terjadi pada daerah pantai dengan komposisi batuan sedimen lunak yang dicirikan oleh pantai landai dan berhadapan langsung dengan laut lepas. Terdapat mulai dari Kota Padang, hingga Kota Pariaman. Termasuk yang ada di Pasaman Barat dan kabupaten Pesisir Selatan serta Kepulauan Mentawai.
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Kawasan ini termasuk kawasan tuf ngarai sianok, danau dibawah, dan kaldera gunung api maninjau.

8. Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

A. Arahan pengembangan Kawasan Hutan Produksi

Kawasan budidaya hutan produksi, berdasarkan PP 26 tahun 2008 terdiri dari Hutan Produksi Terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi serta hutan rakyat. Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi hutan produksi yang cukup luas dan tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Untuk rencana pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi sampai dengan tahun 2028 adalah seluas 796.424 Ha. Adapun pengembangan hutan produksi di arahkan di Kab/kota yang meliputi :

Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Tanah Datar Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kota Solok Selatan dan Kota Sawah Lunto

B. Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan budidaya pertanian dimaksudkan untuk dapat menciptakan produktivitas maksimal dengan masukan terbatas, tanpa mengurangi keseimbangan lingkungan, baik untuk pertanian tanaman pangan maupun perkebunan.

Tabel 7.12

Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau, Kambing dan Domba

No	Komoditi	Kabupaten/Kota
1	Sapi Potong	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Sijunjung, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Padang, Kota Pariaman
		Kawasan Sentra yang telah dikembangkan (20 kawasan) : Kenagarian Mungo, Mungka Kab. Limapuluh Kota, Koto Hilalang, Baso, Pakan Kamis Kab. Agam, Sitiung, Koto Baru Kab. Dharmasraya, Tanjung Emas, Salimpaung Kab. Tanah Datar, Lembah Gumanti Kab. Solok, Lubuk Alung, Padang Sago Kab. Padang Pariaman, Sutera, Bayang Kab. Pesisir Selatan dan Kenagarian Kinali Kab. Pasaman Barat.
2	Sapi Perah	Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang
		Kawasan Sentra yang telah dikembangkan (2 Kawasan): Gunggung Kota Padang Panjang, X Koto Kab. Tanah Datar
3	Kerbau	Kawasan Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Tanah Datar, Kab. Sijunjung
		Kawasan Sentra yang telah dikembangkan (5 kawasan) Sijunjung Kab. Sijunjung, IV Kota, Matur, Batagak, Kabuapten Agam, Alahan Panjang Kab. Solok.
4	Kambing	Kab. Agam, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, Kota Solok
5	Itik	Kawasan sentra Itik 3 Kawasan : Sumani Kab. Solok, Pitalah Kab. Tanah Datar, Payobasung Kota Payakumbuh.

Sumber Data : Kesepakatan dengan Kabupaten/Kota

Tabel 7.13
Arahan Kawasan Pusat Pengembangan Pertanian (Agropolitan)

No	Pusat Kawasan Agropolitan	Kabupaten	Core Komoditi
1	IV Angkat Candung	Agam	Sapi dan Sayuran Dataran Tinggi
2	Lembah Gumanti	Solok	Sayuran Dataran Tinggi
3	Koto Baru	Tanah Datar	Sayuran Dataran Tinggi
4	Lengayang	Pesisir Selatan	Sapi Potong
5	VII Koto Sungai Sarik	Padang Pariaman	Sapi Potong
6	Mungka	Lima Puluh Kota	Unggas
7	Kecamatan Rao	Kab. Pasaman	Karet
8	Kecamatan Bonjol	Kab. Pasaman	Pertanian Terpadu (Pertanian, Peternakan)

Sumber Data : Kementerian Pertanian Tahun 2008

Tabel 7.14
Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga Peternakan

No	Komoditi	Kawasan Sentra	Penyangga
1	Sapi Potong	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Dharmasraya, Kota Payakumbuh	Kab. Solok, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan
2	Sapi Perah	Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kota Padang, Kota Sawahlunto
3	Kerbau	Kab. Agam, Kab. Sijunjung	Kab. Solok, Kab. Tanah Datar,
4	Kambing	Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar,	Kab. Solok Kota Sawahlunto
5	Itik	Kab. Tanah Datar, Kab. Pss Selatan.	Kab. Pasaman, Kab.Dharmasraya
6	Ayam Potong	Kota Padang, Kab.Pdg Pariaman	Kota Payakumbuh, Kota Pariaman
7	Ayam Petelur	Kab. Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh	Kota Padang, Kab.Pasaman Barat
8	Ayam Buras	Kota Swahlunto, Kab.Tanah Datar	Kab.Pss Selatan, Kab.Pdg Pariaman, Kab.Sjj

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

C. Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Hasil analisis menunjukkan, kawasan yang sesuai untuk tujuan pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas : 1.148.728 Ha, yang terdiri dari: potensi lahan sawah, dan lahan bukan sawah, sedangkan distribusi kesesuaian untuk tiap kabupaten/kota menunjukkan bahwa kabupaten Pasaman Barat mempunyai luas areal potensial dengan potensi tertinggi, dan kota Padang Panjang mempunyai areal potensial terendah. Sedangkan potensi pengembangan areal pertanian terluas di kabupaten Agam seluas 29.611 Ha, dan terendah Kota Bukittinggi hanya 414 Ha. Adapun rencana pengembangan kawasan pertanian pangan dan hortikultura, adalah :

1. Pertanian Lahan sawah tersebar pada seluruh kabupaten di Propinsi Sumatera Barat .

Pengembangan lahan irigasi: Kab. Pasaman (Irigasi Panti Rao), Kab. Dharmasraya (Irigasi Batang Hari), Kab. Pasaman Barat (Irigasi Batang Tongar dan Irigasi Batang Batahan), Kab. Pesisir Selatan (Irigasi Inderapura), Kab. Padang Pariaman (Irigasi Batang Anai II), Kabupaten Tanah Datar (Irigasi Sinamar).

2. Kawasan Pertanian Lahan Kering (Palawija dan Hortikultura)

Pertanian lahan kering meliputi palawija dan hortikultura terdiri dari komoditi sayuran (seperti kubis, kentang, bawang merah, cabe), buah-buahan (seperti : manggis, pisang, jeruk, melinjo, markisah, alpokat, salak), dan tanaman hias serta obat-obatan . Dimana sentra produksinya tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 7.15 berikut.

Tabel 7.15
Arahan Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	Komoditi	Lokasi
Buah-buahan		
1.	Jeruk	Kab. Pasaman, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Agam, Kab. Padang Pariman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya dan Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok
2.	Pisang	Kab. Pasaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok
3.	Alpokat	Kab. Solok
4.	Manggis	Kab. 50 Kota, Kab. Agam, Kab. Pdg Pariaman dan Kab. Siunjung, Kab. Solok.
5.	Markisa	Kab. Solok
6.	Sawo	Kab. Tanah Datar
Sayur-sayuran		
1.	Sayuran organik	Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Limapuluh Kota
2.	Kentang	Kab. Agam dan Kab. Solok,
3.	Bawang Merah	Kab. Solok
4.	Tomat	Kab. Tanah Datar, Kab. Solok
5.	Cabe	Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar dan Kab. Agam, Kab. Solok
Palawija		
1	Jagung	Kab. Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sijunjung
2	Kedele	Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya
Tanaman Hias		
1.	Bunga	Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Tabel 7.16
Arahan Pengembangan Kawasan Sentra dan Penyangga
Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	Komoditi	Lokasi Sentra	Penyangga
Buah-buahan			
1.	Jeruk	Kab. Limapuluh Kota,	Kab. Agam, Kab. Solok Selatan
2.	Pisang	Kab. Tanah Datar, Kab. Agam	Kab. Pasaman, Kota Pariaman
3.	Alpoklat	Kab. Solok	Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar
4.	Manggis	Kab. 50 Kota,	Kab Padang Pariaman, Kab Sjj
5.	Markisa	Kab. Solok	
6.	Sawo	Kab. Tanah Datar	
Sayur-sayuran			
1.	Sayuran organik	Kab. Tanah Datar	Kab. Agam, Kab. Solok, Kab. Limapuluh Kota
2.	Kentang	Kab. Solok	Kab. Agam, Kab. Tanah Datar
3.	Bawang Merah	Kab. Solok	Kab. Tanah Datar, Kab. Agam
4.	Tomat	Kab. Tanah Datar,	Kab. Solok, Kab. Agam
5.	Cabe	Kota Payakumbuh	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar
Palawija			
1	Jagung	Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan	Kab. 50 Kota, Kab. Tanah Datar
2	Kedele	Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya	
Tanaman Hias			
1.	Bunga	Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang,	Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

D. Arahan Pengembangan Kawasan Perkebunan.

Kawasan perkebunan di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang selanjutnya disebut kimbun. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan antara lain berupa Komoditi unggulan : kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, kopi, gambir, cassiavera, nilam, jarak pagar. Adapun rencana pengembangan kawasan perkebunan adalah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 7.17
Arahan Pengembangan Kawasan Komoditi Unggulan Perkebunan

No	Komoditi Perkebunan	Lokasi Kawasan Pengembangan Pada Kabupaten/Kota
1	Kelapa Sawit	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung , Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Kepulauan Mentawai
2	Karet	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung , Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman
3	Kelapa Dalam	Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Solok, Kab. Kepulauan Mentawai
4	Kakao	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Kep. Mentawai, Kab. Solok Selatan, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Solok
5	Kopi	Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok, Kab. Pasaman
6	Gambir	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung
7	Cassia vera	Kab. Agam, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung , Kab. Pasaman, Kab. Solok
8	Nilam	Kab. Pasaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Sujujung. Kab. Solok
9	Jarak Pagar	Kab. Pasaman, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kab. Dharmasraya, Kab. Solok Selatan

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Tabel 7.18
Arahan Pengembangan Kawasan Sentra Komoditi Unggulan Perkebunan

No	Komoditi Perkebunan	Lokasi Sentra	Penyangga
1	Kelapa Sawit	Kab. Agam, Kab. Dharmasraya, Kab. Pasaman Barat	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung , Kab. Solok Selatan,
2	Karet	Kab. Sijunjung , Kab. Dharmasraya,	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman
3	Kelapa Dalam	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Kepulauan Mentawai	Kab. Agam, Kab. Kepulauan Mentawai
4	Kakao	Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman	Kab. Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Kep. Mentawai,
5	Kopi	Kab. Tanah Datar, Kab. Solok	Kab. Agam
6	Gambir	Kab. Limapuluh Kota, Kab. Pesisir Selatan,	Kab. Agam
7	Cassia vera	Kab. Tanah Datar, Kab. Solok Selatan	Kab. Solok
8	Nilam	Kab. Pasaman Barat, Kab. Mentawai	Kab. Solok, Kab, Sjj

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

E. Arahan Pengembangan Kawasan Perikanan

▪ Perikanan Tangkap

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 pasal 3, bahwa wilayah provinsi, sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1, terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sesuai dengan undang-undang tersebut maka batas wilayah laut termasuk kawasan perikanan tangkap yang pengelolaannya menjadi wewenang propinsi adalah sejauh 12 mil.

Rencana pengembangan kawasan perikanan tangkap di Provinsi Sumatera Barat dikembangkan di 2 kota dan 5 Kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan laut. Masing-masing daerah tersebut adalah (1) Kota Padang, (2) Kabupaten Pesisir Selatan, (3) Kabupaten Padang Pariaman, (4) Kabupaten Agam, (5) Kabupaten Pasaman Barat dan (6) Kabupaten Kepulauan Mentawai dan (7) Kota Pariaman.

- **Perikanan Budidaya**

Perikanan budidaya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu budidaya laut, budidaya tambak dan budidaya air tawar. Budidaya laut dikembangkan di wilayah kota dan kabupaten yang memiliki perairan laut, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat serta Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan komoditi budidaya rumput laut, kerang mutiara, ikan kerapu serta tambak udang.

Rencana pengembangan perikanan darat budidaya yaitu tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan sentra di Kab. Agam, kab. Padang Pariaman, Kab. Sijunjung, Kab. Limapuluh Kota dan Kabupaten Dharmasraya.

F. Arahan Pengembangan Kawasan Pertambangan

Hampir semua wilayah administrasi merupakan rencana areal penambangan, karena 17 dari 19 wilayah administrasi kabupaten kota mempunyai bahan mineral yang berpotensi untuk dieksploitasi.

Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang kaya akan hasil tambang, terutama: tambang, bahan galian dan berbagai sumberdaya mineral. kawasan pertambangan di Sumatera Barat berada di Sawahlunto, Sijunjung dan Pesisir Selatan untuk batubara; Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat dan Solok untuk pertambangan Galena; Sijunjung, Solok, Tanah Datar dan Kepulauan Mentawai untuk pertambangan minyak dan gas; serta Padang Pariaman, Agam dan Pasaman Barat untuk kawasan tambang pasir besi.

G. Arahan Pengembangan Kawasan Industri

Adapun rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Sumatera Barat berlokasi di perbatasan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang berupa Kawasan Padang Industrial Park (PIP). Disamping kawasan

industry tersebut arah pengembangan sentra industri pada Kabupaten/Kota antara lain:

Tabel 7.19
Arahan Pengembangan Industri di Propinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Komoditi Industri
1	Kabupaten Limapuluh Kota	Gambir, anyaman rotan, batu bata, bubuk kopi Komoditi Inti : Gambir
2	Kabupaten Agam	Bordir, konveksi/garmen, kerajinan perak, CPO, gula tebu, perabot Komoditi Inti : Konveksi/Garment
3	Kabupaten Dharmasraya	CPO, batu bata, meubel kayu, keret, genteng Komoditi Inti : Industri Berbasis Tanah Liat
4	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pengolahan hasil laut, minyak nilam, batu bata, kelapa, kopra, rotan Komoditi Inti : Rotan
5	Kota Padang	Makanan ringan, pengolahan hasil laut, kompor minyak tanah, sulaman benang emas, perabot rotan, semen Komoditi Inti : Pengolahan Hasil Laut
6	Kota Pariaman	Emping melinjo, bordir, sulaman benang emas, pengolahan hasil laut Komoditi Inti : Kelapa Terpadu
7	Kota Solok	Bubuk kopi, perabot kayu, batu bata, makanan ringan Komoditi Inti : Industri Pakaian Jadi & Tekstil Lainnya
8	Kota Payakumbuh	Makanan ringan, bordir, anyaman bambu, telur rendang Komoditi Inti : Industri Pengolahan Daging (Rendang, Dendeng Salai)

Sumber Data : Kesepakatan Provinsi dengan Kabupaten/Kota

Pada RPJMD ini, pengembangan industri unggulan diarahkan pada pengembangan 10 (sepuluh) industri unggulan sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk Provinsi Sumatera Barat oleh Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional yaitu :

Tabel 7.20
Sepuluh (10) Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat

No	Industri Unggulan	Lokasi Pengembangan
1	Industri Pengolahan Kakao	Industri Fermentasi : Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kota Sawahlunto, Industri Pengolahan Kakao: Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Industri Makanan berbasis Coklat : Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh
2	Industri Gambir	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan
3	Industri Minyak Atsiri	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya
4	Industri Pengolahan Makanan Ringan	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, Kab. 50 Kota, Kab. Padang Pariaman, Kota Solok
5	Industri Kulit dan Alas Kaki	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi Kabupaten Tanah Datar
6	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Payakumbuh
7	Industri Alsintan	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam dan Payakumbuh
8	Industri Semen (suku cadang dan pengolahan semen)	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Industri Maritim (perkapalan)	Kabupaten Pesisir Selatan
10	Industri Hasil Laut	Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Tabel 7.20
Sepuluh (10) Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat

No	Industri Unggulan	Lokasi Pengembangan
1	Industri Pengolahan Kakao	Industri Fermentasi : Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. 50 Kota, Kota Sawahlunto, Industri Pengolahan Kakao: Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Industri Makanan berbasis Coklat : Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh
2	Industri Gambir	Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pesisir Selatan
3	Industri Minyak Atsiri	Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Daharmasraya
4	Industri Pengolahan Makanan Ringan	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kab. Tanah Datar, Kab. 50 Kota, Kab. Padang Pariaman, Kota Solok
5	Industri Kulit dan Alas Kaki	Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi Kabupaten Tanah Datar
6	Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Payakumbuh
7	Industri Alsintan	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam dan Payakumbuh
8	Industri Semen (suku cadang dan pengolahan semen)	Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Industri Maritim (perkapalan)	Kabupaten Pesisir Selatan
10	Industri Hasil Laut	Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Sumber Data : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

H. Arahan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Pengembangan pariwisata dilakukan melalui penataan kawasan wisata terdiri atas: penetapan obyek/atraksi unggulan, kota pusat pelayanan pariwisata, dan jalur wisata. Upaya pengembangan wisata Provinsi Sumatera Barat ini juga tetap dikaitkan dengan pusat pariwisata nasional yakni: Jakarta, Jogja, dan Bali sebagai satu kesatuan tujuan wisata nasional sekaligus untuk menarik minat pengunjung. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan pengembangan koridor wisata dan peningkatan daya tarik obyek wisata. Pengembangan pariwisata ini ditujukan untuk wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pembangunan sektor pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dibagi kedalam 7 (tujuh) WPP sebagaimana diuraikan berikut :

Tabel 7.21
Wilayah Pengembangan Pariwisata

No	Wilayah Pengembangan	Kabupaten/kota dan Pusat Layanan
1	Wilayah Pengembangan Pariwisata I	karidor Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kota Payakumbuh. WPP ini dominasi atraksi adalah Budaya, Belanja, MICE, Kerajinan, Kesenian, Peninggalan Sejarah, Danau, Pegunungan, serta Flora dan Fauna dengan Pusat Layanan di Kota Bukittinggi
2	Wilayah Pengembangan Pariwisata II	Meliputi karidor Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kota Payakumbuh. WPP ini dominasi atraksi adalah Budaya, Belanja, MICE, Kerajinan, Kesenian, Peninggalan Sejarah, Danau, Pegunungan, serta Flora dan Fauna dengan Pusat Layanan di Kota Bukittinggi
3	Wilayah Pengembangan Pariwisata III	Meliputi karidor Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang dimana WPP ini didominasi jenis wisata Budaya, Peninggalan Sejarah, Kesenian, Rekreasi, Danau, Agro, Olah Raga, Pegunungan, Hutan, Kerajinan dengan Pusat Layanan di Kota Batusangar
4	Wilayah Pengembangan Pariwisata IV	Meliputi karidor Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok dengan Pusat Layanan di Kota Arosuka. WPP ini didominasi jenis wisata Rekreasi Danau, Pegunungan, Hutan, Agro, Taman Nasional Budaya dan Kesenian
5	Wilayah Pengembangan Pariwisata V	WPP ini meliputi koridor Kota Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya yang didominasi oleh jenis wisata Peninggalan Sejarah, Tambang, Rekreasi Agro, Olah Raga, Hutan dengan Pusat Layanan di Kota Sawahlunto
6	Wilayah Pengembangan Pariwisata VI	Meliputi Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pusat Layanan di Kota Painan. Berupa objek wisata bahari karena terdapat kawasan yang ditetapkan dalam RIPPNAS Pariwisata sebagai Pusat Pengembangan Wisata Bahari Wilayah Barat, yakni Kawasan Wisata Mandeh
7	Wilayah Pengembangan Pariwisata VII	Meliputi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sesuai dengan kondisi geografis berupa kepulauan dan berbatasan langsung dengan laut lepas Samudra Hindia, maka kawasan ini dinominasi oleh wisata bahari yang dilengkapi dengan wisata budaya dan alam. Pusat layanan pada WPP ini adalah Kota Tua Pejat

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

Arah pengembangan kawasan pariwisata pada RPJMD ini sesuai dengan kesepakatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota tentang 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan Pariwisata adalah :

Tabel 7.22
Sepuluh (10) Destinasi Unggulan Pariwisata

No	Destinasi Unggulan	Kabupaten/kota
1	Pantai air Manis, Pantai Padang, Gunung Padang	Kota Padang
2	TeukATURAI, Pantai Barat Sikakap dan Siberut	Kabupaten Kepulauan Mentawai
3	Panorama Baru	Kota Bukittinggi
4	Heritage transportasi batubara	Kota Sawahlunto
5	Lembah Harau	Kabupaten Lima Puluh Kota
6	Kawasan Mandeh	Kabupaten Pesisir Selatan
7	Danau Kembar	Kabupaten Solok
8	Istana Pagaruyung	Kabupaten Tanah Datar
9	Ulakan Tapakis, Tabuik	Kabupaten Padang Pariaman
10	Danau Maninjau, Puncak Lawang	Kabupaten Agam

Sumber Data : Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009

I. Arahan pengembangan Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Barat, dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan diupayakan tidak melakukan peralihan fungsi terhadap lahan pertanian teknis.

Secara keseluruhan luas lahan terbangun di Provinsi Sumatera Barat direncanakan seluas 61.682 ha, sebagian besar kawasan terbangun berupa permukiman, yang dapat dibedakan dalam dua kelompok yakni permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan, Adapun arahan pengembangan kawasan permukiman adalah:

- a. Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam, sehingga pada permukiman yang telah ada diupayakan untuk direlokasi ke wilayah yang relatif aman
- b. Sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha serta dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas yang ada disekitarnya dan meningkatkan perkembangan kegiatan sektor ekonomi yang ada.
- c. Perlu adanya pengaturan terhadap luas lahan terbangun dengan tak terbangun pada kawasan pengembangan permukiman.
- d. Perlu pengelompokan kawasan permukiman agar dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman lebih efisien dan efektif
- e. Perlu adanya penegasan batas kawasan terhadap kawasan non permukiman.
- f. Perlu adanya penetapan tinggi bangunan pada kawasan pengembangan permukiman.

J. Arahan Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Provinsi Lain

Sumatera Barat di wilayah utara berbatasan langsung dengan provinsi Sumatera Utara, wilayah timur dengan Provinsi Riau dan Jambi, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu dan sebelah barat dengan Samudera Hindia. Jumlah kabupaten dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga sebagai berikut:

Tabel 7.23
Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan
Yang berbatasan dengan Provinsi Tetangga

No	Provinsi Berbatasan	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kecamatan
1	Sumatera Utara	Pasaman Barat	4	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Gunung Tuleh dan Lembah Malintang
		Pasaman	4	Duo Koto, Rao Utara, Rao, Mapat Tunggul
2	Riau	Pasaman	2	Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan
		Lima Puluh Kota	4	Kapur IX, Pangkalan Koto Baru, Harau, Lareh Sago Halaban
		Sijunjung	3	Sijunjung, Kamang Baru, Sumpur Kudus
		Dharmasraya	2	Sitiung dan Koto Baru
3	Jambi	Dharmasraya	2	Koto Baru, Sungai Rumbai
		Solok Selatan	2	Sangir Jujuhan dan Sangir
		Pesisir Selatan	3	Pancung Soal, basa IV Balai Tapan dan Lunang Silaut
4	Bengkulu	Pesisir Selatan	1	Lunang Silaut

Wilayah perbatasan dengan provinsi tetangga sebagian besar merupakan wilayah yang tertinggal dan sebagai kantong-kantong kemiskinan. Hal ini terjadi karena pada wilayah perbatasan merupakan wilayah yang termarginalkan dari pusat pemerintahan; kurangnya aksesibilitas dan keterbatasan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi dan transportasi, pasar, serta energy serta sifat permukimannya menyebar.

Strategi pengembangan wilayah perbatasan antara lain:

- a. Pengembangan infrastruktur meliputi transportasi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur perekonomian.
- b. Pengembangan dan penyelamatan ekosistem, kesepakatan antar wilayah hulu, hilir, provinsi, dan pusat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan antisipasi terhadap bencana.
- c. Pengembangan potensi ekonomi. Potensi ekonomi berupa potensi wisata, sumberdaya alam serta sumber ekonomi lainnya dilakukan dengan pola kerjasama antar provinsi maupun antar kabupaten tetangga

Pengembangan sosial budaya, pertalian sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan biasanya mempunyai keterkaitan persaudaraan, kekerabatan karena interaksi masyarakat antar wilayah perbatasan sudah lama terjadi.

7.3. Arahan Pengembangan Daerah Tertinggal

Wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari 7 Kota dan 12 Kabupaten, saat ini masih 8 kabupaten yang dikategorikan tertinggal, secara aksesibilitas ke ibu kota kabupaten pada dasarnya sudah lancar dan terhubung, hanya satu

kabupaten yang membutuhkan transportasi melalui laut dan udara yang sering terkendala dengan cuaca yaitu ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karakteristik wilayah atau kondisi geografis serta menyebarnya kawasan permukiman sehingga akses ke nagari/jorong masih banyak yang belum dapat ditempuh dengan lancar.

Penetapan nagari/desa tertinggal berdasarkan kepada 15 kriteria dasar, yaitu jalan utama desa, lapangan usaha masyarakat, fasilitas dan tenaga kesehatan, sarana komunikasi kondisi perekonomian masyarakat, kondisi sosial masyarakat, ketersediaan infrastruktur, kepadatan penduduk, Sumber air, sumber bahan bakar, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga pertanian, kondisi sosial ekonomi masyarakat, akses sarana kesehatan dan ke pasar serta kemudahan mencapai pertokoan. Pendekatan untuk pengurangan daerah tertinggal perlu berbasis pada nagari, sehingga peningkatan sarana aksesibilitas dari wilayah nagari ke pusat ekonomi atau ibukota kabupaten dan peningkatan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat akan terfokus.

Strategi pengurangan daerah tertinggal berbasis nagari dilakukan dengan

- a. Pengembangan kebersamaan dan kemandirian daerah dalam pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui (1) Pengembangan ekonomi lokal, (2) pemberdayaan masyarakat, dan (3) penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan.
- b. Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing secara berkelanjutan. Strategi ini diharapkan untuk dapat mengembangkan daerah masing-masing berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kondisi potensi lokal setempat. Pengembangan potensi lokal yang berdaya saing dilakukan melalui (1) peningkatan investasi daerah baik investasi swasta, masyarakat dan pemerintah, (2) pemberdayaan usaha kecil, menengah, koperasi dan dunia usaha, (3) pengembangan kawasan produksi, kawasan cepat tumbuh dan agropolitan.
- c. Peningkatan sistem wilayah ekonomi yang sinergis antara daerah tertinggal dan daerah maju tanpa mempertimbangkan wilayah administrasi. Strategi ini dilakukan melalui (1) pengembangan akses dan jaringan ekonomi dan prasarana antar wilayah, (2) pengembangan sentra produksi, (3) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah
- d. Peningkatan penanganan kawasan tertinggal yang memiliki

permasalahan khusus dengan membuka aksesibilitas kepada daerah yang sulit dijangkau secara fisik disebabkan kurangnya moda transportasi, komunikasi dan informasi, minimnya infrastruktur. Strategi ini dilakukan melalui (1) pembukaan infrastruktur untuk mengatasi keterisolasian daerah (2) pembangunan infrastruktur dasar berupa pendidikan, kesehatan, komunikasi, air bersih dan energi (3) pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sasaran pengurangan daerah tertinggal berbasis nagari dilakukan melalui :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat tertinggal minimal sama dengan daerah yang lebih maju.
2. Meningkatnya aksesibilitas kepada daerah tertinggal
3. Berkurangnya ketimpangan antara daerah yang lebih maju dengan daerah tertinggal yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat kabupaten tertinggal.

7.4. AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

7.4.1. Agenda Pembangunan Daerah

Agenda pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan daerah secara menyeluruh sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang telah dirumuskan serta mempedomani agenda pembangunan nasional, maka pada bagian ini ditetapkan 5 agenda pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2010-2015. Masing-masing agenda merupakan rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk setiap misi. Kelima agenda tersebut adalah:

Agenda 1: Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah

Penerapan ajaran agama dan budaya daerah merupakan landasan utama untuk dapat mewujudkan proses pembangunan daerah yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat umum. Melalui agenda pembangunan daerah ini diharapkan akan dapat diwujudkan keselarasan antara ajaran agama dan budaya daerah dengan tingkah laku dan kebiasaan hidup masyarakat setempat sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera dan agamis menuju masyarakat madani. Termasuk ke dalam agenda pembangunan ini adalah perbaikan moral dan akhlak, peningkatan kepedulian sosial, pengembangan pendidikan bernuansa agama, peningkatan toleransi beragama, penerapan dan pengembangan budaya Minangkabau serta peningkatan kepastian hukum tanah ulayat,

Agenda 2: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Oleh karena peran pemerintah dalam pembangunan cukup dominan, maka percepatan proses pembangunan daerah berkaitan erat dengan tata-kelola pemerintah daerah. Dengan demikian perbaikan tata-kelola pemerintah daerah merupakan agenda penting dalam mendorong proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Tekanan utama dalam agenda pembangunan ini adalah: peningkatan keterpaduan dan sinergi antar pelaku pembangunan daerah, pelaksanaan sistem pemerintahan yang partisipatif dan transparansi, perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran, perbaikan sistem rekrutmen dan promosi aparatur, dan peningkatan pelayanan publik.

Agenda 3: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan landasan utama bagi terwujudnya proses pembangunan yang baik, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kualitas pendidikan yang mencakup pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, peningkatan derajat kesehatan tinggi dan pelayanan kesehatan merata, perbaikan gizi dan penerapan dan pengembangan IPTEK tepat guna serta perbaikan etos kerja masyarakat.

Agenda 4: Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat masih tetap menjadi sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah. Karena itu agenda untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat strategis dalam mendorong proses pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Termasuk dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah disemua sektor, penambahan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesempatan berusaha dan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan Nagari serta pengembangan prasarana dan sarana pembangunan.

Agenda 5: Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan yang baik tidak hanya dalam bentuk peningkatan kemakmuran masyarakat, tetapi juga dalam bentuk terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan. Oleh karena itu, agenda perbaikan kualitas lingkungan hidup juga merupakan unsur yang sangat penting dan strategi untuk meningkatkan proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Fokus utama agenda ini adalah pada perbaikan kualitas

Rencana Tata-Ruang Wilayah (RTRW), mewujudkan disiplin aparaturnya dan masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan rencana tata-ruang tersebut serta terus meningkatkan kesadaran masyarakat Sumatera Barat terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.

7.4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan adalah kumpulan program prioritas yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari masing-masing agenda pembangunan. Agenda pembangunan Sumatera Barat tahun 2010-2015 dijabarkan ke dalam sepuluh prioritas pembangunan, yaitu: 1) Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat, 2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan, 3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan, 4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, 5) Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan, 6) Pengembangan Industri Olahan, UMKMK, Perdagangan dan Iklim Investasi, 7) Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya, 8) Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal, 9) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat, 10) Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas, dapat dilihat pada Tabel 7.24.

Tabel 7.24
Hubungan antara Misi, Agenda, dan Prioritas Pembangunan

NO	MISI	AGENDA	PRIORITAS
1	Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"	Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah	1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat
2	Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Perbaikan Tatakelola Pemerintahan Daerah	2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan
3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan 4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
4	Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global	Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan 6. Pengembangan Industri Olahan, UMKMK, Perdagangan dan Iklim Investasi 7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya 8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal 9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat
5	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	10. Penanggulangan Bencana Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Prioritas 1: Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat. Prioritas pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan

Masyarakat diarahkan kepada implementasi prinsip-prinsip agama dan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan pengamalan ajaran agama yang baik dan penerapan adat dan budaya Minangkabau yang intensif diharapkan akan terwujud: 1) Kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, dan cinta damai, 2) Terwujudnya pribadi masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia, 3) Tercerminnya nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sosial ekonomi, 4) Menurunkan tingkat konflik dan kekerasan dalam masyarakat, 5) Pewarisan nilai-nilai kearifan adat Minangkabau, 6) Terwujudnya optimalisasi peran lembaga keagamaan dan lembaga adat, dan 7) Berkurangnya perbuatan maksiat.

Prioritas 2: Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan.

Prioritas Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Dengan reformasi birokrasi akan terwujud: 1) Tata pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima, 2) Terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional, 3) Terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, 4) Terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, 5) Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dan bebas KKN, 6) Terwujudnya kepastian hukum 7) Terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, 8) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel 9) Terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, dan pembangunan lintas sektor.

Prioritas 3: Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan.

Prioritas peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan diarahkan pada penuntasan wajib belajar 9 tahun, perintisan wajib belajar 12 tahun, dan peningkatan standar pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan persyaratan lapangan kerja dan atau dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan prioritas tersebut diharapkan akan terwujud: 1) Penuntasan wajib belajar 9 tahun, 2) Perintisan wajib belajar 12 tahun, 3) Meningkatnya angka partisipasi pendidikan, 4) Terwujudnya pola pendidikan berkarakter dan berkualitas, 5) Lahirnya sentra pendidikan unggul di Indonesia Bagian Barat, 6) Terwujudnya pendidikan spesifik sesuai dengan bakat SDM, 7) Terwujudnya lembaga pendidikan penghasil SDM profesional, 8) Lahirnya wirausahawan baru yang berkapasitas nasional dan global, 9) Berkembangnya penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK, 10) Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga, 11) Peningkatan kualitas pemuda dan

pembangunan olah raga, 12) Mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan pendidikan.

Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, 2) Meningkatnya angka harapan hidup, 3) Menurunnya tingkat kematian ibu melahirkan, 4) Menurunnya tingkat kematian bayi, 5) Menurunnya persentase masyarakat gizi kurang, 6) Meningkatnya pola hidup bersih dan sehat, 7) Meningkatnya layanan rumah sakit berakreditasi internasional.

Prioritas 5: Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan. Prioritas pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan diarahkan untuk mengembangkan pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kelautan) yang mempunyai nilai tambah (*added value*) tinggi, sehingga masyarakat dapat menikmati tingkat keuntungan yang tinggi dari gabungan hasil usahanya melalui berbagai komoditi unggulan. Dengan prioritas tersebut diharapkan: 1) Berkembangnya kawasan sentra produksi pertanian, 2) Berkembangnya agroindustri dan agribisnis sesuai potensi daerah, 3) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai propinsi agraris dengan petani yang sejahtera, 4) Berkembangnya penerapan teknologi pertanian, 5) Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian, 6) Terwujudnya ketahanan pangan, 7) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai daerah penghasil pengusaha profesional, 8) Terwujudnya pola pembangunan berbasis kawasan, 9) Terwujudnya pola pembangunan berbasis komoditi unggulan dan prinsip *one village one product*.

Prioritas 6: Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi. Prioritas pengembangan industri olahan dan perdagangan diarahkan untuk mengembangkan industri skala kecil dan menengah dan jasa berbasis bahan baku dan potensi daerah. Dengan pengembangan industri ini diharapkan: 1) Berkembang sentra industri dan jasa berdasarkan potensi lokal, 2) Penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, 3) Meningkatnya daya saing produk industri dan jasa, 4) Meningkatnya jumlah ekspor produk industri, 5) Meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa, 6) Terwujudnya Sumatera Barat sebagai pelopor pertumbuhan UMKMK dan ekonomi kerakyatan, 7) Terwujudnya promosi dan pemasaran produk industri, 8) Peningkatan Investasi.

Prioritas 7: Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya. Prioritas pengembangan kawasan wisata alam dan budaya diarahkan untuk

mengembangkan objek-objek wisata alam dan situs-situs budaya Minangkabau yang sudah ada menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan pariwisata alam dan budaya ini diharapkan: 1) Berkembang objek-objek wisata alam yang potensial, 2) Berkembang objek-objek wisata budaya yang sudah ada pada setiap daerah, 3) Mewujudkan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata alam dan budaya.

Prioritas 8: Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal. Prioritas percepatan penurunan tingkat kemiskinan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur dan yang miskin secara intensif sehingga laju penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan lebih tinggi dari periode RPJM sebelumnya. Dengan prioritas ini diharapkan akan terwujud: 1) Penurunan jumlah penduduk yang menganggur secara lebih tajam, 2) Penurunan jumlah penduduk miskin secara lebih tajam, 3) Perluasan lapangan kerja, 4) Meningkatnya ketersediaan lembaga penanggulangan kemiskinan, 5) Meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, 6) Berkurangnya jumlah daerah tertinggal.

Prioritas 9: Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat. Prioritas pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat diarahkan untuk meningkatkan akses, jumlah, dan efisiensi distribusi produksi masyarakat, penataan ruang terpadu untuk usaha dan industri, sarana prasarana pertanian, dan perumahan rakyat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Meningkatnya akses transportasi penunjang ekonomi, 2) Lancarnya akses antar kota dan desa, 3) Meningkatnya akses jalan terhadap destinasi wisata, 4) Tersedianya akses jalan evakuasi penanggulangan bencana, 5) Tersedianya sarana prasarana irigasi pertanian, 6) Tersedianya sarana prasarana perekonomian masyarakat, 7) Meningkatnya sarana prasarana perumahan dan pemukiman.

Prioritas 10: Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Prioritas Penanggulangan Bencana alam diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana melalui penguatan kapasitas aparat, penguatan lembaga masyarakat, tersedianya tim gerak cepat, tersedianya sistem peringatan dini, dan program rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana, menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan potensi sumberdaya yang sudah ada untuk usaha ekonomi masyarakat. Dengan prioritas ini diharapkan: 1) Terwujudnya kesiapan daerah untuk penanggulangan bencana, 2) Terwujudnya pemetaan daerah rawan bencana, 3) Tersedianya sistem peringatan dini yang siap siaga, 4) Pengurangan resiko bencana alam, 5)

Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi, 6) Terwujud konservasi sumberdaya alam, 7) Penekanan laju deforestasi, 8) Pengendalian kerusakan lingkungan, 9) Penurunan pencemaran lingkungan, 10) Terpeliharanya kearifan lokal terhadap lingkungan.

Sinkronisasi prioritas pembangunan Sumatera Barat dengan Prioritas Nasional dilihat pada Tabel 7.25

Tabel 7.25
Sinkronisasi Prioritas Nasional Dengan Prioritas Sumatera Barat

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.	1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat (1,11)*
2. Pendidikan	2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan (1)
3. Kesehatan	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan (2)
4. Penanggulangan Kemiskinan	4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat (3)
5. Ketahanan Pangan	5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan (5, 7)
6. Infrastruktur	6. Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi (7,11)
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha	7. Pengembangan Wisata Alam dan Budaya (11)
8. Energi	8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal (4, 10)
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	9. Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat (6, 8, 10)
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	10. Penanggulangan Bencana Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup (9)
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	

** Nomor di belakang prioritas menunjukkan nomor prioritas nasional yang terkait*

7.4.3 Program Per Prioritas Pembangunan

Visi dan misi Pemerintah Daerah 2010-2015, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional kedalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Tabel 7.26
Hubungan Misi, Agenda, Prioritas dan Program

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
1. Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"	1. Peningkatan Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah	1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat	1. Program Gerakan Terpadu Pengamalan Agama, ABS-SBK 2. Program Pengembangan Nilai Budaya 3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Adat 4. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 5. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan Pengamalan dan Pengembangan Nilai agama 6. Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan 7. Program Pengembangan Lembaga -lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 8. Program Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) 9. Program Peningkatan Pemberantasan Maksiat 10. Program Pengembangan Pendidikan Budaya 11. Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
1. Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	1. Perbaikan Tatakelola Pemerintahan Daerah	1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Gerakan Terpadu Reformasi Birokrasi 2. Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik 3. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintah dan pembangunan daerah 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 8. Program Pendidikan Politik Masyarakat 9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan dan Ketertiban Umum 10. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 11. Program Pendidikan Kedinasan 12. Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM 13. Pengembangan manajemen pelayanan publik 14. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur 15. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (good governance) 16. Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur 17. Program peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah daerah 18. Program Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 19. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 20. Program Kerjasama Pembangunan 21. Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22. Program Sarana Informasi Hukum 23. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan 24. Program Pembangunan Materi Hukum 25. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 26. Program Peningkatan Budaya Hukum 27. Program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum 28. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 29. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari 30. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 31. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari 32. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Nagari 33. Program perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 34. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ arsip daerah 35. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi kearsipan 36. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika 37. Program Pengembangan Data dan Informasi 38. Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi	3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan IPTEK	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Gerakan Terpadu Peningkatan SDM 2. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini 3. Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar 4. Program Peningkatan Akses Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah 5. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal 6. Program Pendidikan Luar Biasa 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas Teknis Lainnya 8. Program Pendidikan Berkarakter 9. Program Peningkatan Kordinasi dan Fasilitasi Pendidikan 10. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 11. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga 12. Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan 13. Program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olahraga 14. Program peningkatan penyadaran kepemudaan 15. Program pengembangan kepemimpinan pemuda 16. Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan
		4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Gerakan Terpadu Peningkatan SDM 2. Program Penyediaan obat dan pembekalan kesehatan 3. Program upaya kesehatan masyarakat 4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 5. Program Perbaikan gizi masyarakat 6. Program pengembangan lingkungan sehat 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit (menular/tidak menular) 8. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rs. paru / rs.mata 9. Program sumber daya kesehatan 10. Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 11. Program penelitian dan pengembangan kesehatan 12. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rs. paru/rs.mata 15. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD 16. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 17. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 18. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 19. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 20. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak 21. Program Kesehatan reproduksi remaja 22. Program pelayanan alat kontrasepsi 23. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 24. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita 25. Program keluarga berencana

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global	4. Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Petani 2. Program Pensejahteraan Ekonomi Nelayan 3. Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Perikanan 4. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Pertanian dan Perikanan 5. Program Pengembangan Teknologi informasi pertanian dan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian dan Perikanan 7. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan SDM Petani 8. Program Peningkatan Produksi dan mutu Pertanian secara berkelanjutan 9. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perikanan 10. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, produk Hasil Pertanian dan Perikanan 11. Program Peningkatan Ketahanan dan Keamanan Pangan 12. Program Diversifikasi Pangan 13. Program Pengamanan Sumberdaya Hewani 14. Program Pengembangan Satu Petani Satu Sapi 15. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 16. Program Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap 17. Program Pemberdayaan dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
		6. Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dan Iklim Investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Terpadu peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro kecil 2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 3. Program Peningkatan Kompetensi SDM UMKMK dan Aparatur Pembina UMKMK 4. Program Peningkatan Dukungan dan akses pemodaln UMKMK 5. Program Pengembangan Kemitraan UMKMK 6. Program Peningkatan Peranan Koperasi dalam sektor riil 7. Program peningkatan Lembaga Keuangan Non Bank dalam pembiayaan UMKMK 8. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal 9. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 10. Program Penyiapan Potensi Sumber daya daerah 11. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar 12. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 13. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah 14. Program pengembangan sentra-sentra industri Potensial 15. Program Peningkatan Iklim Usaha Industri 16. Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Unggulan berbasis Agro dan Manufaktur 17. Program Revitalisasi dan pengembangan industri kecil dan menengah

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
			18. Program Pengembangan SDM Industri kecil dan Menengah dan Aparat pembina 19. Program Pengembangan Teknologi Tepatguna 20. Program Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan aparatatur perdagangan 21. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 22. Program Pengembangan Klaster Industri Unggulan
		7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya	1. Program Pengembangan Pemasaran Wisata 2. Program Pengembangan Kawasan Wisata Alam 3. Program Pengembangan Kawasan Wisata Budaya 4. Program Pengembangan SDM Pariwisata 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Produk Wisata Budaya Minangkabau 6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 7. Program Pengembangan Pendidikan Budaya 8. Program Pemberdayaan lembaga-lembaga adat, seni dan budaya
		8. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal	1. Program Gerakan Terpadu Pensejahteraan Fakir Miskin 2. Program Pengendalian Terpadu Penanganan Kemiskinan 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari 4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 7. Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 9. Program Pembinaan Anak Terlantar 10. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma 11. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 12. Program Produktifitas Tenaga Kerja 13. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan diversikasi usaha 14. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 15. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium 16. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja 17. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal

MISI	AGENDA	PRIORITAS	PROGRAM
		9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Partisipasi Investasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur (Public Private Partnership - PPP) 2. Program Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus 3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 4. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air lainnya 5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 6. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 7. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Barat 8. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 9. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman 10. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 11. Program Perencanaan Tata Ruang 12. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 13. Program Pembangunan, Rehabilitasi dan , Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 14. Program Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut 15. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara 16. Pengembangan Angkutan Kereta Api 17. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 18. Program Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan investasi sumberdaya mineral dan batubara 19. Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan prasarana Energi dan Kelistrikan
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	5. Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup	10. Penanganan Bencana Alam, dan Pelestarian Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Mitigasi Bencana 2. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 3. Program Pengelolaan dan Penanganan Dampak Bencana Alam 4. Program Penanganan Tanggap Darurat 5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7. Program Tata lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan 8. Program Pengamanan dan Pengendalian Hutan Serta Mitigasi Perubahan Iklim 9. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 10. Program Pengelolaan Sumberdaya Perairan Umum, Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 11. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 12. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 13. Program Pemantapan Kawasan Hutan 14. Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Lembaga Pengelolaan Hutan

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Pada bab-bab terdahulu, telah dijabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur secara hirarkhis memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, sehingga menghasilkan rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Program-program tersebut dikelompokkan ke dalam 5 agenda dan 10 prioritas pembangunan, program-program tersebut adalah upaya-upaya yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut harus dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Pada bab ini program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan SKPD terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab SKPD langsung dalam pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program dan indikator kinerja tersebut dikelompokkan ke dalam 23 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Pangan, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan Urusan Perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, dan Perindustrian.

Untuk dapat merumuskan program secara terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Indikator dan target kinerja ini ditetapkan dengan memperhatikan kondisi awal dan disusun bersama SKPD dan kemudian disepakati dengan DPRD Provinsi. Pada target kinerja diperkirakan output dan outcome yang akan dihasilkan dari masing-masing program. Penulisan output selain outcome pada indikator kinerja dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada SKPD dalam merumuskan kegiatan-kegiatan pada setiap program prioritas pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Sedangkan pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian target tersebut serta SKPD penanggungjawab. Rincian program berdasarkan urusan dengan indikator dan target kinerja secara rinci dapat dilihat pada Tabel 8.1.

TABEL 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Sumatera Barat

Bidang Usuan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD Rp. (L)	SKPD Penanggung Jawab
	Output	Outcome			2011		2012		2013		2014		2015		Target	Rp. (L)		
					Target	Rp. (L)	Target	Rp. (L)	Target	Rp. (L)	Target	Rp. (L)	Target	Rp. (L)				
Usuan Wajib					682,768	1,052,112	1,193,518	1,292,975	1,435,592	1,435,592	1,435,592	1,435,592	1,435,592	1,435,592				
PENDIDIKAN					66,858	70,694	74,914	79,555	84,660	84,660	84,660	84,660	84,660	84,660				
Program Cerdas Tipe Baru Pendidikan SDMI	IPM			73,44	74,24	74,64	75,04	75,84	75,84	75,84	75,84	75,84	75,84	75,84				
		Angka Partisipasi Murni (APM)																
		% SDMI/SDLE/Paket A	%	99,67	99,67	99,75	100	100	100	100	100	100	100	100		Disdikpora		
		b. SMP/MTs/ SMP/IB/Paket B	%	77,25	78,80	80,35	82,90	83,45	83,45	85*	85*	85*	85*	85*		Disdikpora		
		c. SMA/SMK/MA/ SMA/IB/Paket C	%	55,50	62,5	67,5	72,5	75	75	80	80	80	80	80		Disdikpora		
		d. PT	%	20	21	22	23	24	24	25	25	25	25	25		Disdikpora		
		Kualifikasi pendidikan guru setara S/UDV																
		a. SD	%	20,0	25	30	35	40	40	50	50	50	50	50		Disdikpora		
		b. SMP	%	86,63	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100		Disdikpora		
		c. SMA	%	91,01	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Disdikpora		
		d. SMK	%	91,01	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100		Disdikpora		
		Lama sekolah	Tahun	8,45	9,35	9,70	10,05	10,40	10,40	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75				
Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Alat Permainan Edukatif PAUD	Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD	Jumlah APE	124	430	136	473	520	165	572	182	630	182	630		Disdikpora		
	Workshop penyusunan materi PAUD		kalijudul	5	256	6	282	6	310	7	341	7	375	7	375	Disdikpora		
	Sosialisasi Materi PAUD		orang	160	1,083	176	1,191	194	1,310	213	1,441	234	1,586	234	1,586	Disdikpora		
Program Peningkatan Akses Pendidikan Dasar	persentase Pembinaan pendidikan dasar	Meningkatnya wajib belajar anak usia dasar	%	60	857	70	943	80	1,037	90	1,141	100	1,255	100	1,255	Disdikpora		
	Pembinaan sekolah sehat		%	80	967	85	1,064	90	1,171	95	1,288	100	1,416	100	1,416	Disdikpora		
Program Peningkatan Akses Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah	Akreditasi pendidikan menengah	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan menengah	Sekolah	28	2,351	33	2,586	38	2,845	43	3,129	48	3,442	48	3,442	Disdikpora		
	Jumlah sekolah ber taraf internasional		Jumlah SBI	5	19,434	6	21,377	7	23,315	8	25,867	9	28,453	9	28,453	Disdikpora		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP-JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP-JMD		
	Output	Outcome			Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	
Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal	Meningkatnya keterampilan peserta diklat pendidikan non formal	Persentase buta aksara > 15 tahun	%		2.945	60	3.130	80	3.442	90	3.797	100	4.165	100	4.165	Disdikpora	
Program Pendidikan Luar Biasa	Persentase peserta diklat/layani		%		995	75	1.095	80	1.204	90	1.324	100	1.457	100	1.457	Disdikpora	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan Tugas teknis lainnya	Dokumen Data Pokok Pendidikan		dokumen	1	400	1	440	1	484	1	532	1	586	1	586	Disdikpora	
	persentase pemantauan dan pengendalian program dan proses pendidikan		%	80	6.500	85	7.150	90	7.865	100	8.652	100	9.517	100	9.517	Disdikpora	
Program Pendidikan Berkeadilan	Jumlah Kabupaten/Kota persentase buku pembelajaran pendidikan bermuansa Siarat: Sinkronisasi program Pendidikan		Kab/Kota	19	28.500	19	28.500	19	28.500	19	28.500	19	28.500	19	28.500	Disdikpora	
	Meningkatnya kompetensi pendidikan bermuansa sruat		%	80	750	85	825	90	908	95	998	100	1.098	100	1.098	Disdikpora dan Biro Binsos	
Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan			%	80	460	90	506	100	557	100	612	100	673	100	673	Biro Binsos	
KESEHATAN																	
Program Gerakan Terpadu Peningkatan SDM		IPM		73,44	128.683	74,64	156.649	75,04	172.636	75,44	213.822	75,84	269.606	75,84	269.606		
		Meningkatnya Umur Harapan Hidup	%	70,4	71,12	71,48	71,84	71,84	72,2	72,56	72,56	72,56	72,56	72,56	72,56	Dinas Kesehatan	
		Menurunnya Angka Kemalihan Ibu melahirkan	per 100.000 KH	207	190	166	142	118	118	102	102	102	102	102	102	Dinas Kesehatan	
		Menurunnya Angka Kemalihan Bayi per 1.000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	26	22,00	20,00	18	16	14	14	14	14	14	14	14	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi Gizi Kurang pada anak balita	%	10,5	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	Dinas Kesehatan	
		Persentase penduduk yang memiliki Akses Air Minum yang berkualitas	%	46,68	62,5	63	63,5	63,5	67	68	68	68	68	68	68	Dinas Kesehatan	
Program obat dan pembelatihan kesehatan	persentase kesuksesan obat essensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar		%	85	11.207	90	12.327	95	13.560	100	14.916	100	16.408	100	16.408	Dinas RSJ HB Saahin, RSUD Soek, RSUD Paritaman	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		Rp (Jt)	Target		
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)				
Program upaya kesehatan masyarakat	Output	Outcome	%		70	11,920	80	13,172	90	21,083	100	23,652	100	20,237	100	20,237	Dinkes, RSJ, HB Saanin, RSUD Sook, RSUD Pataman	
			%	100	100	1,355	100	1,491	100	1,640	100	1,804	100	1,984	100	1,984	Dinkes, RSJ, HB Saanin, RSUD Sook, RSUD Pataman	
			%		70	632	80	695	90	765	100	841	100	925	100	925	Dinkes	
			%		70	729	80	802	90	882	95	970	100	1,067	100	1,067	Dinkes	
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat			%		72	1,878	74	2,085	76	2,272	78	2,489	80	2,749	80	2,749	Dinkes, RSJ, HB Saanin, RSUD Sook, RSUD Pataman	
Perbaikan gizi masyarakat			%		8,20	2,250	7,80	2,475	7,40	2,723	7,00	2,995	6,60	3,295	6,60	3,295	Dinkes	
Program pengembangan lingkungan sehat			kali pertemuan		7	394	9	433	11	477	13	524	15	577	15	577	Dinkes	
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular					55	34	60	37	70	41	80	45	90	50	50	50	Dinkes	
					88	232	89	255	90	281	91	309	92	340	92	340	Dinkes	
					90	57	90	63	90	69	90	76	90	83	90	83	Dinkes	
					2	84	2	92	1	102	1	112	1	123	1	123	Dinkes	
					100	111	100	122	100	134	100	148	100	163	100	163	Dinkes	
Program pengobatan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rs. baru / rs. lama					100	33,786	100	37,764	100	40,881	100	44,969	100	49,466	100	49,466	Dinkes, RSM, RSJ HB, Saanin, RSUD Sook, RSUD Pataman	
Program sumber daya kesehatan			org		2	450	3	495	4	545	5	599	6	659	6	659	Dinkes, RSUD Sook, RSUD Pataman	
			kali pelatihan kesehatan		12	1,488	14	1,637	16	1,800	18	1,981	20	2,179	20	2,179	Dinas Kesehatan	
			kali pertemuan		11	766	13	843	15	927	18	1,020	20	1,122	20	1,122	Dinas Kesehatan	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD		
					Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	
Program kegiatan dan manajemen pembangunan kesehatan	Output	Outcome	%	80	987	90	1,064	100	1,170	100	1,237	100	1,416	100	1,416	Dinkes	
	Sikronisasi Program kesehatan			63,8	4.177	78,6	4.995	91,3	5.054	100	5.560	100	6.116	100	6.116	Dinas Kesehatan	
	Jumlah masyarakat mendapat jaminan kesehatan	% penduduk	%	80	243	85	267	90	294	95	323	100	356	100	356	Dinkes dan RS	
	persentase ketersediaan data kesehatan secara cepat akurat dan tepat		%	80	372	85	409	90	450	95	495	100	545	100	545	Dinas Kesehatan	
	persentase kesiapsiagaan bencana		%	1	434	2	478	3	525	5	578	5	636	5	636	Dinkes	
Program penelitian dan pengembangan kesehatan	Jumlah Penelitian		dokumen penelitian	11	1.040	12	1.144	15	1.258	17	1.394	19	1.523	19	1.523	RSAM, RSJ, HB Sainih, RSUD Sook	
Program Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Rumah Sakit Kab/Kota yang memberikan pelayanan kepada penduduk miskin		Kab/Kota	85	153	90	168	95	185	100	203	100	223	100	223	RS Propinsi	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	standarisasi, akreditasi dan peningkatan mutu pelayanan di RS		%	85	2.251	90	2.776	95	2.724	100	2.996	100	3.296	100	3.296	Dinkes, RSJ, HB Sainih, RSUD Sook, RSUD Panaman	
Program pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang aman, nyaman, bersih, terpelihara	sarana prasarana kesehatan yang aman, nyaman, bersih, terpelihara		%	1	45.673	2	65.541	3	72.095	4	103.336	0	148.070	4	148.070	RSUD Propinsi	
Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	BLUD		Jumlah RS BLUD	71	73	73	75	75	78	80	80	80	80	80	80		
	BOR		%	171,363	100	110	110	121	121	133	133	146	146	146	146	Bappeda	
PEKERJAAN UMUM				1	100	1	110	1	121	1	133	1	146	1	146		
Peningkatan Partisipasi Investasi Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur (Public Private Partnership - PPP)	Daftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur	Meningkatnya Kerjasama Pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur	Buku	1	100	1	110	1	121	1	133	1	146	1	146		
Pencapaian pembangunan dan pengorganisasian infrastruktur pada kawasan khusus dan tertinggal	Perumbuhan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi	Meningkatnya pembangunan infrastruktur pada kawasan khusus di Sumter	kawasan	5	5.000 *	5	5.000 *	5	5.000 *	5	5.000 *	5	5.000 *	5	5.000 *	Praja, Terkin, Pemubangan, PSDA, ESDM, Nakertrans	
	Pemgkatan pertumbuhan pembangunan infrastruktur daerah tertinggal		kab	8	8.380	7	9.218	6	10.140	5	11.154	4	12.269	4	12.269	Praja, Terkin	

Bidang Urusan Penerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD			
					Rp (Ji) Target	Rp (Ji) 13,732	Rp (Ji) Target	Rp (Ji) 15,171	Rp (Ji) Target	Rp (Ji) 16,688	Rp (Ji) Target	Rp (Ji) 18,357	Rp (Ji) Target	Rp (Ji) 18,357	Rp (Ji) Target	Rp (Ji) 20,143		Rp (Ji) Target
Peningkatan pertumbuhan pembangunan infrastruktur Pading Metroبولitan.	Outcome	%			5	13,732	5	15,171	5	16,688	5	18,357	5	20,143	5	20,143	5	20,143
					3	3,710	6	4,081	9	4,489	12	4,938	15	5,432	15	5,432	15	5,432
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Outcome	Km			24,206	37,412	24,206	82,092	24,206	90,301	24,206	99,332	24,206	109,265	24,206	109,265	24,206	109,265
					31,72	7,000	31,72	10,171	31,72	17,169	31,72	12,300	31,72	13,550	31,72	13,550	31,72	13,550
Luas layanan jaringan irigasi yang di OP	Outcome	Ha			5000	500*	5000	500*	5000	500*	5000	500*	5000	500*	5000	5000	500*	500*
					1 2	840* 240*	1 2	840* 240*	1 2	840* 240*	1 2	840* 240*	1 2	840* 240*	1 2	840* 240*	1 2	840* 240*
Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi	Outcome	Ha			750	5,625*	2010	15,075*	3020	22,650*	4030	30,225*	5040	37,800*	5040	37,800*	5040	37,800*
					10,660	7,462*	22000	15,400*	33000	23,100*	44000	30,800*	55000	38,500*	55000	38,500*	55000	38,500*
Luas Layanan jaringan rawa yang di OP	Outcome	Ha			37	1,850*	62	3,100*	91	4,550*	112	5,600*	135	6,750*	135	6,750*	135	6,750*
					3	3,000*	3	3,000*	3	3,000*	3	3,000*	3	3,000*	3	3,000*	3	3,000*
Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi dan di OP (1 buah = 240 Ha)	Outcome	Buah			23	1,150*	55	2,750*	85	4,250*	115	5,750*	145	7,250*	145	7,250*	145	7,250*
					20	2,510	20	2,761	20	3,037	20	3,341	20	3,675	20	3,675	20	3,675
Pembangunan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air lainnya	Outcome	Meningkatnya luas sumber daya air yang dikelola dari sumber daya air yang ada di Sumber (%)			179	8,950*	334	16,700*	484	24,200*	644	32,200*	799	39,950*	799	39,950*	799	39,950*
					1	3,723	4	25,931	4	28,525	4	31,377	4	34,715	4	34,715	4	34,715
Pembangunan embung/ Situ	Outcome	unit			2	7,000*	2	7,000*	2	7,000*	2	7,000*	2	7,000*	2	7,000*	2	7,000*
					5	2,500*	5	2,500*	5	2,500*	5	2,500*	5	2,500*	5	2,500*	5	2,500*
Rehabilitasi embung/ Situ	Outcome	unit			25	3,750*	25	3,750*	25	3,750*	25	3,750*	25	3,750*	25	3,750*	25	3,750*
					3000	75,000*	6100	60,000*	6100	80,000*	6100	80,000*	6100	80,000*	6100	80,000*	6100	80,000*
Bendung seri saluran	Outcome	Ha			500	25,000*	1650	82,500*	2700	135,000*	3900	195,000*	5000	250,000*	5000	250,000*	5000	250,000*
					20,000	20,000*	40,000	40,000*	60,000	60,000*	80,000	80,000*	100,000	100,000*	100,000	100,000*	100,000	100,000*

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja Awal RP-JMD (Tahun 2010)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP-JMD				
					Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)		Target	Rp. (Jt)
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Output	Outcome	Satuan	Kawasan	3	50.000*	3	60.000*	3	60.000*	3	60.000*	3	60.000*	3	60.000*	3	60.000*	PSDA
					4	910	4	1.001	4	1.101	4	1.211	4	1.211	4	1.211			
Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	Output	Outcome	Km	Paket	40	22.000	12	75,822	12	83,470	12	91,817	12	100,199	12	100,199	12	100,199	PSDA
					2	160.000*	3	200.000*	3	200.000*	3	200.000*	3	200.000*	3	200.000*			
Penataan Kelembagaan/ Dan Kelembagaan	Output	Outcome	Buah	Pergub / SK. Gub	2	200	2	220	2	242	2	266	2	293	2	293	2	293	PSDA
					1	190	1	209	1	230	1	253	1	278	1	278			
Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Barat	Output	Outcome	Km	Sistem	1	1.010	1	1.111	1	1.222	1	1.344	1	1.479	1	1.479	1	1.479	Presaja – Barkim
					145	50.000 *	500	98.000 *	500	98.000 *	500	98.000 *	500	98.000 *	500	98.000 *			
Pembangunan dan peningkatan jalan nasional	Output	Outcome	Km	Km	240.15	664.000 *	294	765.000 *	211	482.000 *	83	192.000 *	145	363.000 *	145	363.000 *	145	363.000 *	Presaja – Barkim
					15	18.992	15	20.891	15	22.980	15	25.278	15	27.806	15	27.806			
Pembangunan dan peningkatan jalan nasional	Output	Outcome	Km	Km	42	107.000 *	60	150.000 *	60	150.000 *	60	150.000 *	60	150.000 *	60	150.000 *	60	150.000 *	Presaja – Barkim
					4	5.000	5	7.000 *	5	7.000 *	5	7.000 *	5	7.000 *	5	7.000 *			
Pembangunan jalan dua jalur Teluk Bayur – BIM	Output	Outcome	Km	Km	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Presaja – Barkim	
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Pembangunan jalan nasional dua jalur Padang – Payakumbuh	Output	Outcome	Km	Km	Kajian	500	3.000*	70	160.000*	70	160.000*	70	160.000*	70	160.000*	70	160.000*	Presaja – Barkim	
					15	15.844	20	45.000	20	45.000	20	45.000	20	45.000	20	45.000			
Pembangunan jalan provinsi antar kabupaten/ kota	Output	Outcome	Km	Km	DED	5.000 *	36	155.000 *	36	155.000 *	36	155.000 *	36	155.000 *	36	155.000 *	36	155.000 *	Presaja – Barkim
					60	55.000 *	60	55.000 *	60	55.000 *	60	55.000 *	60	55.000 *	60	55.000 *			
Pembangunan jalan Provinsi	Output	Outcome	Km	Km	DED	5.000 *	36	155.000 *	36	155.000 *	36	155.000 *	36	155.000 *	36	155.000 *	36	155.000 *	Presaja – Barkim
					60	55.000 *	60	55.000 *	60	55.000 *	60	55.000 *	60	55.000 *	60	55.000 *			
Pembangunan jembatan provinsi	Output	Outcome	Meter	Meter	25	5.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	Presaja – Barkim
					•	•	400	100.000 *	400	100.000 *	400	100.000 *	400	100.000 *	400	100.000 *			
Pembangunan jalan objek wisata 25 Km	Output	Outcome	Km	Km	•	•	5	10.000 *	5	10.000 *	5	10.000 *	5	10.000 *	5	10.000 *	5	10.000 *	Presaja – Barkim
					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD			
				TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)		TARGET
PENATAAN RUANG Perencanaan Tata Ruang	Output			3	3.453	3	3.468	3	1.634	2	1.799	2	1.977	2	1.977	1,977	Praja - Tarkim
	Outcome	Meningkatnya perencanaan penataan ruang di Sumber dan Perbatasan	Buku	1	4.900*	1	5.400*	1	5.400*	4	5.400*	4	5.400*	1	5.400*	5.400*	Praja - Tarkim
Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Output	Peta		3	4.900*	4	5.400*	4	5.400*	4	5.400*	4	5.400*	4	5.400*	5.400*	Praja - Tarkim
	Outcome	Meningkatnya kewenangan dan keserasian dan pelaksanaan program pembangunan di kawasan	kawasan	25	1.003	20	1.103	20	1.103	20	1.103	20	1.103	20	1.103	1.103	Praja - Tarkim
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Output	Dokumen Perencanaan	Jumlah	4	13.392	3	13.060	3	12.493	3	12.880	3	14.314	4	14.314	14.314	Praja - Tarkim
	Outcome	Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan/publikasi statistik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.	Buku	3	2.500*	4	3.000*	4	3.000*	4	3.000*	4	3.000*	4	3.000*	3.000*	DKP
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Output	Rencana Zonasi P3K	Buku	2	800	2	880	1	968	1	1.065	1	1.171	1	1.171	1.171	Praja - Tarkim
	Outcome	Tersedianya dokumen zonasi peraturan		2	800	2	880	1	968	1	1.065	1	1.171	1	1.171	1.171	Praja - Tarkim
Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tertinggal	Output	Kali		78	8.027	73	6.349	73	6.708	73	6.835	76	7.154	76	7.154	7.154	Bappeda
	Outcome	Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan/publikasi statistik yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.		78	8.027	73	6.349	73	6.708	73	6.835	76	7.154	76	7.154	7.154	Bappeda
Program penelitian dan pengembangan IPTEK untuk menunjang pemerintah dan pembangunan daerah	Output	Judul		19	150	19	150	17	150	17	150	15	175	15	175	175	Bappeda
	Outcome	Jumlah koordinasi dan kerjasama perencanaan pembangunan daerah tertinggal		19	150	19	150	17	150	17	150	15	175	15	175	175	Bappeda
Perencanaan Pembangunan Daerah	Output	Judul		14	1.425	19	1.006	24	1.046	28	2.106	34	2.317	34	2.317	2.317	Bappeda
	Outcome	Jumlah penelitian dan pengembangan terapan untuk menunjang pemerintah dan pembangunan daerah		14	1.425	19	1.006	24	1.046	28	2.106	34	2.317	34	2.317	2.317	Bappeda
Perencanaan Pembangunan Daerah	Output	Buah		17	1.575	23	3.230	29	1.892	35	1.892	41	2.581	41	2.581	2.581	Bappeda
	Outcome	Jumlah Dokumen perencanaan		17	1.575	23	3.230	29	1.892	35	1.892	41	2.581	41	2.581	2.581	Bappeda

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD				
					Target	Rp. (M)	Target	Rp. (M)	Target	Rp. (M)	Target	Rp. (M)	Target	Rp. (M)	Target	Rp. (M)		Target	Rp. (M)
PERHUBUNGAN	Output	Outcome																	
Perbaikan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Lintas Angkutan Jalan	Tersedianya jalur baru KA (4,5 Km)	Meningkatnya pengembalian angkutan kereta api di Sumber (%)	km	4,5	10.000	2,5	75.000*	2	50.000*	21.007	10.000*	7.753	0	7.753	-				Dinas - Perhub
	Terdaksananya pelayanan berklasifikasi baik berdasarkan standar pelayanan perhubungan darat		%	76	345	77	380	78	417	79	459	80	505	80	505				Dinas - Perhub
	Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan		Paket	1	1.100	1	1.210	1	1.331	1	1.464	1	1.611	1	1.611				Dinas - Perhub
	Tersedianya Izonisasi dan papan penyeberangan	Meningkatnya pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Sumber (%)	Unit	-	28.500*	1	30000*	-	1	30000*	-	-	-	-	-				Dinas - Perhub
Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Transportasi Laut	Terdaksananya pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelabuhan	Meningkatnya penyelenggaraan Moda Transportasi Laut di Sumber (%)	paket	1	10500*	1	15000*	1	15000*	1	15000*	1	15000*	1	15000*				Dinas - Perhub
	Peningkatan demaga dan fasilitas penunjang lainnya pada pelabuhan laut (Teluk Bayur dan Teluk Lipang)		Paket	2	385.000*	2	385.000*	2	385.000*	1	300.000*	1	300.000*	1	300.000*				Dinas - Perhub
	Pewataan Perda / Perub./SK.Gub		Paket	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-				Dinas - Perhub
	Terdaksananya pembangunan demaga khusus dan areal gerdugangan		Paket	DED	400*	1	50.000*	1	75.000*	1	150.000*	1	150.000*	1	150.000*				Pelindo dan Disahub
	Terdangnya demaga dan perhubungan		Paket	1	10.500*	1	13.500*	1	15000*	1	15000*	1	20000*	1	20000*				Dishub
	Tersedianya 1 unit kapal cepat GT. 235	Meningkatkan moda transportasi laut pada daerah terpencil (kab. Mentawai)	unit	0	-	1	5.000*	1	10.000*	1	10.000*	1	10.000*	1	10.000*				Dishub
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara	Tersedianya panjang landasan pacu 3.000 meter	Meningkatnya penyelenggaraan Moda transportasi Udara di Sumber	meter	2750	20000*	150	75000*	50	25000*										Kemhub dan Dishub
	Terdaksananya pembangunan Bandara three in one di Mentawai		paket	kajian	-	2	2.000*	1	100.000*	1	150.000*	1	50.000*	1	50.000*				Dinas - Perhub

Bidang Urusan Peningkatan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD		SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015			Target	Rp (Jt)
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)			
Pengembangan Angkutan Kota Api	Output	Outcome	Paket	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Dinas - Perhub
	Terlaksananya pembangunan short cut Padang - Solok	Terlaksananya Rehabilitasi dan pemeliharaan dan pembangunan prasarana, fasilitas Angkutan Kota Api		3.000	6.860	1	3.303	1	4.792	1	5.271	1	5.271	1	5.271	
	Tersedianya perencanaan Rencana Induk pembangunan jalangan KA Sumbar		Paket	250	2.275	1	3.303	1	333	1	366	1	366	1	366	Dinas - Perhub
LINGKUNGAN HIDUP				47.013	84.681		86.670		90.699		94.859		94.859		94.859	
Peningkatan Mitigasi Bencana	Jalan evakuasi yang dibangun	Berlangsungnya sarana dan prasarana mitigasi bencana	KM	3,5	5.000 10000*	5	5.000 10000*	5	5.000 10000*	5	5.000 10000*	5	5.000 10000*	5	5.000 10000*	5.000 Prasaj - Tankim
	Lambatan evakuasi yang dibangun		Buah	3	2.000	3	10.000 7.000*	3	10.000 7.000*	3	10.000 7.000*	3	10.000 7.000*	3	10.000 7.000*	10.000 Prasaj-Tankim
	Escape building yang dibangun		Buah	1	10.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	30.000 Prasaj-Tankim
	Expangan tempat evakuasi yang dibangun		Buah	-	5	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	2.000	2.000 Prasaj-Tankim
	Peningkatan kebing sungsai yang dibangun		KM	0,5	13.750	0,5	15.725	0,5	16.637	0,5	18.301	0,5	20.131	0,5	20.131	20.131 PSDA
	Panjang tanggul pengendalian banjir yang dibangun		KM	1	6.350	1	6.985	1	7.683	1	8.451	1	9.297	1	9.297	9.297 PSDA
	Jumlah unit pengaman panta yang dibangun		Unit	3	3.905	3	4.295	3	4.725	3	5.197	3	5.717	3	5.717	5.717 PSDA
	Jumlah unit tanggul pengendalian sedimen/ lahar dibangun		Unit	3	25.000*	3	15.000*	3	15.000*	3	15.000*	3	15.000*	3	15.000*	15.000* PSDA
	Dokumen Rencana Pengendalian Bencana (RPB) yang tersusun (Prov/Kab./ Kota)	Menjadi acuan program / kegiatan rencana PB	Laporan	-	5.000*	1	5.000*	1	5.000*	1	5.000*	1	5.000*	1	5.000*	5.000* PSDA
	Dokumen Rencana Konjungsi (Renkon) per- jenis bencana		Laporan	-	250	1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	250 BPBD Prov.
	Pendataan dan penyusunan dokumen kebijakan (Perda, Percab, SK-Gub)		Paket	-	250	1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	250 BPBD Prov.
	Penetapan Pembinaan dan Pembinaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Prov. / Kab. / Kota			3	269	3	325	3	358	3	394	3	394	3	394	394 BPBD Prov.
				1	5	8	11	14	14	14	14	14	14	14	14	14 BPBD Prov.

Bidang Urusan Peningkatan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab			
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD					
					Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)		Target	Rp (U)	
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			1	180	5	168	8	217	11	239	14	263	14	263	14	263				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			1	300*	1	300*	1	300*	1	300*	1	300*	1	300*	1	300*				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			1	988	1	1.084	1	1.171	1	1.288	1	1.417	1	1.417	1	1.417				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			20	703	20	773	20	851	20	956	20	1.029	20	1.029	20	1.029				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			1	224	1	246	1	271	1	298	1	328	1	328	1	328				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			1	75	-	82	-	90	-	99	1	109	1	109	1	109				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			1	40	-	44	-	48	-	53	1	58	1	58	1	58				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			1	50	1	55	1	60	1	66	1	73	1	73	1	73				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			70	250	70	500	75	500	75	500	80	500	80	500	80	500				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			-	-	9	6.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			7	85	8	150	9	175	10	185	11	200	11	200	11	200				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			5	125	6	190	6	209	8	230	8	250	8	250	8	250				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			4	125	4	173	4	173	4	173	4	173	4	173	4	173				
Peningkatan dan Pembangunan	Output	Outcome																		
			2	7.000*	4	9.000*	6	11.000*	8	13.000*	10	15.000*	10	15.000*	10	15.000*				

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Ro (Jt)	Target	Ro (Jt)	Target	Ro (Jt)	Target	Ro (Jt)	Target	Ro (Jt)	Target	Ro (Jt)	
Terpapannya pencemaran 18 sungai dan 4 danau	Output	Outcome	Sungai, danau	18,2	200	18,2	260	18,2	260	18,4	350	18,4	350	18,4	350	350	Bapeatalda, BPWS V
				500*	500*	500*	500*	600*	600*	600*	600*	600*	600*	600*	600*	600*	600*
Ditengahkannya daya dukung dan daya tampung sungai, danau dan lahan	Output	Outcome	Provinsi, Kab/ Kota	2	94	4	200	5	200	6	200	7	225	7	225	225	Bapeatalda
				4	110	4	300	4	300	4	300	4	300	4	300	300	Bapeatalda
Terfasilitasnya penyusunan status Kehati 2 Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota	Output	Outcome	Ha	3	25	6	150	9	150	12	-	-	-	-	-	-	DKP
				1	25	1	100	1	100	1	125	1	125	1	125	125	DKP
Tata lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	Output	Outcome	Dokumen	2	54	2	200	2	200	2	200	2	225	2	225	225	Bapeatalda
				100	45	100	125	100	150	100	150	100	175	175	175	175	Bapeatalda
Pengamanan dan pengendalian hutan serta mitigasi perubahan iklim	Output	Outcome	%	4	500	4	900	4	1.000	4	1.025	4	1.120	4	1.120	1.120	Dishut, BKSDA TNS Wil. II, TNS
				6.300*	6.500*	6.500*	6.500*	6.700*	6.700*	6.700*	6.700*	6.700*	6.700*	6.700*	6.700*	6.700*	6.700*
Penguasaan hak spot dan pemanfaatan kawasan hutan	Output	Outcome	%	6	186	6	300	6	400	6	500	6	500	6	500	500	Dishut, BKSDA TNS Wil. II, TNS
				2	100	2	100	2	350	2	400	2	450	2	450	450	Dishut
Perkembangan ekosistem kawasan hutan atau lahan dalam ranah bencana	Output	Outcome	kab/kota	10	400	11	100	11	150	12	500	15	600	15	600	600	Dishut
				200.000	575	210.000	500	210.000	500	210.000	500	210.000	500	210.000	500	210.000	500
Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Output	Outcome	batang	15.300.000	14.435*	15.300.000	14.435*	15.300.000	14.435*	15.300.000	14.435*	15.300.000	14.435*	15.300.000	14.435*	15.300.000	BP DAS Agam Kuantan
				77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang	77.545.500 batang
Tersejahteranya lahan kritis dalam kawasan hutan 101.905 ha	Output	Outcome	Ha	12.037	15.500*	12.037	15.500*	12.037	15.500*	12.037	15.500*	12.037	15.500*	12.037	15.500*	15.500*	BP DAS Indragiri
				5.339	5.400*	8,6	8.200*	8,85	8.300*	10,35	10.100*	8,37	8.100*	8,37	8.100*	8,37	8.100*

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)		
Terehabilitasinya lahan kritis diluar kawasan hutan 106.154 ha	Outcome	Ha		24	150	70	300	90	350	90	350	90	350	90	350	350	Dishut,
		Ha		15.492	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492	15.492	BPDAS Indragiri
		Ha		5.531	5.531	5.375	5.375	5.531	5.531	6.469	5.531	6.438	5.531	6.438	5.531	6.438	BP DAS Agam Kuantan
Terbangunnya bangunan konsorasi (Dairi Pengendali, Dam Penalar dan Galir Plug) 1.972 unit	Outcome	Unit		-	-	2	80	2	80	2	80	2	80	2	80	2	80
		Unit		383	700	383	800	383	700	383	700	383	700	383	700	383	700
		Unit		2	150	2	150	2	150	2	150	2	150	2	150	2	150
Pembelahan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Outcome	Unit		23	400	23	400	23	400	23	400	23	400	23	400	23	400
		Unit		77.933	55.100	77.933	55.100	77.933	55.100	77.933	55.100	77.933	55.100	77.933	55.100	77.933	55.100
		Unit		-	-	4	250	1	75	1	75	-	-	-	-	-	-
Pembelahan Sumberdaya Perairan Junjurn, Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Outcome	Ha		50	200	100	750	100	750	100	750	100	750	100	750	100	750
		Ha		50	150	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500
		Ha		3	25	6	75	9	125	12	175	15	225	15	225	15	225
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Outcome	Ha		2	150	4	300	6	450	8	600	10	750	10	750	10	750
		Kawasan		1	125	2	250	3	325	4	400	5	475	5	475	5	475
				1.664	1.664	1.830	1.830	2.013	2.013	2.214	2.214	2.436	2.436	2.436	2.436	2.436	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Outcome	%		70.04	71.33	72.62	73.91	75.2	76.49	76.49	76.49	76.49	76.49	76.49	76.49	76.49	
		%		61.69	62.76	63.82	64.895	65.95	66.95	67.02	67.02	67.02	67.02	67.02	67.02		
		%		60	50	70	55	80	61	90	67	100	73	100	73	100	

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD Rp. (J)	SKPD Penanggung Jawab		
					2011		2012		2013				2014	
	Output	Outcome			Target	Rp. (J)	Target	Rp. (J)	Target	Rp. (J)			Target	Rp. (J)
Program kegiatan pemberdayaan kesetaraan gender dalam pembangunan	Efektif Bidang Pembinaan/Anak dan Perempuan/Anak dan KB	Meningkatkan peran serta keluarga dalam proses pembangunan	kali		76	84	92	101	111		111	BPPF & KB		
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	pembinaan terhadap peran serta gender dalam pembangunan	Meningkatnya Pengarus Utamaan Gender	%		382	398	438	482	530		530	BPPF & KB		
Program peningkatan pelayanan perempuan	Pelembhan/Sosialisasi bagi peningkatan kualitas perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam segala bidang pembangunan	kali		345	380	417	459	505		505	BPPF & KB		
Program peningkatan kesjahteraan dan berdayatangan anak	Sistem Informasi Gender dan Anak Informasi Anak (PUBSA)	tersendengarnya Pengaruhannya Hik- Informasi Anak (PUBSA)	Sistem		63	69	76	84	92		92	BPPF & KB		
	Sosialisasi bagi Anak		kali		376	414	455	500	551		551	BPPF & KB		
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA					1.024	1.128	1.239	1.363	1.500		1.500			
	Laju Perumbuhan Penduduk		%	1,34			1,27	1,25	1,23		1,23			
Program keluarga berencana	Sinkronisasi Program KB	Persentase informasi KB kepada masyarakat	PUS	153.191	170.781	188.375	207.782	229.188	252.799		252.799			
	Informasi tentang KB	Tersedianya informasi pelayanan kontrasepsi	kali		166	183	201	221	243		243	BPPF & KB		
	Alat kontrasepsi	Manurumnya perkembangan usia dini	%		430	474	521	573	630		630	BPPF & KB		
	Sosialisasi/Pertemuan Promosi	Meningkatnya keluarga bagian sejahtera	kali		67	85	81	95	98		98	BPPF & KB		
	persentase tenaga pendamping terampil kelompok bina keluarga balita		%		125	2	138	4	183		183	BPPF & KB		
SOSIAL					30.017	33.019	36.322	39.953	43.948		43.948			
Program Gerakan Tertantu Pensejahteraan Fakir Miskin														

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD		
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
Program Eks Peningkatan Penyakit Sosial (Eks NaraPendana) penyandang penyakit sosial (%)	Output	penyuluhan dan pembinaan kepada eks sosial (%)	%	60	2,645	70	2,809	80	3,240	90	3,520	95	3,872	95	3,872	Dinass	
	Outcome	penyakit sosial (%)															
Program Sosialisasi/informasi tentang Narkoba dan AIDS	Output	Sosialisasi/informasi tentang Narkoba dan AIDS	Org peserta	160	280	160	308	160	339	160	373	160	410	160	410	Biro Bina Sosial	
	Outcome	persentase partisipasi sosial potensi sumber kesegiteraan sosial	%	70	42	80	46	85	51	90	56	100	61	100	61		
Program Pemberdayaan Masyarakat Sosial	Output	Jumlah Fakir Miskin, Komunitas Adat Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Orang	4500	15,283	4,750	16,749	5,000	18,468	5,500	20,314	6,000	22,346	6,000	22,346	Dinass	
	Outcome	Program															
Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	Output	Rapat koordinasi/pengkoordinasian kegiatan program rehabilitasi sosial pasca bencana alam	Kali	6	850	6	935	6	1,029	6	1,131	6	1,244	6	1,244	Biro Binasos	
	Outcome	Program															
Program Pembinaan dan penerapan LKMPK bencana alam	Output	Penyusunan LKMPK Kabupaten/Kab/Kota	Kab/Kota	11	90	11	99	11	109	11	120	11	132	11	132	Biro Binasos	
	Outcome	Program															
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar	Output	Persentase Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar	%	70	2,000	80	2,200	90	2,420	100	2,662	100	2,928	100	2,928	Dinass	
	Outcome	Program															
Program Pembinaan Anak Terlantar	Output	Jumlah Panti Anak Terlantar	Jumlah Panti	2	3,116	2	3,428	2	3,771	2	4,148	2	4,563	2	4,563	Dinass	
	Outcome	Program															
Program Pembinaan Panti Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Output	Jumlah Panti Penyandang cacat dan Eks Trauma	Jumlah Panti	2	2,147	2	2,362	2	2,598	2	2,858	2	3,144	2	3,144	Dinass	
	Outcome	Program															
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Output	Jumlah Panti Anak Asuhan dan Panti Jompo	Jumlah Panti	2	3,494	2	3,844	2	4,228	2	4,651	2	5,116	2	5,116	Dinass	
	Outcome	Program															
Program koordinasi perubahan gizi masyarakat	Output	koordinasi pembinaan penanggulangan gizi masyarakat	kali	4	90	6	99	9	109	12	120	12	132	100	132	Biro Binasos	
	Outcome	Program															
KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN																	
Program Gerakan Terpadu Kesejahteraan Fakir Miskin	Output	Panduduk Miskin	%	9,50	9,1	8,7	8,3	7,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,860	
	Outcome	Program															

Bidang Urusan Peningkatan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)		2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD Rp (Jt)	SKPD Penanggung jawab		
				Outcome		Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET			Rp (Jt)	TARGET
				Output	Outcome	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET			TARGET	
Pengembangan Kemahiran UMKMK	- Jumlah PKL yang dibesi pemadaban	Meningkatnya kemahiran dan Kualitas Promosi pemasaran	unit	7000	3000	140	16000	160	11000	180	12000	200	240	240	13000	240	Dinas Koperasi dan BKPM, Biro perakomninan		
	- UMKMK yang bermitra dengan BUMN	Meningkatnya peranan koperasi dalam sektor rill	%th	15	17	140	19	160	21	180	23	200	25	240	25	240			
Peningkatan Peranan Koperasi dalam Sektor Rill	- Jumlah Koperasi yang berperan dalam sektor rill (unit)		Unit	10	15	517		530	30	560	40	600	50	640	50	640	Dinas Koperasi dan BKPM, Biro perakomninan		
Program Terpadu peningkatan kesegatiberaan peaku Program peningkatan Kemahaan Keuangan Bank Bank dan Bembinaan UMKMK	- Jumlah UMKMK yang diasilitasi	Meningkatnya kesegatiberaan peaku Usaha mikro dan kecil	UMK	0	190	1.160	380	1.740	570	2.510	760	3.915	950	5.872	950	5.872	Dinas Koperasi dan BKPM, Biro perakomninan		
		Meningkatnya lembaga Keuangan non bank yang pembiayaan UMKMK	unit	20	30	219		531	644	644	60	858	774	774	774	774	Dinas Koperasi dan BKPM, Biro perakomninan		
		- Jumlah KSP/USP K/IKS/LIJS dan LKM yang berperan dalam dembayaan	unit	20	30	40		40	50	60	60	70	70	70	70	70			
PENANAMAN MODAL																			
Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penanaman modal dan realisasi investasi		unit			3.136	4.390	4.390	4.355	5.175	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835	5.835			
						1.325	1.480	1.480	1.515	1.705	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910	BKPM		
						38	59	59	82	106	132	132	132	132	132	132	BKPM		
						404.65	439	439	461	480	501	501	501	501	501	501	BKPM		
						17.81	22	22	23	24	25	25	25	25	25	25	BKPM		
						46	101	101	137	175	215	2305	215	2.435	215	2.435	BKPM		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat dan kejasama di bidang investasi		jumlah MoU	0	1	75	3	200	5	300	8	400	10	500	10	500			
Program Penyediaan Potensi Sumber daya daerah	Menyiapkan potensi sumberdaya daerah		macam	0	2	840	2	605	2	885	2	765	2	990	2	990	BKPM		
KEBUDAYAAN																			
Program Ceraikan Terpadu Peningkatan Adanya A655-SBK						9.872	11.488	11.488	12.528	14.270	16.104	16.104	16.104	16.104	16.104	16.104			
						4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398			
						70	75	863	80	950	90	1.045	100	1.149	100	1.149	Dinas, Biro Binas		
Program Peningkatan Nilai Budaya	pensentase pemahaman terhadap nilai-nilai tradisional dan peningkatan keselarahan		%			785	75	863	80	950	90	1.045	100	1.149	100	1.149	Dinas, Biro Binas		

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD		
					Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	
Program Pembudayaan Kelembagaan Masyarakat Adat	Output	Melekatnya kapasitas lembaga masyarakat adat (pelatihan)	kali pelatihan		4	650	4	715	4	787	4	865	4	952	4	952	Biro Binsos
	Outcome	Sinkronisasi program-program pemerintah dengan lembaga adat	kali		3	1.000	4	1.100	6	1.210	9	1.331	12	1.464	12	1.464	Biro Binsos
Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	Output	Meningkatnya persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan jamaah Haji	%		100	1.651	100	1.616	100	1.688	100	2.197	100	2.417	100	2.417	Biro Binsos
	Outcome	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan terhadap Al Quran	peningkat	5	1.250	5	1.375	4	1.513	100	898	100	988	100	988	Biro Binsos	
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pembangunan Nilai Agama	Output	Wirdi/Pelatihan/kegiatan ibadah yang dilaksanakan	%		80	675	90	743	100	817	100	898	100	988	100	988	Biro Binsos
	Outcome	Meningkatnya syiar agama kepada pondok Al Quran masyarakat	%		70	860	80	946	90	1.041	95	1.145	100	1.259	100	1.259	Biro Binsos
Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan	Output	Sinkronisasi program bidang Keagamaan	%		70	300	80	330	90	363	95	389	100	439	100	439	Biro Binsos
	Outcome	Meningkatnya kualitas SDM lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	%		70	300	80	330	90	363	95	389	100	439	100	439	Biro Binsos
Pembudayaan lembaga-lembaga adat, seni dan budaya	Output	Jumlah lembaga adat, seni dan budaya	lembaga	2	1.970	2	2.300	3	2.400	3	2.500	3	2.600	3	2.600	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Outcome	Berkembangnya kapasitas kelembagaan adat, seni dan budaya															
Pembangunan Pendidikan Budaya	Output	Tersosialisasinya nilai adat, seni dan budaya	Kali	21	431	21	900	21	950	25	1.576	30	2.206	30	2.206	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Outcome	Meningkatnya pemahaman dan kecinnaan terhadap seni dan budaya															
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Output	Pelaksanaan praktik pendidikan adat, seni dan budaya sesuai	Kali	2	300	6	400	7	500	8	650	10	800	10	800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pendidikan	
	Outcome	Meningkatnya budaya bangsa, kesetiaan jemaah, memaknai Rohani masyarakat	%		65	6.727	75	7.400	80	8.140	85	8.954	95	9.849	95	9.849	Disdikpora dan Biro Binsos
Program peningkatan sarana dan prasarana lahir raja	Output	penyisnse sarana olahraga	%		65	2.376	75	2.613	80	2.974	85	3.162	95	3.478	95	3.478	Disdikpora
	Outcome																

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab			
				2011		2012		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)		Target	Rp. (Jt)	Target
Program Peningkatan Peranisa Keperumudaan	Output persentase peran pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	%		65	400	75	440	80	484	85	532	95	586	95	586	586	Biro Binsos
Program pengembangan organisasi pemuda dan manajemen olahraga	Output persentase kemandirian organisasi pemuda dan olahraga	%		70	659	80	725	85	797	90	877	100	964	100	964	964	Disdikpora
Program peningkatan penyiapan pemuda dalam kemudaan	Output persentase partisipasi pemuda dalam pembangunan	%		70	795	80	875	85	962	90	1.038	100	1.164	100	1.164	1.164	Disdikpora
Program pengembangan kepemimpinan pemuda	Output persentase keterampilan dan semangat wirausaha pemuda	%		70	2.003	80	2.204	85	2.424	90	2.666	100	2.933	100	2.933	2.933	Disdikpora
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI																	
Program Peningkatan Keamanaan dan Kenyamanan Lingkungan	Output Persentase keamanaan dan kenyamanan lingkungan	%		75	1.058	80	1.164	85	1.281	90	1.409	95	1.549	95	1.549	1.549	Kesbangpol Limmas
Program Kemitaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Politik Masyarakat	Output Jumlah Aparatur Kesbang Limmas Kabupaten/Kota	org		40	451	40	497	40	546	40	601	40	661	200	661	661	Kesbangpol Limmas
Program Pendidikan Masyarakat	Output Persentase peningkatan wawasan dan pengetahuan politik masyarakat	%		75	645	80	710	85	780	90	859	90	944	95	944	944	Kesbangpol Limmas
Program Peningkatan Pemberian Maksial	Output Persentase penurunan pelanggaran peraturan makisial	%		20	165	20	182	20	200	20	220	20	242	100	242	242	Kesbangpol Limmas, Pol PP
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keamanaan dan Keterlibatan Umum	Output Persentase partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanaan dan keterlibatan umum	%		80	1.350	85	1.484	90	1.634	95	1.797	95	1.976	95	1.976	1.976	Pol PP

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD	
				Rp (Ji)	TARGET	Rp (Ji)	TARGET	Rp (Ji)	TARGET	Rp (Ji)	TARGET	Rp (Ji)	TARGET		Rp (Ji)	TARGET
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN LULUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPENGAWAAN DAN PERSANDIAN	Output			74,445		83,195		84,066		105,061		117,233		117,233		
	Outcome															
	Kualitas LKPD Mengoptimalisasi Produk Hukum (Perda)	Opini Jumlah Perda	WDP	15	17	19	19	19	19	21	15	15				
	Pendidikan SDM Aparatur	Strata 1 Strata 2 Strata 3		3 19 1	4 20 2	5 22 3	5 21 3	6 22 4	7 23 5	7 23 5	7 23 5	7 23 5				
Program Pembangunan Materi Hukum				1,045	1,150	1,264	1,381	1,530	1,685	1,839	1,994	2,149	2,304	2,459	2,614	
Peningkatan Lembaga Perwakilan Daerah				34,209	37,630	41,051	44,472	47,893	51,314	54,735	58,156	61,577	65,000	68,421	71,842	
Program Pendidikan Kelembagaan	Jumlah aparat yang melaksanakan Diklat	org	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	
Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM	Persentase Penegakan Hukum	%	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	
Pengembangan manajemen pelayanan publik	Persentase anggaran melalui tender melalui elektronik	%	30	50	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur	Jumlah SKPD yang dibangun	SKPD	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
Penerapan pemerintahan yang baik (good governance)	Tersedianya regulasi tentang perekonomian dan pelayanan publik	%	15	45	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Ranperda tentang kebijakan dasar	ranperda	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Perubahan regulasi	perubahan	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	SKPD Penanggung Jawab
	Output	Outcome			2011		2012		2013		2014		2015		Rp (J)	Rp (J)		
					Target	Rp (J)	Target	Rp (J)	Target	Rp (J)	Target	Rp (J)	Target	Rp (J)				
Peningkatan kemampuan sdm	Persentase Aparatur eselon yang dibayar	%	50	398	75	437	85	461	95	529	100	562	100	362	Biro Organisasi			
Program peningkatan kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah	Persentase peningkatan kinerja perangkat pemerintah daerah	%	50	1.255	75	1.381	85	1.519	95	1.671	100	1.838	100	1.838	Biro Organisasi & Kependudukan			
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan informasi dan administrasi Kependudukan	Jumlah Kabupaten/Kota	3	461	5	507	5	557	4	613	2	675	19	675	Biro Pemerintahan & Kependudukan			
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Aparatur yang dibina	%	50	5.330	65	5.683	75	6.449	85	7.094	95	7.803	95	7.803	BKOD			
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase peningkatan sineritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	%	70	518	75	600	80	600	90	650	100	715	100	715	Biro Pemerintahan & Kependudukan, Biro Pembangunan dan Rantau			
Program Peningkatan Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan, Pengadaan Barang & Jasa Publik serta Realisasi Manajemen Keuangan	%	50	1.320	70	1.520	75	2.069	80	3.071	85	3.268	85	3.268	Biro Pembangunan dan Rantau			
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN	%	35	344	50	379	75	417	90	458	100	504	100	504	Biro Hukum			
Program Peningkatan Budaya Hukum	Persentase peningkatan budaya sadar dan taat hukum di tengah masyarakat	%	50	191	65	210	75	231	85	254	95	279	95	279	Biro Hukum			
Program Sarana Informasi Hukum	Persentase ketersediaan sarana informasi hukum	%	45	18	60	20	22	85	24	95	27	27	95	27	Biro Hukum			
Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan	Persentase penundagian yang dapat tersusun dan disinkronisasikan	%	75	825	80	908	85	988	90	1.098	95	1.208	95	1.208	Biro Hukum, Setwan			
Program peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum	Kualitas LPJDP	Opini	WDP	5.906	WTP	6.937	WTP	7.146	WTP	7.861	WTP	8.647	WTP	8.647	Inspektora, DPRD			
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan	%	100	12.035	100	14.442	100	17.331	100	20.797	100	24.956	100	24.956	DPRD			

Bidang Urusan Penerbitan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD				
				Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)		Target	Rp (Jt)
METAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Mengingatnya dan Keamanan Pangan kelelahan dan keamanan pangan pembangunan kelelahan pangan yang terintegrasi (2 kabupaten)	-	Tahun	-	Target	2.195	Target	4.530	Target	6.085	Target	7.100	Target	8.025	Target	8.025	BKP		
				Rp (Jt)	300	400	500	600	2	2	2	2	2	2	2		600	
				Target	50	300	52	350	55	400	57	450	57	450	57		450	450
				Rp (Jt)	250	300	350	350	400	400	400	400	400	400	400		400	400
				Target	80	40	83	500	84	520	85	550	85	550	85		550	550
				Rp (Jt)	450	40	40	500	40	520	40	550	40	550	40		550	550
				Target	80	80	100	600	100	700	100	800	100	800	100		800	800
				Rp (Jt)	300	400	400	600	400	700	400	800	400	800	400		800	800
				Target	20	400	80	700	110	800	140	900	140	900	140		900	900
				Rp (Jt)	400	600	600	700	800	800	900	900	900	900	900		900	900
Diversifikasi Pangan	-	%	-	Target	10	Target	360	Target	450	Target	550	Target	650	Target	650	BKP		
				Rp (Jt)	-	10	360	450	10	550	10	650	10	650	10		650	
				Target	-	20	550	30	600	40	650	60	700	60	700		60	700
				Rp (Jt)	-	20	550	30	600	40	650	60	700	60	700		60	700
				Target	-	20	400	40	500	60	600	80	700	80	700		80	700
				Rp (Jt)	-	40	400	40	500	60	600	80	700	80	700		80	700
				Target	-	40	100	50	200	60	300	70	400	70	400		70	400
				Rp (Jt)	-	40	100	50	200	60	300	70	400	70	400		70	400
				Target	-	20	550	30	600	40	650	60	700	60	700		60	700
				Rp (Jt)	-	20	550	30	600	40	650	60	700	60	700		60	700
Diversifikasi Pangan	-	%	-	Target	25	Target	320	Target	380	Target	440	Target	500	Target	500	BKP		
				Rp (Jt)	160	320	380	440	500	500	500	500	500	500	500			
				Target	25	320	380	440	500	500	500	500	500	500	500			
				Rp (Jt)	160	320	380	440	500	500	500	500	500	500	500			
				Target	25	320	380	440	500	500	500	500	500	500	500			
				Rp (Jt)	160	320	380	440	500	500	500	500	500	500	500			
				Target	25	320	380	440	500	500	500	500	500	500	500			
				Rp (Jt)	160	320	380	440	500	500	500	500	500	500	500			
				Target	25	320	380	440	500	500	500	500	500	500	500			
				Rp (Jt)	160	320	380	440	500	500	500	500	500	500	500			

Bidang Urusan Penerimaan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (J)	Target	Rp (J)	Target	Rp (J)	Target	Rp (J)	Target	Rp (J)	Target	Rp (J)	
	Output	Outcome	%	-	10	200	20	350	30	300	40	650	50	800	30	800	BKP
			%	-	10	135	20	170	30	205	40	240	50	275	50	275	BKP
						6.862		63.548		98.305		99.132		100.047		100.047	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																	
Program Gerakan Tepatu Pensejahteraan Fakir Miskin																	
Program Pengendalian Tepatu Penanganan Kemiskinan			Rapat Kali		4	1.742	3	1.916	3	2.108	3	2.318	3	2.550	3	2.550	BPM
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Nagari			kab		2	-	2	56.000	5	90.000	5	90.000	5	90.000	5	90.000	BPM
						230.000		230.000		600.000		600.000		600.000		600.000	
			kali		1	415	1	457	1	502	1	552	1	608	1	608	BPM
			%		70	740	80	814	90	895	95	985	100	1.063	100	1.083	BPM
			kali		36	650	40	715	44	787	48	865	53	952	53	952	BPM
			Kab/Kota		18	147	19	162	19	178	19	196	19	215	19	215	BPM
			%		70	595	80	655	90	720	95	792	100	871	100	871	BPM
			Org		36	650	40	715	44	787	48	865	53	952	53	952	BPM
			%		70	740	80	814	90	896	95	985	100	1.084	100	1.084	BPM
			%		75	624	80	686	90	755	100	830	100	913	100	913	Biro Pemerintahan & Kependudukan

Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		SKPD Penanggung Jawab			
					2011		2012		2013		2014			2015		
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)		Target	Rp (Jt)	Target
PERKAWASAN	Jumlah ketersediaan program dengan budaya buku perpusdaan	Outcome	Jenis paket	18	2.300	20	2.630	20	2.183	20	3.001	20	3.367	20	3.367	Badan Pustaka & Asip
				18	2.300	20	2.630	20	2.183	20	3.001	20	3.367	20	3.367	
URUSAN PILIHAN PERTANIAN	Tebangannya KSP Pertanian, perkebunan dan peternakan/ dan Agribisnis/ Pemasaran:	Output	Kawasan	86.588	193.497	176.580	241.719	285.938	215.447	339.308	256.329	339.968	256.329	339.968	256.329	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
				86.588	193.497	176.580	241.719	285.938	215.447	339.308	256.329	339.968	256.329	339.968	256.329	
Gerakan Tergantung Peningkatan Petani yang sejahtera (KK)	Meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang sejahtera (KK)	Outcome	Jumlah petani (3 usahar/KK)	108	610	216	732	324	432	1054	540	1265	540	1265	540	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
				108	610	216	732	324	432	1054	540	1265	540	1265	540	
				108	610	216	732	324	432	1054	540	1265	540	1265	540	
				108	610	216	732	324	432	1054	540	1265	540	1265	540	
				108	610	216	732	324	432	1054	540	1265	540	1265	540	
				108	610	216	732	324	432	1054	540	1265	540	1265	540	
				108	610	216	732	324	432	1054	540	1265	540	1265	540	
				108	610	216	732	324	432	1054	540	1265	540	1265	540	
				108	610	216	732	324	432	1054	540	1265	540	1265	540	
				108	610	216	732	324	432	1054	540	1265	540	1265	540	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
					TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rp (Jt)		TARGET
	Output	Outcome		16	90	32	108	48	130	64	156	80	187	80	187		Dinas pertanian	
	Meningkatnya jumlah rumah tangga petani yang sejahtera di nagari tertinggal		Jumlah nagari															
	Terbentuknya model budidaya tanaman hutan 150 Ha	Terbentuknya model pengembangan sumberdaya hutan, serta penanganannya kasus SOA	Ha		20	320	10	335	10	330	10	335	10	340	10	340	340	Dishut
	Terbentuknya model pengembangan lahan madang/ula enau di 98 unit		Unit		19	625	15	625	20	800	20	800	22	850	22	850	850	Dishut
	Terbiayanya Model social forestry dan Agroforestry 250 Ha		Ha		50	165*	50	165*	50	165*	50	165*	50	165*	50	165*		Dishut
	Terfasilitasinya pembangunan hutan tanaman (TRHKM/HR) oleh 10 unit		kelompok		2	100	2	150	2	160	2	165	2	170	2	170	170	Dishut
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian		%		2	500	4	1.000	6	1.250	8	1.500	10	1.750	10	1.750	1.750	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
	- Pengembangan Balai Benih (unit)		Unit	11	11	650	11	650	11	650	11	650	11	650	11	650	650	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
	- Evaluasi				5	70	5	70	5	70	5	70	5	70	5	70	70	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
	- Pengembangan pasar		Unit	1	1	100	2	200	4	300	6	350	7	460	7	460	460	Peternakan
	- Pemplatan luas lahan budidaya sesuai		Ha		1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	250	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
	- Ruman percontohan pembuatan pupuk organik (RPPPO)		Unit		14	1.400	27	2.700	37	3.700	47	4.700	57	5.700	57	5.700	5.700	Dinas Pertanian
	- Unit pengalihan pupuk organik (UPPO)		Unit		19	6.650	32	8.150	37	8.650	42	9.150	47	9.650	47	9.650	9.650	Dinas Pertanian
	Perluasan areal		Ha		680	3.105	940	4.105	1.190	5.105	1.440	6.105	1.690	7.105	1.690	7.105	7.105	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
	Meningkatnya teknologi info pertanian																	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Terpenuhihnya alsmian bagi petani	%	50	70	500	75	550	80	600	85	650	90	700	90	700	700	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
	Pembudayaan Penyuluhan	Pembudayaan Penyuluhan untuk pengembangan teknologi : BPP yang berbasis (unit/tahun)	Unit		20	1.200	30	1.700	40	1.950	50	2.200	60	2.450	60	2.450	2.450	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan
	Peningkatan kapasitas penyuluh		Orang		40	900	60	1.500	80	2.300	100	2.800	120	3.300	120	3.300	3.300	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pencanaan												Kondisi Kinerja Awal RP-JMD (Tahun 2010)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP-JMD	SKPD Penanggung jawab		
			2011		2012		2013		2014		2015		Rp. (Jt)	Target					Rp. (Jt)	Target
			Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)								
- Peningkatan jumlah penyuluh			20	-	40	650	50	850	60	1,050	70	1,250	70	1,250	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan					
Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan SDM usaha pertanian Petani			5	5,900	8	8,400	11	10,900	14	13,400	17	15,900	17	15,900	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan					
- Peningkatan kelembagaan peningkat pembibit			33	3,150	50	3,650	70	4,150	90	4,650	110	5,150	110	5,150	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan					
- Peningkatan petani pengusai organik (15 unit)			15	300	20	500	25	700	30	900	35	1,100	35	1,100	Pertanian					
- Peningkatan modal usaha petani mandiri (23Klupih)			25	750	35	1,000	45	1,250	55	1,500	65	1,750	65	1,750	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan					
- Pencanaan, pengorganisasian, monitoring evaluasi yang terintegrasi dan berkelanjutan			60	1,054	65	1,138	70	1,228	80	1,400	80	1,400	80	1,400	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, BKP					
Peningkatan Produksi dan mutu Pertanian secara berkelanjutan			4	30,000	8	35,000	8	37,000	12	40,000	16	45,000	16	45,000	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan					
- Peningkatan Produk pertanian, peternakan, perkebunan			-	-	1	450	2	550	3	650	4	750	4	750	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan					
- Meningkatkan serangan Hama dan penyakit tanaman			30	250	32	500	34	750	36	1,000	38	1,250	38	1,250	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan					
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian			2	-	4	200	6	300	8	400	10	500	10	500	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan					
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, produk Hasil Pertanian			20	400	40	600	60	800	80	1,000	100	1,200	100	1,200	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan					
- Meningkatkan pemasaran hasil produksi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- Terbentuknya mitra kerjasama antara capaian dg pengusaha agribisnis			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
- Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, produk Hasil Pertanian			20	400	40	600	60	800	80	1,000	100	1,200	100	1,200	Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan					
- Meningkatkan nilai tambah (jenis produk 20 unit/tahun)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD		
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	
	Output	Outcome			90	180	115	230	140	155	165	103	180	210	190	210	Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Peternakan
	- Peningkatan hasil produksi ornasi perahu (8 komoditi/5ibu). (ha)		Ha		3	700	5	6.000	7	6.500	9	7.000	11	7.500	11	7.500	Dinas Perikanan, Peternakan
	- Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian (%)		%														Dinas Perikanan, Peternakan
	- Register kebun buah (100 unit/ lahan) dan register lahan sayur 25 unit/lahan) (ha)		Ha		100	-	200	400	300	600	400	800	500	1.000	500	1.000	Dinas Perikanan, Peternakan, Peternakan
	- Sertifikasi produk pangan		Unit		2	100	4	200	7	350	10	500	13	650	13	650	Dinas Perikanan, Peternakan, Peternakan
	- Peningkatan jumlah pengimanan (Meningkatnya SPSHP 710 unit/ahun)		Unit		10	100	20	200	30	600	40	800	50	1.000	50	1.000	Dinas Perikanan, Peternakan, Peternakan
Pengamanan Sumberdaya Hewani																	
	- Mengingatnya jumlah pelayanan keswan (unit)		Kaus		30	600	25	500	20	400	15	300	10	200	10	200	
	- Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan keswan sesuai standar (unit)		Unit		65	325	68	340	70	350	73	365	75	375	75	375	Peternakan
	- Meningkatkan aplikasi teknologi medik veteriner		Unit		1	2.000	2	4.000	2	4.000	2	4.000	2	4.000	2	4.000	Peternakan
Pengembangan Satu Petani Satu Sapi																	
	- Meningkatkan KK Petani Pemilik Sapi (KK)		KK		180	3.680	890	28.680	1140	53.680	1390	78.680	1640	103.680	3100	103.680	Dinas Perikanan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan
KEHUTANAN																	
Pencananaan dan Pengembangan Hutan																	
	- Terwujudnya perencanaan pembangunan kehutanan yang sinergis, diantis terarah dan terpadu sesuai dengan perkembangan daerah		Paket		1	1.392	1	1.318	1	1.399	1	1.489	1	1.586	1	1.586	
	- Terpilihnya balas kawasan hutan 835 Km		Km		185	75	170	200	170	220	170	242	170	266	170	266	

Bidang Urusan Penerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RP JMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RP JMD			
					Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)	Target	Rp (Jt)		Target
Pencapaian batas kawasan hutan (batas fungsi, batas luar) 350 Km	Output	0	750	30	400	0	75	30	400	75	600	0	75	30	400	75	600	BPKH-Mil. II
	Outcome	0	750	30	400	0	75	30	400	75	600	0	75	30	400	75	600	
Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan (KPH) model 2 unit	Output	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dishut
	Outcome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tersedianya atas potensi hasil hutan kayu & Non kayu, NSDH & Non kayu, NSDH penggunaan, pemanfaatan kawasan hutan sebanyak 107 judul	Output	15	500	31	100	20	110	20	121	21	133	21	133	21	133	21	133	Dishut
	Outcome	15	500	31	100	20	110	20	121	21	133	21	133	21	133	21	133	
Peningkatan Kualitas SDN dan Lembaga Pengabdian Hutan	Output	19	200	19	270	19	270	19	270	19	270	19	270	19	270	19	270	Dishut
	Outcome	19	200	19	270	19	270	19	270	19	270	19	270	19	270	19	270	
Peningkatan hasil hutan di Kab/Kota	Output	19	250	19	275	19	302	19	332	19	365	19	365	19	365	19	365	Dishut
	Outcome	19	250	19	275	19	302	19	332	19	365	19	365	19	365	19	365	
Peningkatan pencahayaan hasil hutan Legal di Kab/Kota	Output	19	150	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	Dishut
	Outcome	19	150	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	
Peningkatan performance industri Hasil hutan di Kab/Kota	Output	19	150	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	Dishut
	Outcome	19	150	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	19	235	
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL	Output	71	1,620	72	1,782	73	1,960	74	2,156	75	2,372	75	2,372	75	2,372	75	2,372	Dinas ESDM
	Outcome	71	1,620	72	1,782	73	1,960	74	2,156	75	2,372	75	2,372	75	2,372	75	2,372	
Meningkatnya pertumbuhan LISEDES	Output	20	70	40	138	60	151	80	166	100	183	100	183	100	183	100	183	Dinas ESDM
	Outcome	20	70	40	138	60	151	80	166	100	183	100	183	100	183	100	183	
Terdapatnya operator pelaku usaha kelistrikan	Output	3	1,300	6	1,430	9	1,573	12	1,730	15	1,903	15	1,903	15	1,903	15	1,903	Dinas ESDM
	Outcome	3	1,300	6	1,430	9	1,573	12	1,730	15	1,903	15	1,903	15	1,903	15	1,903	
Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PLTMh/ Piko hidro daerah tertinggal	Output	1	200	1	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM
	Outcome	1	200	1	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Penetapan dokumen kebijakan (Penda/ Pergub/ SK-Gub)	Output	1	200	1	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas ESDM, Bappenas
	Outcome	1	200	1	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tersedianya dokumen perencanaan bidang energi dan kelistrikan	Output	1	50	1	75	1	100	1	110	1	125	1	125	1	125	1	125	Dinas ESDM, Bappenas
	Outcome	1	50	1	75	1	100	1	110	1	125	1	125	1	125	1	125	
Tersedianya laporan pengembangan bidang energi dan kelistrikan	Output	1	70	1	77	1	85	1	93	1	102	1	102	1	102	1	102	Dinas ESDM
	Outcome	1	70	1	77	1	85	1	93	1	102	1	102	1	102	1	102	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
					Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	Target	Rp (U)	
Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	Output	Mendukungnya seragam nama dan logo produk.	%	2	150	6	200	8	250	10	250	12	300	12	300	DKP	
	Outcome	Meningkat pemasaran hasil produksi															
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Penerimaan GRP dan Produk Hasil Perikanan	Output	- Peningkatan tujuan pasar hasil kelautan dan perikanan baik regional maupun internasional (luar pulau).	negara	1	-	1	250	1	250	1	250	1	250	1	250	DKP	
	Outcome	- Peningkatan dan pemasaran hasil perikanan yg memenuhi standar (unit/tn)	Unit	3	-	3	125	3	125	3	125	3	125	3	125	DKP	
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Penerimaan GRP dan Produk Hasil Perikanan	Output	- Peningkatan mutu produk olahan hasil perikanan	Ha	4	180	5	200	5	350	5	375	5	400	5	400	DKP	
	Outcome	- Peningkatan mutu dan daya saing produk perikanan.	%	2	-	2	150	2	300	2	450	2	600	2	600	DKP	
Peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap	Output	- Peningkatan unit pengolahan ikan dan hasil perikanan (unit/tahun)	Unit	2	300	2	1.000	2	1.250	2	1.500	2	1.750	2	1.750	DKP	
	Outcome	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap	Lokasi	2	440	2	440	2	440	2	440	2	440	2	440	DKP	
Peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap	Output	- Jumlah lokasi dan ekosistem yang dilindungi dan diperkaya stok (lokasi/pertahun)	Dokumen	50	200	50	200	50	200	50	200	50	200	50	200	DKP	
	Outcome	perikanan tangkap sesuai ketentuan yg berlaku (dokumen/ta)															
Peningkatan KUB nelayan skala kecil yang mandiri (klimp/tn)	Output	- Peningkatan KUB nelayan skala kecil yang mandiri (klimp/tn)	Kelompok	2	-	4	225	6	300	8	350	10	450	10	450	DKP	
	Outcome	- Peningkatan kapal, alat tangkap dan awak kapal	%	0.5	5.400	0.5	5.400	0.5	5.400	0.5	5.400	0.5	5.400	0.5	5.400	DKP	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab	
			2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
			Rg (Jt)	TARGET	Rg (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET	Rg (Jt)	TARGET	Rg (Jt)	TARGET	Rp (Jt)	TARGET		Rp (Jt)
Pemeliharaan Pemasalahan Ekonomi Nelayan	Meningkatnya jumlah rumah tangga nelayan sejahtera di daerah terdampak	KK	50	1.000	75	2.000	100	2.500	125	3.000	150	3.500	150	3.500	3.540	DKP, Perikanan, Perkebunan
Pembudayaan dalam pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan Zaitan (SDKP)	Terawasi lokasi perairan yang bebas dari kerusakan dan pencemaran	lokasi	2	300	4	300	6	300	8	300	10	300	12	300	300	
	Pengembangan dan peningkatan data dan informasi	%	70	-	75	100	80	200	85	300	90	400	90	400	400	
PARIWISATA																
Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	Meningkatnya jumlah event budaya yang dikembangkan	Produk	8	10.822	11	11.562	14	14.536	17	17.004	20	19.104	20	17.993	19.104	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pengelolaan Kelayaan Budaya yang lestakan	Meningkatnya kualitas cagar budaya	unit	3	2.846	5	3.130	6	3.443	6	3.788	7	4.166	7	4.166	4.166	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Peningkatan Pengembangan Produk Wisata Budaya Minangkabau	Meningkatnya jumlah produk wisata budaya yang dikembangkan	jenis Produk Wisata Budaya	0	291	2	320	2	352	3	387	4	426	4	426	426	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pengembangan Kawasan Wisata Alam	Meningkatnya jumlah destinasi wisata alam	Kawasan	2	3.500	4	4.000	5	4.500	6	5.000	7	5.500	7	5.500	5.500	Dinas Pariwisata
Pengembangan Kawasan Wisata Budaya	Meningkatnya jumlah destinasi wisata budaya	Kawasan	0	-	0	-	1	1.500	2	2.000	3	2.500	3	2.500	2.500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pengembangan Pemasaran Wisata	Event promosi wisata	%	5	2.810	10	3.000	12	3.500	15	4.000	20	4.500	20	4.500	4.500	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pengembangan SDM Pariwisata	Meningkatnya jumlah wisatawan dalam dan luar negeri	orang	100	125	125	165	185	181	220	199	220	219	220	219	219	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM pariwisata															
PERDAGANGAN																
Peningkatan Prasarana dan Sarana Pasar	Meningkatnya jumlah sarana pasar	jumlah	0	2.714	8	5.884	6	6.182	7	7.610	8	8.638	8	8.638	8.638	Dinas Koperindag
	- Jumlah kab/kota yang mendapatkan sarana perdagangan	kab/kota	3	3.000	8	3.000	12	3.500	16	4.000	19	4.500	19	4.500	4.500	
Peningkatan Kualitas SDM Pelaku Usaha dan Aparatur Perdagangan	Meningkatnya jumlah peserta pelatihan (orang)	Orang	0	315	50	348	75	381	100	419	150	628	150	628	628	Dinas Koperindag
	- Jumlah peserta pelatihan															
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Stabilitas tingkat inflasi															Dinas Koperindag
	- Persentase peningkatan transaksi pasar		1	5	10	1106	15	1217	18	1338	20	1472	20	1472	1472	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab																
					2011		2012		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD																		
					Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)		Target	Rp. (jt)														
Peningkatan Pelindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Output	Outcome	produk	6	1.141	12	1255	18	1380	24	1518	30	1670	30	1670	Dinas Koperindag																	
																	- Jumlah produk yang memenuhi SNI																
																	- Peningkatan jumlah UTPP yang ditera / tera ulang	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Daerah	Output	Outcome	US \$	2.219	252	2.935	277	3.375	304	3.882	335	4.464	368	4.464	368	Dinas Koperindag																	
																	- Meningkatkan nilai ekspor daerah																
																	- Jumlah produk yang potensial ekspor	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
PERINDUSTRIAN	Output	Outcome	Negara	5	6.141	10	8.097	15	9.491	20	10.231	25	550	25	550	Dinas Koperindag																	
																	- Jumlah negara tujuan ekspor	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65	60-65		
																	- Jumlah sertifikat mutu yang diterbitkan	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Program Pengembangan Kluster Industri Potensial	Output	Outcome	Unit sentra	2	60	10	400	15	450	20	500	25	550	25	550	Dinas Koperindag																	
																	- Berkembangnya sentra-sentra industri potensial																
																	- Jumlah sentra industri	7	92	2	400	2	450	2	400	2	450	2	600	10	600	600	Dinas Koperindag
Program Pengembangan Kluster Industri Potensial	Output	Outcome	%	2	92	2	250	2	400	2	450	2	600	10	600	Dinas Koperindag																	
																	- Meningkatkan investasi usaha IKM																
																	- Jumlah unit usaha IKM	1	3.800	1	4.640	2	5.104	2	5.104	2	5.500	3	5.614	3	5.614	3	5.614
Program Pengembangan Kluster Industri Potensial	Output	Outcome	ratio	-	380	1.48	418	1.45	459	1.43	505	1.40	600	1.40	600	Dinas Koperindag																	
																	- Tumbuh dan berkembangnya industri kecil dan menengah secara proposional																
																	- Jumlah unit usaha IKM	1.500	380	1.48	418	1.45	459	1.43	505	1.40	600	1.40	600	1.40	600	600	Dinas Koperindag
Program Pengembangan Kluster Industri Potensial	Output	Outcome	orang	50	254	100	279	150	307	200	338	250	371	250	371	Dinas Koperindag																	
																	- Meningkatkan produktivitas SDM IKM																
																	- Jumlah SDM IKM	50	254	100	279	150	307	200	338	250	371	250	371	250	371	371	Dinas Koperindag
Program Pengembangan Kluster Industri Potensial	Output	Outcome	unit	3	555	9	610	12	771	15	938	18	1.100	18	1.100	Dinas Koperindag																	
																	- Jumlah rekrutasi tenaga kerja																
																	- Jumlah tenaga kerja	1	1.000	1	1.500	2	2.000	2	2.000	3	2.500	3	2.500	3	2.500	2.500	Dinas Koperindag
Program Pengembangan Kluster Industri Potensial	Output	Outcome	Kluster industri aglomerasi	1	1.000	1	1.500	2	2.000	2	2.000	3	2.500	3	2.500	Dinas Koperindag																	
																	- Jumlah kluster industri aglomerasi																
																	- Jumlah industri aglomerasi	1	1.000	1	1.500	2	2.000	2	2.000	3	2.500	3	2.500	3	2.500	2.500	Dinas Koperindag
Jumlah					810.335		1.245.609		1.435.237		1.381.913		1.774.900		1.775.559																		

Cat. : *) adalah program yang sumber dananya dari APBN dan dana lainnya

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015 secara terukur diperlukan penetapan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja daerah secara makro (*outcome*). Indikator kinerja daerah ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Aspek Pelayanan Umum meliputi : Pelayanan Urusan Wajib dan Pelayanan Urusan Pilihan, sedangkan aspek daya saing meliputi : Nilai Tukar Petani, Produktivitas total daerah dan Rasio Ekspor terhadap PDRB. Penetapan indikator kinerja daerah dilakukan berdasarkan kondisi tahun 2009, tendensi perkembangan dimasa lalu dan kemampuan keuangan. selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 9.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		73,44 *	74,24	74,64	75,04	75,44	75,84
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,93	6,21	6,50	6,81	7,13	7,46
1.2.	PDRB per kapita (Harga Berlaku)	Rp/Jt	17,96	20,26	22,40	24,48	26,49	28,44
1.3.	ICOR		3,63	3,41 ***	3,44 ***	3,48 ***	3,50 ***	3,54 ***
1.4	PDRB Harga Konstan	Rp. Triliun	38,860	41,03	43,69	46,67	49,99	53,73
1.5	PDRB Harga Berlaku	Rp. Triliun	87,221	100,64	112,82	125,00	137,17	149,35
1.6	Investasi (ADHK)	Rp. Milyar	7.161	8.166	9.184	10.347	11.634	13.191
1.7	Tingkat Pengangguran	%	6,95	6,59	6,22	5,86	5,50	5,13
1.8	Tingkat Kemiskinan	%	9,50	8,55	8,15	7,75	7,35	6,95
1.9	Jumlah Daerah Tertinggal	Kab	8	8	7	6	5	4
	Jumlah Daerah Tertinggal Berbasis Nagari	Nagari	253	217	181	145	109	73

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
2	Kesejahteraan Sosial							
2.1	Pendidikan							
2.1.1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,79	9,35	9,70	10,05	10,40	10,75
2.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	112,54	118,48	119,98	120,44	121,92	122,10
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	98,31	98,92	100,42	101,92	103,42	104,92
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	83,92	84,33	84,75	85,16	85,58	86,00
2.1.3	Angka Partisipasi Murni (APM)							
	a.SD/MI/SDLB/Paket A	%	99,67	99,67	99,75	100	100	100
	b.SMP/MTs/SMPLB/Paket B	%	77,25	78,80	80,35	82,90	83,45	85
	c.SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C	%	55,50	62,5	67,5	72,5	75	80
2.1.4	Rank Nasional		9	9	9	9	8	8
	Kualifikasi pendidikan.guru setara S1/DIV							
	a. SD	%	20,0	25	30	35	40	50
	b. SMP		86,63	90	95	100	100	100
	c. SMA		91,01	95	100	100	100	100
	d. SMK		91,01	95	100	100	100	100
	Sertifikasi Guru (Pemerintah pusat)							
	a. TK	org	30	50	75	100	125	150
	b. SLB		30	50	75	100	125	150
	c. SD/MI		600	750	1500	2250	3000	4250
	d. SMP/MTs		1440	1750	2500	3250	4250	5250
	e. SMA/SMK/MA		2400	2500	3750	5000	6250	7500
	Belajar 12 tahun	%		10	20	30	40	50
2.1.5	Peningkatan Kualitas pendidikan							
	Jumlah lembaga pendidikan terakreditasi	%		30	75	100	100	100
2.1.6	Relevansi pendidikan							
	Rasio guru bidang studi dan siswa yang merata pada kab/kota			30	30	25	25	20
2.1.7	Boarding School Bertaraf Maju		2	3	3	4	4	5
2.2	Kesehatan							
2.2.1	Meningkatnya Umur Harapan Hidup; (UHH)	Tahun	70,9	71,12	71,48	71,84	72,20	72,56
2.2.2	Menurunnya Angka Kematian Ibu Melahirkan	Orang per 100.000 KH	**	190	166	142	118	102
2.2.3	Menurunnya Angka Kematian Bayi;	Bayi per 1.000 KH	**	22	20	18	16	14
2.2.4	Angka Gizi Kurang (BB/TB); (pada Balita)	%	10,5	8,2	7,8	7,4	7,0	6,6
2.2.5	Persentase penduduk yang memiliki Akses Air Minum yang berkualitas;	%	46,68	62,5	63	63,5	67	68
2.2.6 *)	Penemuan kasus baru Tuberculosis	%		55	60	70	80	90
2.2.7 *)	Menurunnya kasus Malaria (Annual Paracite Index API)	per 1000 pdd		2	2	1	1	1
2.2.8 *)	Persentase ODHA yang diobati	%		90	93	95	100	100
2.2.9*)	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan ;	%		80	85	90	95	100
2.2.10 *)	Persentase penduduk yang memiliki Akses Air Minum yang berkualitas;	%		64	65	66	67	68
2.2.11*)	Persentase penduduk yang menggunakan Jamban Sehat;	%		67	70	73	74	75
2.2.12*)	Jaminan pemeliharaan kesehatan (total coverage)	%		63,8	78,6	91,3	100	100
2.2.13	BOR	%		71	73	75	78	80
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
1.	Pekerjaan Umum							
1.1	Kemantapan jalan provinsi	%	80	82	83	85	86	88
1.2	Panjang Irigasi Terbangun	Km	2311	2313	2316	2319	2322	2325
1.3	Panjang Jalan Evakuasi	Km	0	10	20	30	40	50
2.	Kebudayaan							
2.1	Jemaah Haji yang terlayani	Orang	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398	4.398
2.2	Kasus Perbuatan Maksiat	Kasus		1.368	1.313	1.261	1.210	1.162

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Tahun 2010	Target Capaian Setiap Tahun				
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
3.	Pemerintahan							
3.1	Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
	Pelayanan Urusan Pilihan							
1	Pertanian							
1.1	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian	Rp. Juta	9,66	10,72	11,25	11,78	12,31	12,84
1.2	Berkembangnya Balai Alih Teknologi Pertanian (BATP/Agro-Techno Park).	Unit	1	6	14	22	30	38
1.3	Berkembangnya Kawasan Sentra Produksi (KSP)							
	Berkembangnya KSP Pertanian Tanaman pangan dan hortikultura	Unit	40	43	47	52	56	60
	Berkembangnya KSP Perkebunan	Unit	12	14	17	20	24	28
	Berkembangnya KSP Peternakan	Unit	6	6	8	10	12	14
	Berkembangnya Agro-city.	Unit	1	1	2	3	4	5
	Terbangunnya Science/ Techno Park	Unit	1	1	2	2	2	3
2	Energi							
2.1	Cakupan Layanan Listrik	%	90	91	92	93	94	95
3	Pariwisata							
3.1	Penataan Kawasan Wisata	Kawasan	2	3	6	9	10	10
4	Lingkungan Hidup							
4.1	Total Penurunan Lahan Kritis	Ha	372.386	362.386	352.386	342.386	332.386	322.386
5	Industri							
5.1	Kontribusi Industri Pengolahan	%	12,54	12,56	12,69	12,93	13,22	13,47
5.2	Pertumbuhan Industri Pengolahan	%	9,89	10,68	11,47	12,70	13,07	13,69
6	Perdagangan							
6.1	Kontribusi Perdagangan, Hotel dan Restoran	%	17,74	18,60	19,05	19,29	19,42	20,08
	ASPEK DAYA SAING							
1	Nilai Tukar Petani	%	105,60	106	107	108	109	110
2	Produktivitas total daerah	Rp. Jt	40,00	44,88	49,62	54,23	58,68	63,00
3	Rasio Ekspor terhadap PDRB	%	15	23	27	31	35	39

Keterangan : * Data tahun 2009

*) Indikator baru untuk pencapaian MDGs

** Belum dilakukan survei

***Dihitung berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Stok Kapital

Sumber Data : BPS, SKPD terkait dan Data di olah

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 –2025, Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2029, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tahun 2010-2015.

10.1 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan RKPD Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan program pembangunan dapat berlanjut, sedangkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 telah habis masa berlakunya serta untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan daerah tahun 2016, dimana tahun bersangkutan pemerintah daerah sudah diharuskan menyusun RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA APBD Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Proses penyusunan RPJMD Tahun 2016-2020 memerlukan waktu cukup lama berdasarkan masa jabatan gubernur terpilih hasil Pilkada Tahun 2015. Selanjutnya Gubernur Sebagai Kepala Daerah Terpilih Dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rancangan RKPD Tahun 2016 berikut penyusunan RKPD Tahun 2016.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perencanaan penganggaran serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota.

RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan Tahun 2015. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Gubernur dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Penetapan target indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2010-2015 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD;
4. Target indikator kinerja keluaran (output) untuk program prioritas pada RPJMD 2010-2015 alokasi dananya bersumber dari APBD sedangkan target indikator kinerja hasil (outcome) untuk program prioritas yang alokasi dananya bersumber dari APBN dan sumber pendanaan lainnya;
5. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan dengan koordinator Sekretaris Daerah, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan pemerintahan daerah;
6. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Program-Program yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 dilaksanakan secara operasional oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
8. Program-program dalam RPJMD adalah program minimal dan wajib harus diikuti. SKPD boleh menambah program lain bila anggaran memungkinkan sesuai dengan Renstra SKPD.

9. Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 sudah mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Barat agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

10.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015 dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) terhadap indikator kinerja pembangunan dan indikator kinerja program pada setiap tahunnya dan lima tahunan atau akhir periode RPJMD.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

